

Akuntansi Keberlanjutan



Konsep dan Praktik Keberlanjutan



R. A. Widyanti Diah Lestari | Benni Sumarman | L.M. Hasriadi
Ardyan Firdausi Mustoffa | Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno
Dewi Junita | Astuning Saharsini | Nurul Hidayah
Siska Aprianti | Nugroho Wisnu Murti | Alan Smith Purba
Maryam Monika Rangkuti | I Gusti Ayu Ngurah Pradnyadevi Utami
Emayanti Christina Hutabarat | Ahmad Rijal Amiruddin
Samuel PD Anantadjaya | Theresia Mentari

Editor: Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Akuntansi Keberlanjutan merupakan suatu pendekatan yang memperluas orientasi pelaporan dan pengukuran kinerja organisasi ke arah dimensi yang lebih komprehensif, meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara terintegrasi. Pendekatan ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis yang tidak lagi dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap ekosistem dan struktur sosial.

Dalam praktiknya, sistem ini mendorong organisasi untuk menginternalisasi berbagai eksternalitas yang sebelumnya diabaikan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih reflektif terhadap konsekuensi jangka panjang. Transformasi ini juga berkaitan dengan pergeseran paradigma dari *profit-oriented* menuju *value-oriented* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya.

Urgensi pemahaman terhadap pendekatan ini semakin menguat dalam lanskap global yang ditandai oleh tekanan regulasi, tuntutan transparansi, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin kritis terhadap tanggung jawab korporasi. Integrasi aspek keberlanjutan dalam sistem pelaporan dan evaluasi kinerja memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko strategis yang bersifat non-finansial, sekaligus membuka peluang inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan penciptaan nilai jangka panjang.

Kehadiran buku Akuntansi Keberlanjutan: Konsep dan Praktik Keberlanjutan, akan membantu para pembelajar dan praktisi untuk menjawab berbagai perkembangan yang berkaitan dengan kajian Akuntansi Keberlanjutan. Dengan demikian, buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi para pembaca yang ingin memahami paradigma dari teori dan aplikasi Akuntansi Keberlanjutan di era keberlanjutan.



 jawarakreasinografi
 081214839667
 www.jawarakreasinografi.com
 Anggota IKAPI 089/BANTEN/2025



KEHENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEHAKIMAN INTELEKTUAL
NO HKI: EC002026110476

ISBN 978-634-97250-6-4



9

786349

725064

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Konsep dan Praktik Keberlanjutan

PENULIS

R. A. Widyanti Diah Lestari, Benni Sumarman, L.M. Hasriadi,
Ardyan Firdausi Mustoffa, Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno,
Dewi Junita, Astuning Saharsini, Nurul Hidayah, Siska Aprianti,
Nugroho Wisnu Murti, Alan Smith Purba, Maryam Monika Rangkuti,
I Gusti Ayu Ngurah Pradnyadevi Utami,
Emayanti Christina Hutabarat, Ahmad Rijal Amiruddin,
Samuel PD Anantadjaya, Theresia Mentari

EDITOR

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.



PENERBIT CV. JAWARA KREASINOGRAPHI

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Konsep dan Praktik Keberlanjutan

Penulis : R. A. Widyanti Diah Lestari
Benni Sumarman
L.M. Hasriadi
Ardyan Firdausi Mustoffa
Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno
Dewi Junita
Astuning Saharsini
Nurul Hidayah
Siska Aprianti
Nugroho Wisnu Murti
Alan Smith Purba
Maryam Monika Rangkuti
I Gusti Ayu Ngurah Pradnyadevi Utami
Emayanti Christina Hutabarat
Ahmad Rijal Amiruddin
Samuel PD Anantadjaya
Theresia Mentari

Editor : Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

Desain Sampul : Bimo

Tata Letak : Sofitahm

ISBN : 978-634-97250-6-4

No. HKI : EC002026110476

Diterbitkan oleh : JAWARA KREASINOGRAFI,
AGUSTUS 2026
IKAPI 089/BANTEN/2025

Redaksi:

Jalan Lingkungan Tegal Jeruk RT 2 RW 7, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang
Provinsi Banten Telp. 081214839667
Surel: jawarakreasinografi@gmail.com
Cetakan Pertama: 2026

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Akuntansi Keberlanjutan: Konsep dan Praktik Keberlanjutan dapat disusun dan dihadirkan kepada para pembaca. Buku ini disusun sebagai salah satu kontribusi akademik dalam memperkaya kajian Akuntansi Keberlanjutan.

Akuntansi Keberlanjutan merupakan suatu pendekatan yang memperluas orientasi pelaporan dan pengukuran kinerja organisasi ke arah dimensi yang lebih komprehensif, meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara terintegrasi. Pendekatan ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis yang tidak lagi dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap ekosistem dan struktur sosial.

Dalam praktiknya, sistem ini mendorong organisasi untuk menginternalisasi berbagai eksternalitas yang sebelumnya diabaikan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih reflektif terhadap konsekuensi jangka panjang. Transformasi ini juga berkaitan dengan pergeseran paradigma dari *profit-oriented* menuju *value-oriented* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan pembaca, serta menjadi bagian dari upaya memperkuat teori Akuntansi Keberlanjutan dimasa depan.

Kota Serang, Mei 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAB 01

KONSEP DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI

KEBERLANJUTAN..... 1

Dr. R. A. Widyanti Diah Lestari, S.E., S.H., S.Pd., M.M., CSRS., CSRA

A. Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan	1
B. Prinsip dan Tujuan Akuntansi Keberlanjutan.....	4
C. Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam Akuntansi Keberlanjutan	6
D. Ruang Lingkup Informasi Akuntansi Keberlanjutan	8
E. Standar dan Kerangka Pelaporan Keberlanjutan.....	10
F. Peran Akuntansi Keberlanjutan dalam Tata Kelola Perusahaan	13

BAB 02

EVOLUSI AKUNTANSI DARI KONVENSIONAL KE

KEBERLANJUTAN..... 17

Benni Sumarman, S.E., Ak., M.Ak., Ak., CA., ASEAN CPA.

A. Pendahuluan	17
B. Definisi dan Ruang Lingkup Manajemen Ritel.....	19
C. Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Ekosistem Bisnis	22
D. Perkembangan Sejarah Akuntansi	24
E. Faktor-Faktor Pendorong Perubahan	26
F. Konsep dan Panduan Berbasis Industri.....	29
G. Implementasi Standar Keberlanjutan di Indonesia	32
H. Tantangan dan Masa Depan	33

BAB 03

TEORI DAN LANDASAN FILOSOFIS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN..... 37

L.M. Hasriadi, S.S.T., M.Tr.E.

- A. Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan 37
- B. Landasan Filosofis Akuntansi Keberlanjutan..... 39
- C. Teori-Teori yang Mendasari Akuntansi Keberlanjutan..... 42
- D. Paradigma Akuntansi Keberlanjutan..... 44
- E. Prinsip Dasar Pelaporan Keberlanjutan..... 46
- F. Peran Akuntansi Keberlanjutan dalam Pembangunan
Berkelanjutan..... 48

BAB 04

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERAN AKUNTANSI..... 53

Ardyan Firdausi Mustoffa, S.E., M.Si.

- A. Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan 53
- B. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 56
- C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable
Development Goals* 58
- D. Peran Akuntansi dalam Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan..... 60
- E. Pelaporan Keberlanjutan dalam Pembangunan
Berkelanjutan..... 62
- F. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Strategi
Akuntansi Perusahaan 64

BAB 05

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CONCEPT 69

Dr. Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno, S.A.

- A. Pendahuluan 69
- B. Definisi dan perkembangan dari *Environmental
Accounting*..... 71
- C. Elemen dan Dimensi Konseptual *Environmental
Accounting*..... 72
- D. Ruang Lingkup *Environmental Accounting* dan Peran
Akuntansi dalam Konteks Lingkungan..... 74
- E. Pendekatan dalam *Environmental Accounting*..... 75
- F. Karakteristik *Environmental Accounting* 77
- G. Tantangan dalam *Environmental Accounting* dan Masa
Depannya..... 78

BAB 06

AKUNTANSI SOSIAL DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN..... 85

Dewi Junita, S.E., M.Ak.

- A. Pendahuluan 85
- B. Tinjauan literatur dan kerangka teoritis 86
- C. Tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) 89
- D. Standar dan Kerangka Pelaporan Sosial dan Keberlanjutan 91
- E. Pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial 93
- F. Implementasi CSR dan Akuntansi Sosial di Indonesia 95
- G. Tren dan Isu Kontemporer 96

BAB 07

AKUNTANSI KARBON DAN EMISI GAS RUMAH KACA 103

Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

- A. Pendahuluan 103
- B. Konsep Dasar Akuntansi Karbon 105
- C. Pengukuran dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berdasarkan GHG Protocol 110
- D. Tantangan dan Masa Depan Akuntansi Karbon di Indonesia 113
- E. Simpulan 114

BAB 08

BIAYA LINGKUNGAN DAN INTERNALIASI EKSTERNALITAS 119

Nurul Hidayah, S.Pd., M.Sc.

- A. Pendahuluan 119
- B. Konsep Biaya Lingkungan 120
- C. Klasifikasi Biaya Lingkungan 121
- D. Konsep Eksternalitas dalam Ekonomi Lingkungan 125
- E. Internalisasi Eksternalitas dalam Akuntansi 128
- F. Implementasi Carbon Trading di Indonesia 131
- G. Metode Pengukuran Biaya Lingkungan 132
- H. Tantangan Implementasi Biaya Lingkungan 135

BAB 09

PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN

PERUSAHAAN..... 141

Dr. Siska Aprianti., S.E., M.Si. Ak., CA., CSRA., CRP

- A. Pendahuluan 141
- B. Definisi, Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keberlanjutan Perusahaan 141
- C. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keberlanjutan Perusahaan 142
- D. Kerangka Konseptual Pengukuran Kinerja Keberlanjutan 144
- E. Komponen Pengukuran Kinerja Keberlanjutan..... 146
- F. Metode Pengukuran Kinerja Keberlanjutan 150
- G. Pendekatan dan Model dalam Pengukuran Keberlanjutan 151
- H. Simpulan..... 152

BAB 10

PELAPORAN KEBERLANJUTAN DAN PELAPORAN

TERPADU: TINJAUAN PRAKTIK DAN PENELITIAN 159

Dr. Nugroho Wisnu, Murti, S.E., M.Si., M.Ec.Dev., Ak., CA.

- A. Pendahuluan 159
- B. Pelaporan Berkelanjutan 160
- C. Pelaporan Terpadu: Apa bedanya dengan Pelaporan Berkelanjutan..... 162
- D. Tantangan Implementasi Pelaporan Di Negara Maju Dan Berkembang: Kajian penelitian dan praktik 165
- E. Agenda Riset Masa Depan: Pertanyaan Penelitian yang Relevan 169
- F. Simpulan..... 172

BAB 11

STANDAR DAN KERANGKA PELAPORAN

KEBERLANJUTAN GLOBAL.....177

Alan Smith Purba, S.E., M.Ak.

- A. Konsep Dasar Pelaporan Keberlanjutan Global..... 177
- B. Perkembangan Standar Pelaporan Keberlanjutan 179
- C. *Global Reporting Initiative* dalam Pelaporan Keberlanjutan 181
- D. International Sustainability Standards Board dan IFRS Sustainability Disclosure Standards..... 182

E. Kerangka Pelaporan Keberlanjutan Lainnya	184
F. Harmonisasi Standar Pelaporan Keberlanjutan Global.....	186

BAB 12

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN KEBIJAKAN 191

Maryam Monika Rangkuti, S.E., M.Si.

A. Urgensi Regulasi dalam Akuntansi Keberlanjutan.....	191
B. Arsitektur Kebijakan Keberlanjutan Global	193
C. Kerangka Regulasi Keberlanjutan di Indonesia	194
D. Mandatory versus <i>Voluntary Disclosure</i> : Dinamika dan Implikasinya.....	197
E. Instrumen Kebijakan Ekonomi untuk Internalisasi Eksternalitas	199
F. Tantangan Implementasi dan Risiko Kebijakan.....	201
G. Konvergensi Standar Global dan Tantangan Harmonisasi Regulasi	203

BAB 13

PERAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN..... 209

I Gusti Ayu Ngurah Pradnyadevi Utami, S.E., M.A.

A. Pendahuluan: Integrasi Keberlanjutan dalam Tata Kelola Perusahaan	209
B. Konsep dan Landasan Teoretis Hubungan Akuntansi Keberlanjutan dan <i>Corporate Governance</i>	210
C. Perkembangan Regulasi dan Standar Akuntansi Keberlanjutan	213
D. Mekanisme Tata Kelola dalam Implementasi Akuntansi Keberlanjutan	216
E. Dampak Akuntansi Keberlanjutan terhadap Kualitas Tata Kelola dan Nilai Perusahaan.....	219
F. Tantangan Implementasi Akuntansi Keberlanjutan dalam Tata Kelola Perusahaan.....	221
G. Simpulan.....	224

BAB 14

AUDIT DAN ASSURANCE LAPORAN KEBERLANJUTAN..... 229

Emayanti Christina Hutabarat, S.Ak., M.Ak.

A. Pendahuluan	229
----------------------	-----

B. Konsep Laporan Keberlanjutan.....	229
C. Konsep Audit dan Assurance	233
D. Audit dan Assurance Laporan Keberlanjutan	233
E. Proses Audit dan Assurance Laporan Keberlanjutan	235
F. Standar Pelaporan Keberlanjutan.....	239

BAB 15

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA UMKM DAN SEKTOR PUBLIK.....245

Ahmad Rijal Amiruddin, S.E., M.Ak.

A. Konsep Dasar Akuntansi Keberlanjutan pada UMKM dan Sektor Publik	245
B. Urgensi Akuntansi Keberlanjutan bagi UMKM.....	247
C. Praktik Akuntansi Keberlanjutan pada UMKM	249
D. Akuntansi Keberlanjutan dalam Sektor Publik.....	251
E. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Keberlanjutan pada Sektor Publik	253
F. Strategi Penguatan Akuntansi Keberlanjutan pada UMKM dan Sektor Publik.....	255

BAB 16

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK KEBERLANJUTAN.....261

Dr. Samuel PD Anantadajaya, BSc, M.B.A., M.M.

A. Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi untuk Keberlanjutan	261
B. Komponen Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Keberlanjutan	263
C. Pengelolaan Data Keberlanjutan dalam Sistem Informasi Akuntansi	266
D. Digitalisasi Sistem Informasi Akuntansi untuk Keberlanjutan	268
E. Sistem Informasi Akuntansi sebagai Alat Pengendalian dan Pengambilan Keputusan	270

BAB 17

STUDI KASUS PENERAPAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN.....275

Theresia Mentari, M.Ak.

A. Konsep Dasar Studi Kasus Akuntansi Keberlanjutan	275
---	-----

B. Studi Kasus Akuntansi Keberlanjutan pada Perusahaan Manufaktur.....	277
C. Studi Kasus Akuntansi Keberlanjutan pada Sektor Jasa	279
D. Studi Kasus Akuntansi Keberlanjutan pada UMKM.....	281
E. Studi Kasus Akuntansi Keberlanjutan pada Sektor Publik.....	283
F. Analisis Pembelajaran dari Studi Kasus Akuntansi Keberlanjutan	284

Bab 01



KONSEP DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

*Dr. R. A. Widhyanti Diah Lestari, S.E., S.H., S.Pd., M.M., CSRS., CSRA
Universitas Batam*

A. KONSEP DASAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Akuntansi keberlanjutan merupakan perkembangan penting dalam disiplin akuntansi yang lahir dari kebutuhan untuk memperluas orientasi pelaporan perusahaan. Akuntansi tidak lagi hanya dipahami sebagai sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengomunikasikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas organisasi. Perubahan ini muncul karena keberhasilan perusahaan pada masa kini tidak hanya dinilai dari laba, aset, dan arus kas, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menjaga keberlanjutan operasional, memenuhi tanggung jawab sosial, mengelola risiko lingkungan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi berbagai pemangku kepentingan. Dalam praktik bisnis modern, isu keberlanjutan menjadi semakin penting seiring meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, ketimpangan sosial, tata kelola perusahaan, hak pekerja, etika rantai pasok, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mendorong akuntansi untuk berperan lebih luas dalam menyediakan informasi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga nonfinansial. Akuntansi keberlanjutan hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasikan informasi keuangan dan informasi keberlanjutan agar

pengambilan keputusan menjadi lebih komprehensif, transparan, dan bertanggung jawab.

1. Pengertian Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi keberlanjutan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas organisasi. Informasi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi mampu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada dampak organisasi terhadap manusia, lingkungan, dan sistem ekonomi yang lebih luas. Dalam pengertian yang lebih luas, akuntansi keberlanjutan berfungsi sebagai sistem informasi yang menghubungkan aktivitas perusahaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan alam. Oleh sebab itu, informasi akuntansi perlu mencerminkan bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya, menghasilkan nilai, mengelola dampak negatif, serta memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan (Adhariani, 2022).

Akuntansi keberlanjutan juga memiliki hubungan erat dengan konsep triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi ekonomi berkaitan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan nilai dan mempertahankan kelangsungan usaha. Dimensi sosial berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Dimensi lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, emisi, limbah, energi, air, dan dampak ekologis lainnya. Ketiga dimensi tersebut perlu dilihat secara terpadu agar penilaian terhadap kinerja perusahaan tidak bersifat sempit. Dalam konteks pelaporan, akuntansi keberlanjutan menyediakan informasi yang membantu pemangku kepentingan memahami risiko, peluang, strategi, dan dampak perusahaan. Investor dapat menggunakan informasi keberlanjutan untuk menilai ketahanan bisnis jangka panjang. Manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan strategi operasional yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Masyarakat dapat menilai sejauh mana perusahaan memberikan kontribusi positif atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

2. Perkembangan Akuntansi Keberlanjutan dalam Praktik Bisnis Modern

Perkembangan akuntansi keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma bisnis global. Pada awalnya, pelaporan perusahaan lebih banyak berfokus pada laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap cukup untuk menunjukkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Namun, kompleksitas bisnis modern menunjukkan bahwa informasi keuangan saja tidak selalu mampu menggambarkan risiko dan nilai perusahaan secara menyeluruh. Perusahaan dapat memperoleh laba tinggi, tetapi pada saat yang sama menghadapi risiko reputasi, kerusakan lingkungan, konflik sosial, atau lemahnya tata kelola. Kesadaran tersebut mendorong munculnya praktik pelaporan keberlanjutan. Perusahaan mulai menyampaikan informasi mengenai tanggung jawab sosial, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola. Pelaporan keberlanjutan kemudian berkembang menjadi kebutuhan strategis karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih luas. Investor, regulator, konsumen, dan masyarakat semakin memperhatikan apakah perusahaan menjalankan bisnis secara etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Werastuti, 2026).

Perkembangan akuntansi keberlanjutan juga didukung oleh munculnya berbagai standar dan kerangka pelaporan. GRI Standards digunakan secara luas untuk membantu organisasi melaporkan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia secara sebanding serta kredibel. Selain itu, IFRS Sustainability Disclosure Standards, khususnya IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh ISSB pada 2023, memperkuat arah pelaporan keberlanjutan yang berfokus pada informasi terkait risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan bagi pasar modal. Dalam praktik bisnis modern, akuntansi keberlanjutan juga semakin terhubung dengan ESG, yaitu *environmental, social, and governance*. ESG menjadi kerangka penting dalam menilai kinerja perusahaan dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan yang mampu mengelola ESG dengan baik cenderung memiliki reputasi lebih kuat, akses pendanaan lebih baik, serta kemampuan menghadapi risiko jangka panjang secara lebih adaptif.

B. PRINSIP DAN TUJUAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Akuntansi keberlanjutan dibangun atas prinsip bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jujur, relevan, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keberlanjutan tidak boleh disusun hanya sebagai alat promosi, tetapi harus menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas organisasi. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan memerlukan prinsip yang jelas agar pengukuran dan pelaporan tidak bersifat simbolis. Tujuan utama akuntansi keberlanjutan adalah menyediakan informasi yang membantu perusahaan dan pemangku kepentingan memahami kinerja, dampak, risiko, dan peluang keberlanjutan. Informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan, penilaian kinerja, perumusan strategi, pengelolaan risiko, dan peningkatan akuntabilitas. Dengan demikian, prinsip dan tujuan akuntansi keberlanjutan saling berkaitan karena prinsip menentukan kualitas informasi, sedangkan tujuan menentukan arah penggunaan informasi.

1. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Keseimbangan Kepentingan

Transparansi merupakan prinsip utama dalam akuntansi keberlanjutan. Transparansi menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka mengenai aktivitas, kebijakan, risiko, dampak, dan capaian keberlanjutan. Informasi yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan menilai apakah perusahaan telah menjalankan tanggung jawabnya secara memadai. Transparansi juga membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan dampak operasionalnya. Dalam akuntansi keberlanjutan, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas penggunaan modal finansial, tetapi juga atas penggunaan sumber daya alam, perlakuan terhadap tenaga kerja, hubungan dengan masyarakat, serta kepatuhan terhadap tata kelola. Akuntabilitas menuntut perusahaan menyajikan informasi yang dapat diuji, didukung data, dan tidak menyesatkan (Rusnawati, 2026).

Keseimbangan kepentingan merupakan prinsip yang menekankan perlunya memperhatikan berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan tidak hanya memiliki hubungan dengan pemegang saham, tetapi juga dengan

pekerja, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, kreditur, dan lingkungan alam. Akuntansi keberlanjutan perlu menyajikan informasi yang mencerminkan kepentingan berbagai pihak tersebut secara proporsional. Prinsip keseimbangan juga berarti bahwa pelaporan keberlanjutan tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga menjelaskan tantangan, risiko, dan dampak negatif. Pelaporan yang hanya menonjolkan keberhasilan tanpa mengungkapkan persoalan dapat menimbulkan kesan greenwashing. Oleh karena itu, informasi keberlanjutan harus disusun secara seimbang agar mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar.

2. Tujuan Akuntansi Keberlanjutan bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan

Bagi perusahaan, akuntansi keberlanjutan bertujuan menyediakan dasar informasi untuk pengambilan keputusan strategis. Informasi mengenai penggunaan energi, emisi, limbah, keselamatan kerja, kepuasan pelanggan, atau tata kelola dapat membantu manajemen mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, memperkuat reputasi, dan menciptakan nilai jangka panjang. Akuntansi keberlanjutan juga bertujuan membantu perusahaan mengelola risiko. Risiko keberlanjutan dapat berupa risiko lingkungan, sosial, hukum, reputasi, operasional, dan keuangan. Contohnya, perusahaan yang tidak mengelola limbah dengan baik dapat menghadapi sanksi hukum dan penolakan masyarakat. Perusahaan yang mengabaikan keselamatan kerja dapat mengalami penurunan produktivitas dan kerusakan reputasi. Melalui akuntansi keberlanjutan, risiko semacam ini dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara lebih sistematis.

Bagi pemangku kepentingan, akuntansi keberlanjutan bertujuan memberikan informasi yang relevan untuk menilai tanggung jawab dan kinerja perusahaan. Investor dapat menggunakan informasi keberlanjutan untuk menilai prospek jangka panjang. Konsumen dapat menilai komitmen perusahaan terhadap produk yang etis dan ramah lingkungan. Pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk memantau kepatuhan dan dampak industri. Masyarakat dapat menilai kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan akuntansi keberlanjutan tidak terbatas pada kepentingan internal perusahaan. Informasi keberlanjutan menjadi sarana komunikasi

antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Semakin baik kualitas informasi yang disampaikan, semakin besar peluang perusahaan membangun kepercayaan dan legitimasi.

C. DIMENSI EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN DALAM AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Akuntansi keberlanjutan mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak dapat dinilai secara tunggal melalui ukuran keuangan. Perusahaan dapat disebut berkelanjutan apabila mampu menciptakan nilai ekonomi tanpa mengabaikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keberlanjutan harus memperhatikan hubungan antara aktivitas bisnis, manusia, dan alam. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan. Keputusan ekonomi dapat berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Keputusan sosial dapat memengaruhi produktivitas dan reputasi perusahaan. Keputusan lingkungan dapat memengaruhi biaya, efisiensi, kepatuhan, dan keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan memerlukan pendekatan terpadu dalam mengukur dan melaporkan kinerja organisasi (Darajat & Saputra, 2026).

1. Dimensi Ekonomi dan Penciptaan Nilai Jangka Panjang

Dimensi ekonomi dalam akuntansi keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan perusahaan menciptakan nilai secara berkelanjutan. Nilai ekonomi tidak hanya diukur dari laba jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usaha, meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, mendukung rantai pasok, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penciptaan nilai jangka panjang menuntut perusahaan untuk mengelola sumber daya secara bijaksana. Perusahaan perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dibangun melalui eksploitasi sumber daya yang berlebihan atau praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan mendorong perusahaan untuk menilai bagaimana strategi bisnis memengaruhi keberlanjutan finansial dan nonfinansial.

Dalam dimensi ekonomi, informasi yang dapat dilaporkan meliputi pendapatan, nilai ekonomi yang didistribusikan, investasi

pada masyarakat, efisiensi energi, biaya lingkungan, risiko perubahan iklim, belanja pemasok lokal, dan kontribusi terhadap pembangunan wilayah. Informasi ini membantu pemangku kepentingan memahami apakah aktivitas ekonomi perusahaan memberikan manfaat yang luas atau hanya menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Dimensi ekonomi juga berkaitan dengan ketahanan bisnis. Perusahaan yang memiliki strategi keberlanjutan cenderung lebih siap menghadapi perubahan regulasi, tekanan pasar, kelangkaan sumber daya, dan tuntutan konsumen. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan melihat hubungan antara kinerja ekonomi saat ini dan kemampuan bertahan pada masa depan.

2. Dimensi Sosial dan Lingkungan dalam Pelaporan Keberlanjutan

Dimensi sosial dalam akuntansi keberlanjutan berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap manusia dan masyarakat. Aspek sosial mencakup tenaga kerja, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, keberagaman, pelatihan, hubungan industrial, kepuasan pelanggan, perlindungan konsumen, serta kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Informasi sosial penting karena aktivitas perusahaan selalu berhubungan dengan manusia, baik sebagai pekerja, konsumen, pemasok, maupun warga masyarakat. Pelaporan sosial membantu menunjukkan bagaimana perusahaan memperlakukan tenaga kerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Perusahaan yang memperhatikan dimensi sosial dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan pemangku kepentingan. Sebaliknya, pengabaian aspek sosial dapat menimbulkan konflik, penurunan kepercayaan, dan gangguan operasional.

Dimensi lingkungan berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap alam. Aspek lingkungan mencakup penggunaan energi, penggunaan air, emisi gas rumah kaca, limbah, keanekaragaman hayati, pencemaran, penggunaan bahan baku, serta upaya efisiensi sumber daya. Dalam konteks perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam, dimensi lingkungan menjadi bagian penting dari akuntansi keberlanjutan. Pelaporan lingkungan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak ekologis. Perusahaan perlu menyampaikan target, kebijakan, program, capaian, dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Informasi ini penting bagi investor, regulator, masyarakat, dan

konsumen yang semakin memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis (Hidayah et al., 2023).

Tabel 1.1 Dimensi Sosial dan Lingkungan dalam Pelaporan Keberlanjutan

Dimensi Keberlanjutan	Fokus Utama	Contoh Informasi yang Dilaporkan
Ekonomi	Penciptaan nilai dan ketahanan bisnis	Pendapatan, distribusi nilai ekonomi, investasi, kontribusi pajak
Sosial	Dampak terhadap manusia dan masyarakat	Keselamatan kerja, pelatihan, hak pekerja, hubungan masyarakat
Lingkungan	Dampak terhadap ekosistem dan sumber daya alam	Emisi, energi, air, limbah, konservasi, efisiensi sumber daya

D. RUANG LINGKUP INFORMASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Ruang lingkup informasi akuntansi keberlanjutan mencakup informasi keuangan dan nonkeuangan yang berkaitan dengan dampak, risiko, peluang, dan kinerja keberlanjutan. Informasi keuangan memberikan gambaran mengenai konsekuensi ekonomi dari isu keberlanjutan, sedangkan informasi nonkeuangan memberikan gambaran mengenai aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang tidak selalu langsung tercermin dalam laporan keuangan. Keduanya perlu dipahami secara terpadu karena isu keberlanjutan dapat memengaruhi nilai perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam praktiknya, ruang lingkup informasi keberlanjutan dapat berbeda antarperusahaan bergantung pada sektor, ukuran, model bisnis, lokasi operasi, regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Perusahaan pertambangan, misalnya, memiliki isu lingkungan yang berbeda dengan perusahaan jasa keuangan. Perusahaan manufaktur memiliki perhatian besar terhadap energi, limbah, dan rantai pasok, sedangkan perusahaan teknologi dapat lebih banyak berfokus pada privasi data, inovasi, dan tata kelola digital.

1. Informasi Keuangan dan Nonkeuangan dalam Akuntansi Keberlanjutan

Informasi keuangan dalam akuntansi keberlanjutan berkaitan dengan dampak isu keberlanjutan terhadap posisi

keuangan, kinerja, arus kas, biaya, pendapatan, aset, kewajiban, dan nilai perusahaan. Contohnya adalah biaya pengelolaan limbah, investasi teknologi ramah lingkungan, potensi kerugian akibat bencana iklim, biaya kepatuhan lingkungan, atau peluang pendapatan dari produk berkelanjutan. Informasi keuangan penting karena menunjukkan hubungan antara keberlanjutan dan performa ekonomi perusahaan. Isu lingkungan dan sosial dapat berubah menjadi risiko keuangan apabila tidak dikelola dengan baik. Misalnya, peningkatan harga energi dapat memengaruhi biaya produksi. Perubahan regulasi emisi dapat memengaruhi kebutuhan investasi. Tuntutan konsumen terhadap produk ramah lingkungan dapat memengaruhi strategi pemasaran dan pendapatan.

Informasi nonkeuangan mencakup indikator sosial, lingkungan, tata kelola, operasional, dan strategis yang tidak selalu berbentuk nilai uang. Contoh informasi nonkeuangan adalah jumlah emisi, konsumsi energi, tingkat kecelakaan kerja, jumlah pelatihan karyawan, kebijakan antikorupsi, keberagaman tenaga kerja, kepuasan pelanggan, dan program pemberdayaan masyarakat. Informasi ini membantu menjelaskan kinerja perusahaan secara lebih luas. Informasi nonkeuangan menjadi penting karena banyak faktor yang memengaruhi keberlanjutan perusahaan tidak langsung terlihat dalam laporan keuangan. Reputasi, kepercayaan masyarakat, budaya organisasi, kualitas tata kelola, dan dampak lingkungan merupakan faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan mengintegrasikan informasi keuangan dan nonkeuangan agar penilaian terhadap perusahaan menjadi lebih utuh (Astuti et al., 2025).

2. Pengukuran, Pengungkapan, dan Pelaporan Kinerja Keberlanjutan

Pengukuran kinerja keberlanjutan merupakan proses menentukan indikator, metode, dan satuan pengukuran yang digunakan untuk menilai dampak dan capaian perusahaan. Indikator keberlanjutan harus relevan dengan karakteristik perusahaan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Misalnya, perusahaan energi perlu mengukur emisi, efisiensi energi, keselamatan kerja, dan dampak terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan ritel dapat lebih menekankan rantai pasok, kemasan, limbah, dan hak konsumen. Pengungkapan kinerja keberlanjutan adalah proses menyampaikan informasi yang telah diukur kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan harus memperhatikan

prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keseimbangan. Informasi yang diungkapkan perlu menjelaskan kebijakan, target, strategi, capaian, risiko, serta tantangan. Dengan demikian, pengungkapan tidak hanya berupa daftar kegiatan, tetapi juga menunjukkan hubungan antara strategi perusahaan dan dampak keberlanjutan.

Pelaporan kinerja keberlanjutan merupakan bentuk komunikasi resmi perusahaan mengenai kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pelaporan dapat disajikan dalam laporan keberlanjutan tersendiri, laporan tahunan, laporan terintegrasi, atau laporan sesuai ketentuan regulator. Laporan yang baik tidak hanya memuat capaian, tetapi juga menjelaskan proses pengelolaan, indikator kinerja, metode pengukuran, serta rencana perbaikan. Dalam pelaporan keberlanjutan, perusahaan perlu menghindari pengungkapan yang bersifat umum dan tidak terukur. Pernyataan seperti “perusahaan peduli lingkungan” tidak cukup kuat apabila tidak disertai indikator, program, target, dan hasil. Akuntansi keberlanjutan menuntut informasi yang dapat ditelusuri dan dinilai secara objektif.

E. STANDAR DAN KERANGKA PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Standar dan kerangka pelaporan keberlanjutan berperan penting dalam meningkatkan kualitas, keterbandingan, dan kredibilitas informasi keberlanjutan. Tanpa standar, perusahaan dapat melaporkan informasi secara tidak seragam, sehingga sulit dibandingkan antarperiode, antarperusahaan, atau antarsektor. Standar membantu menentukan informasi apa yang perlu dilaporkan, bagaimana informasi diukur, dan bagaimana laporan disusun. Beberapa standar dan kerangka pelaporan yang banyak dikenal antara lain GRI, SASB, Integrated Reporting, dan IFRS Sustainability Standards. Setiap standar memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik masing-masing standar agar dapat memilih atau menggabungkan kerangka yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan tuntutan pemangku kepentingan.

1. Pengenalan GRI, SASB, Integrated Reporting, dan IFRS Sustainability Standards

GRI atau *Global Reporting Initiative* menyediakan standar pelaporan keberlanjutan yang berfokus pada dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. *GRI Standards* dapat

digunakan oleh berbagai organisasi, baik besar maupun kecil, swasta maupun publik, untuk meningkatkan transparansi kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pendekatan GRI banyak digunakan ketika perusahaan ingin melaporkan dampak aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan secara luas. SASB atau Sustainability Accounting Standards Board mengembangkan standar yang berfokus pada isu keberlanjutan yang material secara finansial berdasarkan industri. Saat ini, SASB Standards berada di bawah pengelolaan IFRS Foundation melalui ISSB, setelah konsolidasi kelembagaan pelaporan keberlanjutan. Pendekatan SASB membantu perusahaan mengidentifikasi isu keberlanjutan yang paling relevan bagi investor dan nilai perusahaan berdasarkan sektor industri.

Integrated Reporting atau pelaporan terintegrasi menekankan hubungan antara strategi, tata kelola, kinerja, prospek, dan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kerangka Integrated Reporting berada dalam tanggung jawab IFRS Foundation sejak 2022 dan didorong untuk mendukung pelaporan korporat yang berkualitas. Pendekatan ini membantu perusahaan menjelaskan bagaimana berbagai sumber daya atau modal digunakan untuk menciptakan nilai. IFRS Sustainability Standards dikembangkan oleh *International Sustainability Standards Board*. Standar awal yang diterbitkan adalah IFRS S1 mengenai persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan IFRS S2 mengenai pengungkapan terkait iklim. Standar ini diarahkan untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang relevan bagi keputusan investor dan pasar modal (Saputri et al., 2025).

2. Relevansi Standar Pelaporan Keberlanjutan bagi Praktik Akuntansi

Standar pelaporan keberlanjutan relevan bagi praktik akuntansi karena membantu memperluas cakupan informasi yang disajikan oleh perusahaan. Akuntansi tidak lagi hanya menyajikan laporan keuangan, tetapi juga perlu memastikan bahwa informasi keberlanjutan disusun dengan prinsip pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban yang memadai. Standar memberikan panduan agar informasi tersebut tidak bersifat sembarangan atau hanya narasi umum. Standar juga meningkatkan keterbandingan informasi. Apabila perusahaan menggunakan indikator dan kerangka yang seragam, pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja antarperusahaan atau

antarperiode. Keterbandingan penting bagi investor, regulator, analis, dan masyarakat dalam menilai kemajuan keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, standar membantu meningkatkan kredibilitas laporan. Laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan standar lebih mudah diverifikasi karena memiliki struktur dan indikator yang jelas. Hal ini penting untuk mengurangi risiko greenwashing, yaitu praktik menyampaikan citra keberlanjutan yang tidak didukung oleh bukti memadai. Bagi akuntan, standar pelaporan keberlanjutan membuka perluasan peran profesional. Akuntan tidak hanya berperan dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga dalam pengukuran indikator keberlanjutan, pengendalian data nonkeuangan, pelaporan ESG, assurance laporan keberlanjutan, dan pengembangan sistem informasi manajemen keberlanjutan.

Tabel 1.2 Relevansi Standar Pelaporan Keberlanjutan bagi Praktik Akuntansi

Standar/Kerangka	Fokus Utama	Relevansi bagi Akuntansi Keberlanjutan
GRI Standards	Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan	Menyajikan informasi dampak organisasi terhadap pemangku kepentingan
SASB Standards	Isu keberlanjutan material secara finansial per industri	Membantu mengaitkan keberlanjutan dengan nilai perusahaan
Integrated Reporting	Penciptaan nilai jangka pendek, menengah, dan panjang	Mengintegrasikan strategi, modal, tata kelola, dan kinerja
IFRS Sustainability Standards	Informasi keberlanjutan terkait keputusan investor	Mendorong pengungkapan keberlanjutan yang relevan bagi pasar modal

F. PERAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Akuntansi keberlanjutan memiliki peran strategis dalam tata kelola perusahaan karena menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi secara bertanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan perusahaan mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan. Dalam hal ini, akuntansi keberlanjutan menjadi alat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerapkan akuntansi keberlanjutan dapat memiliki sistem informasi yang lebih lengkap untuk memahami risiko dan peluang. Informasi tersebut membantu dewan komisaris, direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan lain dalam menilai apakah strategi perusahaan telah selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan eksternal, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dan tata kelola internal.

1. Akuntansi Keberlanjutan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Manajerial

Akuntansi keberlanjutan menyediakan informasi yang dapat digunakan manajemen dalam merumuskan keputusan strategis dan operasional. Informasi mengenai penggunaan energi, biaya lingkungan, tingkat kecelakaan kerja, produktivitas tenaga kerja, kepatuhan pemasok, dan emisi dapat membantu manajemen menentukan prioritas kebijakan. Keputusan manajerial yang berbasis informasi keberlanjutan cenderung lebih adaptif terhadap risiko jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan investasi, akuntansi keberlanjutan dapat membantu perusahaan menilai kelayakan proyek tidak hanya dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak lingkungan dan sosial. Contohnya, investasi pada teknologi hemat energi mungkin membutuhkan biaya awal yang besar, tetapi dapat menurunkan biaya operasional dan risiko emisi dalam jangka panjang. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan membantu manajemen melihat manfaat yang lebih luas dari suatu keputusan (Gunawan et al., 2025).

Akuntansi keberlanjutan juga mendukung pengendalian internal. Perusahaan perlu memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu menghasilkan data keberlanjutan secara akurat. Data nonkeuangan seperti emisi, limbah, keselamatan kerja, dan pelatihan karyawan harus dikelola dengan prosedur

yang jelas agar dapat dipercaya. Hal ini menuntut integrasi antara fungsi akuntansi, operasional, sumber daya manusia, lingkungan, dan tata kelola. Selain itu, informasi keberlanjutan dapat digunakan dalam penilaian kinerja. Perusahaan dapat menetapkan indikator kinerja utama yang tidak hanya berkaitan dengan laba, tetapi juga efisiensi energi, pengurangan limbah, keselamatan kerja, keberagaman, dan kepatuhan etika. Dengan cara ini, manajemen dapat mendorong perilaku organisasi yang lebih seimbang antara target ekonomi dan tanggung jawab keberlanjutan.

2. Hubungan Akuntansi Keberlanjutan dengan Good Corporate Governance dan Environmental, Social, and Governance

Akuntansi keberlanjutan memiliki hubungan erat dengan good corporate governance karena keduanya menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Tata kelola yang baik membutuhkan informasi yang memadai agar pengawasan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif. Akuntansi keberlanjutan menyediakan informasi mengenai dampak dan risiko yang sebelumnya sering berada di luar laporan keuangan tradisional. Dalam kerangka ESG, akuntansi keberlanjutan menjadi alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja *environmental, social, and governance*. Aspek *environmental* mencakup pengelolaan emisi, energi, air, limbah, dan biodiversitas. Aspek *social* mencakup tenaga kerja, hak asasi manusia, keselamatan, pelanggan, dan masyarakat. Aspek *governance* mencakup struktur tata kelola, etika bisnis, antikorupsi, kepatuhan, dan pengendalian internal.

Hubungan antara akuntansi keberlanjutan dan ESG semakin penting karena investor dan regulator semakin memperhatikan risiko nonkeuangan. Perusahaan yang lemah dalam pengelolaan ESG dapat menghadapi risiko reputasi, hukum, operasional, dan keuangan. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengelola dan melaporkan ESG secara baik dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Akuntansi keberlanjutan juga membantu mencegah praktik pelaporan yang tidak bertanggung jawab. Dengan sistem pengukuran dan pengungkapan yang jelas, perusahaan dapat menyampaikan informasi ESG secara lebih objektif. Hal ini penting karena pemangku kepentingan membutuhkan bukti, bukan hanya pernyataan komitmen. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, D. (2022). *Akuntansi keberlanjutan: Suatu pengantar*. Universitas Indonesia Publishing.
- Astuti, N. D., Malau, E. I., & Bahantwelu, M. I. (2025). Model Konseptual Integrasi Akuntansi Lingkungan Ke Dalam Pelaporan Keuangan: Implikasi Bagi Akuntabilitas Dan Praktik Akuntansi Modern. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 13(2), 77-85.
- Darajat, M. N., & Saputra, F. A. (2026). Menjembatani Konsep Akuntansi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Digitalisasi: Perspektif Konsep pada Entitas Bisnis. *Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 6(2), 126-141.
- Gunawan, A., Surur, A. T., Nasrullah, M., & Fadzila, A. U. (2025). Peran akuntansi hijau dalam keberlanjutan perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 6(1), 40-52.
- Hidayah, N. R., Susena, K. C., & Tarigan, H. P. (2023). Akuntansi Berkelanjutan: Implementasi Standar Pelaporan Keberlanjutan dalam Praktik Bisnis CV. Utami. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1859-1868.
- Rusnawati, M. (2026). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Integrasi Akuntansi Lingkungan dan CSR untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economic Studies*, 1(4).
- Saputri, H., SE, M. A., Tohiroh, S. P., SE, M., Agustina, I., Sitohang, R. M.,... & Hendra Candra, S. E. (2025). *Akuntansi Berbasis Keberlanjutan*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Werastuti, D. N. S. (2026). Akuntansi Keberlanjutan; Akuntansi Hijau; Governance: Strategi Keberlanjutan Bisnis. *AMU Press*, 1-258.

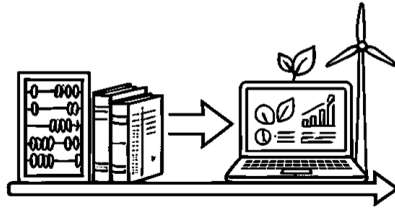
■ TENTANG PENULIS



**Dr. R. A. Widyanti Diah Lestari, S.E., S.H., S.Pd.,
M.M., CSRS., CSRA
Universitas Batam**

Penulis merupakan Dosen Tetap Akuntansi pada Program Studi Strata 2 Magister Akuntansi Universitas Batam sejak tahun 2024. Sebelumnya menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Strata 1 Akuntansi Universitas Internasional Batam sejak 2005-2023. Lulusan Magister dari Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 2002 ini, juga telah menuntaskan pendidikan doktoral pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2023. Penulis tidak hanya menempuh beberapa pendidikan formal dari jenjang Sarjana hingga Doktoral. Selain aktif mengajar, penulis hingga saat ini juga produktif menulis berbagai buku, artikel ilmiah dan mengikuti berbagai pelatihan non-gelar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Komitmen penulis dalam bidang penelitian terlihat dari sejumlah karya ilmiah yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mencerminkan dedikasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis juga sering dipercaya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai pembicara maupun narasumber dalam berbagai forum ilmiah seperti *workshop*, seminar, dan lokakarya, yang sekaligus menjadi sarana untuk memperluas jejaring profesional dan memperkuat kontribusi dalam komunitas akademik sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Email: widyanti75@gmail.com

Bab 02



EVOLUSI AKUNTANSI DARI KONVENSIONAL KE KEBERLANJUTAN

Benni Sumarman, S.E., Ak., M.Ak., Ak., CA., ASEAN CPA.
Universitas Batam

A. PENDAHULUAN

Secara tradisional, akuntansi sering kali dipersepsikan oleh masyarakat awam maupun praktisi bisnis semata-mata sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dalam pandangan konvensional ini, fungsi utama akuntansi adalah menyediakan alat bantu bagi manajemen dan investor untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas bisnis. Apabila seseorang menanyakan tugas utama seorang akuntan, jawaban yang paling umum diterima cenderung berkisar pada aktivitas "mencatat uang masuk dan keluar" atau "menghitung kewajiban pajak". Namun, apabila menelusuri lebih dalam hakikat dari akuntansi, disiplin ilmu ini sejatinya merupakan cerminan dari cara sebuah masyarakat memandang bisnis, ekonomi, serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya (Gray et al., 1996).

Akuntansi bukanlah ilmu yang statis atau bebas nilai. Ia merupakan produk sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Ketika tujuan utama bisnis dianggap semata-mata untuk memaksimalkan laba bagi pemilik modal, maka sistem akuntansi pun dirancang hanya untuk menangkap angka-angka keuntungan finansial. Dalam kondisi ini, alam sering kali dianggap sebagai sumber

daya gratis yang bisa diambil semauanya, dan masyarakat dipandang hanya sebagai pasar untuk menjual produk. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi klasik di mana tanggung jawab sosial perusahaan hanyalah meningkatkan keuntungan selama tetap mematuhi hukum (Friedman, 1970). Sebaliknya, ketika kesadaran global mulai bergeser menuju pemahaman bahwa aktivitas ekonomi memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan sosial, akuntansi pun turut mengalami transformasi fundamental.

Perjalanan evolusi dari akuntansi konvensional menuju akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*) bukanlah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Proses ini berkembang secara bertahap selama beberapa dekade, dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks seperti krisis ekonomi global, kerusakan lingkungan yang semakin nyata, tuntutan masyarakat sipil yang semakin kritis, serta perubahan paradigma dalam teori perusahaan dan tata kelola organisasi. Transisi ini menandai pergeseran dari pandangan yang berpusat pada manusia dan keuntungan semata, menuju pandangan yang lebih holistik yang mengakui ketergantungan bisnis terhadap alam dan kesejahteraan sosial (WCED, 1987).

Bayangkan sebuah perusahaan tambang yang mencatat laba miliaran rupiah dalam laporan keuangannya. Secara akuntansi konvensional, perusahaan ini sangat sukses. Namun, jika perusahaan tersebut meninggalkan lubang tambang yang berbahaya, mencemari sungai warga, dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, apakah perusahaan tersebut benar-benar sukses? Akuntansi konvensional tidak akan menjawab pertanyaan ini karena fokusnya hanya pada angka keuangan. Akuntansi keberlanjutan hadir untuk menjawab celah tersebut, dengan mencoba mengukur dan melaporkan dampak nyata perusahaan terhadap manusia dan bumi (Schaltegger & Burritt, 2000).

Di Indonesia, evolusi ini semakin diperkuat dengan hadirnya regulasi-regulasi progresif. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Keberlanjutan (DSK IAI) telah mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), yaitu PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan dan PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 (DSK IAI, 2025a). Standar ini merujuk pada standar global IFRS S1 dan S2, menjadikan laporan keberlanjutan Indonesia kredibel dan dapat diperbandingkan secara internasional (IFRS Foundation, 2023). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa

keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas mereka (OJK, 2017).

Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan dan akuntansi nasional. Bab ini akan membahas secara komprehensif bagaimana akuntansi berkembang dari sistem yang berorientasi eksklusif pada laba dan pemegang saham (*shareholder*) menjadi sistem yang lebih inklusif dan holistik, yang memperhitungkan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan (*Governance*). Pemahaman terhadap evolusi ini sangat krusial bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum karena memberikan landasan filosofis mengapa laporan keberlanjutan kini menjadi sama pentingnya dengan laporan keuangan tradisional (Gray et al., 1996).

Tanpa memahami sejarah dan alasan di balik perubahan ini, penerapan akuntansi keberlanjutan hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa substansi yang mendalam. Dalam konteks pendidikan dan literasi akuntansi modern, pemahaman tidak lagi cukup hanya pada teknik debit-kredit, jurnal umum, atau konsolidasi laporan keuangan. Masyarakat dan profesional perlu memahami bagaimana perusahaan mengelola emisi karbon, mengukur biaya lingkungan, menyusun laporan keberlanjutan yang teraudit, dan membangun tata kelola yang transparan. Dengan kata lain, akuntansi modern menuntut cara berpikir yang lebih luas, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. Bab ini akan menguraikan tahapan evolusi tersebut, teori-teori yang mendasarinya, tantangan yang dihadapi, serta konteks regulasi Indonesia, sehingga pembaca dapat memiliki peta jalan yang jelas mengenai ke mana arah disiplin ilmu akuntansi sedang bergerak (DSK IAI, 2025b).

B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN RITEL

Untuk memahami evolusi akuntansi secara mendalam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan secara jelas perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi keberlanjutan, serta ruang lingkup yang dicakup oleh masing-masing pendekatan. Definisi ini penting untuk membatasi pembahasan dan memberikan kejelasan konseptual bagi pembaca yang mungkin baru pertama kali mengenal istilah akuntansi keberlanjutan. Sering kali terjadi kesalahpahaman bahwa akuntansi keberlanjutan adalah ilmu yang sama sekali baru yang menghapus akuntansi lama. Padahal,

hubungannya lebih pada perluasan dan integrasi (Schaltegger & Burritt, 2000).

1. Akuntansi Konvensional

Akuntansi konvensional, yang sering juga disebut sebagai akuntansi keuangan tradisional, adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (GAAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Fokus utama dari akuntansi konvensional adalah menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal, terutama investor dan kreditur, untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi terkait penanaman modal atau pemberian pinjaman.

Karakteristik utama dari akuntansi konvensional dapat diidentifikasi melalui beberapa poin kunci:

- Berorientasi pada Laba (*Profit Oriented*): Tujuan utama pelaporan adalah menunjukkan seberapa menguntungkan perusahaan selama periode tertentu. Indikator keberhasilan utamanya adalah laba bersih (*net income*).
- Fokus pada Pemegang Saham (*Shareholder Oriented*): Prioritas utama adalah memenuhi kepentingan pemilik modal atau investor. Keputusan manajemen sering kali diarahkan untuk meningkatkan harga saham dan dividen.
- Moneter: Hanya transaksi yang dapat diukur dengan satuan uang yang dicatat. Dampak yang tidak memiliki harga pasar, seperti kerusakan ekosistem atau kebahagiaan karyawan, sering kali diabaikan karena sulit diberi nilai rupiah.
- Historical Cost: Aset dan liabilitas umumnya dicatat berdasarkan biaya perolehan historis, bukan nilai wajar saat ini atau nilai dampaknya di masa depan.
- Jangka Pendek: Penekanan pada kinerja kuartalan atau tahunan, yang sering kali mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan jangka pendek namun merugikan jangka panjang.

Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi klasik. Salah satu tokoh yang terkenal dengan gagasan ini adalah Milton Friedman, yang dalam esainya tahun 1970 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah meningkatkan keuntungan selama tetap mematuhi hukum dan aturan main yang berlaku (Friedman, 1970). Dalam paradigma ini, laporan keuangan dianggap berhasil jika mampu menunjukkan pertumbuhan laba, peningkatan aset, dan imbal hasil (*return*) yang tinggi bagi investor.

2. Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi keberlanjutan adalah pengembangan dari akuntansi konvensional yang mengintegrasikan informasi non-keuangan terkait kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam sistem pelaporan perusahaan. Definisi ini mencakup proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas organisasi terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ini bukan sekadar tentang "berbuat baik", melainkan tentang mengukur nilai yang diciptakan atau dihancurkan oleh perusahaan secara menyeluruh (Gray et al., 1996).

Menurut para ahli, akuntansi keberlanjutan adalah akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan kinerja perusahaan dalam tiga dimensi: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ruang lingkup akuntansi keberlanjutan jauh lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional, meliputi:

- Akuntansi Lingkungan: Mengukur biaya dan manfaat terkait pengelolaan lingkungan, seperti biaya pengolahan limbah, efisiensi energi, denda lingkungan, serta nilai konservasi sumber daya alam.
- Akuntansi Sosial: Melaporkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, seperti program CSR, kesejahteraan karyawan, hak asasi manusia dalam rantai pasok, keselamatan kerja, dan pemberdayaan komunitas lokal.
- Akuntansi Tata Kelola: Mengungkapkan struktur manajemen, etika bisnis, transparansi, anti-korupsi, dan kepatuhan terhadap regulasi serta hukum yang berlaku.

Tujuan utama akuntansi keberlanjutan adalah memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya alam atau kesejahteraan sosial. Ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Komisi Brundtland sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (WCED, 1987).

3. Perbedaan Mendasar

Perbedaan antara kedua sistem akuntansi ini tidak hanya terletak pada jenis data yang dilaporkan, tetapi juga pada filosofi dasar yang mendasarinya. Dalam akuntansi konvensional, alam dan masyarakat dianggap sebagai sumber daya gratis atau eksternalitas yang tidak perlu dibayar kecuali ada regulasi yang

memaksa. Sebaliknya, akuntansi keberlanjutan menganggap alam dan masyarakat sebagai modal yang harus dijaga kelestariannya. Jika modal ini rusak, maka bisnis tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang (Schaltegger & Burritt, 2000). Tabel berikut merangkum perbedaan utama antara akuntansi konvensional dan akuntansi keberlanjutan:

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Keberlanjutan
Fokus Utama	Laba Keuangan	Nilai Berkelanjutan
Orientasi	Pemegang Saham	Pemangku Kepentingan
Jenis Informasi	Finansial (Moneter)	Finansial & Non-Finansial
Perspektif Waktu	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Perlakuan Lingkungan	Eksternalitas (Tidak Dicatat)	Internalisasi Biaya & Dampak
Tujuan Pelaporan	Kepatuhan & Investasi	Akuntabilitas & Transparansi
Standar	SAK/IFRS (Keuangan)	PSPK 1 & 2, GRI, ISSB
Pengguna Laporan	Investor & Kreditor	Investor, Masyarakat, Pemerintah, LSM

Perbedaan ini menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan bukanlah pengganti akuntansi konvensional, melainkan perluasan dan penyempurnaan. Laporan keuangan tetap penting untuk menilai kesehatan ekonomi perusahaan, tetapi kini harus dilengkapi dengan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan untuk memberikan gambaran utuh tentang kinerja perusahaan (DSK IAI, 2025a).

C. PERAN DAN FUNGSI AKUNTANSI DALAM EKOSISTEM BISNIS

Akuntansi memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Sebagai sistem informasi, akuntansi berfungsi sebagai bahasa bisnis yang memungkinkan komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks evolusi menuju keberlanjutan, peran akuntansi menjadi semakin strategis karena

berfungsi sebagai alat verifikasi dan akuntabilitas atas klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan (Gray et al., 1996).

1. Mendukung Pengambilan Keputusan Investasi

Di era modern, investor tidak lagi hanya melihat angka laba bersih. Mereka menggunakan informasi akuntansi keberlanjutan untuk menilai risiko jangka panjang. Perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam pengelolaan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia dianggap memiliki risiko reputasi dan regulasi yang tinggi. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan membantu investor mengalokasikan modal ke perusahaan yang lebih berkelanjutan dan resilien. Data yang disajikan melalui laporan keberlanjutan memungkinkan analisis keuangan untuk melakukan valuasi yang lebih akurat dengan memasukkan faktor risiko ESG ke dalam model keuangan mereka (IFRS Foundation, 2023).

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Peran utama akuntansi adalah menyediakan akuntabilitas. Dalam konteks keberlanjutan, akuntansi memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanpa sistem akuntansi yang memadai, klaim perusahaan tentang "go green" hanyalah sekadar pemasaran (*greenwashing*). Melalui pengukuran dan pelaporan yang standar, akuntansi keberlanjutan memaksa perusahaan untuk membuka data nyata mengenai emisi karbon, penggunaan air, dan kondisi kerja karyawan, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja perusahaan secara objektif (GRI, 2021).

3. Mendorong Efisiensi Operasional

Penerapan akuntansi lingkungan, sebagai bagian dari akuntansi keberlanjutan, membantu manajemen mengidentifikasi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan mencatat biaya energi, limbah, dan material secara terperinci, perusahaan dapat menemukan peluang untuk mengurangi pemborosan. Misalnya, analisis biaya aliran material (*Material Flow Cost Accounting*) dapat menunjukkan di mana material terbuang dalam proses produksi, yang secara langsung mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Jadi, akuntansi keberlanjutan tidak hanya bersifat pelaporan eksternal, tetapi juga alat manajemen internal untuk meningkatkan efisiensi (Schaltegger & Burritt, 2000).

4. Memfasilitasi Kepatuhan Regulasi

Pemerintah di berbagai negara semakin ketat dalam menerapkan regulasi lingkungan dan sosial. Di Indonesia, Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan keberlanjutan (OJK, 2017). Akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan memantau kepatuhan mereka terhadap undang-undang tersebut. Sistem pencatatan yang baik memastikan bahwa perusahaan dapat membuktikan kepatuhannya saat diaudit oleh regulator. Hal ini mengurangi risiko denda, sanksi hukum, atau pencabutan izin usaha.

5. Membangun Kepercayaan Publik

Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam bisnis modern. Konsumen semakin sadar akan isu keberlanjutan dan cenderung memilih merek yang menunjukkan tanggung jawab sosial. Laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan standar yang diakui, seperti PSPK 1 dan PSPK 2 dari IAI, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen (DSK IAI, 2025a). Hal ini berdampak langsung pada loyalitas merek dan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang transparan mengenai tantangan dan kemajuan keberlanjutan mereka cenderung lebih dipercaya dibandingkan perusahaan yang menyembunyikan informasi negatif.

6. Alat untuk Keadilan Antar Generasi

Fungsi yang lebih filosofis dari akuntansi keberlanjutan adalah sebagai alat untuk memastikan keadilan antar generasi. Akuntansi konvensional sering kali mengabaikan biaya yang harus ditanggung oleh generasi mendatang akibat eksploitasi sumber daya saat ini. Akuntansi keberlanjutan mencoba menginternalisasi biaya tersebut, sehingga harga produk yang kita beli hari ini mencerminkan biaya sebenarnya, termasuk biaya pemulihan lingkungan. Dengan demikian, generasi saat ini tidak menikmati keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan generasi masa depan (WCED, 1987).

D. PERKEMBANGAN SEJARAH AKUNTANSI

Evolusi akuntansi dari konvensional ke keberlanjutan dapat dipetakan melalui beberapa era sejarah yang menandai perubahan paradigma penting. Memahami *timeline* ini membantu kita mengerti

konteks mengapa perubahan tersebut terjadi dan tidak muncul begitu saja. Sejarah ini menunjukkan bahwa akuntansi selalu merespons kebutuhan zamannya (Gray et al., 1996).

1. Era Industrialisasi (Abad 19 – Pertengahan Abad 20)

Pada masa Revolusi Industri, fokus utama bisnis adalah produksi massal dan efisiensi operasional. Akuntansi berkembang untuk mendukung kebutuhan ini, dengan penekanan pada akuntansi biaya (*cost accounting*) untuk menghitung harga pokok produksi. Lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang tak terbatas. Polusi dan limbah dianggap sebagai konsekuensi wajar dari kemajuan industri. Pada era ini, laporan keuangan murni berfokus pada aset fisik dan keuangan. Tidak ada konsep mengenai aset alam atau liabilitas lingkungan.

2. Era Kesadaran Sosial (1970-an)

Tahun 1970-an menandai titik balik awal. Krisis minyak, gerakan hak sipil, dan meningkatnya kepedulian terhadap hak pekerja mulai memicu pertanyaan tentang tanggung jawab perusahaan. Di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission (SEC) mulai meminta pengungkapan tertentu terkait dampak sosial dan lingkungan, meskipun masih bersifat sukarela dan terbatas. Istilah "Corporate Social Responsibility" (CSR) mulai muncul dalam literatur bisnis. Namun, akuntansi pada masa ini belum memiliki metodologi yang baku untuk mengukur dampak sosial.

3. Era Pembangunan Berkelanjutan (1980-1990-an)

Momen paling kritis dalam era ini adalah publikasi laporan "Our Common Future" oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987, yang dikenal sebagai Laporan Brundtland. Laporan ini memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ke dalam arus utama kebijakan global (WCED, 1987). Pada tahun 1992, Konferensi Bumi di Rio de Janeiro semakin mengukuhkan komitmen global terhadap lingkungan. Dalam dunia akuntansi, periode ini melahirkan gagasan "Green Accounting". Beberapa negara mulai bereksperimen dengan akun satelit lingkungan dalam sistem akun nasional mereka.

4. Era Standarisasi dan Sukarela (2000-an)

Memasuki abad ke-21, kebutuhan akan standar yang komparibel (*comparable*) semakin mendesak. Pada tahun 2000, Global Reporting Initiative (GRI) merilis pedoman pelaporan keberlanjutan pertama, yang menjadi standar *de facto* global (GRI, 2021). Pada era ini, pelaporan keberlanjutan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Perusahaan yang melaporkan kinerja keberlanjutan dianggap sebagai pemimpin pasar dan memiliki reputasi baik. Namun, karena sifatnya sukarela, kualitas laporan sangat bervariasi.

5. Era Integrasi ESG dan Wajib Lapori (2010-an – Sekarang)

Krisis keuangan global 2008 menyadarkan dunia bahwa risiko sistemik tidak hanya berasal dari faktor keuangan, tetapi juga dari tata kelola yang buruk. Isu keberlanjutan semakin terintegrasi dalam sistem keuangan global melalui konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Investor institusional mulai menuntut data ESG yang terstandar untuk keputusan investasi.

Perkembangan terbaru dan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB) di bawah yayasan IFRS. Ini menandai fase baru evolusi akuntansi: keberlanjutan bukan lagi pilihan sukarela, tetapi menjadi bagian resmi dari arsitektur standar pelaporan keuangan global. Standar IFRS S1 dan S2 yang dirilis pada 2023 mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan yang relevan dengan keputusan investor (IFRS Foundation, 2023). Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Keberlanjutan (DSK IAI) telah mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 (DSK IAI, 2025a). Standar ini merujuk pada IFRS S1 dan IFRS S2, memastikan bahwa laporan keberlanjutan Indonesia selaras dengan praktik global.

E. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERUBAHAN

Keberhasilan transisi dari akuntansi konvensional ke akuntansi keberlanjutan tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat berbagai faktor eksternal dan internal yang mendorong perusahaan dan regulator untuk mengadopsi praktik ini. Memahami faktor-faktor ini penting untuk menganalisis dinamika perubahan di masa depan (Freeman, 1984).

1. Tekanan Stakeholder

Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) yang dipopulerkan oleh R. Edward Freeman (1984) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Perubahan ini menggeser cara pandang terhadap tujuan perusahaan. Keberhasilan tidak lagi diukur hanya dari laba, tetapi juga dari nilai yang diciptakan bagi berbagai pemangku kepentingan. Tekanan dari konsumen yang semakin sadar lingkungan memaksa perusahaan untuk transparan. Kelompok masyarakat sipil (LSM) juga berperan sebagai pengawas yang vokal. Jika perusahaan ketahuan mencemari lingkungan, kampanye boikot dapat merusak reputasi merek secara instan.

2. Regulasi Pemerintah

Pemerintah memainkan peran kunci melalui regulasi. Uni Eropa menjadi pemimpin global dalam regulasi keberlanjutan dengan memperkenalkan *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) yang mewajibkan ribuan perusahaan untuk melaporkan dampak keberlanjutan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi tentang Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan dan emiten untuk menyusun laporan keberlanjutan (OJK, 2017). Regulasi ini mengubah status pelaporan keberlanjutan dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*), yang secara langsung mendorong adopsi akuntansi keberlanjutan.

Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 sebagai Standar Pengungkapan Keberlanjutan nasional. PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, sedangkan PSPK 2 fokus pada pengungkapan terkait iklim. Kedua standar ini merujuk pada IFRS S1 dan S2 dari ISSB, memastikan bahwa laporan keberlanjutan Indonesia kredibel dan dapat diperbandingkan secara global (DSK IAI, 2025b).

3. Krisis Lingkungan dan Sosial

Bencana lingkungan besar sering kali menjadi katalisator perubahan. Tumpahan minyak, kebakaran hutan, atau krisis iklim global menyadarkan dunia tentang biaya nyata dari kerusakan lingkungan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan yang tidak dicatat dalam akuntansi konvensional pada akhirnya harus dibayar oleh masyarakat dan pemerintah.

Kesadaran ini mendorong tuntutan agar perusahaan menginternalisasi biaya tersebut melalui sistem akuntansi yang lebih komprehensif. Prinsip "pencemar membayar" (*polluter pays principle*) mulai diadopsi dalam kebijakan akuntansi.

4. Tuntutan Investor dan Institusi Keuangan

Investor institusional besar seperti *pension funds* dan perusahaan asuransi kini mengelola triliunan dolar aset. Mereka menyadari bahwa perubahan iklim merupakan risiko finansial material. *Network for Greening the Financial System* (NGFS) yang terdiri dari bank sentral global telah merekomendasikan integrasi risiko iklim dalam pengawasan keuangan. Investor global mulai mempertimbangkan faktor ESG sebelum menanamkan modal. Perusahaan yang memiliki risiko lingkungan tinggi atau tata kelola buruk dianggap memiliki risiko investasi yang lebih besar dan biaya modal yang lebih tinggi. Hal ini memaksa manajemen perusahaan untuk memperbaiki sistem pengukuran dan pelaporan keberlanjutan mereka agar tetap menarik bagi investor (IFRS Foundation, 2023).

5. Kemajuan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi juga menjadi faktor pendukung. Di masa lalu, mengumpulkan data non-keuangan seperti emisi karbon dari rantai pasok global adalah hal yang sangat sulit dan mahal. Namun, dengan adanya teknologi *Big Data*, *Internet of Things* (IoT), dan *Blockchain*, perusahaan kini dapat melacak dampak lingkungan secara *real-time*. Sensor pada cerobong asap dapat mencatat emisi secara otomatis, dan sistem ERP dapat mengintegrasikan data tersebut ke dalam laporan akuntansi. Teknologi memungkinkan akuntansi keberlanjutan menjadi lebih praktis, akurat, dan efisien untuk diimplementasikan.

6. Perubahan Paradigma Pendidikan

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perubahan dalam pendidikan akuntansi. Universitas dan lembaga profesi akuntan di seluruh dunia mulai memasukkan kurikulum keberlanjutan ke dalam program studi mereka. Akuntan masa depan dididik untuk tidak hanya melihat angka keuangan, tetapi juga dampak sosial lingkungan. Generasi akuntan baru ini akan membawa perubahan budaya dalam profesi akuntansi, di mana keberlanjutan dianggap sebagai kompetensi inti, bukan sekadar tambahan.

F. KONSEP DAN PANDUAN BERBASIS INDUSTRI

Seiring dengan evolusi sejarah, muncul berbagai konsep dan model yang menjadi landasan teknis dalam akuntansi keberlanjutan. Salah satu perkembangan terpenting dalam era modern adalah pengenalan panduan berbasis industri (*Industry-based Guidance*) untuk implementasi pengungkapan terkait iklim, sebagaimana diterbitkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) pada Juni 2023. Dokumen ini *accompany* IFRS S2 dan memberikan arahan spesifik bagi berbagai sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan telah matang menjadi disiplin ilmu yang spesifik dan terukur, tidak lagi bersifat umum (IFRS Foundation, 2023).

1. Konsep Triple Bottom Line (TBL)

Konsep *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 menekankan bahwa kinerja perusahaan harus diukur dari tiga aspek yang saling berkaitan:

- **Profit** (Keuntungan ekonomi): Kinerja keuangan tradisional yang memastikan perusahaan tetap *viable* secara ekonomi.
- **People** (Dampak sosial): Bagaimana perusahaan memperlakukan manusia, termasuk karyawan, masyarakat sekitar, dan rantai pasok.
- **Planet** (Dampak lingkungan): Bagaimana perusahaan meminimalkan jejak ekologis dan menjaga kelestarian alam

Triple Bottom Line mengubah cara kita membaca laporan perusahaan. Tidak cukup hanya melihat laba, tetapi juga perlu melihat bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, menjaga lingkungan, dan berkontribusi pada masyarakat (Elkington, 1997).

2. Integrasi ESG dalam Dunia Keuangan Modern

Memasuki abad ke-21, isu keberlanjutan semakin terintegrasi dalam sistem keuangan global melalui konsep ESG:

- *Environmental* (Lingkungan): Perubahan iklim, emisi karbon, pengelolaan air dan limbah, keanekaragaman hayati.
- *Social* (Sosial): Hubungan industrial, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan dengan komunitas.
- *Governance* (Tata Kelola): Struktur dewan, remunerasi eksekutif, audit internal, hak pemegang saham, etika bisnis.

Investor global mulai mempertimbangkan faktor ESG sebelum menanamkan modal. Pembentukan *International Sustainability Standards Board* (ISSB) di bawah IFRS Foundation

menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan kini menjadi bagian resmi dari arsitektur standar pelaporan keuangan global (IFRS Foundation, 2023).

3. Panduan Berbasis Industri (Industry-based Guidance)

Salah satu bukti kematangan evolusi akuntansi keberlanjutan adalah diterbitkannya *Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures* oleh ISSB. Dokumen ini menyarankan cara-cara *possible* untuk menerapkan beberapa persyaratan pengungkapan dalam IFRS S2 yang dikaitkan dengan model bisnis, aktivitas ekonomi, dan fitur umum tertentu yang menjadi karakteristik partisipasi dalam industri tersebut. Panduan ini berasal dari *Standar Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) yang kini dikelola oleh ISSB (IFRS Foundation, 2023). Pentingnya panduan berbasis industri ini menunjukkan bahwa materialitas isu keberlanjutan berbeda-beda tergantung sektor usahanya. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana panduan ini diterapkan pada berbagai sektor berdasarkan dokumen IFRS S2 Industry-Based Guidance:

- **Sektor Barang Konsumen (*Consumer Goods*):** Fokus pada sumber bahan baku prioritas. Perusahaan diminta mengungkapkan daftar bahan baku prioritas (seperti kapas, kulit, wol) dan faktor lingkungan atau sosial yang paling mungkin mengancam sumber daya tersebut. Mereka juga harus melaporkan jumlah bahan baku yang dibeli dan berapa persen yang bersertifikat standar lingkungan atau sosial pihak ketiga.
- **Sektor Ekstraktif dan Mineral (*Extractives & Minerals*):** Fokus utama pada emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Scope 1 dan cadangan sumber daya. Perusahaan tambang harus mengungkapkan strategi jangka panjang dan pendek untuk mengelola emisi, target pengurangan emisi, dan analisis kinerja terhadap target tersebut. Mereka juga harus melakukan analisis sensitivitas tingkat cadangan batubara atau minyak terhadap skenario harga masa depan yang memperhitungkan harga karbon.
- **Sektor Keuangan (*Financials*):** Bagi bank dan manajer aset, fokusnya adalah pada integrasi faktor ESG dalam manajemen investasi dan analisis kredit. Mereka harus mengungkapkan jumlah aset under management (AUM) yang employ integrasi isu ESG, serta pendekatan mereka dalam memasukkan faktor lingkungan dan sosial dalam proses keputusan investasi. Bank

juga harus mengungkapkan bagaimana mereka mengelola risiko iklim dalam portofolio kredit mereka.

- **Sektor Makanan dan Minuman (*Food & Beverage*):** Fokus pada pengelolaan air dan rantai pasok bahan baku. Mengingat industri ini sangat intensif air, perusahaan harus mengungkapkan total air yang ditarik dan dikonsumsi, serta persentasenya di wilayah dengan stres air tinggi. Mereka juga harus melaporkan strategi untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam rantai pasok bahan baku pertanian, termasuk kesejahteraan hewan.
- **Sektor Teknologi dan Komunikasi:** Fokus pada jejak lingkungan infrastruktur perangkat keras, khususnya pusat data (*data centers*). Perusahaan diminta mengungkapkan total energi yang dikonsumsi oleh pusat data, persentase listrik dari jaringan, dan persentase energi terbarukan. Mereka juga harus melaporkan strategi untuk mengurangi dampak lingkungan dari logistik produk dan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*).
- **Sektor Transportasi:** Fokus pada efisiensi bahan bakar dan emisi dari armada. Perusahaan penerbangan, pelayaran, dan darat harus mengungkapkan konsumsi bahan bakar total, persentase bahan bakar alternatif atau terbarukan, dan strategi untuk meningkatkan efisiensi armada guna mengurangi emisi karbon.

Panduan berbasis industri ini sangat relevan dengan implementasi PSPK 2 di Indonesia. Karena PSPK 2 mengadopsi IFRS S2, maka perusahaan Indonesia dapat merujuk pada panduan industri ini untuk menentukan metrik dan target yang relevan bagi sektor. Hal ini memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya berisi narasi umum, tetapi juga data kuantitatif yang spesifik dan dapat dibandingkan antar perusahaan dalam industri yang sama (DSK IAI, 2025b).

4. Pelaporan Terintegrasi (*Integrated Reporting*)

Model terbaru yang berkembang adalah *Integrated Reporting* (<IR>). Konsep ini tidak memisahkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan menjadi dua dokumen berbeda, melainkan menyatukannya dalam satu laporan terintegrasi yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai dari waktu ke waktu melalui enam modal: keuangan, manufaktur, intelektual, manusia, sosial dan hubungan, serta alam. Pendekatan ini mencerminkan kematangan tertinggi dari evolusi akuntansi, dimana batas antara

kinerja keuangan dan non-keuangan menjadi kabur karena keduanya saling berkaitan erat.

G. IMPLEMENTASI STANDAR KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

Implementasi akuntansi keberlanjutan di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh regulasi lokal dan adopsi standar internasional. Pemahaman terhadap lanskap regulasi ini penting bagi praktisi akuntansi di Indonesia.

1. Peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

IAI melalui Dewan Standar Keberlanjutan (DSK IAI) memegang peranan sentral dalam menetapkan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Pengesahan PSPK 1 dan PSPK 2 pada tahun 2025 merupakan tonggak sejarah yang menyelaraskan praktik Indonesia dengan standar global ISSB (DSK IAI, 2025a). PSPK 1 menetapkan persyaratan umum untuk pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, memastikan bahwa informasi tersebut relevan bagi investor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, PSPK 2 secara spesifik mengatur pengungkapan terkait iklim, termasuk risiko fisik dan transisi, serta strategi mitigasi dan adaptasi perusahaan (DSK IAI, 2025b).

2. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebelum adanya PSPK, OJK telah lebih dulu menerbitkan POJK No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menyusun Laporan Keberlanjutan. Dengan adanya PSPK, diharapkan terjadi konvergensi antara persyaratan OJK dan standar akuntansi yang ditetapkan IAI, sehingga mengurangi beban pelaporan ganda bagi perusahaan (OJK, 2017).

3. Tantangan Adaptasi

Meskipun kerangka regulasi sudah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak perusahaan Indonesia, terutama UMKM, belum memiliki sistem pengumpulan data keberlanjutan yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar PSPK dan IFRS S2 juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan bagi akuntan Indonesia menjadi sangat krusial dalam fase transisi menuju berlaku efektifnya standar ini pada 2027 (DSK IAI, 2025a).

H. TANTANGAN DAN MASA DEPAN

Meskipun evolusi menuju akuntansi keberlanjutan telah menunjukkan kemajuan signifikan, terdapat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi. Memahami tantangan ini penting untuk menyusun strategi implementasi yang efektif di masa depan (Schaltegger & Burritt, 2000:**Profit (Keuntungan ekonomi)**: Kinerja keuangan tradisional yang memastikan perusahaan tetap viable secara ekonomi.

- **Masalah Pengukuran dan Standarisasi:** Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengukur dampak sosial dan lingkungan dalam satuan yang dapat dibandingkan. Sementara laba diukur dalam mata uang, bagaimana cara mengukur "kebahagiaan karyawan" atau "keanekaragaman hayati" secara konsisten? Meskipun standar seperti GRI, SASB, dan kini PSPK 1 & 2 telah ada, masih terdapat banyak kerangka kerja yang berbeda, menyebabkan kebingungan bagi penyusun laporan dan pengguna laporan.
- **Fenomena Greenwashing:** Dengan meningkatnya tuntutan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan, muncul risiko greenwashing, yaitu praktik dimana perusahaan melebih-lebihkan atau membuat klaim palsu tentang kinerja lingkungan mereka. Tanpa audit dan asurans yang ketat terhadap laporan keberlanjutan, akuntansi keberlanjutan kehilangan kredibilitasnya.
- **Integrasi ke dalam Sistem Manajemen:** Tantangan operasional lainnya adalah mengintegrasikan akuntansi keberlanjutan ke dalam sistem manajemen sehari-hari. Sering kali, laporan keberlanjutan disusun oleh tim komunikasi atau CSR yang terpisah dari departemen keuangan. Hal ini menciptakan silo informasi. Masa depan akuntansi keberlanjutan menuntut integrasi penuh dimana data keberlanjutan dicatat dalam sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang sama dengan data keuangan. Ini memerlukan pelatihan ulang bagi akuntan dan manajer untuk memahami metrik keberlanjutan.
- **Biaya Implementasi:** Bagi perusahaan kecil dan menengah (UMKM), biaya untuk menerapkan sistem akuntansi keberlanjutan bisa menjadi beban yang berat. Pengumpulan

data, penyusunan laporan, dan audit keberlanjutan memerlukan sumber daya dan keahlian khusus. Tantangan bagi pembuat kebijakan adalah menciptakan standar yang proporsional, dimana persyaratan pelaporan disesuaikan dengan ukuran dan kapasitas perusahaan, tanpa mengorbankan prinsip transparansi. Namun, seiring waktu, teknologi diharapkan dapat menurunkan biaya ini sehingga dapat diakses oleh UMKM.

- **Masa Depan: Akuntansi Berbasis Teknologi:** Masa depan akuntansi keberlanjutan akan sangat bergantung pada teknologi. Penggunaan Blockchain dapat memastikan keaslian data rantai pasok, misalnya memastikan bahwa kopi yang dijual benar-benar berasal dari petani yang dibayar adil. *Artificial Intelligence* (AI) dapat membantu menganalisis *big data* keberlanjutan untuk memprediksi risiko iklim. Internet of Things (IoT) dapat memberikan data real-time tentang konsumsi energi. Akuntan masa depan akan bekerja berdampingan dengan data scientist dan ahli lingkungan. Profesi akuntan akan bertransformasi menjadi "Akuntan Keberlanjutan" yang memiliki kompetensi hibrida.
- **Regulasi yang Semakin Ketat:** Tren global menunjukkan bahwa regulasi akan semakin ketat. Di Indonesia, implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 mulai 2027 akan menjadi tonggak penting (DSK IAI, 2025a). Perusahaan yang ingin tetap kompetitif dan memiliki akses terhadap pendanaan hijau harus segera mempersiapkan sistem akuntansi keberlanjutan mereka. Akuntansi keberlanjutan akan menjadi tiket masuk untuk perdagangan internasional dan akses modal global. Regulasi seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa juga akan mempengaruhi perusahaan ekspor Indonesia, mengharuskan mereka untuk mampu melaporkan emisi karbon produk mereka secara akurat.
- **Integrasi ke dalam Sistem Manajemen:** Tantangan operasional lainnya adalah mengintegrasikan akuntansi keberlanjutan ke dalam sistem manajemen sehari-hari. Sering kali, laporan keberlanjutan disusun oleh tim komunikasi atau CSR yang terpisah dari departemen keuangan. Hal ini menciptakan silo informasi. Masa depan akuntansi keberlanjutan menuntut integrasi penuh dimana data keberlanjutan dicatat dalam sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang sama dengan data keuangan. Ini memerlukan pelatihan ulang bagi akuntan dan manajer untuk memahami metrik keberlanjutan.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI). (2025a). Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan. Jakarta: IAI.
- Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI). (2025b). Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 2: Pengungkapan Terkait Iklim. Jakarta: IAI.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. *The New York Times Magazine*.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). *GRI Standards 2021*. Amsterdam: GRI.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall.
- International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2023). *IFRS S1 and S2 Sustainability Disclosure Standards*. London: ISSB.
- International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2023). *Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures*. London: ISSB.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: OJK.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2000). *Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice*. Greenleaf Publishing.
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

■ TENTANG PENULIS



**Benni Sumarman, S.E., Ak., M.Ak., Ak., CA.,
ASEAN CPA.
Universitas Batam**

Penulis lahir di Cirebon, 02 Desember 1972. Penulis menempuh Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan Magister Akuntansi (M.Ak.) di Universitas Batam. Selain pendidikan formal, penulis juga memperoleh sertifikasi profesi Akuntan (Ak.), Chartered Accountant (CA), serta ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) sebagai bentuk pengakuan profesional di bidang akuntansi. Saat ini penulis merupakan Kepala Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batam. Penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, perpajakan, serta tata kelola dan pelaporan keberlanjutan. Selain kegiatan akademik, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan, seminar, dan pendampingan di bidang akuntansi dan perpajakan bagi institusi pemerintah, koperasi, UMKM, maupun organisasi lainnya. Penulis juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan Akuntansi Sektor Publik. Buku ini merupakan salah satu karya yang ditulis sebagai kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu akuntansi serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya literatur di bidang akuntansi.

Bab 03



TEORI DAN LANDASAN FILOSOFIS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

*L.M. Hasriadi, S.S.T., M.Tr.E.
Universitas Mulawarman*

A. KONSEP DASAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Akuntansi keberlanjutan merupakan perkembangan penting dalam disiplin akuntansi yang lahir dari kebutuhan untuk memperluas fungsi akuntansi melampaui pencatatan dan pelaporan keuangan konvensional. Dalam praktik bisnis modern, perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas operasionalnya memberikan dampak terhadap lingkungan, masyarakat, tata kelola, serta keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasikan informasi keuangan dan nonkeuangan dalam satu kerangka pertanggungjawaban organisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak bersifat netral secara sosial. Akuntansi memiliki peran dalam membentuk perilaku organisasi, memengaruhi keputusan manajerial, serta memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks keberlanjutan, akuntansi menjadi sarana untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan pelaporan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara pandang organisasi terhadap tanggung jawab dan nilai jangka panjang.

1. Pengertian Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi keberlanjutan dapat dipahami sebagai proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola suatu organisasi. Berbeda dari akuntansi keuangan tradisional yang berfokus pada posisi keuangan, kinerja laba rugi, dan arus kas, akuntansi keberlanjutan memperluas cakupan informasi agar mencerminkan dampak organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif konseptual, akuntansi keberlanjutan bertumpu pada gagasan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan ekologis. Perusahaan menggunakan sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur sosial, serta dukungan institusional dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang menjelaskan bagaimana sumber daya tersebut digunakan, bagaimana dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana strategi organisasi diarahkan untuk menjaga keberlanjutan nilai (Sukaharsono & Andayani, 2021).

Akuntansi keberlanjutan juga dapat dipandang sebagai instrumen akuntabilitas. Informasi yang dihasilkan tidak hanya ditujukan kepada investor dan kreditor, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, pemerintah, masyarakat lokal, pemasok, lembaga swadaya masyarakat, serta generasi mendatang. Dengan cakupan pemangku kepentingan yang lebih luas, akuntansi keberlanjutan menuntut adanya transparansi, keterukuran, dan relevansi informasi mengenai dampak perusahaan. Dalam praktiknya, akuntansi keberlanjutan mencakup berbagai aspek, seperti emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, penggunaan air, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, keberagaman tenaga kerja, tata kelola perusahaan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja organisasi dibandingkan laporan keuangan semata.

2. Perkembangan Akuntansi Keberlanjutan dalam Praktik Bisnis Modern

Perkembangan akuntansi keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran global terhadap risiko lingkungan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tuntutan tata kelola perusahaan yang lebih bertanggung jawab. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia usaha menghadapi tekanan yang semakin

besar untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Pada tahap awal, pelaporan keberlanjutan lebih banyak bersifat sukarela dan digunakan sebagai sarana komunikasi reputasi perusahaan. Banyak organisasi menyampaikan informasi sosial dan lingkungan dalam bentuk laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, seiring meningkatnya tuntutan transparansi, pelaporan keberlanjutan berkembang menjadi bagian penting dari sistem akuntabilitas korporasi. Informasi keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari informasi strategis yang memengaruhi penilaian risiko, nilai perusahaan, dan kepercayaan publik.

Dalam praktik bisnis modern, akuntansi keberlanjutan semakin terkait dengan konsep *Environmental, Social, and Governance* atau ESG. Konsep ini digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi bisnis. Investor, regulator, dan pasar modal mulai mempertimbangkan informasi ESG dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan telah memasuki ruang utama dalam praktik bisnis dan keuangan. Selain itu, perkembangan standar pelaporan keberlanjutan turut memperkuat posisi akuntansi keberlanjutan. Berbagai kerangka pelaporan mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi secara sistematis, terukur, dan dapat dibandingkan. Perusahaan diharapkan tidak hanya menyampaikan narasi positif, tetapi juga menjelaskan risiko, kebijakan, indikator kinerja, target, serta capaian keberlanjutan secara objektif. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan bergerak dari pendekatan simbolik menuju pendekatan substantif (Puspa et al., 2026).

B. LANDASAN FILOSOFIS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Landasan filosofis akuntansi keberlanjutan bertumpu pada pertanyaan mendasar mengenai tujuan perusahaan, makna tanggung jawab, dan posisi manusia dalam sistem ekonomi serta lingkungan. Jika akuntansi konvensional banyak dibangun atas dasar efisiensi ekonomi dan pertanggungjawaban modal, maka akuntansi keberlanjutan memperluas dasar pemikirannya pada nilai keadilan, etika, keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan antar generasi. Filosofi keberlanjutan menolak pandangan bahwa keberhasilan organisasi semata-mata diukur dari akumulasi laba jangka pendek.

Sebaliknya, keberhasilan organisasi harus dilihat dari kemampuan menciptakan nilai yang tidak merusak dasar kehidupan sosial dan ekologis. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan mengandung dimensi normatif karena menempatkan nilai moral dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dalam praktik akuntansi.

1. Hakikat Keberlanjutan dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Keberlanjutan pada dasarnya mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk bertahan, berkembang, dan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks akuntansi, keberlanjutan dipahami sebagai upaya untuk menyajikan informasi mengenai bagaimana organisasi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi, keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan perusahaan menciptakan nilai secara konsisten tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang. Perusahaan yang berorientasi keberlanjutan tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi juga memperhatikan ketahanan model bisnis, efisiensi penggunaan sumber daya, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Informasi akuntansi keberlanjutan membantu menilai apakah pertumbuhan ekonomi perusahaan dibangun di atas dasar yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif sosial, keberlanjutan berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak, dan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan memiliki dampak terhadap tenaga kerja, konsumen, komunitas lokal, dan rantai pasok. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan perlu mencerminkan informasi mengenai praktik ketenagakerjaan, keselamatan kerja, inklusi sosial, hak asasi manusia, serta kontribusi organisasi terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Dalam perspektif lingkungan, keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengelola dampak ekologis dari kegiatan usaha. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dapat menimbulkan emisi, limbah, pencemaran, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas sumber daya alam. Akuntansi keberlanjutan berperan dalam mengukur dan melaporkan aspek tersebut agar organisasi dapat mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan efisiensi ekologis. Hubungan antara tiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Wahanisa & Adiyatma, 2021).

Tabel 3.1 Hakikat Keberlanjutan dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Dimensi Keberlanjutan	Fokus Utama	Implikasi dalam Akuntansi Keberlanjutan
Ekonomi	Nilai jangka panjang, efisiensi, ketahanan bisnis	Pelaporan kinerja ekonomi, risiko keberlanjutan, investasi berkelanjutan
Sosial	Keadilan, kesejahteraan, hak, hubungan sosial	Pelaporan tenaga kerja, keselamatan, komunitas, hak asasi manusia
Lingkungan	Perlindungan sumber daya alam dan ekosistem	Pelaporan emisi, energi, air, limbah, biodiversitas

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan multidimensi. Kinerja perusahaan harus dibaca sebagai hasil interaksi antara capaian ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan lingkungan.

2. Nilai Keadilan, Tanggung Jawab, dan Etika dalam Akuntansi Keberlanjutan

Nilai keadilan menjadi salah satu dasar filosofis utama dalam akuntansi keberlanjutan. Keadilan menuntut agar manfaat dan beban dari aktivitas perusahaan tidak hanya dinikmati atau ditanggung oleh kelompok tertentu. Dalam praktik bisnis, kegiatan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi sekaligus menimbulkan biaya sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Akuntansi keberlanjutan berupaya menghadirkan informasi yang lebih adil dengan mengungkapkan dampak positif dan negatif dari aktivitas organisasi. Tanggung jawab juga menjadi nilai penting dalam akuntansi keberlanjutan. Perusahaan tidak dapat dipandang hanya sebagai entitas ekonomi yang berdiri sendiri. Perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial yang memperoleh legitimasi dari masyarakat dan menggunakan sumber daya bersama. Karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan dampak yang timbul akibat kegiatan usahanya.

Akuntansi keberlanjutan menjadi media untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dalam bentuk informasi

yang dapat dinilai secara publik. Etika dalam akuntansi keberlanjutan berhubungan dengan kejujuran, transparansi, integritas, dan kepedulian terhadap dampak jangka panjang. Informasi keberlanjutan harus disajikan secara benar dan tidak boleh digunakan hanya sebagai alat pencitraan. Praktik seperti *greenwashing*, yaitu penyajian informasi lingkungan yang berlebihan atau menyesatkan, bertentangan dengan nilai etika akuntansi keberlanjutan. Oleh sebab itu, etika menuntut agar pelaporan keberlanjutan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, termasuk tantangan, risiko, dan keterbatasan yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan memiliki dimensi moral yang kuat. Akuntansi tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai “berapa besar laba yang diperoleh”, tetapi juga “bagaimana laba tersebut diperoleh”, “siapa yang terdampak”, dan “apakah proses penciptaan nilai tersebut dapat dipertahankan secara adil dan bertanggung jawab”.

C. TEORI-TEORI YANG MENDASARI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Akuntansi keberlanjutan didukung oleh berbagai teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Teori-teori tersebut memberikan dasar konseptual untuk memahami mengapa perusahaan perlu melaporkan informasi keberlanjutan dan bagaimana informasi tersebut digunakan dalam membangun akuntabilitas korporasi. Dua teori yang paling sering digunakan dalam kajian akuntansi keberlanjutan adalah teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Keduanya menempatkan perusahaan sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial. Perusahaan membutuhkan penerimaan, kepercayaan, dan dukungan dari berbagai pihak agar dapat bertahan dan berkembang.

1. Teori Legitimasi dan Akuntabilitas Korporasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi berdasarkan kontrak sosial dengan masyarakat. Kontrak sosial ini tidak selalu tertulis, tetapi tercermin dalam harapan publik bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan, menghormati norma sosial, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila aktivitas perusahaan dinilai bertentangan dengan nilai sosial yang berlaku, legitimasi perusahaan dapat menurun. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, pelaporan keberlanjutan menjadi sarana untuk memperoleh, mempertahankan, atau memulihkan legitimasi.

Perusahaan menggunakan laporan keberlanjutan untuk menjelaskan kebijakan lingkungan, program sosial, praktik tata kelola, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Informasi tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa kegiatan organisasi selaras dengan nilai dan harapan masyarakat (Werastuti, 2026).

Namun, teori legitimasi juga mengingatkan bahwa pelaporan keberlanjutan dapat bersifat simbolik. Perusahaan dapat menyajikan informasi keberlanjutan untuk membangun citra positif tanpa perubahan substantif dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, akuntabilitas korporasi menjadi aspek penting. Akuntabilitas menuntut perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bertanggung jawab atas tindakan, dampak, dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas korporasi dalam akuntansi keberlanjutan mencakup kewajiban untuk menjelaskan dampak operasional, menetapkan target keberlanjutan, melaporkan capaian secara berkala, serta membuka ruang evaluasi publik. Dengan demikian, laporan keberlanjutan bukan sekadar dokumen komunikasi, tetapi instrumen pertanggungjawaban yang memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

2. Teori Stakeholder dalam Pelaporan Keberlanjutan

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki hubungan dengan berbagai pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Pemangku kepentingan tidak terbatas pada pemegang saham, tetapi mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, lembaga keuangan, media, dan lingkungan alam sebagai entitas yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Dalam pelaporan keberlanjutan, teori stakeholder menegaskan bahwa informasi yang disajikan harus relevan bagi berbagai kelompok kepentingan. Investor membutuhkan informasi tentang risiko ESG dan prospek nilai jangka panjang. Karyawan membutuhkan informasi tentang keselamatan kerja, kesejahteraan, dan keadilan organisasi. Masyarakat membutuhkan informasi tentang dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah membutuhkan informasi untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi dan kontribusi terhadap pembangunan.

Teori *stakeholder* memperluas orientasi akuntansi dari *shareholder-oriented* menuju *stakeholder-oriented*. Dalam pendekatan tradisional, laporan perusahaan terutama diarahkan untuk memenuhi kepentingan penyedia modal. Dalam pendekatan keberlanjutan, laporan perusahaan harus mencerminkan tanggung

jawab terhadap pihak yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perusahaan tidak dapat menciptakan nilai secara berkelanjutan tanpa memperhatikan hubungan sosial dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Pelaporan keberlanjutan berdasarkan teori stakeholder juga menuntut adanya dialog dan keterlibatan. Perusahaan perlu mengidentifikasi isu material berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan demikian, informasi yang disajikan tidak hanya berasal dari sudut pandang manajemen, tetapi juga mempertimbangkan harapan pihak yang terdampak.

D. PARADIGMA AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Paradigma akuntansi keberlanjutan menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam cara memahami fungsi akuntansi. Akuntansi tidak lagi hanya diposisikan sebagai alat teknis untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sistem informasi yang berperan dalam membentuk perilaku organisasi dan memperkuat tanggung jawab sosial. Perubahan paradigma ini penting karena tantangan dunia bisnis semakin kompleks dan tidak cukup dijelaskan melalui indikator keuangan saja. Dalam paradigma keberlanjutan, perusahaan dipandang sebagai entitas yang memiliki keterkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, informasi akuntansi harus mampu menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan nilai, menggunakan sumber daya, mengelola risiko, serta mempertanggungjawabkan dampaknya.

1. Perubahan Paradigma dari Akuntansi Konvensional menuju Akuntansi Berkelanjutan

Akuntansi konvensional berfokus pada transaksi keuangan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Pendekatan ini sangat penting untuk menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, laba, dan arus kas. Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan ketika harus menjelaskan dampak sosial dan lingkungan yang tidak selalu tercermin dalam angka keuangan. Sebagai contoh, pencemaran lingkungan, konflik sosial, penggunaan energi berlebihan, atau rendahnya keselamatan kerja dapat memengaruhi keberlanjutan perusahaan, tetapi tidak selalu langsung terlihat dalam laporan keuangan. Akuntansi keberlanjutan hadir untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan memperluas objek pengukuran dan pelaporan. Informasi nonkeuangan menjadi bagian penting dalam

menilai kualitas kinerja organisasi. Perubahan paradigma juga terlihat dari pergeseran orientasi jangka pendek menuju orientasi jangka panjang. Akuntansi konvensional sering digunakan untuk menilai kinerja tahunan, sedangkan akuntansi keberlanjutan memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis. Perusahaan yang mengabaikan risiko lingkungan dan sosial mungkin memperoleh laba dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menghadapi kerugian reputasi, sanksi hukum, penurunan kepercayaan publik, dan gangguan operasional di masa depan. Perbedaan antara paradigma akuntansi konvensional dan akuntansi keberlanjutan dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perubahan Paradigma dari Akuntansi Konvensional menuju Akuntansi Berkelanjutan

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Keberlanjutan
Fokus utama	Kinerja keuangan	Kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola
Orientasi waktu	Jangka pendek hingga menengah	Jangka panjang dan lintas generasi
Pengguna informasi	Terutama investor dan kreditor	Berbagai pemangku kepentingan
Jenis informasi	Dominan moneter	Moneter dan nonmoneter
Tujuan pelaporan	Pengambilan keputusan ekonomi	Akuntabilitas, transparansi, dan penciptaan nilai berkelanjutan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan tidak menggantikan akuntansi konvensional, tetapi memperluas cakupan dan tujuan pelaporan agar lebih relevan dengan kebutuhan bisnis modern.

2. Akuntansi sebagai Instrumen Transparansi dan Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi memiliki kekuatan untuk membuat sesuatu menjadi terlihat dan terukur. Dalam konteks keberlanjutan, akuntansi membantu mengungkap dampak yang sebelumnya tersembunyi atau tidak mendapat perhatian memadai. Dampak lingkungan dan sosial yang tidak dilaporkan dapat menyebabkan perusahaan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan berfungsi sebagai instrumen

transparansi. Transparansi berarti keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan seimbang. Informasi keberlanjutan harus mencakup capaian positif sekaligus tantangan yang dihadapi. Transparansi tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga membantu pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap komitmen perusahaan (Darajat & Saputra, 2026).

Selain transparansi, akuntansi keberlanjutan juga berperan dalam pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban sosial berarti perusahaan bersedia menjelaskan dampak aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, laporan keberlanjutan menjadi media untuk menunjukkan komitmen, kebijakan, indikator kinerja, serta hasil yang telah dicapai. Namun, pertanggungjawaban sosial tidak berhenti pada penyajian laporan. Pertanggungjawaban menuntut adanya tindakan nyata, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan dapat memperkuat tata kelola perusahaan. Informasi keberlanjutan yang disusun dengan baik dapat digunakan oleh manajemen untuk menetapkan strategi, oleh dewan pengawas untuk melakukan evaluasi, oleh investor untuk menilai risiko, dan oleh masyarakat untuk menilai kontribusi perusahaan.

E. PRINSIP DASAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Pelaporan keberlanjutan membutuhkan prinsip dasar agar informasi yang disajikan memiliki kualitas, relevansi, dan kredibilitas. Tanpa prinsip yang jelas, laporan keberlanjutan berpotensi menjadi dokumen yang bersifat umum, tidak terukur, dan sulit dibandingkan. Oleh karena itu, prinsip pelaporan menjadi fondasi dalam penyusunan informasi keberlanjutan yang dapat dipercaya. Prinsip pelaporan keberlanjutan tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis penyajian data, tetapi juga mencerminkan nilai etis dalam komunikasi korporasi. Laporan keberlanjutan harus mampu memberikan gambaran yang wajar mengenai dampak, risiko, kebijakan, dan kinerja organisasi.

1. Prinsip Materialitas, Keterbandingan, dan Keandalan Informasi

Materialitas merupakan prinsip penting dalam pelaporan keberlanjutan. Suatu informasi dianggap material apabila dapat memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Dalam konteks keberlanjutan, materialitas tidak hanya berkaitan dengan dampak keuangan terhadap perusahaan, tetapi juga

dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu, isu seperti emisi karbon, keselamatan kerja, penggunaan air, hak tenaga kerja, atau integritas tata kelola dapat menjadi material meskipun tidak selalu langsung tercermin dalam laporan keuangan. Keterbandingan juga menjadi prinsip penting. Informasi keberlanjutan harus disajikan secara konsisten agar dapat dibandingkan antarperiode dan antarlembaga. Keterbandingan membantu pengguna laporan menilai kemajuan, tren, serta posisi relatif perusahaan. Tanpa keterbandingan, laporan keberlanjutan sulit digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja. Keandalan informasi berkaitan dengan kualitas data yang disajikan. Informasi harus didukung oleh metode pengukuran yang jelas, sumber data yang dapat ditelusuri, serta proses verifikasi yang memadai. Keandalan menjadi penting karena laporan keberlanjutan sering kali mencakup informasi nonkeuangan yang pengukurannya lebih kompleks dibandingkan transaksi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem pengumpulan data yang kuat agar informasi keberlanjutan tidak bersifat perkiraan semata.

2. Prinsip Transparansi, Inklusivitas, dan Orientasi Jangka Panjang

Transparansi menuntut perusahaan untuk menyajikan informasi secara terbuka, seimbang, dan tidak menyesatkan. Laporan keberlanjutan harus menjelaskan capaian, kendala, risiko, dan rencana perbaikan. Informasi yang hanya menonjolkan keberhasilan tanpa mengungkapkan tantangan dapat mengurangi kredibilitas laporan. Inklusivitas berkaitan dengan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan. Perusahaan perlu memahami kebutuhan informasi dari berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas organisasi. Melalui pendekatan inklusif, laporan keberlanjutan dapat lebih relevan dan mencerminkan isu yang benar-benar penting. Inklusivitas juga menunjukkan bahwa perusahaan menghargai suara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Orientasi jangka panjang menjadi prinsip utama karena keberlanjutan tidak dapat diukur hanya dari kinerja sesaat. Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana strategi, kebijakan, dan investasi diarahkan untuk menjaga ketahanan organisasi di masa depan. Orientasi jangka panjang juga mencakup perhatian terhadap risiko iklim, perubahan regulasi, perubahan preferensi konsumen, inovasi teknologi, serta daya dukung lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaporan keberlanjutan dapat menjadi sarana komunikasi yang

bermakna. Laporan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat manajemen strategis dan akuntabilitas publik.

F. PERAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Akuntansi keberlanjutan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi keberlanjutan berkontribusi dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai, mengarahkan, dan mengendalikan dampak organisasi terhadap tujuan pembangunan. Perusahaan sebagai aktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Aktivitas produksi, konsumsi energi, pengelolaan tenaga kerja, rantai pasok, inovasi produk, dan investasi sosial dapat memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap agenda keberlanjutan. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan menjadi alat penting untuk menghubungkan strategi perusahaan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas (Yusuf, 2025).

1. Kontribusi Akuntansi terhadap Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda pembangunan global yang mencakup berbagai tujuan, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, serta perlindungan ekosistem. Akuntansi keberlanjutan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kontribusi terhadap tujuan-tujuan tersebut. Kontribusi akuntansi terhadap SDGs dapat dilakukan melalui pengukuran indikator yang relevan. Misalnya, perusahaan dapat melaporkan konsumsi energi dan emisi untuk mendukung tujuan penanganan perubahan iklim. Perusahaan juga dapat melaporkan praktik ketenagakerjaan, pelatihan, keselamatan kerja, dan kesetaraan kesempatan untuk mendukung tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, informasi mengenai pengelolaan limbah, efisiensi sumber daya, dan rantai pasok bertanggung jawab dapat mendukung tujuan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Akuntansi keberlanjutan membantu menerjemahkan SDGs yang

bersifat makro menjadi indikator organisasi yang lebih operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat menilai sejauh mana aktivitas bisnisnya sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Informasi tersebut juga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai keseriusan perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Namun, kontribusi terhadap SDGs harus dilaporkan secara hati-hati. Perusahaan tidak cukup hanya mencantumkan ikon atau tujuan SDGs dalam laporan. Perusahaan perlu menjelaskan hubungan antara program, indikator, target, dan capaian yang relevan. Dengan demikian, pelaporan SDGs tidak bersifat simbolik, tetapi memiliki dasar pengukuran yang dapat dievaluasi.

2. Akuntansi Keberlanjutan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan

Akuntansi keberlanjutan memiliki nilai strategis karena menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Informasi mengenai energi, emisi, limbah, tenaga kerja, risiko sosial, dan tata kelola dapat membantu perusahaan merancang strategi yang lebih adaptif dan bertanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan investasi, akuntansi keberlanjutan dapat digunakan untuk menilai risiko dan peluang jangka panjang. Investasi pada teknologi hemat energi, sistem produksi bersih, pelatihan tenaga kerja, atau penguatan tata kelola mungkin memerlukan biaya awal yang besar, tetapi dapat menghasilkan manfaat jangka panjang berupa efisiensi, reputasi, kepatuhan, dan ketahanan bisnis. Dalam pengelolaan risiko, akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan mengidentifikasi faktor yang dapat mengganggu keberlanjutan operasi. Risiko iklim, kelangkaan sumber daya, konflik sosial, pelanggaran etika, dan perubahan regulasi dapat memengaruhi kinerja perusahaan (Sinaga et al., 2025).

Dengan informasi yang memadai, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan dan menyusun strategi mitigasi. Dalam penciptaan nilai, akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan memahami bahwa nilai tidak hanya berasal dari aset keuangan dan fisik, tetapi juga dari modal manusia, modal sosial, modal alam, modal intelektual, dan modal reputasi. Perusahaan yang mampu mengelola berbagai bentuk modal tersebut secara seimbang memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan nilai berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan menjadi bagian dari sistem manajemen strategis. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan, menetapkan

target, mengukur kinerja, mengevaluasi capaian, dan meningkatkan akuntabilitas organisasi. Peran ini menegaskan bahwa akuntansi keberlanjutan bukan sekadar praktik pelaporan, melainkan fondasi penting bagi transformasi bisnis menuju keberlanjutan.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Darajat, M. N., & Saputra, F. A. (2026). Menjembatani konsep akuntansi pembangunan berkelanjutan berbasis digitalisasi: Perspektif konsep pada entitas bisnis. *Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 6(2), 126–141.
- Puspa, E. S., Amyulianthy, R., Saprudin, S., Apip, M., Nur, T. F., Adhi, D. K.,... & Surifah, S. (2026). *Akuntansi keuangan berkelanjutan: Dasar pengelolaan dan pengambilan keputusan manajemen keuangan*. CV Eureka Media Aksara.
- Sinaga, J., Simanjuntak, H., Saribu, A. D., Manullang, A., Siregar, R. R. M., Siahaan, P. R., & Sianturi, T. M. (2025). Peran akuntansi manajemen lingkungan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1350–1359.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118.
- Werastuti, D. N. S. (2026). *Akuntansi keberlanjutan; akuntansi hijau; governance: Strategi keberlanjutan bisnis*. AMU Press.
- Yusuf, M. F. M. (2025). Akuntansi keberlanjutan: Peran akuntan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko fisik iklim: Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 6(1), 38–67.

■ TENTANG PENULIS



L.M. Hasriadi, S.S.T., M.Tr.E.
Universitas Mulawarman

Penulis lahir di Ujung Pandang, 4 Juli 1992. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana Sains Terapan di Politeknik Negeri Samarinda dengan Program Studi D4 Akuntansi Manajerial, lulus tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Magister tahun 2019 di Politeknik Negeri Bandung Program Studi Magister Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah, lulus tahun 2021. Penulis sejak tahun 2022 aktif menjadi Dosen, Buku ini merupakan buku Ketiga yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Bab 04



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERAN AKUNTANSI

Ardyan Firdausi Mustoffa, S.E., M.Si.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting dalam tata kelola pembangunan modern yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan global, seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan sosial, kemiskinan, perubahan iklim, dan krisis tata kelola. Pembangunan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai peningkatan output ekonomi, melainkan harus dilihat sebagai proses transformasi yang menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Dalam konteks dunia usaha, pembangunan berkelanjutan menuntut perusahaan untuk memperluas orientasi bisnis. Perusahaan tidak cukup hanya mengukur keberhasilan melalui laba, pertumbuhan aset, dan peningkatan nilai pemegang saham. Perusahaan juga perlu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari seluruh aktivitas operasionalnya. Pada titik inilah akuntansi memiliki peran strategis karena akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Akuntansi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai sistem

pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menilai apakah aktivitas perusahaan telah mendukung efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, kesejahteraan tenaga kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta penciptaan nilai jangka panjang.

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai proses pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian ini mengandung makna bahwa pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologis. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif akademik, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep multidimensi. Pembangunan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, kelembagaan, dan etika. Pembangunan disebut berkelanjutan apabila proses penciptaan nilai ekonomi berlangsung selaras dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta perlindungan terhadap daya dukung lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga menekankan pentingnya tanggung jawab lintas waktu. Keputusan ekonomi yang diambil pada masa kini memiliki konsekuensi bagi masa depan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, dan ketimpangan sosial dapat menghasilkan beban bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya kebijakan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Bagi perusahaan, pembangunan berkelanjutan berarti menjalankan kegiatan bisnis dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Perusahaan diharapkan mampu menciptakan keuntungan tanpa mengabaikan keselamatan kerja, hak masyarakat, efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pengelolaan risiko lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penting bagi transformasi bisnis menuju model usaha yang lebih bertanggung jawab (Suparmoko, 2020).

2. Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini sering dipahami sebagai pilar utama keberlanjutan karena saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Kinerja ekonomi yang baik tidak akan berkelanjutan apabila dicapai melalui kerusakan lingkungan atau ketidakadilan sosial. Sebaliknya, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat agar dapat terus dijalankan. Dimensi ekonomi berkaitan dengan kemampuan suatu sistem untuk menciptakan nilai, meningkatkan produktivitas, menyediakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks perusahaan, dimensi ekonomi terlihat dari kemampuan menghasilkan laba, meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menjaga kesinambungan usaha. Namun, keberlanjutan ekonomi tidak hanya berarti memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui proses yang bertanggung jawab.

Dimensi sosial berkaitan dengan kualitas kehidupan manusia, keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak, dan hubungan sosial yang harmonis. Dalam dunia usaha, dimensi sosial mencakup perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan kompetensi karyawan, kesetaraan kesempatan, kepedulian terhadap masyarakat sekitar, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dimensi sosial menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkena dampak dari aktivitas operasionalnya. Dimensi lingkungan berkaitan dengan perlindungan ekosistem, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan pencemaran, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Perusahaan yang menjalankan pembangunan berkelanjutan perlu memperhatikan bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi berdampak terhadap lingkungan. Pengabaian terhadap dimensi lingkungan dapat menimbulkan risiko hukum, reputasi, operasional, dan finansial. Hubungan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dimensi	Fokus Utama	Contoh Implikasi bagi Perusahaan
Ekonomi	Pertumbuhan, efisiensi, produktivitas, kesinambungan usaha	Laba berkelanjutan, inovasi, efisiensi biaya, investasi jangka panjang
Sosial	Keadilan, kesejahteraan, hak, dan kualitas hidup	Keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, pemberdayaan masyarakat
Lingkungan	Kelestarian sumber daya dan perlindungan ekosistem	Pengurangan emisi, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi air

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari integrasi berbagai aspek dalam proses bisnis. Perusahaan yang hanya menekankan dimensi ekonomi berpotensi mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Sebaliknya, perusahaan yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dapat membangun ketahanan usaha dan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat.

B. PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya merupakan konsep, tetapi juga seperangkat prinsip yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar pembangunan tidak terjebak pada orientasi jangka pendek dan tidak mengabaikan dampak terhadap masyarakat serta lingkungan. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar untuk menentukan informasi apa yang perlu diukur, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus memperhatikan keadilan, keseimbangan, partisipasi, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dua prinsip yang sangat penting dalam pembahasan ini adalah keadilan antargenerasi dan intragenerasi, serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

1. Prinsip Keadilan Antargenerasi dan Intragenerasi

Keadilan antargenerasi merupakan prinsip yang menekankan bahwa generasi masa kini memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sumber daya dan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Prinsip ini menolak pola pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak boleh hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi harus tetap mempertahankan daya dukung kehidupan pada masa depan. Dalam praktik perusahaan, keadilan antargenerasi dapat diwujudkan melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, investasi pada teknologi bersih, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Perusahaan yang mengabaikan prinsip ini dapat menciptakan beban ekologis yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya, seperti pencemaran, kerusakan lahan, krisis air, dan perubahan iklim (Lamberton, 2005).

Keadilan intragenerasi berkaitan dengan keadilan di antara kelompok masyarakat dalam generasi yang sama. Prinsip ini menekankan bahwa manfaat pembangunan harus didistribusikan secara adil dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dalam dunia usaha, prinsip ini relevan dengan isu upah layak, keselamatan kerja, akses masyarakat terhadap manfaat ekonomi, perlindungan masyarakat lokal, serta tanggung jawab terhadap rantai pasok. Akuntansi berperan penting dalam mendukung keadilan antargenerasi dan intragenerasi melalui penyediaan informasi yang transparan. Informasi tentang dampak lingkungan, distribusi nilai ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, dan kontribusi sosial dapat membantu pemangku kepentingan menilai apakah perusahaan telah menjalankan prinsip keadilan secara memadai.

2. Prinsip Keseimbangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan penting dalam pembangunan karena berkaitan dengan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan biaya besar dalam jangka panjang. Kerusakan lingkungan, pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim dapat mengancam stabilitas ekonomi itu sendiri. Prinsip keseimbangan menuntut agar pertumbuhan ekonomi dicapai melalui cara yang tidak merusak fondasi ekologis. Dalam

konteks perusahaan, prinsip ini berarti bahwa kegiatan produksi harus diarahkan pada efisiensi sumber daya, inovasi ramah lingkungan, pengurangan limbah, serta pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan. Perusahaan perlu memahami bahwa lingkungan bukan sekadar sumber input produksi, tetapi juga sistem pendukung kehidupan yang memiliki batas daya dukung.

Akuntansi keberlanjutan membantu mewujudkan prinsip keseimbangan tersebut melalui pengukuran dan pelaporan kinerja lingkungan. Informasi mengenai konsumsi energi, emisi karbon, penggunaan air, limbah, dan biaya lingkungan dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya informasi yang terukur, perusahaan dapat menilai apakah pertumbuhan yang dicapai masih berada dalam batas keberlanjutan.

Prinsip keseimbangan juga mendorong perusahaan untuk menginternalisasi biaya lingkungan. Biaya yang sebelumnya dianggap sebagai beban eksternal masyarakat, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlu diperhitungkan dalam sistem pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi dapat membantu perusahaan melihat konsekuensi ekonomi dari dampak lingkungan dan mendorong perubahan menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan (Zulkarnaen et al., 2016).

C. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ATAU SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda pembangunan global yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan besar dunia. SDGs memberikan kerangka tujuan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, SDGs menjadi acuan penting karena membantu perusahaan menghubungkan aktivitas bisnis dengan agenda pembangunan yang lebih luas. SDGs juga mempertegas bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan tersebut melalui investasi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan, tata kelola yang baik, dan kemitraan sosial. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami relevansi SDGs dalam strategi dan pelaporan keberlanjutan.

1. Konsep dan Ruang Lingkup Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals merupakan seperangkat tujuan pembangunan global yang mencakup berbagai isu

mendasar, seperti pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, pengurangan ketimpangan, kota berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, serta kemitraan. Ruang lingkup SDGs menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki cakupan yang luas dan saling terkait. Misalnya, pengurangan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, perlindungan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pola konsumsi, produksi, energi, dan tata kelola. Keterkaitan ini menegaskan bahwa pendekatan pembangunan harus bersifat integratif.

Bagi perusahaan, SDGs dapat menjadi panduan untuk mengidentifikasi isu keberlanjutan yang relevan dengan kegiatan usaha. Perusahaan di sektor manufaktur, misalnya, dapat mengaitkan aktivitasnya dengan efisiensi energi, pengurangan limbah, keselamatan kerja, dan produksi bertanggung jawab. Perusahaan di sektor pertanian dapat menghubungkan kegiatan bisnis dengan ketahanan pangan, penggunaan air, perlindungan tanah, dan kesejahteraan petani. Dengan demikian, SDGs membantu perusahaan memahami kontribusi dan dampak bisnis secara lebih sistematis. Dalam pelaporan keberlanjutan, SDGs dapat digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan hubungan antara strategi perusahaan dan tujuan pembangunan global. Namun, penggunaan SDGs harus dilakukan secara substantif. Perusahaan perlu menunjukkan indikator, target, kebijakan, dan capaian yang relevan, bukan sekadar mencantumkan simbol atau pernyataan umum (Idrus & Usi, 2024).

2. Relevansi Sustainable Development Goals bagi Dunia Usaha

SDGs memiliki relevansi yang kuat bagi dunia usaha karena perusahaan merupakan aktor penting dalam sistem ekonomi dan sosial. Perusahaan memiliki kapasitas untuk menciptakan inovasi, menyediakan pekerjaan, mengembangkan teknologi, mengelola rantai pasok, serta memengaruhi pola produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, kontribusi dunia usaha menjadi bagian penting dari pencapaian pembangunan berkelanjutan. Relevansi SDGs bagi perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, SDGs membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang. Isu seperti perubahan iklim, kelangkaan air, ketimpangan sosial, dan perubahan regulasi dapat menjadi risiko bisnis. Namun, isu

tersebut juga dapat menjadi peluang untuk mengembangkan produk ramah lingkungan, teknologi bersih, model bisnis inklusif, dan inovasi sosial.

Kedua, SDGs dapat memperkuat legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan dapat memperoleh kepercayaan dari investor, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. *Ketiga*, SDGs dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Perusahaan dapat menggunakan SDGs untuk merumuskan prioritas keberlanjutan, menetapkan target kinerja, mengukur dampak, dan melaporkan capaian. Dengan demikian, SDGs tidak hanya menjadi agenda eksternal, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen internal. *Keempat*, SDGs mendorong kolaborasi. Banyak persoalan keberlanjutan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi secara sendiri. Perusahaan perlu bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat efektivitas program keberlanjutan dan memperluas dampak positif perusahaan.

D. PERAN AKUNTANSI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Akuntansi memiliki peran fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk menilai dan mengelola dampak organisasi. Tanpa informasi yang memadai, pembangunan berkelanjutan sulit diwujudkan dalam praktik perusahaan. Keputusan manajemen membutuhkan data yang relevan, terukur, andal, dan dapat dibandingkan. Peran akuntansi tidak terbatas pada pencatatan transaksi keuangan. Dalam kerangka keberlanjutan, akuntansi juga berperan dalam mengidentifikasi biaya lingkungan, mengukur dampak sosial, menilai risiko keberlanjutan, melaporkan kontribusi perusahaan, dan memperkuat akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, akuntansi menjadi bagian penting dari tata kelola pembangunan berkelanjutan.

1. Akuntansi sebagai Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan Berkelanjutan

Akuntansi sebagai sistem informasi berfungsi menyediakan data yang mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan

evaluasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, informasi yang dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, biaya, laba, dan aset, tetapi juga dengan konsumsi energi, penggunaan air, emisi, limbah, keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, dan dampak sosial. Informasi tersebut dapat membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih berkelanjutan. Contohnya, data konsumsi energi dapat digunakan untuk menilai efisiensi operasional dan menentukan investasi pada teknologi hemat energi. Data limbah dapat digunakan untuk merancang sistem produksi yang lebih bersih. Data keselamatan kerja dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur operasional dan menurunkan risiko kecelakaan (Rusnawati, 2026).

Akuntansi juga membantu perusahaan mengidentifikasi biaya tersembunyi yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial. Biaya pencemaran, sanksi regulasi, konflik masyarakat, penurunan reputasi, dan gangguan rantai pasok dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang signifikan. Dengan memasukkan aspek keberlanjutan ke dalam sistem informasi akuntansi, perusahaan dapat memahami hubungan antara keputusan bisnis dan risiko jangka panjang. Pengambilan keputusan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang tidak hanya menghitung manfaat ekonomi langsung, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan perlu mendukung analisis biaya manfaat yang lebih luas, termasuk manfaat sosial dan lingkungan. Dengan demikian, keputusan bisnis dapat diarahkan pada penciptaan nilai yang berkelanjutan.

2. Akuntansi sebagai Instrumen Akuntabilitas Sosial dan Lingkungan

Akuntansi berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas karena menyediakan informasi yang memungkinkan perusahaan mempertanggungjawabkan tindakan dan dampaknya. Dalam pembangunan berkelanjutan, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan yang terkena dampak aktivitas perusahaan. Akuntabilitas sosial berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menjelaskan dampak kegiatannya terhadap tenaga kerja, konsumen, masyarakat, dan rantai pasok. Informasi mengenai keselamatan kerja, pelatihan karyawan, kesetaraan kesempatan, kontribusi sosial, serta perlindungan hak masyarakat menjadi bagian penting dari akuntabilitas sosial.

Akuntabilitas lingkungan berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan dampak terhadap lingkungan. Informasi mengenai emisi, penggunaan energi, air, limbah, bahan baku, dan kebijakan lingkungan perlu disampaikan secara transparan. Dengan adanya informasi tersebut, pemangku kepentingan dapat menilai apakah perusahaan telah mengelola dampak ekologis secara bertanggung jawab. Akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas juga berperan dalam mencegah praktik pelaporan yang bersifat simbolik. Laporan keberlanjutan harus didukung oleh data, indikator, target, dan capaian yang jelas. Informasi yang tidak terukur dapat menurunkan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi perlu memastikan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan disusun berdasarkan prinsip keandalan, transparansi, dan keterbandingan.

E. PELAPORAN KEBERLANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pelaporan keberlanjutan merupakan salah satu bentuk nyata dari peran akuntansi dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan menyampaikan informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Laporan ini menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan mengenai komitmen, kebijakan, risiko, serta capaian keberlanjutan. Dalam praktik modern, pelaporan keberlanjutan semakin memperoleh perhatian karena pengguna laporan membutuhkan informasi yang lebih luas dibandingkan laporan keuangan. Investor, regulator, masyarakat, dan konsumen ingin mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dampak dan risiko keberlanjutan. Oleh sebab itu, pelaporan keberlanjutan menjadi bagian penting dari transparansi korporasi.

1. Pelaporan Kinerja Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Perusahaan

Pelaporan kinerja ekonomi dalam keberlanjutan mencakup informasi mengenai nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, investasi, kontribusi pajak, pengadaan lokal, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat. Informasi ekonomi tidak hanya menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba, tetapi juga bagaimana nilai ekonomi tersebut memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Pelaporan kinerja sosial mencakup aspek ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, keberagaman, hak asasi manusia, kepuasan pelanggan,

serta hubungan dengan masyarakat. Informasi ini penting untuk menilai apakah perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial (Yusuf, 2025).

Pelaporan kinerja lingkungan mencakup penggunaan energi, emisi, air, limbah, bahan baku, keanekaragaman hayati, dan kebijakan pengelolaan lingkungan. Informasi lingkungan membantu pemangku kepentingan menilai sejauh mana perusahaan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, informasi ini juga berguna bagi manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dan risiko lingkungan. Ketiga aspek tersebut perlu disajikan secara seimbang. Laporan yang hanya menampilkan keberhasilan tanpa menjelaskan tantangan dapat menimbulkan kesan tidak objektif. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan harus memberikan gambaran yang wajar mengenai kondisi perusahaan, baik capaian positif maupun permasalahan yang masih perlu diperbaiki.

2. Transparansi dan Keterbandingan Informasi Keberlanjutan

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pelaporan keberlanjutan. Perusahaan perlu menyampaikan informasi yang jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan. Transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, tetapi menyajikan informasi material yang relevan bagi pemangku kepentingan. Informasi material adalah informasi yang dapat memengaruhi penilaian terhadap kinerja, risiko, dan dampak perusahaan. Keterbandingan juga sangat penting dalam pelaporan keberlanjutan. Informasi yang disajikan perlu menggunakan metode, indikator, dan periode pelaporan yang konsisten agar dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Keterbandingan memungkinkan pengguna laporan menilai perkembangan kinerja perusahaan. Selain itu, keterbandingan juga membantu membandingkan kinerja antarperusahaan dalam sektor yang sama.

Untuk mencapai transparansi dan keterbandingan, perusahaan perlu membangun sistem pengumpulan data yang baik. Data keberlanjutan sering kali berasal dari berbagai unit organisasi, seperti produksi, sumber daya manusia, keuangan, pengadaan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Jika tidak dikelola secara sistematis, data tersebut dapat menjadi tidak konsisten dan sulit diverifikasi. Transparansi dan keterbandingan juga berkaitan dengan kepercayaan. Laporan keberlanjutan yang disusun secara terukur dan konsisten dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sebaliknya, laporan yang bersifat umum,

tidak memiliki indikator yang jelas, atau hanya menonjolkan citra positif dapat menimbulkan keraguan dari pemangku kepentingan (Sukaharsono & Andayani, 2021).

F. INTEGRASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM STRATEGI AKUNTANSI PERUSAHAAN

Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam strategi akuntansi perusahaan merupakan tahap penting agar keberlanjutan tidak hanya menjadi slogan atau program tambahan. Keberlanjutan perlu masuk ke dalam sistem perencanaan, pengendalian, pengukuran kinerja, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Dengan demikian, akuntansi menjadi bagian dari proses transformasi bisnis menuju model usaha yang lebih bertanggung jawab. Integrasi ini menuntut perubahan cara pandang. Akuntansi tidak lagi dipahami sebagai alat administratif, tetapi sebagai sistem informasi strategis. Informasi akuntansi dapat membantu perusahaan memahami hubungan antara kinerja keuangan, dampak sosial, risiko lingkungan, dan penciptaan nilai jangka panjang.

1. Pengukuran Dampak Keberlanjutan dalam Perencanaan dan Pengendalian Manajemen

Pengukuran dampak keberlanjutan merupakan langkah penting dalam perencanaan dan pengendalian manajemen. Perusahaan perlu menetapkan indikator keberlanjutan yang sesuai dengan karakteristik bisnis, risiko utama, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Indikator tersebut dapat mencakup konsumsi energi, intensitas emisi, penggunaan air, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan karyawan, kepuasan masyarakat, serta kontribusi ekonomi lokal. Dalam tahap perencanaan, informasi keberlanjutan digunakan untuk menetapkan target dan program kerja. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan target pengurangan emisi, efisiensi energi, peningkatan keselamatan kerja, atau pengurangan limbah. Target tersebut perlu dikaitkan dengan strategi bisnis agar pelaksanaannya tidak terpisah dari kegiatan utama perusahaan.

Dalam tahap pengendalian, akuntansi membantu memantau pelaksanaan program keberlanjutan. Data aktual dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan, manajemen dapat melakukan evaluasi dan perbaikan. Proses ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dikelola secara sistematis melalui mekanisme akuntansi manajemen. Pengukuran dampak keberlanjutan juga penting untuk menilai efektivitas biaya. Program keberlanjutan sering kali

membutuhkan investasi, seperti teknologi ramah lingkungan, pelatihan, pengolahan limbah, atau sertifikasi. Akuntansi dapat membantu menilai manfaat finansial dan nonfinansial dari investasi tersebut. Dengan demikian, keberlanjutan dapat dipahami sebagai bagian dari penciptaan nilai, bukan sekadar beban biaya (Werastuti, 2026).

2. Akuntansi sebagai Dasar Strategi Bisnis Berkelanjutan

Akuntansi dapat menjadi dasar strategi bisnis berkelanjutan karena menyediakan informasi yang diperlukan untuk memahami risiko, peluang, dan dampak jangka panjang. Strategi bisnis berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan laba, tetapi juga pada ketahanan usaha, kepatuhan regulasi, reputasi, inovasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Informasi akuntansi keberlanjutan dapat membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih adaptif. Contohnya, peningkatan biaya energi dapat mendorong perusahaan mengembangkan strategi efisiensi. Risiko perubahan iklim dapat mendorong perusahaan menyesuaikan rantai pasok. Tuntutan konsumen terhadap produk ramah lingkungan dapat mendorong inovasi produk dan proses produksi. Dengan demikian, informasi keberlanjutan menjadi dasar bagi keputusan strategis (Bebbington et al., 2014).

Akuntansi juga membantu perusahaan menghubungkan strategi keberlanjutan dengan kinerja keuangan. Efisiensi energi dapat menurunkan biaya operasional. Pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi risiko sanksi. Keselamatan kerja yang baik dapat menurunkan biaya kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Tata kelola yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hubungan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kinerja ekonomi tidak harus dipertentangkan. Dalam jangka panjang, perusahaan yang mengintegrasikan akuntansi keberlanjutan ke dalam strategi bisnis memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan nilai yang stabil. Nilai tersebut tidak hanya tercermin dalam keuntungan finansial, tetapi juga dalam reputasi, legitimasi sosial, loyalitas konsumen, keterlibatan karyawan, dan daya tahan menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, akuntansi berperan sebagai fondasi informasi bagi strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (Eds.). (2014). *Sustainability accounting and accountability*. Routledge.
- Idrus, M. R. H., & Usi, U. A. N. (2024). Realisasi penanganan perubahan iklim di Indonesia melalui implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs): Tujuan-13.1.3. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(1), 77–100.
- Lamberton, G. (2005). Sustainability accounting – A brief history and conceptual framework. In *Accounting Forum* (Vol. 29, No. 1, pp. 7–26). Taylor & Francis.
- Rusnawati, M. (2026). Peran sistem informasi akuntansi dalam integrasi akuntansi lingkungan dan CSR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. *Journal of Economic Studies*, 1(4).
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Werastuti, D. N. S. (2026). *Akuntansi keberlanjutan; akuntansi hijau; governance: Strategi keberlanjutan bisnis*. AMU Press.
- Yusuf, M. F. M. (2025). Akuntansi keberlanjutan: Peran akuntan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko fisik iklim: Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 6(1), 38–67.
- Zulkarnaen, E., Harakan, A., & Hawing, H. (2016). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam implementasi pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1), 46–59.

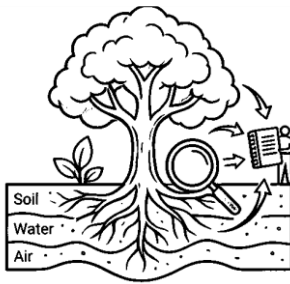
■ TENTANG PENULIS



Ardyan Firdausi Mustoffa, S.E., M.Si.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penulis lahir di Wonogiri pada tanggal 04 Desember 1982. Menamatkan Sarjana Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan menamatkan Pasca Sarjana Program Studi Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini aktif sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selain sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi, ia juga aktif menulis artikel di jurnal. Penelitian yang didanai DIKTI dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo pernah diperolehnya. Buku yang telah ditulis adalah Akuntansi Keuangan Menengah (2018), Pengantar Pasar Modal (2019), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2020), Teori Akuntansi Buku 1 (2020), Teori Akuntansi Buku II (2021), Laboratorium Pengantar Akuntansi 1 (2021), Buku Praktik Akuntansi Pengantar II, SERI-A (2022), Aplikasi Komputer Akuntansi (2025).

Bab 05



ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CONCEPT

Dr. Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno, S.A.
Universitas Telkom

A. PENDAHULUAN

Environmental accounting merupakan cabang dalam ilmu akuntansi yang berkembang sebagai respons atas keterbatasan sistem akuntansi konvensional dalam menangkap dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Sebagaimana ditegaskan oleh Bebbington et al. (2021), akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konteks lingkungan karena sistem ekonomi yang beroperasi di dalamnya sering kali menghasilkan konsekuensi yang berpotensi merusak sistem ekologi yang menopang kehidupan. Dalam kerangka ini, *environmental accounting* berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi mengenai interaksi antara organisasi dan lingkungan alam, sehingga lingkungan tidak lagi diposisikan sebagai faktor eksternal, melainkan sebagai bagian integral dari sistem akuntansi. Pada tataran konseptual, *environmental accounting* memperluas fungsi akuntansi dari sekadar pencatatan transaksi keuangan menjadi alat yang mampu merepresentasikan penggunaan sumber daya alam serta konsekuensi ekologis dari aktivitas organisasi. Akuntansi memiliki peran penting dalam memberikan visibilitas terhadap dampak lingkungan, baik yang berada dalam kendali organisasi maupun yang berada di luar kendali langsung organisasi, seperti eksternalitas.

Dengan demikian, *environmental accounting* mencakup tidak hanya pengukuran biaya lingkungan secara eksplisit, tetapi juga berupaya mengungkap dampak yang selama ini tidak terlihat dalam sistem akuntansi tradisional. Lebih lanjut, *environmental accounting* berangkat dari asumsi bahwa aktivitas ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan sistem ekologi yang kompleks dan dinamis. Sistem ekonomi yang beroperasi dalam kerangka sosial dan budaya tertentu dapat menimbulkan tekanan pada lingkungan, seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks ini, *environmental accounting* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjembatani kesenjangan antara informasi ekonomi dan realitas ekologis, sehingga hubungan tersebut dapat dipahami secara lebih sistematis dan transparan. Perkembangan *environmental accounting* tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan mendasar yang melekat pada sistem akuntansi konvensional. Secara tradisional, akuntansi dirancang untuk mencatat transaksi yang memiliki implikasi finansial langsung bagi entitas, sehingga berbagai dampak lingkungan yang tidak memiliki nilai moneter yang jelas cenderung diabaikan. Hal ini menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi parsial dan tidak mampu merepresentasikan keseluruhan konsekuensi dari aktivitas organisasi terhadap lingkungan. Salah satu permasalahan utama yang direspons oleh *environmental accounting* adalah tidak terinternalisasinya biaya lingkungan dalam sistem akuntansi. Banyak aktivitas ekonomi menghasilkan dampak negatif, seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran air, dan degradasi ekosistem, tetapi biaya dari kerusakan tersebut tidak tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini menciptakan externalities, di mana biaya lingkungan dialihkan kepada masyarakat atau generasi mendatang.

Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem akuntansi dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak aktivitas ekonomi. Selain itu, akuntansi konvensional juga memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi dan mengukur penggunaan sumber daya alam secara memadai. Sumber daya seperti air, energi, dan bahan baku sering kali diperlakukan hanya sebagai input produksi tanpa mempertimbangkan aspek kelangkaan dan keberlanjutannya. Di sisi lain, banyak dampak lingkungan bersifat jangka panjang dan kumulatif, sementara akuntansi cenderung berorientasi pada periode pelaporan jangka pendek. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Dalam konteks inilah *environmental accounting* hadir sebagai respons konseptual untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Dengan memperluas cakupan

akuntansi untuk mencakup aspek lingkungan, pendekatan ini berupaya menghadirkan sistem informasi yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan.

B. DEFINISI DAN PERKEMBANGAN DARI ENVIRONMENTAL ACCOUNTING

Environmental accounting berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran bahwa sistem ekonomi modern tidak dapat dipisahkan dari sistem ekologis yang menopang kehidupan. Literatur menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang beroperasi dalam kerangka sosial dan institusional tertentu sering kali menimbulkan tekanan pada lingkungan, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap siklus alam (Bebbington et al., 2021; Nyström et al., 2019; Rockström et al., 2009). Dalam konteks ini, *environmental accounting* muncul sebagai upaya untuk memperluas peran akuntansi agar mampu menangkap konsekuensi ekologis dari aktivitas organisasi, sehingga informasi yang dihasilkan tidak hanya merefleksikan kinerja ekonomi, tetapi juga dampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Secara konseptual, *environmental accounting* dapat dipahami sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan interaksi antara organisasi dan lingkungan alam. Bebbington dan Thomson (2013) menekankan bahwa akuntansi berperan dalam memberikan visibilitas terhadap dampak lingkungan, baik yang berada dalam kendali organisasi maupun yang berada di luar kendali langsung organisasi. Dalam praktiknya, hal ini mencakup berbagai pendekatan, seperti pengendalian dampak melalui sistem manajemen, pengukuran penggunaan material dan energi (Qian et al., 2011), serta pengungkapan dampak eksternal yang sebelumnya tidak tercermin dalam laporan keuangan tradisional. Dengan demikian, *environmental accounting* tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami hubungan yang kompleks antara aktivitas ekonomi dan sistem ekologis.

Perkembangan *environmental accounting* juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan dimensi sosial. Pada tahap awal, kajian ini tidak terpisah dari akuntansi sosial, yang berkembang melalui konsep corporate social reporting yang berfokus pada dampak sosial dan ekonomi organisasi terhadap masyarakat (Gray et al., 1988). Namun, seiring meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan pada dekade 1980-an dan 1990-an, fokus kajian mulai bergeser dengan menempatkan lingkungan sebagai isu utama dalam akuntansi. Meskipun demikian, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa

dimensi sosial dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kerangka socio-ecological systems yang menekankan keterkaitan antara aktivitas manusia dan sistem Bumi secara keseluruhan (Lade et al., 2020). Selain dipengaruhi oleh perkembangan akademik, *environmental accounting* juga berkembang melalui kontribusi profesi akuntansi dan berbagai institusi pendukung. Sejak tahun 1970-an, gagasan mengenai hubungan antara akuntansi dan lingkungan telah muncul dalam praktik dan kebijakan, yang kemudian semakin berkembang setelah tahun 1990 dengan dukungan dari komunitas akademik dan profesional ("Committee on Measures of Effectiveness for Social Programs," 1972).

Organisasi profesi, seperti federasi akuntan dan lembaga internasional, turut berperan dalam menyebarluaskan praktik pelaporan lingkungan serta mendorong integrasi isu keberlanjutan ke dalam standar akuntansi. Peran ini menunjukkan bahwa perkembangan *environmental accounting* merupakan hasil interaksi antara penelitian, praktik, dan kebijakan. *Environmental accounting* terus mengalami perluasan baik dari sisi konsep maupun ruang lingkup analisis. Literatur menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang berfokus pada entitas bisnis menuju pemahaman yang lebih luas tentang sistem ekologis secara keseluruhan, termasuk gagasan tentang "accounting for the total environment" (Russell et al., 2017). Selain itu, isu seperti planetary boundaries dan Anthropocene semakin menegaskan pentingnya akuntansi dalam memahami dampak aktivitas manusia terhadap sistem bumi (Bebbington et al., 2021; Rockström et al., 2009). Dengan demikian, *environmental accounting* tidak hanya berkembang sebagai alat teknis pelaporan, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang berperan dalam membentuk cara pandang baru terhadap akuntabilitas organisasi dalam konteks keberlanjutan global.

C. ELEMEN DAN DIMENSI KONSEPTUAL *ENVIRONMENTAL ACCOUNTING*

Environmental accounting memiliki beberapa elemen dasar yang menjelaskan bagaimana akuntansi berhubungan dengan lingkungan. Terdapat tiga elemen utama, yaitu: bagaimana sistem menghasilkan dampak lingkungan, bagaimana tanggung jawab atas dampak tersebut ditetapkan, serta bagaimana aspek etika dan moral memengaruhi hubungan manusia dengan alam. Pendekatan ini melihat organisasi sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih luas, di mana aktivitasnya dapat berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, *environmental accounting* tidak hanya mencatat dampak tersebut, tetapi juga mencoba

memahami bagaimana dampak itu terjadi serta bagaimana dampak tersebut dapat dikendalikan atau diperbaiki. Selain itu, *environmental accounting* juga menekankan pentingnya informasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menggunakan perspektif sistem, jika organisasi menghasilkan externalities, informasi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan, baik melalui regulasi, tekanan publik, maupun keputusan konsumen.

Dalam hal ini, akuntansi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dimensi penting lainnya dalam *environmental accounting* adalah hubungan antara organisasi dan masyarakat. Gray et al. (1988) menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada publik mengenai dampak aktivitasnya. Hal ini didasarkan pada konsep akuntabilitas, di mana organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dengan demikian, *environmental accounting* berperan dalam mendukung transparansi dan memastikan bahwa aktivitas organisasi dapat dievaluasi dari perspektif sosial dan lingkungan. Di sisi lain, *environmental accounting* juga tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika. Literatur menunjukkan bahwa pemahaman tentang hubungan manusia dan alam dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan filosofi yang berbeda (Andrew, 2000; Cafaro, 2002).

Perspektif etika ini penting karena menentukan bagaimana dampak lingkungan dinilai dan bagaimana tanggung jawab organisasi didefinisikan. Misalnya, pendekatan berbasis utilitarian akan berbeda dengan pendekatan yang menekankan hak-hak alam atau keadilan antargenerasi. Oleh karena itu, *environmental accounting* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Secara keseluruhan, aspek penting dalam *environmental accounting* mencakup pemahaman sistem, akuntabilitas, transparansi informasi, dan dimensi etika. Seiring perkembangannya, bidang ini juga menghadapi berbagai kritik, baik dari sisi praktik maupun konsep, terutama terkait sejauh mana akuntansi mampu mendorong perubahan sosial dan lingkungan (Bebbington & Unerman, 2018; Gray, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa *environmental accounting* bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga bagian dari proses yang lebih luas untuk memahami dan merespons tantangan keberlanjutan.

D. RUANG LINGKUP *ENVIRONMENTAL ACCOUNTING* DAN PERAN AKUNTANSI DALAM KONTEKS LINGKUNGAN

Ruang lingkup *environmental accounting* berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa aktivitas organisasi tidak hanya menghasilkan output ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi ekologis yang luas. Dalam perspektif ini, *environmental accounting* tidak terbatas pada pengukuran biaya lingkungan semata, melainkan mencakup seluruh proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas organisasi. Bebbington and Thomson (2013) menekankan bahwa akuntansi memiliki peran dalam memberikan visibilitas terhadap berbagai dampak tersebut, baik yang berada dalam kendali organisasi maupun yang bersifat eksternal. Secara lebih luas, ruang lingkup *environmental accounting* mencakup berbagai area, seperti pengelolaan biaya lingkungan, penggunaan sumber daya alam, pengukuran emisi, serta pelaporan keberlanjutan. Burritt (2012) menunjukkan bahwa praktik seperti *material flow accounting* dan *energy accounting* menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana organisasi menggunakan sumber daya. Selain itu, pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan perusahaan juga menjadi aspek penting, karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja lingkungan organisasi secara lebih transparan.

Di sisi lain, *environmental accounting* juga mencakup analisis terhadap dampak yang tidak langsung terlihat dalam sistem akuntansi tradisional, seperti eksternalitas. Andrew and Cortese (2011) menjelaskan bahwa banyak dampak lingkungan tidak tercermin dalam laporan keuangan karena tidak memiliki nilai moneter yang jelas atau tidak ditanggung secara langsung oleh organisasi. Oleh karena itu, ruang lingkup *environmental accounting* juga melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengomunikasikan dampak tersebut agar dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Seiring perkembangannya, ruang lingkup *environmental accounting* tidak lagi terbatas pada tingkat organisasi, tetapi juga meluas hingga tingkat sistem yang lebih besar. Konsep seperti *planetary boundaries* menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah melampaui batas aman sistem bumi, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menghubungkan aktivitas organisasi dengan dinamika sistem ekologis global (Bebbington et al., 2021; Rockström et al., 2009).

Hal ini menegaskan bahwa *environmental accounting* perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas untuk memahami dampak lingkungan. Dalam konteks tersebut, peran akuntansi menjadi

semakin penting sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Gray et al. (1988) menyatakan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada publik mengenai dampak aktivitasnya. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya, akuntansi dapat membantu masyarakat, regulator, dan investor mengevaluasi kinerja lingkungan organisasi. Selain sebagai alat pelaporan, akuntansi juga berperan dalam proses pengambilan keputusan internal organisasi. Informasi mengenai biaya lingkungan, penggunaan sumber daya, dan dampak ekologis dapat digunakan oleh manajemen untuk merancang strategi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam perspektif sistem yang dikemukakan oleh Gray (1990), akuntansi dapat berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang membantu organisasi memahami dampaknya terhadap lingkungan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Lebih jauh, peran akuntansi juga mencakup fungsi normatif, yaitu membentuk cara pandang organisasi terhadap tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Literatur menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan etika yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, *environmental accounting* berperan dalam membangun kesadaran bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi yang tidak dapat diabaikan. Secara keseluruhan, ruang lingkup *environmental accounting* mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari pengukuran dampak lingkungan hingga pembentukan akuntabilitas dan kesadaran etis. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah lingkungan, peran akuntansi juga terus berkembang, tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendorong perubahan menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, *environmental accounting* menjadi bagian penting dalam upaya mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologis dalam pengambilan keputusan organisasi.

E. PENDEKATAN DALAM ENVIRONMENTAL ACCOUNTING

Environmental accounting merupakan bidang yang tidak hanya berkembang secara praktis, tetapi juga secara konseptual melalui berbagai pendekatan teoretis. Teori berfungsi sebagai kerangka untuk memahami fenomena yang kompleks, termasuk bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungan melalui praktik akuntansi dan pelaporan. Dalam konteks ini, teori tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga membantu menjawab mengapa dan bagaimana

praktik *environmental accounting* berkembang dalam berbagai konteks organisasi. Pendekatan awal yang bersifat positivistik melihat *environmental disclosure* sebagai respons terhadap kebutuhan informasi investor dan karakteristik perusahaan. Namun, perspektif ini gagal menangkap dinamika kekuasaan, tekanan institusional, dan strategi legitimasi yang mendasari praktik tersebut. Oleh karena itu, literatur berkembang ke arah *stakeholder theory*, *legitimacy theory*, dan *political economy theory* yang menempatkan *environmental accounting* sebagai respons terhadap tekanan eksternal sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan legitimasi dan posisi organisasi dalam sistem sosial.

Dalam konteks perubahan organisasi, tekanan lingkungan dapat memicu perubahan pada tingkat struktur, sistem, maupun nilai-nilai organisasi. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa *environmental accounting* lebih sering menghasilkan perubahan simbolik daripada transformasi substantif (Bouten & Hoozée, 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan lingkungan sering digunakan sebagai alat adaptasi strategis tanpa mengubah inti praktik bisnis. Perkembangan terbaru menegaskan bahwa *environmental accounting* bersifat performatif, yaitu tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga membentuk keputusan dan arah organisasi. Perspektif seperti *actor-network theory* menunjukkan bahwa informasi, sistem, dan indikator lingkungan berperan dalam mengonstruksi pilihan strategis perusahaan, termasuk dalam investasi, inovasi, dan desain operasional (Susse & Lise, 2017). Dengan demikian, *environmental accounting* menjadi bagian dari mekanisme yang memengaruhi daya saing perusahaan. Pada level yang lebih luas, praktik *environmental accounting* juga dibentuk oleh dinamika institusional dan perkembangan norma dalam suatu bidang.

Norma pelaporan tidak selalu berasal dari regulasi formal, tetapi dari interaksi antaraktor yang membentuk ekspektasi kolektif (Bebbington & Thomson, 2013). Dalam konteks ini, standar seperti IFRS S2 dapat dipahami sebagai bentuk tekanan institusional baru yang mendorong konvergensi praktik pelaporan, sekaligus menciptakan arena kompetisi baru antarperusahaan untuk menunjukkan kredibilitas dan transparansi. Namun, hubungan antara *environmental accounting* dan stakeholder tidak selalu menghasilkan akuntabilitas yang substansial. Banyak praktik pelaporan masih bersifat simbolik dan lebih berorientasi pada legitimasi daripada perubahan nyata (Cooper & Owen, 2007; Solomon et al., 2013). Kritik lebih lanjut menunjukkan bahwa proses ini sering mengabaikan ketimpangan kekuasaan dan konflik kepentingan, sehingga membatasi efektivitas

environmental accounting sebagai mekanisme akuntabilitas (Brown, 2009).

Selain itu, pendekatan berbasis *discourse* menegaskan bahwa *environmental accounting* juga merupakan alat untuk membangun makna. Narasi yang dibangun dalam pelaporan dapat membentuk persepsi investor dan stakeholder terhadap komitmen lingkungan perusahaan, terlepas dari kinerja aktualnya (Tregidga et al., 2014). Hal ini membuka ruang bagi perusahaan untuk menggunakan disclosure sebagai strategi diferensiasi atau bahkan sebagai bentuk *symbolic management*. Secara keseluruhan, pendekatan teoretis menunjukkan bahwa *environmental accounting* berada di persimpangan antara tekanan institusional, strategi organisasi, dan persepsi pasar. Oleh karena itu, dalam konteks IFRS S2, penting untuk tidak hanya melihat disclosure sebagai kewajiban pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis yang dapat memengaruhi *competitiveness* dan *firm value*, tergantung pada bagaimana informasi tersebut diinterpretasikan dan digunakan oleh pasar.

F. KARAKTERISTIK ENVIRONMENTAL ACCOUNTING

Environmental accounting pada dasarnya muncul karena sistem akuntansi konvensional gagal menangkap *externalities*, yaitu dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan yang tidak tercermin dalam laporan keuangan. Aktivitas seperti emisi, pencemaran, atau eksploitasi sumber daya sering kali tidak diinternalisasi sebagai biaya perusahaan, sehingga menciptakan distorsi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, *environmental accounting* berperan untuk membuat dampak tersebut menjadi lebih terlihat (*visible*) dan terukur, sehingga dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (Bebbington et al., 2021). Implikasinya, *environmental accounting* tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memengaruhi *pengambilan keputusan*. Informasi lingkungan yang dihasilkan—baik dalam bentuk biaya, risiko, maupun dampak fisik—digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi operasional, mengidentifikasi potensi penghematan, serta merespons tekanan regulasi dan pasar. Dengan kata lain, akuntansi lingkungan menggeser fokus dari sekadar *profit measurement* menjadi *informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan* yang mencakup dimensi lingkungan (Burritt & Schaltegger, 2010).

Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini adalah *materials and energy accounting*, yang menekankan pentingnya memahami aliran

material dan energi dalam proses produksi. Pendekatan ini melihat bahwa sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku bukan hanya input produksi biasa, tetapi juga memiliki implikasi biaya dan dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaannya menjadi bagian penting dari strategi efisiensi dan keberlanjutan perusahaan. Dalam praktiknya, *materials and energy accounting* mengintegrasikan dua jenis informasi, yaitu informasi fisik dan moneter. Informasi fisik mencakup kuantitas penggunaan material dan energi (kilogram bahan atau joule energi), sedangkan informasi moneter mencerminkan biaya yang terkait dengan penggunaan tersebut. Kombinasi keduanya memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi *hidden environmental costs*, seperti limbah atau inefisiensi produksi, yang sebelumnya tidak terlihat dalam sistem akuntansi tradisional.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa dampak perusahaan tidak hanya memengaruhi kinerja internal, tetapi juga sistem lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, *environmental accounting* mulai mengarah pada integrasi dengan konsep keberlanjutan yang lebih luas, seperti *planetary boundaries* dan *Sustainable Development Goals* Schaltegger (2018). Ini berarti bahwa pengambilan keputusan perusahaan tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi biaya, tetapi juga mempertimbangkan batasan ekologis dan risiko jangka panjang. Secara keseluruhan, karakteristik utama *environmental accounting* terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan externalities dengan decision-making melalui penyediaan informasi yang lebih komprehensif. Dengan memasukkan dimensi material dan energi ke dalam sistem akuntansi, perusahaan dapat membuat keputusan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Dalam konteks ini, *environmental accounting* menjadi fondasi penting dalam menjembatani kepentingan bisnis dengan tuntutan keberlanjutan.

G. TANTANGAN DALAM ENVIRONMENTAL ACCOUNTING DAN MASA DEPANNYA.

Environmental accounting masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang berasal dari keterbatasan sistem akuntansi konvensional. Salah satu isu utama adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengukur *externalities* secara konsisten, mengingat banyak dampak lingkungan tidak memiliki harga pasar yang jelas dan sering kali bersifat jangka panjang. Hal ini membuat informasi yang dihasilkan cenderung parsial dan belum sepenuhnya merepresentasikan realitas ekologis yang kompleks. Selain itu, praktik

di lapangan masih didominasi oleh pendekatan pelaporan yang bersifat simbolik atau *compliance-driven*, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis organisasi (Bebbington et al., 2021; Burritt & Schaltegger, 2010). Tantangan berikutnya berkaitan dengan fragmentasi standar dan pendekatan dalam *environmental accounting*. Berbagai kerangka seperti GRI, SASB, hingga praktik internal perusahaan berkembang secara paralel, namun belum sepenuhnya terkoordinasi.

Akibatnya, informasi yang dihasilkan sering kali tidak dapat dibandingkan (*lack of comparability*), sehingga menyulitkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan secara konsisten. Selain itu, keterbatasan dalam mengintegrasikan informasi fisik (misalnya penggunaan energi atau material) dengan informasi moneter juga menjadi hambatan dalam menghasilkan informasi yang benar-benar *decision-useful*. Dalam konteks ini, IFRS S2 hadir sebagai upaya untuk mengatasi sebagian tantangan tersebut dengan menyediakan kerangka pelaporan yang lebih terstandar, khususnya terkait pengungkapan risiko dan peluang yang berkaitan dengan iklim. IFRS S2 menekankan pentingnya koneksi antara informasi keberlanjutan dan kinerja keuangan, sehingga mendorong perusahaan untuk menginternalisasi dampak lingkungan dalam analisis bisnis. Namun demikian, implementasi IFRS S2 juga tidak lepas dari tantangan, terutama terkait ketersediaan data yang andal, kesiapan sistem internal perusahaan, serta kemampuan untuk mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif dan terverifikasi.

Ke depan, masa depan *environmental accounting* akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan integrasi antara dimensi ekonomi dan ekologis. Salah satu arah perkembangan yang penting adalah penguatan pendekatan berbasis sistem, seperti integrasi dengan konsep *planetary boundaries* dan *socio-ecological systems*, yang memungkinkan akuntansi tidak hanya merefleksikan dampak organisasi, tetapi juga posisi organisasi dalam batas-batas ekologis global. Pendekatan ini menuntut pengembangan metode pengukuran baru yang mampu menghubungkan aktivitas perusahaan dengan dampak lingkungan secara lebih holistik. Dengan demikian, hubungan antara *environmental accounting* dan IFRS S2 dapat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi. Environmental accounting menyediakan basis konseptual dan teknis untuk mengidentifikasi serta mengukur dampak lingkungan, sementara IFRS S2 memberikan kerangka institusional untuk mengomunikasikan informasi tersebut kepada pasar. Tantangan ke depan bukan hanya pada aspek pelaporan, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar digunakan dalam pengambilan

keputusan yang mendorong perubahan perilaku organisasi menuju keberlanjutan yang substantif, bukan sekadar simbolik.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, J. (2000). The accounting craft and the environmental crisis: reconsidering environmental ethics. *Accounting Forum*, 24(2), 197-222. <https://doi.org/10.1111/1467-6303.00036>
- Andrew, J., & Cortese, C. (2011). Accounting for climate change and the self-regulation of carbon disclosures. *Accounting Forum*, 35(3), 130-138. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2011.06.006>
- Bebbington, J., Larrinaga, C., O'Dwyer, B., & Thomson, I. (2021). Routledge handbook of environmental accounting.
- Bebbington, J., & Thomson, I. (2013). Editorial: Sustainable development, management and accounting: boundary crossing. *Management accounting research*, 24(4), 277-283.
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2018). Achieving the United Nations Sustainable Development Goals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(1), 2-24. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929>
- Bouten, L., & Hoozée, S. (2013). On the interplay between environmental reporting and management accounting change. *Management accounting research*, 24(4), 333-348. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.06.005>
- Brown, J. (2009). Democracy, sustainability and dialogic accounting technologies: Taking pluralism seriously. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(3), 313-342. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2008.08.002>
- Burritt, R. L. (2012). Environmental performance accountability: Planet, people, profits. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 25(2), 370-405. <https://doi.org/10.1108/09513571211198791>
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: fad or trend? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(7), 829-846. <https://doi.org/10.1108/09513571011080144>
- Cafaro, P. (2002). RACHEL CARSON'S ENVIRONMENTAL ETHICS. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 6(1), 58-80. <https://doi.org/10.1163/156853502760184595>
- Committee on Measures of Effectiveness for Social Programs. (1972). *The accounting review*, 47(4), 336-396. <https://doi.org/10.2308/TAR-4497412>
- Cooper, S. M., & Owen, D. L. (2007). Corporate social reporting and stakeholder accountability: The missing link. *Accounting*,

- Organizations and Society*, 32(7), 649-667.
<https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.02.001>
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability...and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47-62.
<https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.04.006>
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. (1988). Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(1), 6-20.
<https://doi.org/10.1108/eum0000000004617>
- Gray, R. H. (1990). The greening of accountancy: the profession after Pearce. (*No Title*).
- Lade, S. J., Steffen, W., de Vries, W., Carpenter, S. R., Donges, J. F., Gerten, D., Hoff, H., Newbold, T., Richardson, K., & Rockström, J. (2020). Human impacts on planetary boundaries amplified by Earth system interactions. *Nature sustainability*, 3(2), 119-128. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0454-4>
- Nyström, M., Jouffray, J. B., Norström, A. V., Crona, B., Jørgensen, P. S., Carpenter, S. R., Bodin, Ö., Galaz, V., & Folke, C. (2019). Anatomy and resilience of the global production ecosystem. *Nature*, 575(7781), 98-108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41586-019-1712-3>
- Qian, W., Burritt, R., & Monroe, G. (2011). Environmental management accounting in local government: A case of waste management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(1), 93.
<https://doi.org/10.1108/09513571111098072>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U.,...Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature (London)*, 461(7263), 472-475.
<https://doi.org/10.1038/461472a>
- Russell, S., Milne, M. J., & Dey, C. (2017). Accounts of nature and the nature of accounts: Critical reflections on environmental accounting and propositions for ecologically informed accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(7), 1426. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2017-3010>
- Schaltegger, S. (2018). Linking Environmental Management Accounting: A Reflection on (Missing) Links to Sustainability and Planetary Boundaries. *Social and Environmental*

- Accountability Journal*, 38(1), 19-29.
<https://doi.org/10.1080/0969160X.2017.1395351>
- Solomon, J. F., Solomon, A., Joseph, N. L., & Norton, S. D. (2013). Impression management, myth creation and fabrication in private social and environmental reporting: Insights from Erving Goffman. *Accounting, Organizations and Society*, 38(3), 195-213. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.01.001>
- Susse, G., & Lise, J. (2017). Counting to zero: accounting for a green building. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(5), 1065-1081. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1320>
- Tregidga, H., Milne, M., & Kearins, K. (2014). (Re)presenting 'sustainable organizations'. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 477-494.
<https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.10.006>

■ TENTANG PENULIS

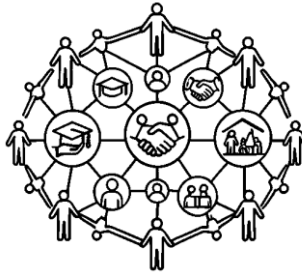


**Dr. Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno., S.A.
Universitas Telkom**

Penulis merupakan dosen akuntansi di Telkom University. Penulis menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2025) melalui program PMDSU dan menjadi wisudawan tercepat dengan masa studi 2 tahun 10 bulan. Sebelumnya, penulis meraih gelar Sarjana

Akuntansi dari Universitas Airlangga (2020). Fokus penelitian penulis meliputi *sustainability accounting*, *government policy*, serta *corporate governance reporting*. Penulis aktif mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi, dengan 8 dokumen terindeks Scopus (h-index 3) serta memiliki rekam jejak sitasi yang terus berkembang. Selain itu, berdasarkan Google Scholar, penulis telah memperoleh lebih dari 150 sitasi dengan h-index 7 dan i10-index 5. Selain kegiatan penelitian, penulis juga berperan sebagai reviewer pada berbagai jurnal akademik serta aktif berkontribusi dalam forum ilmiah melalui konferensi dan kolaborasi riset lintas institusi. Penulis berkomitmen untuk mengembangkan kajian akuntansi yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga relevan dalam menjawab isu keberlanjutan dan kebijakan publik.

Bab 06



AKUNTANSI SOSIAL DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dewi Junita, S.E., M.Ak.
Politeknik Negeri Batam

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis modern tidak lagi dapat dilepaskan dari isu-isu sosial dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit bagi pemegang saham, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tuntutan ini melahirkan konsep yang kini dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, beserta instrumen pencatatannya yang dikenal sebagai akuntansi sosial. Friedman (1970) dalam esainya yang monumental menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungannya. Namun, pandangan ini kemudian banyak mendapat kritik karena mengabaikan dampak aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak di luar pemegang saham. Freeman (1984) kemudian memelopori pemikiran bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak hanya kepada pemegang saham.

Di Indonesia, kewajiban CSR bagi perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi ini memperkuat posisi CSR bukan sekadar praktik sukarela,

melainkan kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu. Akuntansi sosial, sebagai cabang ilmu akuntansi yang lebih luas, menyediakan kerangka konseptual dan metodologis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi tentang dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Gray, Owen, dan Adams (1996) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai proses mengomunikasikan efek sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi organisasi kepada kelompok kepentingan tertentu dalam masyarakat dan kepada masyarakat luas.

B. TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORITIS

1. Definisi dan ruang lingkup akuntansi sosial

Akuntansi sosial (*social accounting*) merupakan konsep yang telah berkembang sejak era 1970-an. Mathews dan Perera (1991) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai perluasan sistem akuntansi konvensional yang mencakup pengukuran dan pelaporan informasi tentang dampak sosial perusahaan. Sementara itu, Deegan (2002) berpendapat bahwa akuntansi sosial berfungsi sebagai mekanisme untuk melegitimasi tindakan-tindakan perusahaan di mata masyarakat. Ruang lingkup akuntansi sosial mencakup beberapa dimensi utama, antara lain: (1) akuntansi lingkungan, yang berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan; (2) akuntansi sumber daya manusia, yang mencatat nilai investasi pada modal manusia; (3) akuntansi sosial kemasyarakatan, yang mengukur kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial; dan (4) akuntansi etika, yang berkaitan dengan pelaporan praktik etika bisnis perusahaan (Mathews, 1997).

2. Evolusi Konsep Akuntansi Sosial dan CSR

Perjalanan akuntansi sosial sebagai disiplin ilmu mencerminkan evolusi pemikiran bisnis dan masyarakat selama lebih dari tujuh dekade. Berikut adalah tonggak-tonggak penting dalam perkembangan tersebut:

- **Era 1950-an – Kelahiran Konsep CSR**

Howard R. Bowen menerbitkan "Social Responsibilities of the Businessman" (1953), yang menjadi karya fondasional pertama yang secara eksplisit mengkaji kewajiban sosial pelaku bisnis. Bowen berpendapat bahwa para pengusaha bertanggung

jawab untuk menjalankan keputusan-keputusan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

- **Era 1970-an – Perdebatan Milton Friedman vs. Tanggung Jawab Sosial**

Friedman (1970) dalam tulisan klasiknya di *New York Times Magazine* berpendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Pandangan ini memicu perdebatan akademik yang panjang dan justru mendorong berkembangnya riset CSR. Di sisi lain, Carroll (1979) mengajukan model piramida CSR yang hingga kini masih menjadi rujukan, terdiri dari tanggung jawab ekonomi, legal, etis, dan filantropis.

- **Era 1990-an – Kelembagaan Akuntansi Sosial**

Gray et al., (1996) menerbitkan "Accounting and Accountability", sebuah karya monumental yang merumuskan kerangka teoritis akuntansi sosial secara komprehensif. Pada periode ini pula, *Global Reporting Initiative* (GRI) didirikan pada tahun 1997, menjadi tonggak penting institusionalisasi pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan.

- **Era 2000-an hingga Kini – Standarisasi dan Regulasi Global**

Perkembangan standar pelaporan keberlanjutan semakin pesat dengan diterbitkannya berbagai regulasi internasional, seperti GRI Standards (2021), IFRS S1 dan S2 dari ISSB (2023), serta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Uni Eropa. Di Indonesia, OJK menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Basavaraj dan Prakash (2024) melalui analisis bibliometrik terhadap literatur akuntansi sosial menemukan bahwa topik-topik utama penelitian kini mencakup CSR, *integrated reporting*, akuntabilitas iklim, kinerja ESG, serta inovasi hijau.

3. Teori-teori utama dalam akuntansi sosial

- **Teori legitimasi**

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) merupakan salah satu teori yang paling dominan digunakan untuk menjelaskan praktik pengungkapan sosial perusahaan. Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dalam sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan laporan

tahunan sebagai salah satu cara untuk mengomunikasikan sinyal legitimasi kepada masyarakat. Deegan (2002) menambahkan bahwa perusahaan akan meningkatkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan ketika mereka merasa legitimasi mereka terancam, misalnya setelah terjadi bencana lingkungan atau kontroversi sosial yang melibatkan perusahaan.

- **Teori pemangku kepentingan**

Freeman (1984) dalam karya klasiknya *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi kepada seluruh kelompok yang memiliki kepentingan dalam operasi perusahaan. Dalam konteks akuntansi sosial, teori pemangku kepentingan memberikan justifikasi mengapa perusahaan perlu mengungkapkan informasi melampaui pelaporan keuangan tradisional. Mitchell, Agle, dan Wood (1997) mengembangkan model atribut pemangku kepentingan yang mengklasifikasikan pemangku kepentingan berdasarkan tiga atribut: kekuatan (*power*), legitimasi (*legitimacy*), dan urgensi (*urgency*). Perusahaan akan memprioritaskan respons terhadap pemangku kepentingan yang memiliki kombinasi atribut tertinggi, yang disebut sebagai pemangku kepentingan definitif (*definitive stakeholders*).

- **Teori kelembagaan**

Teori kelembagaan (*institutional theory*) menjelaskan praktik CSR dari perspektif tekanan-tekanan institusional yang dihadapi perusahaan. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme isomorfisme yang mendorong organisasi untuk mengadopsi praktik serupa: (1) tekanan koersif dari regulasi pemerintah; (2) tekanan mimetis yang mendorong perusahaan meniru pesaing; dan (3) tekanan normatif dari ekspektasi profesional. Dalam konteks Indonesia, isomorfisme koersif tercermin dari kewajiban pelaporan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/2017, sementara isomorfisme mimetik tampak pada adopsi standar GRI oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memposisikan diri sebagai pemimpin keberlanjutan. Dalam konteks CSR, teori ini menjelaskan mengapa perusahaan dalam industri yang sama cenderung memiliki praktik pengungkapan yang serupa, meskipun motivasi di baliknya bisa berbeda-beda. Seo

dan Creed (2002) menambahkan bahwa agen manusia memiliki peran penting dalam membentuk kembali konteks institusional melalui praktik-praktik reflektif.

- **Teori agensi dan pengungkapan sukarela**
Jensen dan Meckling (1976) melalui teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) melahirkan asimetri informasi yang menjadi biaya agensi. Dalam konteks akuntansi sosial, teori agensi digunakan untuk menjelaskan motivasi manajemen dalam melakukan pengungkapan sosial sukarela sebagai upaya mengurangi biaya agensi dan meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan.

C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

1. Definisi dan Evolusi Konsep CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah mengalami evolusi definisi yang signifikan sejak pertama kali dikonseptualisasikan. Berbagai organisasi internasional telah merumuskan definisi yang saling melengkapi:

Tabel 6.1 Evolusi Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sumber	Definisi CSR
Bowen (1953)	Kewajiban para pengusaha untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat
Carroll (1979)	Keseluruhan harapan ekonomi, hukum, etis, dan filantropis yang dimiliki masyarakat terhadap perusahaan pada waktu tertentu
ISO 26000 (2010)	Tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis
Komisi Eropa (2011)	Tanggung jawab perusahaan atas dampaknya terhadap masyarakat, melampaui kewajiban hukum, melalui integrasi kepedulian sosial, lingkungan, etis, dan hak asasi manusia ke dalam operasi bisnis
UU No. 40/2007 (Indonesia)	Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

	lingkungan hidup yang bermanfaat bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
--	---

2. Piramida CSR Carroll

Carroll (1979, 1991) mengajukan model piramida CSR yang menjadi salah satu kerangka konseptual paling berpengaruh dalam literatur CSR. Model ini menempatkan empat lapisan tanggung jawab secara hierarkis (Gambar 1):

- Tanggung Jawab Ekonomi (Dasar Piramida): Perusahaan harus menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan menjaga keberlangsungan bisnis. Ini adalah prasyarat fundamental bagi keberadaan perusahaan.
- Tanggung Jawab Hukum: Perusahaan harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum merupakan kondisi minimum yang diharapkan masyarakat dari dunia usaha.
- Tanggung Jawab Etis: Perusahaan diharapkan berperilaku sesuai norma moral dan etika masyarakat, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit diwajibkan oleh hukum.
- Tanggung Jawab Filantropis (Puncak Piramida): Perusahaan diharapkan berkontribusi secara sukarela kepada masyarakat melalui program-program sosial, beasiswa, seni budaya, dan kegiatan amal lainnya.



Gambar 1. Piramida Carroll (2016)

Carroll menegaskan bahwa keempat lapisan ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling

mendukung. Perusahaan yang menjalankan CSR secara komprehensif perlu memenuhi seluruh lapisan tanggung jawab tersebut secara simultan.

3. CSR dan kinerja keuangan

Salah satu pertanyaan riset yang paling banyak diteliti dalam literatur CSR adalah apakah keterlibatan CSR berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan bibliometrik komprehensif yang dilakukan oleh berbagai peneliti terhadap 508 artikel jurnal Scopus dari 1989 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan riset yang signifikan, dengan hampir 87% artikel diterbitkan dalam satu dekade terakhir. Bukti empiris menunjukkan hasil yang bervariasi. Waddock dan Graves (1997) menemukan korelasi positif antara indeks CSR dan kinerja akuntansi berbasis laba (seperti ROA). Studi lebih terkini yang menggunakan skor ESG sebagai proksi CSR menemukan bahwa dimensi tata kelola (G) cenderung memiliki pengaruh paling konsisten terhadap kinerja keuangan, sementara hubungan antara dimensi lingkungan (E) dan sosial (S) dengan kinerja keuangan bersifat lebih kontekstual dan tergantung pada karakteristik industri.

Wang et al. (2024) melalui tinjauan sistematis menemukan bahwa CSR berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor, yang pada gilirannya menurunkan biaya modal dan meningkatkan valuasi pasar. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa CSR bukan sekadar beban biaya, melainkan investasi strategis yang menghasilkan nilai jangka panjang.

D. STANDAR DAN KERANGKA PELAPORAN SOSIAL DAN KEBERLANJUTAN

1. Global Reporting Initiative (GRI) Standards

Global Reporting Initiative (GRI) didirikan pada tahun 1997 dan telah menerbitkan standar pelaporan keberlanjutan yang menjadi acuan paling luas digunakan di dunia. GRI Standards, yang menggantikan G4 Guidelines pada tahun 2016, menyediakan seperangkat standar modular yang memungkinkan organisasi dari berbagai ukuran dan sektor untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka (GRI, 2016). Struktur GRI Standards terdiri dari tiga seri utama: GRI 100 (Standar Universal), GRI 200 (Standar Ekonomi), GRI 300 (Standar Lingkungan), dan GRI 400

(Standar Sosial). Setiap standar dirancang untuk mengungkapkan topik material yang relevan dengan dampak organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurut KPMG (2022), lebih dari 10.000 organisasi di lebih dari 100 negara menggunakan GRI Standards sebagai kerangka pelaporan keberlanjutan.

2. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

SASB didirikan pada tahun 2011 di Amerika Serikat dengan fokus pada pengembangan standar akuntansi keberlanjutan yang spesifik per industri dan relevan secara finansial. Berbeda dengan GRI yang bersifat lebih multistakeholder, SASB dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi investor (SASB, 2018). SASB Standards mencakup 77 sektor industri dan mengidentifikasi topik-topik ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang paling relevan secara material bagi masing-masing sektor. Pada tahun 2022, SASB bergabung dengan IIRC (*International Integrated Reporting Council*) membentuk Value Reporting Foundation, yang kemudian dikonsolidasikan ke dalam *International Sustainability Standards Board* (ISSB) di bawah IFRS Foundation.

3. Integrated Reporting (IR)

Integrated Reporting (IR) dikembangkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC) pada tahun 2013 dengan tujuan menciptakan komunikasi yang lebih kohesif dan efisien tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek suatu organisasi menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (IIRC, 2013). Kerangka IR mengidentifikasi enam jenis modal yang digunakan dan dipengaruhi oleh organisasi: modal finansial, modal manufaktur, modal intelektual, modal manusia, modal sosial dan relasional, serta modal alam. Pendekatan ini memandang nilai penciptaan secara holistik melampaui sekadar nilai finansial, sehingga lebih mampu menggambarkan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan.

4. IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB)

Pada Juni 2023, ISSB menerbitkan dua standar pengungkapan keberlanjutan pertamanya: IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) dan IFRS S2 (Climate-related Disclosures). Standar-standar ini merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya harmonisasi global pelaporan keberlanjutan (IFRS Foundation, 2023). IFRS S1 mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi material tentang risiko dan peluang yang berkaitan

dengan keberlanjutan, yang dapat memengaruhi prospek entitas. Sementara itu, IFRS S2 fokus pada pengungkapan informasi terkait risiko dan peluang yang berkaitan dengan perubahan iklim, termasuk emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam cakupan 1, 2, dan 3.

Tabel 6.2 Perbandingan Kerangka Pelaporan Keberlanjutan Utama

Aspek	GRI Standards	SASB	IR	ISSB/IFRS S
Fokus Utama	Multistakeholder	Investor	Investor	Investor
Cakupan	Universal	Per industri	Universal	Universal
Mandatory	Sukarela	Sukarela	Sukarela	Berkembang
Pengguna	Semua orang.	Perusahaan publik	Semua orang	Perusahaan publik
Badan Penerbit	GRI	SASB/VRF	IIRC/VRF	IFRS Foundation

Sumber: Diolah penulis dari GRI (2016), SASB (2018), IIRC (2013), IFRS Foundation (2023).

E. PENGUKURAN DAN PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL

1. Dimensi pengukuran kinerja sosial

Pengukuran kinerja sosial merupakan tantangan metodologis yang signifikan dalam akuntansi sosial. Berbeda dengan pengukuran kinerja keuangan yang memiliki satuan moneter yang jelas, kinerja sosial seringkali bersifat kualitatif dan sulit dikuantifikasi. Wood (1991) mengembangkan model kinerja sosial perusahaan yang mencakup tiga level analisis: prinsip-prinsip CSR, proses-proses responsivitas sosial, dan hasil-hasil perilaku perusahaan. Pendekatan pengukuran kinerja sosial yang umum digunakan mencakup: (1) analisis konten laporan tahunan dan laporan keberlanjutan; (2) indeks reputasi seperti Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dan MSCI ESG Ratings; (3) penilaian pemangku kepentingan melalui survei dan wawancara; (4) analisis media sebagai proksi kinerja sosial; dan (5) data basis ESG dari penyedia data seperti Bloomberg, Refinitiv, dan *Sustainalytics* (Cheng, Ioannou, & Serafeim, 2014).

2. Akuntansi lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan subbidang akuntansi sosial yang secara khusus berfokus pada pencatatan, pengukuran,

dan pelaporan biaya-biaya lingkungan serta dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. United Nations Division for Sustainable Development (UNSD, 2001) membedakan empat tipe akuntansi lingkungan: (1) akuntansi lingkungan nasional; (2) akuntansi keuangan lingkungan; (3) akuntansi manajemen lingkungan; dan (4) akuntansi biaya penuh (*full cost accounting*). Biaya lingkungan mencakup berbagai kategori, mulai dari biaya pencegahan (*prevention costs*), biaya deteksi (*detection costs*), biaya kegagalan internal (*internal failure costs*), hingga biaya kegagalan eksternal (*external failure costs*) yang termasuk eksternalitas negatif terhadap masyarakat. Hansen dan Mowen (2006) mengembangkan sistem pelaporan biaya kualitas lingkungan yang dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi area perbaikan lingkungan yang prioritas.

3. Akuntansi sumber daya manusia

Akuntansi sumber daya manusia (*Human Resource Accounting/HRA*) merupakan cabang akuntansi yang mengukur nilai ekonomi dari sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Flamholtz (1974) mendefinisikan HRA sebagai proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia serta mengomunikasikan informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat dua pendekatan utama dalam HRA: pendekatan biaya (*cost approach*), yang mengukur investasi perusahaan dalam merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan; dan pendekatan nilai (*value approach*), yang mencoba mengkuantifikasi nilai ekonomi yang dikontribusikan oleh sumber daya manusia kepada organisasi. Meskipun HRA memiliki nilai informasional yang signifikan, standar akuntansi saat ini umumnya belum mengizinkan pengakuan formal nilai sumber daya manusia dalam neraca keuangan (Lev & Schwartz, 1971).

4. Greenwashing: Risiko dan Tantangan Pengungkapan

Greenwashing, atau praktik mengkomunikasikan klaim lingkungan atau sosial yang menyesatkan, merupakan salah satu tantangan utama dalam akuntansi sosial. Lyon dan Maxwell (2011) mendefinisikan greenwashing sebagai pengungkapan selektif informasi positif tentang kinerja lingkungan atau sosial, dengan menyembunyikan informasi negatif, tanpa komitmen nyata terhadap perbaikan kinerja. Kecenderungan *greenwashing* meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan pemangku kepentingan terhadap kinerja sosial dan lingkungan. Laufer (2003)

menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan aktual yang buruk justru cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan CSR simbolik. Penelitian Du et al., (2010) juga menemukan bahwa kredibilitas komunikasi CSR sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara klaim dan tindakan nyata perusahaan.

F. IMPLEMENTASI CSR DAN AKUNTANSI SOSIAL DI INDONESIA

1. Regulasi CSR di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang mewajibkan CSR melalui perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 menetapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mewajibkan penanam modal untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kewajiban CSR diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik juga mewajibkan entitas yang diaturnya untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

2. Praktik Pelaporan CSR di Perusahaan Indonesia

Studi Faisal, Andrian, dan Arifah (2018) yang menganalisis praktik pengungkapan CSR 100 perusahaan terbesar di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q). Temuan ini konsisten dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR meningkatkan legitimasi dan nilai perusahaan di mata investor. Penelitian Wijaya (2020) pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan bahwa kualitas pengungkapan CSR berhubungan positif dengan kinerja keuangan jangka panjang, meskipun hubungan ini tidak signifikan dalam jangka pendek. Hal ini

mendukung argumentasi bahwa investasi CSR merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak langsung terasa. Tren pelaporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Menurut laporan NCSR (National Center for Sustainability Reporting) Indonesia, jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan mengalami peningkatan signifikan dari sekitar 30 perusahaan pada tahun 2010 menjadi lebih dari 150 perusahaan pada tahun 2023.

3. Tantangan Implementasi di Konteks Indonesia

Meski terdapat kemajuan yang signifikan, implementasi akuntansi sosial dan CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi: (1) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pelaporan keberlanjutan; (2) kurangnya standar nasional yang koheren dan terintegrasi; (3) variasi interpretasi kewajiban CSR di antara regulator dan perusahaan; serta (4) dominasi pendekatan filantropi atas pendekatan strategis dalam implementasi CSR (Waagstein, 2011). Tantangan lain yang spesifik bagi perusahaan di Indonesia adalah rendahnya kesadaran perusahaan skala menengah dan kecil terhadap pentingnya pelaporan sosial. Sebagian besar praktik pelaporan CSR yang baik masih terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan besar yang sudah terdaftar di bursa saham atau perusahaan multinasional.

G. TREN DAN ISU KONTEMPORER

1. ESG Investing dan Keterkaitan dengan Akuntansi Sosial

Investasi berbasis ESG (*Environmental, Social, Governance*) merupakan salah satu tren paling signifikan dalam dunia keuangan global saat ini. Aset yang dikelola dengan mempertimbangkan faktor ESG telah melampaui USD 35 triliun secara global pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan terus meningkat (Bloomberg Intelligence, 2022). Pertumbuhan ini mendorong permintaan yang semakin besar akan informasi sosial dan lingkungan yang berkualitas tinggi, relevan, dan dapat diperbandingkan. Cheng et al., (2014) dalam penelitian mereka yang sangat berpengaruh menemukan bahwa perusahaan dengan nilai ESG yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih baik ke pasar modal dengan biaya yang lebih rendah. Temuan ini memberikan justifikasi finansial yang kuat bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam manajemen dan pelaporan ESG yang baik.

2. Perubahan Iklim dan Akuntansi Karbon

Krisis perubahan iklim global telah mendorong perkembangan bidang akuntansi karbon (*carbon accounting*) sebagai sub bidang penting dalam akuntansi lingkungan. Akuntansi karbon mencakup pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. The Greenhouse Gas Protocol, yang dikembangkan oleh *World Resources Institute* (WRI) dan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), menjadi standar global paling diterima dalam pengukuran emisi GRK perusahaan. Persetujuan Paris (Paris Agreement, 2015) yang menetapkan target pembatasan kenaikan suhu global 1,5°C di atas level pra-industri telah menciptakan kerangka kebijakan global yang semakin mendorong perusahaan untuk mengelola dan melaporkan jejak karbon mereka. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), yang dibentuk oleh Financial Stability Board (FSB) pada tahun 2015, mengembangkan rekomendasi pengungkapan risiko iklim yang kini menjadi acuan global (TCFD, 2017).

3. Teknologi Digital dan Inovasi dalam Pelaporan Sosial

Revolusi digital membawa perubahan signifikan dalam praktik akuntansi sosial dan pelaporan CSR. Teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data besar (*big data analytics*) membuka peluang baru untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pelaporan sosial. *Blockchain*, dapat digunakan untuk memverifikasi rantai pasok yang berkelanjutan dan menjamin keaslian klaim sosial dan lingkungan perusahaan (Sabeti et al., 2019). Perkembangan platform pelaporan digital dan aplikasi XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) untuk data keberlanjutan juga semakin memudahkan komparabilitas dan analisis laporan keberlanjutan lintas perusahaan dan industri. Uni Eropa melalui *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) telah mewajibkan pelaporan keberlanjutan dalam format XBRL, suatu langkah yang mengindikasikan arah standarisasi global dalam pelaporan sosial di masa depan.

4. SDGs dan Kontribusi Sektor Swasta

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015 memberikan kerangka global untuk pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Kontribusi sektor swasta terhadap pencapaian SDGs menjadi semakin penting, mengingat kebutuhan pembiayaan yang diestimasi mencapai USD 5-7 triliun per tahun secara global (UNCTAD, 2014). *Business and Sustainable Development Commission* (2017) memperkirakan bahwa SDGs membuka peluang bisnis senilai USD 12 triliun per tahun pada tahun 2030. Akuntansi sosial berperan krusial dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan kontribusi perusahaan terhadap pencapaian masing-masing SDG secara kredibel dan terstandarisasi.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Bloomberg Intelligence. (2022). ESG assets may hit \$53 trillion by 2025, a third of global AUM. Bloomberg.
- Business and Sustainable Development Commission. (2017). Better business, better world. BSDC.
- Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497-505. <https://doi.org/10.2307/257850>
- Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. *Strategic Management Journal*, 35(1), 1-23. <https://doi.org/10.1002/smj.2131>
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Deegan, C., & Unerman, J. (2011). *Financial accounting theory* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Du, S., Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2010). Maximizing business returns to corporate social responsibility (CSR): The role of CSR communication. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 8-19. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00276.x>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Faisal, F., Andrian, T., & Arifah, D. A. (2018). Corporate governance and environmental disclosure in Indonesian firms. *International Journal of Business & Society*, 19(1), 180-194.
- Flamholtz, E. G. (1974). *Human resource accounting*. Dickenson Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.

- Friedman, M. (1970, September 13). The social responsibility of business is to increase its profits. *The New York Times Magazine*.
- Global Reporting Initiative. (2016). GRI 101: Foundation 2016. GRI. <https://www.globalreporting.org>
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI Universal Standards 2021 (GRI 1, GRI 2, GRI 3). GRI Standards Board. Berlaku efektif 1 Januari 2023
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Prentice Hall.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2006). *Cost management: Accounting and control* (5th ed.). Thomson/South-Western.
- IFRS Foundation. (2023). IFRS S1 and IFRS S2 sustainability disclosure standards. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org>
- International Integrated Reporting Council. (2013). The international <IR> framework. IIRC.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- KPMG. (2022). Big shifts, small steps: Survey of sustainability reporting 2022. KPMG International.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Laufer, W. S. (2003). Social accountability and corporate greenwashing. *Journal of Business Ethics*, 43(3), 253-261. <https://doi.org/10.1023/A:1022962719299>
- Lev, B., & Schwartz, A. (1971). On the use of the economic concept of human capital in financial statements. *The Accounting Review*, 46(1), 103-112.
- Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. *Journal of Economics & Management Strategy*, 20(1), 3-41. <https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x>
- Mathews, M. R. (1997). Twenty-five years of social and environmental accounting research: Is there a silver jubilee to celebrate? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10(4), 481-531. <https://doi.org/10.1108/09513579710367697>
- Mathews, M. R., & Perera, M. H. B. (1991). *Accounting theory and development*. Chapman & Hall.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle

- of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.2307/259247>
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. *International Journal of Production Research*, 57(7), 2117–2135. <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261>
- SASB. (2018). SASB conceptual framework. Sustainability Accounting Standards Board.
- Seo, M., & Creed, W. E. D. (2002). Institutional contradictions, praxis, and institutional change: A dialectical perspective. *Academy of Management Review*, 27(2), 222–247. <https://doi.org/10.2307/4134353>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures: Final report. FSB.
- UNCTAD. (2014). World investment report 2014: Investing in the SDGs. United Nations.
- United Nations Division for Sustainable Development. (2001). Environmental management accounting procedures and principles. United Nations.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Waagstein, P. R. (2011). The mandatory corporate social responsibility in Indonesia: Problems and implications. *Journal of Business Ethics*, 98(3), 455–466. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0587-x>
- Wijaya, L. I. (2020). Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 45–62.
- Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. *Academy of Management Review*, 16(4), 691–718. <https://doi.org/10.2307/258977>

■ TENTANG PENULIS



Dewi Junita, S.E., M.Ak.
Politeknik Negeri Batam

Penulis adalah seorang dosen di Politeknik Negeri Batam, Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Sebagai akademisi, beliau memiliki minat penelitian di bidang akuntansi manajemen, akuntansi perilaku, sistem pengendalian manajemen, serta akuntansi keberlanjutan. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai artikel ilmiah hasil penelitiannya telah dipublikasikan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penulis juga aktif menulis dan berkontribusi dalam penyusunan berbagai buku ilmiah di bidang akuntansi dan manajemen.

Bab 07



AKUNTANSI KARBON DAN EMISI GAS RUMAH KACA

Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.
Universitas Sebelas Maret

A. PENDAHULUAN

Bidang akuntansi saat ini sedang mengalami fase perubahan yang sangat signifikan, bahkan dapat dikatakan sebagai titik balik paling penting sejak dikenalkannya sistem pencatatan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) oleh Luca Pacioli. Selama periode yang panjang, praktik akuntansi konvensional cenderung berorientasi pada pengukuran kinerja perusahaan melalui indikator keuangan historis yang berbasis transaksi kas maupun akrual. Akan tetapi, memasuki era Anthropocene, yaitu periode ketika aktivitas manusia telah menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan iklim serta keseimbangan ekosistem global, pendekatan akuntansi yang hanya menitikberatkan pada perolehan laba mulai dipandang tidak lagi relevan, bahkan berpotensi memberikan gambaran yang keliru mengenai nilai dan keberlanjutan suatu entitas (Bebbington & Unerman, 2020).

Keterbatasan utama akuntansi tradisional terletak pada ketidakmampuannya mengidentifikasi dan mengukur dampak eksternal terhadap lingkungan. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan dapat melaporkan tingkat profitabilitas yang tinggi, namun di saat yang sama menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar tanpa memasukkan dampak tersebut sebagai biaya dalam laporan keuangannya. Akibatnya, laporan laba rugi hanya merefleksikan keuntungan finansial, sementara beban ekologis yang muncul tidak

tercatat secara memadai. Situasi ini menimbulkan kesenjangan informasi terkait risiko iklim, sehingga investor tidak memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi risiko jangka panjang terhadap investasinya. Hal tersebut selaras dengan gagasan Carney (2015) mengenai *“Tragedy of the Horizon”*, yang menjelaskan bahwa kerangka waktu pelaporan keuangan yang relatif pendek sering kali tidak mampu mengantisipasi konsekuensi perubahan iklim yang bersifat jangka panjang dan lintas siklus bisnis.

Upaya pengembangan akuntansi yang lebih komprehensif sebenarnya telah dimulai melalui gagasan *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek Profit, People, dan Planet. Konsep ini mendorong perusahaan untuk memperluas tanggung jawabnya, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan serta lingkungan. Dalam perkembangannya, pendekatan tersebut kemudian berevolusi menjadi kerangka ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang memiliki indikator pengukuran yang lebih terstruktur dan terkuantifikasi. Transformasi ini tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan moral, tetapi juga oleh kesadaran bahwa risiko lingkungan dan perubahan iklim berpotensi menimbulkan dampak finansial yang signifikan. Perusahaan yang mengabaikan pengelolaan emisi karbon kini berhadapan dengan berbagai konsekuensi, seperti meningkatnya biaya pendanaan, potensi tuntutan hukum terkait lingkungan, serta berkurangnya akses ke pasar internasional yang semakin menekankan prinsip keberlanjutan.

Momentum penting dalam upaya standarisasi pelaporan keberlanjutan global ditandai dengan pembentukan *International Sustainability Standards Board (ISSB)* pada Konferensi COP26 di Glasgow tahun 2021 (ISSB, 2023). Pembentukan ISSB yang berada di bawah *IFRS Foundation* bertujuan menyusun standar pelaporan global yang mampu mengintegrasikan berbagai kerangka pelaporan yang sebelumnya berkembang secara terpisah, seperti TCFD, SASB, dan CDSB. Melalui penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 pada tahun 2023, pelaporan keberlanjutan tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas sukarela atau sekadar sarana komunikasi citra perusahaan, melainkan telah menjadi kewajiban yang memiliki implikasi regulatif. Standar tersebut menuntut penggabungan informasi non-keuangan dengan laporan keuangan utama, sehingga aspek keberlanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kelangsungan usaha perusahaan (Jumratin, 2025).

Pada tingkat nasional, Indonesia juga menunjukkan keseriusan dalam mendukung agenda keberlanjutan melalui penguatan berbagai

regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta POJK Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan efek berwawasan lingkungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Perpres, 2021). Kebijakan tersebut menuntut profesi akuntansi di Indonesia untuk mengembangkan metode pengukuran emisi yang andal dan terstandar. Dalam konteks ini, akuntansi karbon memegang peran strategis, bukan hanya sebagai mekanisme pencatatan emisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur, memverifikasi, dan menilai kontribusi perusahaan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Penerapan akuntansi karbon yang kredibel memungkinkan perusahaan mengelola risiko perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon maupun skema pembiayaan hijau. Selain itu, pendekatan ini membantu memastikan bahwa komitmen perusahaan terhadap target Net Zero didukung oleh data ilmiah yang dapat diverifikasi, sehingga dapat meminimalkan praktik greenwashing (GRI, 2021).

B. KONSEP DASAR AKUNTANSI KARBON

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Akuntansi karbon tidak hanya terbatas pada pencatatan emisi karbon dioksida (CO_2), melainkan mencakup pengukuran berbagai jenis gas rumah kaca yang telah diatur dalam Protokol Kyoto beserta amademennya. Gas-gas tersebut meliputi karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), sulfur heksafluorida (SF_6), serta nitrogen trifluorida (NF_3). Dalam praktik pelaporan akuntansi, seluruh gas tersebut dikonversikan ke dalam satuan baku yang dikenal sebagai Karbondioksida Ekuivalen (CO_2e) dengan menggunakan indikator *Global Warming Potential* (GWP) yang mencerminkan tingkat kontribusi masing-masing gas terhadap pemanasan global. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya keseragaman metode pengukuran emisi pada berbagai unit dan aktivitas operasional perusahaan. Dalam implementasinya, akuntansi karbon dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama. Pertama, Akuntansi Manajemen Karbon yang berorientasi internal, yang berfungsi sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Pendekatan ini sering memanfaatkan berbagai alat manajerial, salah satunya *Internal Carbon Pricing* (ICP), yaitu mekanisme penetapan harga karbon secara internal sebagai bentuk “pajak semu” guna memengaruhi keputusan investasi dan

operasional para manajer unit bisnis. Melalui pendekatan tersebut, upaya pengurangan emisi tidak hanya diposisikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai strategi transformasi model bisnis secara menyeluruh (Schoenmaker & Schramade, 2023). Kedua, Akuntansi Keuangan Karbon yang berorientasi eksternal dan menekankan aspek keandalan serta keterbandingan informasi. Fokus utama pendekatan ini adalah penyajian data kuantitatif terkait emisi karbon dalam laporan keberlanjutan maupun laporan terintegrasi. Informasi tersebut berperan sebagai sinyal bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja efisiensi karbon suatu perusahaan relatif terhadap perusahaan lain dalam industri yang sama.

2. Aset dan Liabilitas Karbon

Belum adanya standar akuntansi internasional yang sepenuhnya seragam dalam mengatur perlakuan hak emisi menimbulkan celah regulasi yang berdampak pada inkonsistensi serta keterbandingan laporan keuangan antarentitas. Sejak *IFRIC 3 (Emission Rights)* dicabut oleh IASB karena dinilai menimbulkan ketidaksinkronan antara posisi keuangan dan kinerja laba rugi, perusahaan menghadapi kompleksitas dalam menentukan klasifikasi yang tepat terhadap instrumen karbon. Kondisi tersebut menuntut akuntan untuk menggunakan pertimbangan profesional yang komprehensif dalam menentukan perlakuan akuntansi atas hak dan kewajiban emisi. Ketika entitas memperoleh kuota emisi baik melalui alokasi pemerintah tanpa biaya maupun melalui transaksi di pasar karbon, muncul pertanyaan mendasar mengenai karakteristik ekonominya. Apabila hak emisi tersebut diklasifikasikan sebagai aset takberwujud berdasarkan IAS 38, perusahaan harus memilih antara pendekatan biaya historis atau metode revaluasi sebagai dasar pengukuran.

Penggunaan model biaya historis sering menimbulkan keterbatasan, terutama ketika kuota diperoleh secara gratis sehingga tercatat dengan nilai nol. Pendekatan ini berpotensi tidak merepresentasikan nilai ekonomis maupun peran strategis hak emisi dalam aktivitas bisnis perusahaan, sehingga menciptakan aset yang secara ekonomi bernilai tetapi tidak tercermin secara memadai dalam laporan posisi keuangan. Sebaliknya, apabila perusahaan memilih model revaluasi atau mengelompokkan hak emisi sebagai persediaan sesuai IAS 2 karena adanya tujuan perdagangan jangka pendek, maka perusahaan harus siap menghadapi perubahan nilai yang sangat fluktuatif. Harga karbon yang sensitif terhadap perubahan kebijakan pemerintah maupun

dinamika pasar internasional menyebabkan nilai aset tersebut dapat berubah secara signifikan dan berpotensi memengaruhi indikator keuangan seperti tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan (Ascui, 2014; IFRS, 2023).

Dari sisi kewajiban, perlakuan akuntansi karbon berlandaskan prinsip bahwa pihak yang menghasilkan polusi bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Perusahaan yang menghasilkan emisi diwajibkan secara hukum untuk menyerahkan unit karbon yang setara dengan jumlah emisi aktual pada akhir periode kepatuhan. Berdasarkan IAS 37 mengenai provisi dan liabilitas kontinjensi, kewajiban tersebut harus diakui sebagai provisi ketika emisi telah terjadi.

Permasalahan teknis muncul ketika jumlah emisi yang dihasilkan melebihi kuota yang dimiliki perusahaan. Dalam kondisi tersebut, entitas harus memperkirakan biaya tambahan untuk memperoleh unit karbon guna menutup selisih kekurangan dengan mengacu pada harga pasar karbon pada tanggal pelaporan. Perubahan harga karbon yang drastis dapat menimbulkan risiko finansial yang cukup besar. Kenaikan harga secara tiba-tiba berpotensi meningkatkan nilai kewajiban secara signifikan dan berdampak langsung pada penurunan laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif serta mekanisme pemantauan emisi secara berkelanjutan agar estimasi kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak menimbulkan kesalahan informasi bagi para pemangku kepentingan (Schaltegger & Zvezdov, 2015). Hubungan antara perlakuan akuntansi terhadap aset karbon dan kewajiban emisi kerap menimbulkan ketidaksesuaian dalam metode pengukuran yang berimplikasi pada kualitas laba yang dihasilkan perusahaan.

Ketidakseimbangan ini dapat muncul ketika hak emisi sebagai aset dicatat menggunakan pendekatan biaya historis yang relatif stabil dan konservatif, sedangkan kewajiban emisi diukur berdasarkan nilai pasar terkini yang cenderung berubah-ubah. Perbedaan dasar pengukuran tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan bias dalam merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan secara komprehensif, tetapi juga dapat menghasilkan fluktuasi laba yang bersifat artifisial sehingga sulit diproyeksikan oleh investor. Dampaknya, tingkat keterbandingan laporan keuangan antarperusahaan menjadi berkurang, terutama pada entitas dengan tingkat emisi tinggi yang menerapkan kebijakan akuntansi berbeda-beda (Bebbington & Unerman, 2020). Lebih lanjut, ketidakharmonisan pengukuran ini dapat memunculkan

keraguan dari pasar terkait kemungkinan praktik greenwashing. Ketiadaan standar pelaporan yang benar-benar seragam membuka peluang bagi perusahaan untuk menonjolkan keberadaan aset karbon atau klaim penurunan emisi sebagai bagian dari strategi reputasi, tanpa mengungkapkan secara memadai kewajiban lingkungan yang melekat pada aktivitas operasionalnya.

Situasi ini menegaskan pentingnya pengungkapan yang lebih komprehensif dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang disampaikan tidak hanya berupa angka kuantitatif, tetapi juga perlu memuat penjelasan rinci mengenai asumsi yang digunakan, metode penilaian nilai wajar, sumber data pengukuran emisi, serta kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan dalam menghadapi volatilitas harga karbon di pasar internasional. Di sisi lain, tingkat transparansi dalam pelaporan karbon semakin berpengaruh terhadap aspek keuangan strategis perusahaan, khususnya terkait biaya modal. Investor dan pelaku pasar cenderung menetapkan tingkat premi risiko yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang kurang terbuka dalam mengungkapkan informasi karbonnya. Sebaliknya, perusahaan yang mampu menyajikan pelaporan karbon yang dapat dipercaya serta telah memperoleh verifikasi atau assurance dari pihak independen biasanya dipersepsikan memiliki tingkat risiko transisi yang lebih rendah. Transparansi tersebut memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa manajemen memahami dan mampu mengelola risiko perubahan iklim secara memadai, sekaligus meningkatkan legitimasi perusahaan di hadapan regulator maupun komunitas global. Oleh karena itu, integrasi informasi keuangan dan keberlanjutan melalui kerangka IFRS S2 menjadi tuntutan profesional agar pelaporan karbon tidak sekadar bersifat administratif, melainkan benar-benar mencerminkan akuntabilitas yang substantif (GRI, 2021; IFRS, 2023).

3. Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder

Dari sudut pandang sosial maupun organisasi, penerapan akuntansi karbon tidak dapat dipahami hanya sebagai keputusan teknis dalam pengelolaan perusahaan, melainkan sebagai strategi adaptif terhadap tekanan eksternal yang semakin kuat. Fenomena ini dapat dianalisis melalui integrasi beberapa pendekatan teoretis yang saling melengkapi. Teori legitimasi berangkat dari pandangan bahwa terdapat kesepakatan tidak tertulis antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Dalam era keterbukaan informasi digital dan meningkatnya kepedulian

terhadap isu lingkungan, rekam jejak emisi karbon perusahaan menjadi perhatian publik yang memiliki dimensi sosial dan politik. Perusahaan dengan tingkat emisi tinggi, seperti industri energi berbasis fosil, manufaktur semen, maupun sektor penerbangan, berpotensi menghadapi penurunan legitimasi apabila tidak mampu menunjukkan komitmen nyata dalam pengurangan emisi karbon.

Dalam situasi tersebut, praktik akuntansi karbon sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempertahankan reputasi organisasi serta menghindari tekanan sosial, misalnya dalam bentuk penolakan masyarakat atau aksi boikot konsumen. Meski demikian, sejumlah kajian kritis (Suchman, 1995; Deegan, 2019) menyoroti potensi munculnya kepatuhan yang bersifat simbolis. Tanpa adanya proses verifikasi independen, pelaporan emisi berisiko hanya menjadi strategi komunikasi yang menampilkan citra ramah lingkungan tanpa diikuti perubahan operasional yang substansial. Oleh sebab itu, penerapan akuntansi karbon yang efektif seharusnya mampu memastikan bahwa legitimasi perusahaan dibangun melalui peningkatan kinerja lingkungan yang nyata, bukan sekadar melalui representasi simbolik. Dalam kerangka teori *stakeholder*, lingkungan dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan meskipun tidak memiliki kemampuan menyuarakan kepentingannya secara langsung. Kepentingan tersebut perlu direpresentasikan melalui indikator dan informasi akuntansi yang terukur dan dapat dipercaya.

Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menitikberatkan pada kepentingan pemegang saham, saat ini tekanan juga datang secara signifikan dari pemangku kepentingan finansial. Perusahaan pengelola aset global, seperti BlackRock dan Vanguard, telah memasukkan indikator intensitas karbon sebagai salah satu parameter penting dalam proses evaluasi risiko dan penentuan keputusan investasi (Schoenmaker & Schramade, 2023). Perusahaan modern tidak lagi hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi bagi pemilik modal, tetapi juga harus menyeimbangkan berbagai tuntutan dari berbagai pihak. Tuntutan tersebut mencakup kepatuhan terhadap regulasi pajak karbon, permintaan konsumen terhadap produk yang lebih ramah lingkungan, serta ekspektasi karyawan untuk bekerja pada organisasi yang memiliki tanggung jawab ekologis. Dalam konteks ini, akuntansi karbon berperan sebagai sarana komunikasi yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan tuntutan keberlanjutan yang semakin kompleks (Freeman, 1984). Pendekatan institusional menyoroti bahwa adopsi akuntansi

karbon juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan tekanan normatif global.

Perusahaan sering mengimplementasikan praktik pelaporan karbon bukan semata-mata karena pertimbangan efisiensi internal, tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan regulatif dari pemerintah, otoritas pasar modal, serta dorongan untuk mengikuti praktik yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai pemimpin industri. Fenomena ini dikenal sebagai proses isomorfisme institusional. Selain itu, aspek kekuasaan juga tercermin dalam proses penetapan standar internasional. Pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan kriteria mengenai tingkat emisi yang dapat diterima secara tidak langsung memengaruhi penilaian nilai ekonomi aset karbon secara global. Dengan demikian, akuntansi karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan, tetapi juga menjadi ruang interaksi kepentingan politik dan ekonomi, di mana data lingkungan digunakan untuk menilai keberlanjutan model bisnis dalam sistem ekonomi global yang semakin membatasi aktivitas dengan intensitas emisi tinggi.

C. PENGUKURAN DAN PELAPORAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERDASARKAN GHG PROTOCOL.

Penerapan akuntansi karbon yang andal menuntut adanya standar metodologis yang mampu menerjemahkan berbagai aktivitas operasional perusahaan mulai dari penggunaan bahan bakar, konsumsi energi listrik, hingga kegiatan logistic ke dalam satuan emisi yang seragam dan dapat dibandingkan antarentitas. Tanpa pedoman pengukuran yang terstandar, pelaporan emisi berpotensi menjadi subjektif, sehingga menyulitkan proses verifikasi, audit, maupun evaluasi risiko oleh para investor. Dalam kerangka inilah *The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)* berkembang sebagai pedoman utama yang berfungsi sebagai referensi global dalam praktik akuntansi keberlanjutan. Pendekatan yang ditawarkan oleh *GHG Protocol* tidak hanya berperan sebagai metode kuantifikasi emisi, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola data lingkungan yang sistematis. Kerangka kerja ini memastikan bahwa setiap sumber emisi dapat ditelusuri dan dialokasikan secara proporsional kepada pihak yang bertanggung jawab.

Standar tersebut mewajibkan perusahaan menetapkan batas tanggung jawab melalui penentuan *organizational boundaries* dan *operational boundaries*, yang secara konseptual sejalan dengan

penentuan ruang lingkup entitas pelaporan dalam akuntansi keuangan konsolidasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan yang meliputi relevansi, kelengkapan informasi, konsistensi, transparansi, serta tingkat akurasi yang tinggi, *GHG Protocol* menggeser pelaporan lingkungan dari sekadar deskripsi naratif menjadi informasi kuantitatif yang memiliki kredibilitas dan nilai ekonomi. Penerapan *GHG Protocol* dalam standar pelaporan keberlanjutan global terbaru, khususnya *IFRS S2*, menandai perubahan paradigma dalam praktik pelaporan perusahaan. Pengukuran emisi tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap laporan tahunan, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem keterbukaan informasi korporasi. Melalui klasifikasi emisi ke dalam tiga kategori utama atau Scope, perusahaan dapat memetakan sumber risiko perubahan iklim secara lebih sistematis, mengidentifikasi potensi efisiensi operasional, serta memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi dari pemangku kepentingan internasional.

1. Metodologi GHG Protocol

Dalam praktik pelaporan keberlanjutan, The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) yang disusun oleh World Resources Institute (WRI) bersama World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dipandang sebagai pedoman paling komprehensif dan banyak digunakan secara global. Kerangka kerja ini menyediakan landasan metodologis yang sistematis bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengungkapkan emisi gas rumah kaca secara selaras dengan praktik pelaporan keuangan internasional (WRI & WBCSD, 2004). Kekuatan utama GHG Protocol terletak pada penerapan lima prinsip inti yang diadaptasi dari konsep Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menjamin bahwa informasi emisi yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan dapat diverifikasi oleh auditor maupun investor:

- Relevansi menuntut agar data emisi mencerminkan secara akurat aktivitas operasional perusahaan serta mampu mendukung kebutuhan pengambilan keputusan para pengguna laporan.
- Kelengkapan mengharuskan perusahaan melaporkan seluruh sumber emisi yang berada dalam batas pelaporan yang telah ditetapkan, termasuk memberikan penjelasan apabila terdapat sumber emisi yang tidak dimasukkan.

- Konsistensi mengacu pada penggunaan metode pengukuran yang seragam dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan analisis tren dan perbandingan kinerja emisi antarperiode.
- Transparansi menekankan pentingnya pengungkapan terbuka mengenai asumsi, referensi data, dan teknik perhitungan yang digunakan dalam proses estimasi emisi.
- Akurasi bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengukuran emisi sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Patchell, 2018).

2. Kategori Emisi

Untuk menghindari tumpang tindih pelaporan dan memastikan akuntabilitas yang jelas, GHG Protocol mengklasifikasikan emisi ke dalam tiga lingkup atau *scopes*. Pembagian ini membantu perusahaan membedakan antara emisi yang mereka kendalikan secara langsung dan emisi yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis mereka di sepanjang rantai nilai (WRI & WBCSD, 2004).

Scope 1: Emisi Langsung (*Direct Emissions*) mencakup emisi yang dilepaskan ke atmosfer dari sumber-sumber yang dimiliki atau dikendalikan secara fisik oleh entitas pelapor. Dalam konteks akuntansi keuangan, emisi ini sering kali memiliki korelasi langsung dengan biaya operasional utama.

- Pembakaran Stasioner: Emisi dari pembakaran bahan bakar di fasilitas tetap, seperti ketel uap (*boilers*), turbin, atau tungku pembakaran.
- Pembakaran Bergerak: Emisi dari kendaraan yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan (mobil operasional, truk distribusi).
- Emisi Proses: Emisi yang dihasilkan dari reaksi kimia dalam proses manufaktur, seperti produksi semen atau petrokimia.
- Emisi Pelarian (*Fugitive Emissions*): Kebocoran gas yang tidak disengaja, seperti dari sistem pendingin udara (AC) atau pipa gas (GRI, 2021).
- Sitasi: Menurut GRI 305: *Emissions Standard*, pelaporan Scope 1 bersifat fundamental karena mencerminkan dampak lingkungan langsung dari aset yang tercatat di neraca perusahaan.

Scope 2: Emisi Tidak Langsung dari Energi (*Energy Indirect Emissions*) mencakup emisi GRK dari pembangkitan listrik, uap, panas, atau pendingin yang dibeli atau diperoleh oleh perusahaan dari pihak ketiga. Meskipun emisi tersebut secara fisik terjadi di

lokasi pembangkit listrik, perusahaan pelapor bertanggung jawab karena merekalah yang mengonsumsi energi tersebut. Metode pelaporan GHG Protocol mewajibkan dua metode pelaporan untuk Scope 2. Metode Berbasis Lokasi (menggunakan rata-rata faktor emisi jaringan listrik regional) dan Metode Berbasis Pasar (mencerminkan pilihan kontrak perusahaan, seperti pembelian Sertifikat Energi Terbarukan/REC) (Ranganathan et al., 2025).

Scope 3: Emisi Rantai Nilai (*Value Chain Emissions*) mencakup semua emisi tidak langsung lainnya yang terjadi di rantai nilai perusahaan, baik di hulu (*upstream*) maupun di hilir (*downstream*). Bagi banyak organisasi, Scope 3 mewakili porsi terbesar dari total jejak karbon, sering kali mencapai 70% hingga 90% dari total emisi (Huang et al., 2022).

- Aktivitas Hulu: Mencakup pembelian barang dan jasa, modal barang, transportasi dan distribusi pemasok, serta perjalanan dinas karyawan.
- Aktivitas Hilir: Mencakup pemrosesan produk yang dijual, penggunaan produk oleh konsumen (misalnya emisi dari penggunaan kendaraan yang diproduksi pabrikan otomotif), dan pengolahan limbah akhir produk.

Kesulitan utama dalam Scope 3 adalah ketergantungan pada data eksternal dari pemasok atau konsumen yang sering kali tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai.

D. TANTANGAN DAN MASA DEPAN AKUNTANSI KARBON DI INDONESIA

Indonesia menempuh langkah progresif dalam merespons tantangan perubahan iklim melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi tersebut menjadi tonggak penting yang menegaskan komitmen negara dalam menginternalisasi dampak lingkungan ke dalam sistem ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkenalkan dua mekanisme utama, yaitu perdagangan karbon (*cap-and-trade*) dan pengenaan pajak karbon (*cap-and-tax*), sebagai instrumen untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca. Kehadiran kebijakan tersebut menandai perubahan paradigma, di mana emisi karbon tidak lagi dipandang semata sebagai konsekuensi aktivitas industri, tetapi telah bertransformasi menjadi kewajiban ekonomi yang membawa implikasi finansial bagi entitas bisnis.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah menyusun peta jalan implementasi pajak karbon yang terintegrasi dengan kebijakan reformasi perpajakan nasional. Tahap awal penerapan kebijakan ini

difokuskan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara yang dikenal sebagai salah satu kontributor utama emisi karbon. Penetapan sektor prioritas tersebut mencerminkan pendekatan strategis pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan energi nasional dengan upaya pengendalian dampak lingkungan. Transformasi kebijakan ini membawa konsekuensi langsung terhadap praktik dan peran profesi akuntansi. Sistem pelaporan yang sebelumnya bersifat sukarela kini beralih menuju mekanisme kepatuhan yang lebih ketat melalui penerapan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Kondisi tersebut menuntut pengembangan metode pencatatan yang mampu mengintegrasikan perhitungan pajak konvensional dengan pengukuran dan atribusi emisi karbon secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, profesi akuntansi tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi keuangan, tetapi juga menjadi aktor strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan ekonomi modern. Akuntansi karbon saat ini bukan lagi sekadar isu lingkungan yang bersifat periferal, melainkan telah menjadi transformasi fundamental dalam disiplin ilmu akuntansi yang mendefinisikan ulang nilai sebuah entitas di abad ke-21 melalui integrasi dimensi ekologis ke dalam nilai finansial. Keberhasilan implementasi sinergis antara *GHG Protocol* dan **IFRS S2** di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi strategis antara regulator, profesi akuntan, dan penyedia teknologi guna membangun ekosistem pelaporan yang tangguh. Sebagai langkah konkret, terdapat urgensi bagi organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mempercepat standarisasi kurikulum dan pelatihan sertifikasi akuntansi karbon bagi para akuntan publik agar kompetensi sumber daya manusia selaras dengan tuntutan global.

E. SIMPULAN

Dunia sedang bergerak menuju perubahan besar. Isu perubahan iklim, krisis energi, dan degradasi lingkungan bukan lagi sekadar wacana global, tetapi telah menjadi realitas yang memengaruhi kehidupan manusia, dunia usaha, serta arah pembangunan ekonomi. Dalam situasi ini, akuntansi hadir tidak hanya sebagai bahasa bisnis, tetapi juga sebagai alat refleksi tanggung jawab manusia terhadap bumi yang menjadi tempat hidup bersama. Melalui pembahasan dalam buku ini, kita dapat melihat bahwa akuntansi karbon merupakan bentuk evolusi ilmu akuntansi yang mengikuti dinamika zaman. Jika sebelumnya akuntansi berfokus pada pencatatan transaksi ekonomi,

kini akuntansi turut berperan dalam mencatat dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa ilmu akuntansi bersifat dinamis dan terus berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat global.

Pemahaman tentang akuntansi karbon bukan sekadar penguasaan konsep teknis penghitungan emisi atau penyusunan laporan keberlanjutan. Lebih dari itu, pembelajaran ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa setiap aktivitas bisnis memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan. Seorang akuntan masa depan tidak hanya bertugas memastikan ketepatan angka, tetapi juga berperan sebagai penjaga transparansi, pengawal akuntabilitas, dan mitra strategis dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Perkembangan regulasi dan tuntutan pasar global menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Perusahaan yang mampu mengelola dampak lingkungannya dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih kuat, reputasi yang lebih baik, serta peluang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks inilah peran akuntansi karbon menjadi semakin penting sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

Melalui buku ini, diharapkan dapat melihat profesi akuntansi dari perspektif yang lebih luas. Profesi ini tidak hanya berhubungan dengan laporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan masa depan pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Tantangan yang akan dihadapi generasi akuntan mendatang tentu semakin kompleks, terutama dengan hadirnya teknologi digital, tuntutan transparansi global, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan. Pada akhirnya, perjalanan mempelajari akuntansi karbon merupakan bagian dari perjalanan memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak hanya menjadi bekal akademik, tetapi juga menjadi landasan moral dan profesional dalam menjalankan peran sebagai akuntan yang berintegritas, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bumi.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, J., & Unerman, J. (2020). Advancing research into accounting and the UN sustainable development goals. *Journal Auditing and Accountability*, 2(1), 1–19.
- Carney, M. (2015). Breaking the tragedy of the horizon–climate change and financial stability. *Speech given at Lloyd’s of London*, 29(2), 220–230.
- GRI. (2021). *Consolidated Set of the GRI Standards*. New York : GRI.
- IFRS. (2023). *Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. New York : IFRS.
- ISSB. (2023). *ASEAN securities regulators team up with ISSB to mark global launch of sustainability disclosure standards*. ASEAN Capital Markets Forum.
- Jumratin. (2025). Akuntansi sebagai Media Komunikasi Keberlanjutan. *Jurnal Economia*, 4(9), 1–7.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan*. Jakarta : Republik Indonesia RI.
- Perpres. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Republik Indonesia RI.
- Ranganathan, J., Corbier, L., Bhatia, P., & Schmitz, S. (2025). *A Corporate Accounting and Reporting Standard*. World Resources Institute.
- Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2023). *Corporate finance for long-term value*. New York : Springer.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- WRI, & WBCSD. (2004). *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*. New York: Grenn House Gas Protocol.

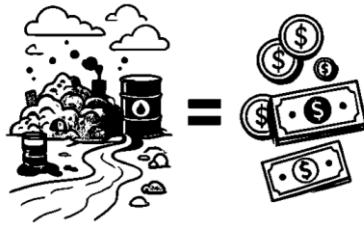
■ TENTANG PENULIS



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.
Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Yogyakarta pada 6 Desember 1991. Ia merupakan dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Pendidikan Magister Akuntansi diselesaikannya di Universitas Gadjah Mada, yang memperkuat fondasi akademik dan profesionalnya di bidang akuntansi. Sebagai akademisi, ia berkomitmen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pembelajaran yang inovatif, penelitian terapan, serta pengabdian kepada masyarakat. Bidang kepakaran yang ditekuni meliputi akuntansi keuangan, perpajakan, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan UMKM. Sejumlah artikel ilmiah telah dipublikasikan pada jurnal nasional, disertai karya tulis terdaftar HKI yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis akuntansi. Selain aktif dalam publikasi ilmiah, penulis juga memiliki pengalaman dalam penyusunan dan penerbitan buku ajar. Buku ini merupakan karya keduanya yang disusun sebagai bentuk pengembangan keilmuan sekaligus kontribusi nyata dalam menyediakan referensi pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa serta praktisi. Pengalaman menulis buku sebelumnya menjadi bekal penting dalam menghadirkan materi yang lebih terstruktur, kontekstual, dan mudah dipahami. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang mendorong lahirnya generasi pembelajar yang kritis, adaptif, dan mampu mengimplementasikan konsep akuntansi secara bertanggung jawab dalam praktik nyata.

Bab 08



BIAYA LINGKUNGAN DAN INTERNALIASI EKSTERNALITAS

Nurul Hidayah, S.Pd., M.Sc.
Universitas Negeri Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Peningkatan aktivitas ekonomi dan industrialisasi telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi global. Namun, aktivitas tersebut juga menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti pencemaran udara, limbah industri, deforestasi, serta emisi gas rumah kaca. Dalam banyak kasus, dampak lingkungan tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam sistem akuntansi konvensional karena biaya yang muncul sering kali ditanggung oleh masyarakat atau lingkungan, bukan oleh perusahaan yang menghasilkan dampak tersebut. Kondisi ini dikenal sebagai eksternalitas lingkungan. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas produksi atau konsumsi suatu pihak memberikan dampak kepada pihak lain tanpa adanya kompensasi ekonomi yang memadai (Pigou, 1920). Dalam konteks lingkungan, eksternalitas sering muncul dalam bentuk pencemaran air, udara, maupun kerusakan ekosistem yang tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi perusahaan.

Akuntansi konvensional umumnya berfokus pada pencatatan transaksi ekonomi yang bersifat finansial dan dapat diukur secara moneter. Akibatnya, banyak biaya lingkungan yang tidak tercatat secara eksplisit dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi menjadi kurang mencerminkan biaya ekonomi yang sebenarnya dari

suatu aktivitas bisnis. Dalam kerangka akuntansi keberlanjutan, perusahaan didorong untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan (Schaltegger & Burritt, 2017). Dengan memasukkan biaya lingkungan dalam sistem akuntansi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait pengelolaan sumber daya, efisiensi produksi, dan pengurangan dampak lingkungan.

Salah satu konsep penting dalam akuntansi keberlanjutan adalah internalisasi eksternalitas, yaitu proses memasukkan biaya sosial atau lingkungan yang sebelumnya berada di luar sistem pasar ke dalam perhitungan biaya perusahaan. Internalisasi eksternalitas dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti regulasi pemerintah, pajak lingkungan, sistem perdagangan emisi, maupun penerapan akuntansi lingkungan dalam perusahaan (Stiglitz, 2019). Melalui pendekatan ini, biaya yang sebelumnya ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada pihak yang menyebabkan dampak tersebut. Dengan demikian, perusahaan memiliki insentif ekonomi untuk mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

B. KONSEP BIAYA LINGKUNGAN

Biaya lingkungan merupakan salah satu komponen penting dalam akuntansi keberlanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Menurut United States Environmental Protection Agency (EPA), biaya lingkungan adalah seluruh biaya yang timbul dari aktivitas yang berkaitan dengan pencegahan, pengurangan, atau perbaikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan (EPA, 2015). Schaltegger dan Burritt (2017) mendefinisikan biaya lingkungan sebagai biaya yang muncul akibat penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian polusi, serta upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh organisasi. Biaya ini dapat muncul baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Dalam praktiknya, banyak biaya lingkungan yang tersembunyi dalam akun biaya produksi atau biaya operasional lainnya.

Contohnya, biaya energi, biaya pengolahan limbah, biaya pengendalian emisi, serta biaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Jika biaya-biaya tersebut tidak diidentifikasi secara jelas, maka perusahaan dapat kehilangan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Akuntansi lingkungan berperan dalam membantu organisasi mengidentifikasi dan mengukur

biaya lingkungan secara sistematis. Dengan informasi tersebut, manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap aktivitas operasional perusahaan dan mengambil keputusan yang lebih berkelanjutan. Penerapan konsep biaya lingkungan juga berkaitan dengan pendekatan *eco-efficiency*, yaitu upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi dampak lingkungan (World Business Council for Sustainable Development, 2000). Perusahaan yang mampu mengelola biaya lingkungan dengan baik tidak hanya dapat mengurangi risiko lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing dan reputasi perusahaan.

C. KLASIFIKASI BIAYA LINGKUNGAN

Dalam akuntansi keberlanjutan, identifikasi dan klasifikasi biaya lingkungan menjadi langkah penting untuk memahami dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan serta menentukan strategi pengelolaan yang tepat. Tanpa klasifikasi yang jelas, banyak biaya lingkungan yang tersembunyi dalam berbagai akun biaya operasional sehingga sulit diidentifikasi dan dikendalikan oleh manajemen. Hansen dan Mowen (2007) mengklasifikasikan biaya lingkungan menjadi empat kategori utama, yaitu biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*), biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*), biaya kegagalan internal (*internal failure costs*), dan biaya kegagalan eksternal (*external failure costs*). Klasifikasi ini dikembangkan dari konsep biaya kualitas (*cost of quality*) dalam akuntansi manajemen yang kemudian diadaptasi untuk konteks pengelolaan lingkungan. Klasifikasi tersebut membantu perusahaan memahami bahwa pengeluaran yang dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan sering kali jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang harus ditanggung apabila kerusakan lingkungan telah terjadi (Schaltegger & Burritt, 2017).

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (Environmental Prevention Costs)

Biaya pencegahan lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebelum dampak tersebut terjadi. Biaya ini berkaitan dengan berbagai aktivitas yang bertujuan mengurangi potensi dampak negatif terhadap lingkungan melalui perencanaan, desain, serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya pencegahan merupakan investasi strategis yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kemungkinan

munculnya biaya lingkungan di masa depan. Dengan kata lain, biaya ini bersifat proaktif karena berfokus pada upaya pencegahan daripada perbaikan kerusakan yang telah terjadi. Beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam biaya pencegahan lingkungan antara lain:

- desain produk ramah lingkungan (*eco-design*)
- penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan
- pengembangan teknologi produksi bersih (*clean technology*)
- pelatihan karyawan terkait pengelolaan lingkungan
- penerapan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001
- penelitian dan pengembangan untuk mengurangi limbah produksi

Sebagai contoh, perusahaan manufaktur dapat menginvestasikan dana untuk mengembangkan teknologi produksi yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan bahan baku. Meskipun investasi awal relatif besar, upaya tersebut dapat mengurangi biaya pengolahan limbah serta menurunkan risiko pelanggaran terhadap regulasi lingkungan di masa depan. Dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, biaya pencegahan juga berkaitan dengan konsep *eco-efficiency*, yaitu upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi dampak lingkungan (World Business Council for Sustainable Development, 2000). Perusahaan yang mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada biaya pencegahan umumnya mampu mengurangi total biaya lingkungan secara keseluruhan dalam jangka panjang.

2. Biaya Deteksi Lingkungan (Environmental Detection Costs)

Biaya deteksi lingkungan merupakan biaya yang berkaitan dengan aktivitas pemantauan, pengukuran, dan evaluasi dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan. Tujuan utama dari biaya ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh regulasi maupun kebijakan internal perusahaan. Menurut Schaltegger dan Burritt (2017), aktivitas deteksi lingkungan berperan penting dalam sistem *environmental management accounting* (EMA) karena memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pencemaran serta mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam biaya deteksi lingkungan antara lain:

- audit lingkungan
- inspeksi proses produksi

- pengujian kualitas air, tanah, dan udara
- pemantauan emisi gas buang
- pengukuran tingkat kebisingan
- evaluasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan

Sebagai contoh, perusahaan pertambangan secara rutin melakukan pengujian kualitas air di sekitar area operasional untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak mencemari sumber air masyarakat. Biaya yang dikeluarkan untuk pengujian laboratorium, pengambilan sampel, serta analisis data lingkungan merupakan bagian dari biaya deteksi lingkungan. Biaya deteksi memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah lingkungan secara dini sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum kerusakan yang lebih serius terjadi. Dengan demikian, biaya ini berperan sebagai mekanisme pengendalian dalam sistem manajemen lingkungan perusahaan.

3. Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Costs)

Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang timbul ketika pencemaran lingkungan atau limbah telah terjadi dalam proses produksi, namun dampaknya masih dapat ditangani di dalam perusahaan sebelum menimbulkan kerugian bagi pihak eksternal. Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya kegagalan internal mencerminkan ketidakefisienan dalam proses produksi yang menyebabkan timbulnya limbah atau pencemaran yang seharusnya dapat dicegah melalui perencanaan yang lebih baik. Beberapa contoh biaya kegagalan internal antara lain:

- biaya pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan
- biaya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
- biaya perbaikan proses produksi yang menghasilkan polusi
- biaya daur ulang material
- biaya energi yang terbuang akibat proses produksi yang tidak efisien

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan kimia mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan agar memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah. Biaya pengolahan limbah tersebut termasuk dalam kategori biaya kegagalan internal karena limbah sudah dihasilkan oleh proses produksi. Biaya kegagalan internal juga sering disebut sebagai *hidden environmental costs* karena sering kali tidak diidentifikasi secara terpisah dalam laporan keuangan perusahaan (Burritt & Schaltegger, 2014). Padahal, identifikasi biaya ini sangat penting untuk membantu

manajemen menemukan sumber inefisiensi dalam proses produksi.

4. Biaya Kegagalan Eksternal (External Failure Costs)

Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang muncul ketika dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan telah mempengaruhi pihak eksternal seperti masyarakat, pemerintah, atau ekosistem. Biaya ini biasanya muncul setelah kerusakan lingkungan terjadi dan sering kali menimbulkan konsekuensi ekonomi maupun reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Menurut Gray (2010), biaya kegagalan eksternal merupakan bentuk nyata dari eksternalitas negatif yang sebelumnya tidak tercermin dalam sistem akuntansi perusahaan. Ketika dampak lingkungan telah meluas ke masyarakat, perusahaan dapat menghadapi berbagai konsekuensi seperti tuntutan hukum, sanksi administratif, maupun penurunan kepercayaan publik. Beberapa contoh biaya kegagalan eksternal antara lain:

- denda akibat pelanggaran regulasi lingkungan
- biaya kompensasi kepada masyarakat terdampak
- biaya pemulihan lingkungan (*environmental remediation*)
- biaya litigasi atau tuntutan hukum
- kerugian reputasi yang mempengaruhi nilai perusahaan

Sebagai contoh, perusahaan yang menyebabkan pencemaran sungai dapat diwajibkan oleh pemerintah untuk membayar denda serta melakukan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, perusahaan juga mungkin harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak oleh pencemaran tersebut. Biaya kegagalan eksternal biasanya merupakan kategori biaya lingkungan yang paling besar dan paling berisiko bagi perusahaan. Selain berdampak pada kondisi keuangan, biaya ini juga dapat merusak reputasi perusahaan serta menurunkan kepercayaan investor dan konsumen (Schaltegger & Burritt, 2017). Oleh karena itu, dalam perspektif manajemen lingkungan modern, perusahaan didorong untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada biaya pencegahan dan deteksi guna mengurangi kemungkinan munculnya biaya kegagalan internal maupun eksternal di masa depan.

D. KONSEP EKSTERNALITAS DALAM EKONOMI LINGKUNGAN

Konsep eksternalitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi lingkungan yang menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi dapat menimbulkan dampak terhadap pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi ekonomi tersebut. Istilah eksternalitas pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh ekonom Inggris Arthur Cecil Pigou dalam karyanya *The Economics of Welfare* (Pigou, 1920). Pigou menjelaskan bahwa eksternalitas terjadi ketika kegiatan produksi atau konsumsi suatu pihak memengaruhi kesejahteraan pihak lain tanpa adanya kompensasi yang memadai melalui mekanisme pasar. Dalam kondisi pasar yang ideal, harga suatu barang atau jasa seharusnya mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut, termasuk biaya sosial dan lingkungan.

Namun dalam praktiknya, banyak aktivitas ekonomi yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan atau masyarakat yang tidak tercermin dalam harga pasar. Ketika biaya atau manfaat tersebut tidak tercermin dalam sistem harga, maka terjadilah eksternalitas (Perman et al., 2011). Secara umum, eksternalitas dapat didefinisikan sebagai dampak tidak langsung dari suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut (Tietenberg & Lewis, 2018). Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada apakah aktivitas tersebut memberikan manfaat atau kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ekonomi lingkungan, konsep eksternalitas menjadi sangat penting karena banyak aktivitas produksi dan konsumsi yang menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, perubahan iklim, serta degradasi ekosistem.

1. Jenis-Jenis Eksternalitas

Eksternalitas pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif.

- **Eksternalitas Positif**

Eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas ekonomi suatu pihak memberikan manfaat bagi pihak lain tanpa adanya kompensasi ekonomi. Dalam situasi ini, pihak yang memperoleh manfaat tidak perlu membayar kepada pihak yang menghasilkan manfaat tersebut. Salah satu contoh eksternalitas positif dalam konteks lingkungan adalah kegiatan reboisasi atau penghijauan yang dilakukan oleh suatu

perusahaan atau komunitas. Aktivitas tersebut dapat meningkatkan kualitas udara, mengurangi erosi tanah, serta meningkatkan keanekaragaman hayati yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Contoh lain dari eksternalitas positif adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Ketika suatu perusahaan mengurangi emisi polusi melalui penggunaan teknologi bersih, masyarakat sekitar akan memperoleh manfaat berupa kualitas lingkungan yang lebih baik meskipun mereka tidak secara langsung membayar atas upaya tersebut. Menurut Stiglitz (2019), eksternalitas positif sering menyebabkan *underproduction*, yaitu kondisi ketika suatu aktivitas yang sebenarnya memberikan manfaat sosial yang besar justru diproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit dari tingkat optimal karena pelaku ekonomi tidak memperoleh seluruh manfaat dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sering memberikan insentif seperti subsidi, insentif pajak, atau dukungan kebijakan untuk mendorong aktivitas yang menghasilkan eksternalitas positif.

- **Eksternalitas Negatif**

Eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas produksi atau konsumsi suatu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya kompensasi ekonomi. Dalam konteks lingkungan, eksternalitas negatif merupakan masalah yang paling sering terjadi karena banyak aktivitas industri yang menghasilkan polusi atau kerusakan lingkungan. Contoh eksternalitas negatif yang umum terjadi adalah pencemaran udara yang dihasilkan oleh industri, emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, pencemaran air akibat limbah industri, serta kebisingan dari aktivitas transportasi atau pembangunan infrastruktur. Sebagai ilustrasi, sebuah pabrik yang memproduksi barang konsumsi mungkin membuang limbah ke sungai untuk mengurangi biaya produksi. Meskipun tindakan tersebut dapat menurunkan biaya operasional perusahaan, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai harus menanggung dampak pencemaran berupa penurunan kualitas air, gangguan kesehatan, serta kerusakan ekosistem perairan. Dalam situasi ini, biaya yang ditanggung oleh masyarakat disebut sebagai biaya eksternal (*external cost*) karena tidak tercermin dalam biaya produksi perusahaan. Akibatnya harga produk yang dihasilkan menjadi lebih rendah dibandingkan biaya sosial yang sebenarnya. Menurut Permana et al. (2011), kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara

biaya privat (private cost) yang ditanggung oleh produsen dengan biaya sosial (social cost) yang sebenarnya ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan.

2. Eksternalitas dan Kegagalan Pasar (Market Failure)

Keberadaan eksternalitas sering kali menyebabkan kegagalan pasar (*market failure*), yaitu kondisi ketika mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam pasar yang mengalami kegagalan, harga barang atau jasa tidak mencerminkan seluruh biaya atau manfaat yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi. Menurut Stiglitz (2019), eksternalitas merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pasar dalam sistem ekonomi modern. Ketika produsen tidak diwajibkan untuk menanggung biaya lingkungan dari aktivitas mereka, maka mereka cenderung menghasilkan tingkat polusi yang lebih tinggi dari tingkat yang secara sosial optimal. Sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah tanpa pengolahan mungkin dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan jangka pendek. Namun secara keseluruhan, masyarakat harus menanggung biaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta biaya pemulihan ekosistem yang jauh lebih besar.

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, solusi terhadap masalah eksternalitas biasanya melibatkan intervensi kebijakan seperti pajak lingkungan (Pigouvian tax), regulasi lingkungan, sistem perdagangan emisi, maupun penerapan mekanisme akuntansi lingkungan dalam perusahaan (Tietenberg & Lewis, 2018). Dengan memasukkan biaya lingkungan ke dalam sistem pengambilan keputusan ekonomi, perusahaan akan memiliki insentif untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Pendekatan ini juga menjadi dasar bagi konsep internalisasi eksternalitas, yaitu proses memasukkan biaya sosial atau lingkungan yang sebelumnya berada di luar sistem pasar ke dalam struktur biaya perusahaan. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, pemahaman mengenai eksternalitas menjadi sangat penting karena membantu perusahaan mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya serta merancang strategi pengelolaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

E. INTERNALISASI EKSTERNALITAS DALAM AKUNTANSI

Internalisasi eksternalitas merupakan konsep penting dalam ekonomi lingkungan dan akuntansi keberlanjutan yang bertujuan untuk memasukkan biaya sosial dan lingkungan yang sebelumnya berada di luar sistem pasar ke dalam struktur biaya ekonomi suatu organisasi. Dalam banyak aktivitas ekonomi, dampak lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, atau kerusakan ekosistem sering kali tidak tercermin dalam biaya produksi perusahaan. Akibatnya, biaya yang sebenarnya ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Konsep internalisasi eksternalitas pertama kali dijelaskan dalam teori ekonomi kesejahteraan oleh Pigou (1920), yang menekankan pentingnya mekanisme kebijakan untuk mengoreksi kegagalan pasar yang disebabkan oleh eksternalitas. Dalam konteks ekonomi modern, internalisasi eksternalitas bertujuan untuk memastikan bahwa harga barang dan jasa mencerminkan seluruh biaya yang timbul dari proses produksinya, termasuk biaya lingkungan dan sosial.

Menurut Tietenberg dan Lewis (2018), internalisasi eksternalitas dapat diartikan sebagai proses mengalihkan biaya eksternal yang sebelumnya ditanggung oleh masyarakat ke dalam sistem biaya produsen atau konsumen yang menyebabkan dampak tersebut. Dengan demikian, pelaku ekonomi memiliki insentif untuk mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam praktiknya, internalisasi eksternalitas dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme kebijakan dan praktik akuntansi yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitasnya. Beberapa mekanisme utama yang sering digunakan dalam proses internalisasi eksternalitas antara lain pajak lingkungan, sistem perdagangan emisi, regulasi pemerintah, serta penerapan akuntansi lingkungan dalam perusahaan.

1. Pajak Lingkungan (Environmental Tax)

Salah satu instrumen kebijakan yang paling dikenal dalam proses internalisasi eksternalitas adalah pajak lingkungan atau *environmental tax*. Pajak lingkungan merupakan instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenakan biaya tambahan terhadap aktivitas yang menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep pajak lingkungan didasarkan pada gagasan *Pigouvian tax*, yaitu pajak yang dikenakan pada

aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif agar biaya sosial dari aktivitas tersebut tercermin dalam harga pasar (Pigou, 1920). Dengan adanya pajak lingkungan, perusahaan yang menghasilkan polusi harus menanggung biaya tambahan yang mencerminkan dampak lingkungan dari aktivitas.

Sebagai contoh, pemerintah dapat mengenakan pajak karbon terhadap perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil. Pajak tersebut bertujuan untuk meningkatkan biaya penggunaan energi yang menghasilkan emisi karbon sehingga mendorong perusahaan untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Menurut Stiglitz (2019), pajak lingkungan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang efektif dalam menginternalisasi eksternalitas karena memberikan sinyal harga yang jelas kepada pelaku ekonomi mengenai biaya lingkungan dari aktivitas mereka. Dengan memasukkan biaya lingkungan ke dalam struktur harga, perusahaan akan terdorong untuk mengurangi polusi serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

2. Sistem Perdagangan Emisi (Emission Trading System)

Selain pajak lingkungan, mekanisme lain yang digunakan untuk menginternalisasi eksternalitas adalah sistem perdagangan emisi atau *emission trading system (ETS)*. Sistem ini dikenal juga sebagai mekanisme *cap-and-trade*, yaitu sistem yang menetapkan batas maksimum emisi yang diperbolehkan dan memungkinkan perusahaan untuk memperdagangkan izin emisi tersebut di pasar. Dalam sistem ini, pemerintah atau otoritas lingkungan menetapkan total batas emisi yang diperbolehkan bagi sektor industri tertentu. Perusahaan kemudian diberikan izin emisi dalam jumlah tertentu. Jika suatu perusahaan mampu mengurangi emisi di bawah batas yang ditetapkan, perusahaan tersebut dapat menjual kelebihan izin emisi kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Salah satu contoh penerapan sistem perdagangan emisi adalah *carbon trading* dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca secara global. Sistem ini telah diterapkan di berbagai negara dan kawasan, seperti *European Union Emissions Trading System (EU ETS)* yang merupakan salah satu pasar karbon terbesar di dunia. Menurut Tietenberg dan Lewis (2018), sistem perdagangan emisi memiliki keunggulan dalam menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengurangi emisi secara efisien. Perusahaan yang mampu menurunkan emisi dengan biaya lebih rendah akan memperoleh keuntungan dari penjualan izin

emisi, sementara perusahaan yang tidak efisien harus membeli izin tambahan di pasar.

3. Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah juga merupakan mekanisme penting dalam proses internalisasi eksternalitas. Regulasi ini biasanya berbentuk standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Contoh regulasi lingkungan antara lain:

- standar emisi gas buang
- standar kualitas air limbah
- batas maksimum penggunaan bahan berbahaya
- kewajiban pengolahan limbah industri

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan batasan terhadap tingkat pencemaran yang diperbolehkan sehingga perusahaan diwajibkan untuk menyesuaikan proses produksinya agar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Menurut Perman et al. (2011), regulasi lingkungan sering digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan eksternalitas negatif ketika mekanisme pasar tidak mampu memberikan insentif yang cukup bagi perusahaan untuk mengurangi polusi. Meskipun regulasi sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat komando dan kontrol (*command and control*), kebijakan ini tetap menjadi instrumen penting dalam perlindungan lingkungan karena mampu menetapkan batasan yang jelas terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

4. Penerapan Akuntansi Lingkungan

Selain mekanisme kebijakan eksternal, internalisasi eksternalitas juga dapat dilakukan melalui penerapan akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) dalam sistem manajemen perusahaan. Akuntansi lingkungan merupakan pendekatan akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya serta manfaat yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Menurut Schaltegger dan Burritt (2017), akuntansi lingkungan membantu perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pengambilan keputusan manajerial. Melalui pendekatan ini, biaya lingkungan yang sebelumnya tersembunyi dalam berbagai akun biaya dapat diidentifikasi secara lebih jelas sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan efisiensi operasional.

Dalam praktiknya, penerapan akuntansi lingkungan dapat meliputi berbagai aktivitas seperti:

- identifikasi biaya lingkungan dalam proses produksi
- pengukuran penggunaan sumber daya alam
- pelaporan emisi dan limbah
- pengungkapan kinerja lingkungan dalam laporan keberlanjutan

Gray (2010) menyatakan bahwa integrasi eksternalitas dalam sistem akuntansi merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan perusahaan, organisasi tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, internalisasi eksternalitas menjadi salah satu mekanisme utama untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi perusahaan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

F. IMPLEMENTASI CARBON TRADING DI INDONESIA

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai mengembangkan mekanisme perdagangan karbon sebagai bagian dari upaya menginternalisasi eksternalitas yang dihasilkan oleh emisi gas rumah kaca. Perdagangan karbon merupakan instrumen berbasis pasar (*market-based instrument*) yang memungkinkan perusahaan atau entitas yang mampu mengurangi emisi di bawah batas yang ditetapkan untuk menjual kelebihan pengurangan emisinya kepada pihak lain yang membutuhkan (Tietenberg & Lewis, 2018). Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka regulasi untuk perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC). Regulasi ini menjadi dasar pengembangan berbagai instrumen nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil (*result-based payment*), serta mekanisme offset karbon. Sebagai implementasi awal, Indonesia meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Carbon Exchange/IDX Carbon) pada tahun 2023 yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia.

Bursa karbon ini menyediakan *platform* perdagangan unit karbon yang berasal dari berbagai proyek pengurangan emisi, seperti proyek energi terbarukan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta

peningkatan efisiensi energi di sektor industri. Melalui mekanisme ini, perusahaan yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca di bawah batas yang ditentukan dapat memperoleh kredit karbon yang dapat diperdagangkan kepada perusahaan lain yang membutuhkan untuk memenuhi target pengurangan emisi. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengurangi emisi serta mendorong investasi pada teknologi rendah karbon. Dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, perdagangan karbon juga memiliki implikasi terhadap sistem pelaporan perusahaan. Kredit karbon yang dimiliki atau diperdagangkan oleh perusahaan perlu dicatat dan diungkapkan secara transparan dalam laporan keberlanjutan maupun laporan keuangan, terutama terkait dengan pengelolaan emisi dan strategi dekarbonisasi perusahaan (Schaltegger & Burritt, 2017). Dengan demikian, penerapan perdagangan karbon di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya internalisasi eksternalitas dalam praktik akuntansi dan manajemen perusahaan.

G. METODE PENGUKURAN BIAYA LINGKUNGAN

Pengukuran biaya lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan akuntansi keberlanjutan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengalokasikan biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Tanpa metode pengukuran yang tepat, banyak biaya lingkungan yang tidak terdeteksi atau tersembunyi dalam berbagai akun biaya operasional sehingga sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Dalam praktiknya, berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk membantu perusahaan mengukur biaya lingkungan secara lebih sistematis. Metode-metode ini tidak hanya berfokus pada pencatatan biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan limbah atau pengendalian polusi, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam, efisiensi proses produksi, serta dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pengukuran biaya lingkungan antara lain Activity-Based Costing (ABC), Material Flow Cost Accounting (MFCA), Life Cycle Costing (LCC), dan Full Cost Accounting (FCA).

1. Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) merupakan metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya dalam suatu organisasi. Dalam

konteks akuntansi lingkungan, metode ABC dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan dampak lingkungan serta mengalokasikan biaya yang berkaitan dengan aktivitas tersebut secara lebih akurat. Menurut Hansen dan Mowen (2007), pendekatan ABC memungkinkan perusahaan untuk menelusuri biaya lingkungan hingga ke sumber aktivitas yang menyebabkannya. Hal ini berbeda dengan metode akuntansi biaya tradisional yang sering kali mengalokasikan biaya secara umum tanpa mempertimbangkan hubungan langsung antara aktivitas dan dampak lingkungan.

Sebagai contoh, dalam proses produksi suatu perusahaan manufaktur, aktivitas seperti penggunaan energi, pengolahan limbah, atau penggunaan bahan kimia tertentu dapat diidentifikasi sebagai aktivitas yang memiliki dampak lingkungan. Dengan menggunakan metode ABC, biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut dapat dihitung secara lebih spesifik sehingga manajemen dapat memahami sumber utama biaya lingkungan dalam proses produksi. Selain itu, pendekatan ABC juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien serta menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran biaya, tetapi juga sebagai alat manajemen untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan.

2. Material Flow Cost Accounting (MFCA)

Material Flow Cost Accounting (MFCA) merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengukuran biaya lingkungan karena mampu mengidentifikasi kerugian material dalam proses produksi secara lebih jelas. Metode ini berfokus pada analisis aliran material dan energi dalam suatu sistem produksi serta mengidentifikasi bagian dari material yang tidak menjadi produk akhir. Menurut Schaltegger et al., (2013), MFCA mengklasifikasikan aliran material dalam dua kategori utama, yaitu produk positif (*positive products*) dan produk negatif (*negative products*). Produk positif merupakan output yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, sedangkan produk negatif mencakup limbah, emisi, atau material yang terbuang selama proses produksi. Dalam pendekatan MFCA, biaya tidak hanya dihitung untuk produk yang berhasil diproduksi, tetapi juga untuk material yang terbuang sebagai limbah. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui berapa besar biaya yang sebenarnya hilang akibat inefisiensi dalam proses produksi. Sebagai ilustrasi, jika suatu perusahaan menggunakan 100 unit bahan baku tetapi hanya 80

unit yang menjadi produk akhir, maka 20 unit lainnya dianggap sebagai kerugian material yang menimbulkan biaya lingkungan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses produksi untuk mengurangi limbah serta meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. MFCA telah diadopsi secara luas dalam praktik manajemen lingkungan dan bahkan dikembangkan sebagai standar internasional melalui ISO 14051 yang mengatur tentang penerapan material flow cost accounting dalam organisasi.

3. Life Cycle Costing (LCC)

Life Cycle Costing (LCC) merupakan metode pengukuran biaya yang mempertimbangkan seluruh biaya yang muncul sepanjang siklus hidup suatu produk, mulai dari tahap desain, produksi, distribusi, penggunaan, hingga tahap pembuangan atau daur ulang produk. Dalam konteks lingkungan, pendekatan LCC memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk secara lebih komprehensif. Metode ini membantu perusahaan memahami bahwa biaya lingkungan tidak hanya muncul pada tahap produksi, tetapi juga dapat terjadi pada tahap penggunaan produk oleh konsumen maupun pada tahap akhir siklus hidup produk. Menurut Tietenberg dan Lewis (2018), pendekatan siklus hidup sangat penting dalam pengelolaan lingkungan karena banyak dampak lingkungan yang terjadi di luar batas operasional perusahaan. Sebagai contoh, produk elektronik mungkin menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan pada tahap pembuangan jika tidak didaur ulang dengan benar. Dengan menggunakan metode LCC, perusahaan dapat merancang produk yang lebih ramah lingkungan sejak tahap awal desain sehingga mampu mengurangi biaya lingkungan dalam jangka panjang.

4. Full Cost Accounting (FCA)

Full Cost Accounting (FCA) merupakan pendekatan yang berusaha memasukkan seluruh biaya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, termasuk biaya lingkungan dan sosial yang sering kali tidak tercatat dalam sistem akuntansi konvensional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai biaya sebenarnya dari suatu aktivitas atau produk. Menurut Burritt dan Schaltegger (2014), FCA berupaya mengintegrasikan biaya lingkungan yang sebelumnya dianggap sebagai eksternalitas ke dalam sistem pengukuran biaya perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh

informasi yang lebih akurat mengenai dampak ekonomi dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya.

Pendekatan FCA juga sering digunakan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti evaluasi investasi, penilaian proyek, serta perencanaan keberlanjutan perusahaan. Dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang terkait dengan aktivitas perusahaan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai metode pengukuran biaya lingkungan tersebut memberikan kerangka kerja yang membantu perusahaan dalam memahami hubungan antara aktivitas operasional, penggunaan sumber daya, serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Dengan penerapan metode pengukuran yang tepat, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

H. TANTANGAN IMPLEMENTASI BIAYA LINGKUNGAN

Meskipun konsep biaya lingkungan dan akuntansi keberlanjutan semakin mendapat perhatian dalam praktik bisnis modern, penerapannya dalam sistem akuntansi perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut muncul baik dari aspek teknis pengukuran, keterbatasan kerangka regulasi, maupun faktor organisasi dan budaya perusahaan. Kondisi ini menyebabkan integrasi biaya lingkungan ke dalam sistem akuntansi dan pengambilan keputusan manajerial belum sepenuhnya berjalan optimal di banyak organisasi. Menurut Burritt dan Schaltegger (2014), integrasi aspek lingkungan dalam sistem akuntansi tidak hanya memerlukan perubahan dalam metode pengukuran biaya, tetapi juga membutuhkan perubahan paradigma dalam sistem manajemen perusahaan. Perusahaan perlu mengubah cara pandang dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek menjadi pendekatan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara lebih luas. Beberapa tantangan utama dalam penerapan biaya lingkungan antara lain sebagai berikut.

1. Kesulitan Pengukuran Dampak Lingkungan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan biaya lingkungan adalah kesulitan dalam mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif. Berbeda dengan biaya produksi yang dapat dihitung secara langsung melalui transaksi keuangan,

banyak dampak lingkungan yang bersifat tidak langsung dan sulit diukur secara moneter. Sebagai contoh, pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas industri dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan bagi masyarakat, seperti gangguan pernapasan atau penyakit kronis. Namun, menentukan nilai ekonomi dari dampak kesehatan tersebut sering kali membutuhkan metode estimasi yang kompleks dan melibatkan berbagai asumsi ekonomi dan sosial. Menurut Perman et al. (2011), kesulitan dalam mengukur dampak lingkungan secara akurat sering menjadi hambatan dalam proses internalisasi eksternalitas. Tanpa metode pengukuran yang jelas, perusahaan akan kesulitan memasukkan biaya lingkungan ke dalam sistem akuntansi. Selain itu, beberapa dampak lingkungan juga bersifat jangka panjang, seperti perubahan iklim atau kerusakan ekosistem, sehingga semakin sulit untuk diukur secara langsung dalam periode akuntansi tertentu.

2. Keterbatasan Standar Akuntansi

Tantangan lain dalam penerapan biaya lingkungan adalah keterbatasan standar akuntansi yang secara khusus mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan biaya lingkungan. Sistem akuntansi konvensional pada umumnya masih berfokus pada transaksi ekonomi yang memiliki nilai finansial yang jelas dan dapat diukur secara andal. Meskipun berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *Integrated Reporting*, standar akuntansi keuangan yang mengatur pelaporan biaya lingkungan secara eksplisit masih relatif terbatas. Gray (2010) menyatakan bahwa sistem akuntansi tradisional pada awalnya tidak dirancang untuk menangkap dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan standar akuntansi yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pelaporan perusahaan secara lebih komprehensif. Tanpa standar yang jelas, perusahaan sering kali memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan melaporkan biaya lingkungan, sehingga mengurangi tingkat konsistensi dan komparabilitas informasi antar perusahaan.

3. Kurangnya Kesadaran dan Komitmen Manajemen

Faktor organisasi juga menjadi salah satu hambatan penting dalam implementasi biaya lingkungan. Dalam banyak kasus, manajemen perusahaan masih memandang pengelolaan lingkungan sebagai biaya tambahan yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Padahal dalam perspektif keberlanjutan,

pengelolaan lingkungan yang baik justru dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi risiko hukum, serta memperkuat reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Menurut Schaltegger dan Burritt (2017), keberhasilan penerapan akuntansi lingkungan sangat bergantung pada komitmen manajemen puncak dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perusahaan. Tanpa dukungan dari manajemen, berbagai inisiatif lingkungan sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran manajemen mengenai pentingnya keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam mendorong penerapan biaya lingkungan secara efektif.

4. Keterbatasan Data Lingkungan

Tantangan lain yang sering dihadapi perusahaan adalah keterbatasan data lingkungan yang diperlukan untuk mengukur biaya lingkungan secara akurat. Pengumpulan data mengenai penggunaan energi, konsumsi air, emisi gas rumah kaca, maupun volume limbah sering kali memerlukan sistem pemantauan yang kompleks serta investasi teknologi yang tidak sedikit. Selain itu, data lingkungan sering kali tersebar di berbagai unit operasional perusahaan sehingga sulit untuk diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi yang terpusat. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Menurut Schaltegger et al., (2013), penerapan *environmental management accounting* memerlukan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data finansial dan nonfinansial secara efektif. Tanpa dukungan sistem informasi yang memadai, pengukuran biaya lingkungan menjadi kurang akurat dan sulit digunakan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, perusahaan perlu mengembangkan sistem manajemen informasi yang mampu mengintegrasikan data lingkungan ke dalam sistem akuntansi agar dapat mendukung penerapan akuntansi keberlanjutan secara lebih efektif.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2014). Sustainability accounting and reporting: Fad or trend? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(3), 1–22.
- Bursa Efek Indonesia. (2023). Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) Implementation Framework.
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47–62.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Managerial Accounting* (8th ed.). Mason, OH: Cengage Learning.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC).
- Perman, R., Ma, Y., McGilvray, J., & Common, M. (2011). *Natural Resource and Environmental Economics* (4th ed.). Pearson Education.
- Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2017). *Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice*. Routledge.
- Schaltegger, S., Bennett, M., & Burritt, R. (2013). *Environmental Management Accounting: Purpose and Progress*. Dordrecht: Springer.
- Stiglitz, J. E. (2019). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Tietenberg, T., & Lewis, L. (2018). *Environmental and Natural Resource Economics* (11th ed.). Routledge.
- World Business Council for Sustainable Development. (2000). *Eco-efficiency: Creating More Value with Less Impact*. Geneva: WBCSD.

■ TENTANG PENULIS



Nurul Hidayah, S.Pd., M.Sc.
Universitas Negeri Yogyakarta

Penulis lahir di Kulon Progo, 3 Juli 1995. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta dengan Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, lulus tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Magister tahun 2019 di Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Magister Sains Akuntansi dengan Konsentrasi Akuntansi Keuangan, lulus tahun 2021. Penulis sejak tahun 2025 sedang melanjutkan Program Doktor Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan mitra dan rekanan. Buku ini merupakan buku ketiga yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Bab 09



PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Dr. Siska Aprianti., S.E., M.Si. Ak., CA., CSRA., CRP
Politeknik Negeri Sriwijaya

A. PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dari pemangku kepentingan seperti konsumen, investor, dan regulator, mendorong perlunya suatu pengukuran dalam konteks akuntansi keberlanjutan. Sehingga metode yang sistematis dan terukur dibutuhkan untuk mengevaluasi bagaimana suatu organisasi bertanggung jawab terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari tindakan bisnis. Adanya pengukuran kinerja keberlanjutan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang timbul dari dampak sosial dan lingkungan yang kurang diperhatikan, serta akan meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.

B. DEFINISI, TUJUAN DAN MANFAAT PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Pengukuran kinerja keberlanjutan didefinisikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi capaian suatu organisasi terhadap tujuan keberlanjutan dengan menggunakan serangkaian indikator yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah tindakan organisasi telah

mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan strategisnya (Fandeli et al., 2020). Pengukuran kinerja keberlanjutan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terstruktur untuk mengkuantifikasi seberapa baik organisasi yang dikelola dan seberapa besar nilai yang diberikannya kepada ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Perusahaan yang beroperasi untuk tujuan pertumbuhan berkelanjutan, harus dapat mengukur kinerja keberlanjutan. Hal ini penting karena akan menjadi kerangka kerja dalam menilai dan meningkatkan efek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis tersebut. Penggunaan metrik keberlanjutan ke dalam sistem pengukuran kinerja organisasi membantu proses pengambilan keputusan strategis dan penciptaan nilai jangka panjang. Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, metode ini semakin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, investor, pelanggan, dan regulator, yang ingin memastikan bahwa perusahaan memiliki kontribusi positif terhadap masalah keberlanjutan khususnya di dunia. Adapun tujuan dan manfaat dari pengukuran kinerja keberlanjutan bagi perusahaan dijelaskan di bagian berikut.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

- **Integrasi dengan Strategi Perusahaan**
Pengukuran kinerja keberlanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam strategi perusahaan, memastikan bahwa keberlanjutan merupakan komponen inti dari operasi bisnis. Alat seperti Sustainable Balanced Scorecard (SBSC) dan Indeks Kinerja Keberlanjutan Organisasi (OSPI) membantu organisasi memasukkan keberlanjutan ke dalam sistem manajemen kinerja tradisional (Damtoft et al., 2025).
- **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**
Dengan memberikan pandangan yang jelas tentang dampak keberlanjutan organisasi, sistem pengukuran kinerja meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi, karena para pemangku kepentingan semakin menuntut laporan keberlanjutan yang terperinci (Nwangele, 2025; Rusu et al., 2024).

- **Memfasilitasi Peningkatan Berkelanjut**
Sistem pengukuran kinerja keberlanjutan dirancang untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan, memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan praktik keberlanjutan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan jangka panjang (Kumar et al., 2023).

1. Manfaat Pengukuran Kinerja Keberlanjutan Perusahaan

- **Peningkatan Kinerja Organisasi**
Ada bukti bahwa pengukuran kinerja keberlanjutan memediasi hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja organisasi, yang mengarah pada peningkatan hasil keuangan. Hal ini dicapai dengan menyelaraskan inisiatif keberlanjutan dengan tujuan bisnis, sehingga meningkatkan efisiensi dan inovasi (Asiaei et al., 2021; Estébanez & Martín, 2025).
- **Manajemen Risiko dan Ketahanan**
Dengan memasukkan metrik keberlanjutan, organisasi dapat mengelola risiko yang terkait dengan faktor lingkungan dan sosial dengan lebih baik. Ini berkontribusi pada ketahanan perusahaan dan selaras dengan tujuan keberlanjutan global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs) (Estébanez & Martín, 2025).
- **Pengambilan Keputusan Strategis**
Pengukuran kinerja keberlanjutan memberikan wawasan berharga yang menginformasikan pengambilan keputusan strategis. Ini membantu organisasi mengidentifikasi risiko dan peluang, mendukung pengembangan strategi bisnis berkelanjutan yang meningkatkan daya saing dan kesuksesan jangka panjang (Nwangele, 2025; Rusu et al., 2024).
- **Keterlibatan dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan**
Pelaporan keberlanjutan yang efektif mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dengan memberikan informasi yang jelas dan sebanding tentang kinerja keberlanjutan. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan mendukung reputasi organisasi sebagai warga korporat yang bertanggung jawab (Rusu et al., 2024).

D. KERANGKA KONSEPTUAL PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Kerangka kerja yang digunakan untuk menilai kinerja keberlanjutan yang banyak digunakan adalah dengan Pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL). Pendekatan ini banyak digunakan untuk menilai dan melaporkan keberlanjutan organisasi, proyek, dan industri. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kinerja keuangan dengan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan. Konsep ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1994 oleh John Elkington (TBL). Dalam konsep TBL, kinerja keberlanjutan digambarkan sebagai tiga pilar utama pengelolaan keberlanjutan, yaitu: *People* (Sosial), *Planet* (Lingkungan), dan *Profit* (Ekonomi). Konsep TBL menekankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh operasi jika ingin mencapai keberlanjutan.



Gambar 9.1 Konsep *Triple Bottom Line*
Sumber: Penulis (2026)

- ***People* (Sosial)**

Aspek sosial TBL menekankan pada tanggung jawab sosial yang ditimbulkan perusahaan sehubungan dengan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Perusahaan yang memiliki kinerja sosial yang baik, mencerminkan adanya komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat, serta memiliki kontribusi terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Isu-isu yang tercakup dalam aspek ini meliputi pengelolaan tenaga kerja, kesejahteraan pekerja, hak asasi manusia, hubungan dengan komunitas

sekitar, dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial

- ***Planet*** (Lingkungan)

Aspek lingkungan TBL menekankan bahwa perusahaan harus berfokus pada pilar lingkungan, dan berusaha untuk melakukan pengurangan jejak ekologis yang mereka tinggalkan serta memiliki kontribusi terhadap tujuan pelestarian lingkungan yang lebih besar. Isu-isu yang tercakup dalam aspek lingkungan misalnya pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, serta penggunaan sumber daya alam secara efisien sebagai upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan.

- ***Profit*** (Ekonomi)

Fokus pilar ekonomi adalah kinerja finansial perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang mendukung kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ini mencakup pendapatan, profitabilitas, efisiensi operasional, dan pengelolaan sumber daya. Pilar ini penting karena keberlanjutan finansial adalah dasar bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan, dan memberi perusahaan kesempatan untuk berinvestasi dalam praktek dan kebijakan keberlanjutan yang lebih luas.

Ketiga pendekatan TBL ini merupakan komponen yang harus dikelola secara bersamaan untuk menciptakan keberlanjutan yang luas. Perusahaan yang berhasil menerapkan TBL akan mengelola dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sambil tetap berkonsentrasi pada pencapaian tujuan keuangan yang kuat. Menurut (Hartmann, 2020), dengan mengadopsi ketiga pendekatan tersebut perusahaan dapat mengelola operasi mereka secara lebih holistik dan melaporkan upaya keberlanjutan mereka secara efektif, karena TBL berfungsi sebagai dasar untuk berbagai kerangka pelaporan dan alat manajemen keuangan, mempromosikan pandangan komprehensif tentang keberlanjutan. Ketika *Profit* diperoleh tanpa memperhatikan dampak sosial atau lingkungan disekitarnya maka perusahaan tersebut tidak akan mampu untuk bertahan lama. Karena ketika *Planet* rusak, maka hal ini akan berdampak pada tingkat produktivitas dan keuntungan yang diperoleh perusahaan, sementara ketika *People* tidak sejahtera dan terabaikan, maka ini akan berdampak pada turunnya kualitas hidup dan keberlanjutan jangka panjang bagi organisasi maupun masyarakat.

E. KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Melalui pendekatan TBL, maka kinerja keberlanjutan mencakup tiga komponen utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ekonomi

Dimensi ekonomi menilai sejauh mana kegiatan perusahaan mampu menciptakan nilai keuangan yang berkelanjutan, serta mendukung pembangunan jangka panjang. Artinya, dimensi ekonomi digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan/laba finansial namun tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi yang baik, dianggap akan mampu bertahan dalam jangka panjang dan melakukan investasi untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Contoh dimensi ekonomi dan indikatornya:

- Profitabilitas dan nilai finansial jangka panjang; merupakan inti dimensi ekonomi yang mencerminkan keberlanjutan keuangan perusahaan. Contoh indikator:
 - *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, margin laba bersih (Estébanez & Martín, 2025; Gonçalves et al., 2023; Nogueira et al., 2024).
 - *Economic Value Added (EVA)* (Gonçalves et al., 2023)
 - Pertumbuhan pendapatan dan laba tahunan (Estébanez & Martín, 2025; Nogueira et al., 2024).
- Likuiditas, solvabilitas dan kesinambungan usaha; menggambarkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan memenuhi kewajiban jangka panjang. Contoh indikator:
 - *Current ratio* (aktiva lancar/kewajiban lancar) (Nogueira et al., 2024)
 - Rasio total liabilitas terhadap total aset (leverage) (Nogueira et al., 2024)
 - Arus kas operasi positif dan berkelanjutan (Nogueira et al., 2024)
- Efisiensi dan produktivitas ekonomi; menunjukkan pemakaian sumber daya yang efisien dan kompetitif. Contoh indikator:
 - *Asset turnover ratio* (penjualan/total aset) (Nogueira et al., 2024)
 - Produktivitas tenaga kerja (output atau pendapatan per pekerja) (Ali et al., 2021)
 - Biaya produksi per unit, penghematan biaya dari inovasi bersih (*clean tech, eco efficiency*) (Ali et al., 2021).

- Investasi, inovasi dan kapasitas pertumbuhan; untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang yang selaras dengan keberlanjutan. Contoh indikator:
 - Tingkat investasi (*capital expenditure*) terhadap penjualan atau terhadap PDB (An, 2023)
 - Belanja R&D, khususnya untuk inovasi hijau/bersih (Ali et al., 2021)
 - Jumlah dan proporsi produk/jasa berkelanjutan dalam portofolio (*sustainable product impact*) (An, 2023)
- Ketahanan ekonomi makro dan iklim bisnis; merupakan indikator ekonomi makro yang mencerminkan SDGs di level negara atau daerah tertentu. Contoh indikator:
 - Pertumbuhan PDB dan PDB per kapita jangka panjang (An, 2023; Işık et al., 2024)
 - Tingkat pengangguran dan struktur pengangguran (jangka panjang, pemuda) (An, 2023; Işık et al., 2024)
 - Inflasi (CPI), suku bunga, stabilitas nilai tukar (Işık et al., 2024)
 - Utang pemerintah terhadap PDB dan keberlanjutan fiskal (An, 2023)
- Kontribusi terhadap pembangunan inklusif; Mengaitkan kinerja ekonomi dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Contoh indikator:
 - Tingkat kemiskinan multidimensi dan pengangguran (An, 2023)
 - Penerimaan pajak lingkungan yang mendukung transisi hijau (An, 2023)

2. Lingkungan

Dimensi lingkungan digunakan untuk mengukur pengaruh aktivitas perusahaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Pengukuran kinerja lingkungan adalah bagian penting dari keberlanjutan, karena perusahaan akan memiliki dampak yang merugikan baik bagi kelangsungan hidup perusahaan sendiri maupun bagi bumi ketika aktivitas operasi dijalani bukanlah aktivitas yang ramah terhadap lingkungan. Contoh dimensi lingkungan dan indikatornya;

- Energi dan emisi gas rumah kaca (GRK); menggambarkan efisiensi energi dan penurunan kontribusi perubahan iklim. Contoh indikator:
 - Konsumsi energi total (kWh/tahun) dan intensitas energi (kWh per unit produk, per m² bangunan, per pasien) (Dolcini et al., 2025)

- Proporsi energi terbarukan dalam total konsumsi (%) (Dolcini et al., 2025)
- Total emisi GRK (t CO₂-eq/tahun), intensitas karbon (t CO₂-eq per unit output atau per pendapatan) (Manobanda-Lisintuña & Villamar-Ayala, 2025)
- Air dan sumber daya alam; menggambarkan efisiensi dan konservasi sumber daya alam. Contoh indikator:
 - Total konsumsi air dan intensitas air (m³ per unit produk/jasa) (Dolcini et al., 2025; Manobanda-Lisintuña & Villamar-Ayala, 2025)
 - *Water footprint* dari proses/produk (Manobanda-Lisintuña & Villamar-Ayala, 2025)
 - Penggunaan bahan baku primer vs. sekunder/daur ulang (% bahan daur ulang) (Okay et al., 2024)
- Limbah, polusi, dan kualitas lingkungan; mencerminkan tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi dan mengolah limbah. Contoh indikator:
 - Total timbunan limbah (ton/tahun) dan limbah berbahaya vs non-berbahaya (Okay et al., 2024)
 - Persentase limbah yang didaur ulang/digunakan kembali vs. dibuang ke TPA (Okay et al., 2024)
- Transportasi dan mobilitas; menggambarkan dampak lingkungan dari pergerakan orang dan barang. Contoh indikator:
 - Konsumsi bahan bakar dan emisi CO₂ dari armada transportasi perusahaan (Dolcini et al., 2025)
 - Proporsi perjalanan menggunakan transportasi publik, berbagi kendaraan, atau e-mobility (%) (Dolcini et al., 2025)
- Pengelolaan dan tata kelola lingkungan; mencerminkan sistem dan praktik yang mendukung kinerja lingkungan jangka panjang. Contoh indikator:
 - Mencakup sistem manajemen lingkungan misalnya. sertifikasi ISO 14001 (Marrucci et al., 2024; Okay et al., 2024)
 - Jumlah audit lingkungan per tahun; tingkat kepatuhan terhadap regulasi (jumlah pelanggaran/denda) (Marrucci et al., 2024)
 - Proporsi karyawan yang menerima pelatihan lingkungan (% jam pelatihan) (Marrucci et al., 2024)

3. Sosial

Indikator ini diukur dengan melihat bagaimana keberadaan perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, yang

meliputi bagaimana pengaruh terhadap kesejahteraan karyawan, komunitas sekitar, maupun konsumen. Kinerja sosial yang baik tercermin dari adanya komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pembangunan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Contoh dimensi sosial dan indikatornya;

- Pekerjaan layak dan kondisi kerja; menggambarkan kesempatan kerja produktif, upah yang layak, keamanan kerja, non-diskriminasi. Contoh indikator:
 - Tingkat pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja (jumlah pekerja, *job creation*) (Santos, 2023)
 - Upah rata-rata, kesenjangan upah gender, dan stabilitas pendapatan (Briamonte et al., 2024; Santos, 2023)
 - Jam kerja, kontrak kerja formal vs informal, perlindungan jaminan sosial (Briamonte et al., 2024; Santos, 2023)
- Hak, kesejahteraan, dan pengembangan karyawan. Contoh indikator:
 - Pelatihan dan pengembangan SDM: jam pelatihan/ karyawan, program pengembangan talenta, beasiswa/ magang (Briamonte et al., 2024)
 - *Work-life balance*: kebijakan cuti, jam kerja fleksibel, dukungan keluarga (Briamonte et al., 2024)
 - Kepuasan kerja dan kualitas hidup karyawan (employee QoL, well-being scores) (Lin et al., 2021)
- Kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Contoh indikator:
 - Jumlah kecelakaan kerja, frequency & severity rate, penyakit akibat kerja (Lin et al., 2021; Santos, 2023)
 - Program dan pelatihan K3, ketersediaan APD, pemeriksaan kesehatan rutin (Lin et al., 2021)
- Hak asasi manusia, keadilan, dan inklusi; kerangka sosial menekankan hak dasar, non-diskriminasi dan kesetaraan. Contoh indikator:
 - Ada/tidaknya pekerja anak, kerja paksa, pelanggaran HAM di rantai pasok (Okay et al., 2024)
 - Kesenjangan upah dan representasi perempuan/ kelompok rentan di level manajerial (Briamonte et al., 2024; Santos, 2023)
 - Kasus diskriminasi, pelecehan, dan penanganannya (Okay et al., 2024)
- Komunitas dan masyarakat; menggambarkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial lokal. Contoh indikator:

- Program pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan dampaknya (pendidikan, kesehatan, gizi) (Okay et al., 2024)
- Dukungan transportasi, perumahan, sekolah, fasilitas sosial bagi komunitas sekitar (Briamonte et al., 2024)
- Indeks keterlibatan pemangku kepentingan, keluhan masyarakat dan penyelesaiannya (Okay et al., 2024)
- Etika, tata kelola sosial, dan kepatuhan. Contoh indikator:
 - Kasus korupsi, anti-kompetisi, pelanggaran hukum ketenagakerjaan (Okay et al., 2024)

F. METODE PENGUKURAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Metode pengukuran kinerja keberlanjutan dibutuhkan perusahaan, karena selain menjadi dasar dalam penyusunan laporan keberlanjutan, hal ini juga akan membantu perusahaan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan. Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengukuran kinerja keberlanjutan, mulai dari pendekatan yang berbasis kuantitatif dan kualitatif, penggunaan indeks dan skor yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, sampai dengan teknik dan alat yang umum digunakan dalam evaluasi kinerja keberlanjutan.

- **Pengukuran yang Berbasis Kuantitatif dan Kualitatif**
 Untuk memperoleh hasil pengukuran yang maksimal, perusahaan dapat menggunakan gabungan dari kedua basis pengukuran ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kuantitatif biasanya digunakan untuk mengukur data-data yang bersifat numerik, yang nilainya dapat dihitung dan terukur secara objektif. Salah satu keuntungan metode ini adalah data yang dihasilkan dapat diperbandingkan antara satu dengan yang lain. Contohnya pengukuran emisi karbon perusahaan (menghitung total emisi CO₂ yang dihasilkan oleh operasi perusahaan, yang dihitung dalam ton per tahun); pengukuran penggunaan energi (dihitung melalui jumlah energi yang digunakan oleh perusahaan dalam unit kilowatt-jam (kWh) per unit produksi atau per pendapatan); pengukuran pendapatan dan laba perusahaan (menghitung angka-angka yang menggambarkan kesehatan finansial perusahaan, termasuk pendapatan tahunan dan laba bersih), dan sebagainya. Sedangkan pengukuran kualitatif umumnya digunakan untuk data-data yang tidak dapat diukur menggunakan angka, dan lebih bersifat subjektif. Model

pengukuran seperti ini biasanya digunakan untuk menilai dampak kebijakan perusahaan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar. Misalnya ketika perusahaan mengalokasikan dana CSR, apakah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat baik dalam pemberdayaan ekonomi ataupun tingkat pendidikan masyarakat.

- **Pengukuran dengan Basis Indeks dan Skor**

Pengukuran model ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang telah disusun sebelumnya oleh lembaga resmi dengan standarisasi internasional. Perusahaan dapat mengukur kinerja keberlanjutannya dengan serangkaian indikator yang tersedia, sehingga pelaporan keberlanjutan yang dihasilkan lebih terstruktur dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Contoh indeks pengukuran kinerja keberlanjutan yang sering digunakan misalnya *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI). GRI memberikan pedoman tentang bagaimana organisasi dapat melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan, seperti yang tertuang dalam konsep TBL. Sejalan dengan itu, DJSI mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan dalam tiga perspektif yaitu faktor-faktor finansial, sosial, dan lingkungan. DJSI menggunakan kriteria yang ketat untuk mengevaluasi perusahaan, termasuk keberlanjutan dalam manajemen risiko, tata kelola perusahaan, inovasi berkelanjutan, dan manajemen sumber daya.

G. PENDEKATAN DAN MODEL DALAM PENGUKURAN KEBERLANJUTAN

Berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengukuran kinerja keberlanjutan. Beberapa pendekatan utama dalam pengukuran kinerja keberlanjutan dijelaskan berikut:

- *Global Reporting Initiative* (GRI)

GRI merupakan Standar internasional pelaporan keberlanjutan yang paling umum digunakan. Standar ini berisi pedoman penyusunan laporan keberlanjutan. Dengan standar ini perusahaan, dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan terhadap masyarakat dan lingkungan, karena indikator kinerja keberlanjutan telah tersusun secara terperinci. Model ini sangat komprehensif dan memungkinkan organisasi untuk melaporkan berbagai indikator keberlanjutan dengan cara yang terstruktur dan transparan.

- *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*
SASB mengidentifikasi indikator keberlanjutan yang sesuai dengan industri. Melalui standar ini perusahaan melakukan pelaporan yang lebih spesifik, khususnya dari perspektif keuangan. Investor diharapkan akan memperoleh informasi keberlanjutan finansialnya secara lebih spesifik, karena keberadaan SASB diharapkan mampu memfasilitasi penyusunan laporan keberlanjutan di sektor industri, sehingga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi isu keberlanjutan yang paling relevan bagi sektor mereka.
- *ISO 26000*
ISO 26000 adalah standar internasional untuk tanggung jawab sosial yang memberikan panduan tentang bagaimana organisasi menjalankan operasional yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Meskipun tidak memberikan standar pelaporan yang sangat rinci, ISO 26000 memberikan pedoman umum yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam upaya keberlanjutan mereka. Organisasi menjadikan standar sebagai pedoman yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam manajemen dan kebijakan mereka, standar ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi dan menangani isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan.
- *Balanced Scorecard* untuk Keberlanjutan
Metode ini membantu bisnis melihat kinerja keberlanjutan dalam konteks yang lebih luas, karena penggunaan standar ini akan memberikan pandangan yang lebih seimbang dan komprehensif tentang kinerja keberlanjutan perusahaan, selain itu standar ini menyediakan kerangka kerja yang lebih dapat diintegrasikan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Dalam model *Balanced Scorecard* (BSC), elemen keberlanjutan ditinjau dari 4 sudut pandang yang meliputi finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan

H. SIMPULAN

Pengukuran kinerja keberlanjutan merupakan suatu proses yang digunakan perusahaan dalam mencapai tujuannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan konsep TBL (ekonomi, lingkungan dan sosial) ketika menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan akan mampu mengukur dan mengelola risiko yang berhubungan dengan dampak sosial dan lingkungan, serta

memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil selaras dengan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, adanya pengukuran kinerja keberlanjutan berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana organisasi mengelola keseimbangan antara keuntungan finansial dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Indikator ekonomi, seperti pendapatan, laba bersih, dan ROI, menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat mencapai keuntungan yang mendukung kelangsungan bisnis jangka panjang. Indikator sosial menilai dampak perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja, hak asasi manusia, dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial yang inklusif. Sedangkan indikator lingkungan mengukur dampak operasional perusahaan terhadap planet, seperti emisi gas rumah kaca, pengelolaan energi, dan pengurangan limbah. Ketiga komponen ini saling terkait dan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan secara holistik. Pengukuran ketiga indikator ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta berinovasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik. Dalam pengukuran kinerja keberlanjutan, berbagai pendekatan yang berbasis kuantitatif dan kualitatif ataupun menggunakan skor dan indeks, digunakan dalam evaluasi kinerja keberlanjutan. Pengukuran ini menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan untuk mengukur dan melaporkan dampak operasinya terhadap keberlanjutan, serta membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. A., Alharthi, M., Hussain, H. I., Rasul, F., Hanif, I., Haider, J., Ullah, S., ur Rahman, S., & Abbas, Q. (2021). A clean technological innovation and eco-efficiency enhancement: A multi-index assessment of sustainable economic and environmental management. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120573. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120573>
- An, D. T. (2023). Private Investment and Economic Development: Ensuring Sustainability in the Future. *Journal of Human, Earth, and Future*, 4(4), 424–442. <https://doi.org/10.28991/HEF-2023-04-04-04>
- Asiaei, K., Bontis, N., Barani, O., & Jusoh, R. (2021). Corporate social responsibility and sustainability performance measurement systems: implications for organizational performance. *Journal of Management Control*, 32(1), 85–126. <https://doi.org/10.1007/s00187-021-00317-4>
- Briamonte, L., Pergamo, R., Salerno, C., Uliano, A., & Nazzaro, C. (2024). Measuring Social Sustainability in the Italian Agri-Food Sector: Proposed Key Performance Indicators. *Foods*, 13(17), 2849. <https://doi.org/10.3390/foods13172849>
- Damtoft, N. F., van Liempd, D., & Lueg, R. (2025). Sustainability performance measurement – a framework for context-specific applications. *Journal of Global Responsibility*, 16(1), 162–201. <https://doi.org/10.1108/JGR-05-2023-0082>
- Dolcini, M., Ferrè, F., Brambilla, A., & Capolongo, S. (2025). Integrating environmental sustainability into hospitals performance management systems: a scoping review. *BMC Health Services Research*, 25(1), 764. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12928-x>
- Estébanez, R. P., & Martín, F. J. S. (2025). Business Sustainability and Its Effect on Performance Measures: A Comprehensive Analysis. *Sustainability*, 17(1), 297. <https://doi.org/10.3390/su17010297>
- Fandeli, H., Hasan, A., & Amrina, E. (2020). Model Konseptual Pengaruh Keberlanjutan terhadap Kinerja Industri Kecil dan Menengah. *Dampak*, 17(1), 15–24. <https://doi.org/10.25077/dampak.17.1.15-24.2020>
- Gonçalves, T., Louro, D., & Barros, V. (2023). Can Corporate Sustainability Drive Economic Value Added? Evidence from Larger European Firms. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(4), 215. <https://doi.org/10.3390/jrfm16040215>

- Hartmann, B. (2020). Triple bottom line. In *Accounting for Sustainability* (pp. 101–110). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003037200-10>
- Işık, C., Ongan, S., & Islam, H. (2024). A new pathway to sustainability: Integrating economic dimension (ECON) into ESG factors as (ECON-ESG) and aligned with sustainable development goals (SDGs). *Journal of Ekonomi*, 6(1), 34–39.
<https://doi.org/10.58251/ekonomi.1450860>
- Kumar, A., Shrivastav, S. K., Shrivastava, A. K., Panigrahi, R. R., Mardani, A., & Cavallaro, F. (2023). Sustainable Supply Chain Management, Performance Measurement, and Management: A Review. *Sustainability*, 15(6), 5290.
<https://doi.org/10.3390/su15065290>
- Lin, C. J., Efranto, R. Y., & Santoso, M. A. (2021). Identification of Workplace Social Sustainability Indicators Related to Employee Ergonomics Perception in Indonesian Industry. *Sustainability*, 13(19), 11069. <https://doi.org/10.3390/su131911069>
- Manobanda-Lisintuña, M. F., & Villamar-Ayala, C. A. (2025). Carbon and water footprints within an environmental laboratory: Water, energy, and packaging management strategies. *Green Analytical Chemistry*, 13, 100243.
<https://doi.org/10.1016/j.greeac.2025.100243>
- Marrucci, L., Daddi, T., & Iraldo, F. (2024). Creating environmental performance indicators to assess corporate sustainability and reward employees. *Ecological Indicators*, 158, 111489.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111489>
- Nogueira, E., Gomes, S., & Lopes, J. M. (2024). Financial Sustainability: Exploring the Influence of the Triple Bottom Line Economic Dimension on Firm Performance. *Sustainability*, 16(15), 6458.
<https://doi.org/10.3390/su16156458>
- Nwangele, C. R. (2025). The Integration of Financial and Sustainability Performance in Corporate Reporting. *Account and Financial Management Journal*, 10(08).
<https://doi.org/10.47191/afmj/v10i8.03>
- Okay, N. C., Sencer, A., & Taskin, N. (2024). Quantitative indicators for environmental and social sustainability performance assessment of the supply chain. *Environment, Development and Sustainability*.
<https://doi.org/10.1007/s10668-024-05210-3>
- Rusu, T. M., Odagiu, A., Pop, H., & Paulette, L. (2024). Sustainability Performance Reporting. *Sustainability*, 16(19), 8538.
<https://doi.org/10.3390/su16198538>

Santos, E. (2023). From Neglect to Progress: Assessing Social Sustainability and Decent Work in the Tourism Sector. *Sustainability*, 15(13), 10329.
<https://doi.org/10.3390/su151310329>

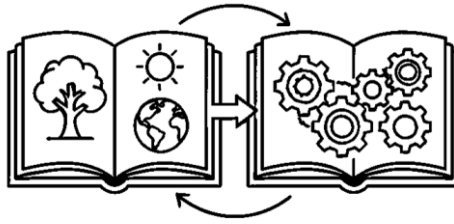
■ TENTANG PENULIS



**Dr. Siska Aprianti., S.E., M.Si. Ak., CA.
CSRA. CRP
Politeknik Negeri Sriwijaya**

Penulis lahir di Palembang, 10 April 1978. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Sriwijaya Palembang, pada Tingkat Sarjana Program Studi Akuntansi tahun 2001, Program Magister BKU Akuntansi tahun 2008 dan Program Doktoral Kekhususan Akuntansi Keuangan tahun 2023. Saat ini penulis merupakan salah satu dosen tetap di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, dan telah mengabdikan sejak tahun 2005. Selain aktif sebagai dosen, penulis pernah mengikuti beberapa pelatihan sertifikasi seperti *Certified Sustainability Reporting Specialist*, *Certified Sustainability Reporting Asrurer*, *Certified Risk Professional*, menulis buku dan menjadi narasumber di beberapa kegiatan.

Bab 10



PELAPORAN KEBERLANJUTAN DAN PELAPORAN TERPADU: TINJAUAN PRAKTIK DAN PENELITIAN

Dr. Nugroho Wisnu, Murti, S.E., M.Si., M.Ec.Dev., Ak., CA.
Universitas Dharma AUB Surakarta

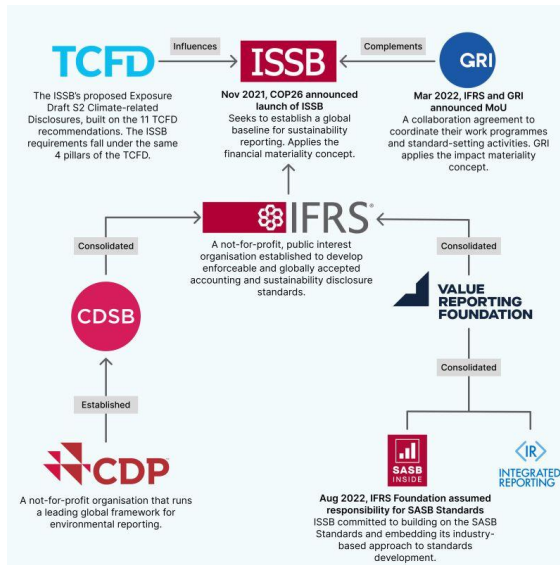
A. PENDAHULUAN

Pelaporan keberlanjutan dan pelaporan terpadu telah menjadi pilar utama dalam arsitektur akuntabilitas korporat modern (Goerzen et al., 2025; Judijanto, 2025). Seiring dengan menguatnya kerangka regulasi seperti *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) di Eropa dan adopsi standar global dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Praktik pelaporan ini telah bertransformasi dari inisiatif sukarela menjadi kewajiban yang terstruktur bagi banyak perusahaan di berbagai yurisdiksi. Praktik yang berkembang pesat ini, secara simultan, menjadi lahan bagi penelitian akademis. Literatur empiris telah tumbuh yang menginvestigasi berbagai aspek seperti determinan adopsi (Pristi & Bandiyono, 2024), kualitas pengungkapan, pengaruh tata kelola perusahaan, serta dampaknya terhadap kinerja pasar modal dan keberlanjutan actual (Yuhertiana & Husna, 2025). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan, baik dalam praktik (misalnya, tantangan implementasi di sektor publik dan usaha kecil-menengah) maupun dalam penelitian (e.g., hubungan kausal antara pelaporan dan perbaikan kinerja lingkungan yang nyata).

B. PELAPORAN BERKELANJUTAN

Terdapat beberapa standar laporan keberlanjutan yang berkembang secara internasional. *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan standar pelaporan keberlanjutan paling awal dan paling banyak digunakan, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 dan terus diperbarui dan terakhir pada tahun 2021 dengan penekanan pada dampak, materialitas, uji tuntas, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain GRI, berbagai standar lain juga berkembang seperti *Force on Climate Related Financial Disclosures* (TCFD), *Integrated Reporting* (IR), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), *Value Reporting Foundation*, *Carbon Disclosure Project* (CDP), serta IFRS S1 dan IFRS S2. IFRS hadir dengan upaya menggabungkan cabang utama pelaporan keuangan terkait keberlanjutan dengan mengutamakan investor sebagai pengguna utama. Kehadiran *International Sustainability Standards Board* (ISSB) melalui IFRS S1 dan S2 dinilai mampu menjawab kebutuhan integrasi informasi keuangan dan non-keuangan yang selama ini belum terakomodasi dalam GRI.

IFRS S1 mengatur pedoman umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, sementara IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim yang memengaruhi kinerja keuangan, seperti arus kas, akses pembiayaan, dan biaya modal. Tujuan kedua standar ini menegaskan bahwa integrasi LST dalam aktivitas bisnis tidak hanya mendorong kinerja keuangan tetapi juga keberlanjutan perusahaan. Bab ini merujuk pada definisi yang dikeluarkan dalam IFRS S1 tentang *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* sebagai rujukan utama dengan mempertimbangkan bahwa posisinya yang semakin sentral dalam lanskap pelaporan keuangan dan keberlanjutan global sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.1



Gambar 10.1. Infografis Perkembangan Standar Laporan Keberlanjutan
 sumber: <https://www.esgprofessionalsnetwork.com/an-infographic-of-the-esg-reporting-landscape/>

Laporan keberlanjutan yang dijelaskan dalam kerangka IFRS S1 adalah sebagai pengungkapan informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat diperkirakan secara wajar akan memengaruhi prospek entitas, termasuk arus kas, akses terhadap pendanaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang (IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information*, 2024). IFRS S1 menegaskan bahwa kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara entitas dengan para pemangku kepentingannya, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan alam di seluruh rantai nilainya. Pengungkapan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna utama laporan keuangan tujuan umum (i.e., investor, pemberi pinjaman dan kreditor) dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas. Dengan demikian, IFRS S1 memposisikan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian integral dari pelaporan keuangan tujuan umum yang harus disajikan dengan karakteristik kualitatif fundamental.

Munculnya laporan keberlanjutan sebagai kebutuhan tidak dapat dilepaskan dari fenomena menurunnya relevansi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi. Berbagai studi

empiris menunjukkan bahwa laporan keuangan tradisional, termasuk catatan atas laporan keuangan (CALK), semakin kehilangan daya jelaskan terhadap nilai perusahaan dan harga saham (Lev & Gu, 2016). Lev & Gu (2016) menemukan bahwa kontribusi informasi laba dan nilai buku terhadap harga saham semakin menurun dari tahun ketahun yang diestiumasi dari tahun 1960an sampai 2015. Terlebih lagi informasi laporan keuangan hanya menyumbang 5-6% dari total informasi yang digunakan investor (Lev & Gu, 2016).

Temuan Lev & Gu (2016) tentang penurunan nilai relevansi akuntansi ini dapat dijelaskan dalam beberapa faktor. *Pertama*, meningkatnya dominasi aset tidak berwujud (intangible assets) seperti modal intelektual, merek, dan riset yang tidak tercatat dalam neraca karena langsung dibebankan sebagai biaya, sementara itu laporan keuangan tidak secara langsung dapat mengkapitalisasi informasi tersebut. *Kedua*, laporan keuangan yang bersifat historis tidak mampu menangkap peristiwa bisnis yang memengaruhi nilai perusahaan secara *real-time*, seperti perubahan regulasi, gerak kompetitor, atau risiko iklim. *Ketiga*, CALK sebagai mekanisme pengungkapan tambahan pun dinilai tidak lagi memadai karena pasar sekuritas yang tidak sepenuhnya efisien membutuhkan lebih dari sekadar informasi suplemen atas biaya historis. Dalam konteks inilah laporan keberlanjutan hadir untuk mengisi kekosongan informasi, terutama dengan pendekatan IFRS S1 yang secara eksplisit dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor dan kreditor akan informasi prospektif tentang risiko dan peluang keberlanjutan yang memengaruhi prospek entitas di masa depan.

C. PELAPORAN TERPADU: APA BEDANYA DENGAN PELAPORAN BERKELANJUTAN

Konsep pelaporan terpadu (*integrated reporting*) berawal dari kesadaran bahwa laporan keuangan yang berdiri sendiri, meskipun telah dilengkapi dengan laporan keberlanjutan terpisah, tidak cukup menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai secara holistik. Sejarah penting terjadi pada tahun 2010 ketika dua organisasi terkemuka (i.e., *Prince's Accounting for Sustainability Project* (A4S) dan GRI) berinisiatif membentuk *International Integrated Reporting Committee* (IIRC) sebagai entitas baru yang secara khusus fokus mengembangkan kerangka pelaporan terpadu. IIRC kemudian menerbitkan *Discussion Paper* pertama pada September 2011 yang menjadi fundamental konseptual *Integrated Reporting*. Puncaknya, pada Desember 2013, IIRC meluncurkan *International Integrated Reporting Framework* yang menjadi rujukan global dalam penyusunan laporan

terpadu. Penting dicatat bahwa setelah IIRC terbentuk, GRI tetap konsisten mengembangkan standar pelaporan keberlanjutannya sendiri, sementara IIRC fokus mengembangkan kerangka IR secara terpisah (Roszak et al., 2025).

Tujuan utama pelaporan terpadu adalah menjelaskan kepada penyedia modal finansial bagaimana organisasi menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Penjelasan tentang tujuan ini dirumuskan dalam *International Integrated Reporting Framework* yang diterbitkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC), yang kini menjadi bagian dari IFRS Foundation.¹ Kerangka *Integrated Reporting* memperkenalkan konsep *six capitals* (enam modal) yaitu modal finansial, manufaktur, intelektual, manusia, sosial dan hubungan, serta alam. Tujuan *Integrated Reporting* adalah menunjukkan bagaimana organisasi menggunakan dan berdampak pada keenam modal tersebut dalam menciptakan nilai bagi dirinya sendiri dan bagi pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, *Integrated Reporting* menjawab pertanyaan: **"Bagaimana perusahaan menciptakan nilai secara berkelanjutan dengan mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya?"**

Dengan demikian, pemahaman tentang perbedaan antara pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dengan pelaporan terpadu (*integrated reporting*) adalah diperlukan. Meskipun keduanya muncul sebagai respons atas keterbatasan pelaporan keuangan tradisional dan sering digunakan secara bergantian dalam pada publik, kedua pelaporan ini memiliki landasan filosofis, tujuan, dan pengguna utama yang berbeda. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai perbedaan mendasar keduanya, analisis terhadap praktik dan penelitian di bidang ini berisiko menjadi kabur dan kehilangan ketajaman. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan secara terpisah karakteristik masing-masing (laporan keberlanjutan dan laporan terpadu), kemudian menyajikan sintesis perbedaannya sebagai dasar pada pembahasan selanjutnya dalam kajian penelitian. Perbedaan antara laporan keberlanjutan dan laporan terpadu ditunjukkan pada Tabel 10.1.

¹ Informasi terkait dengan IFRS Foundation dapat diakses melalui tautan berikut:
https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Tabel 10.1 Perbedaan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Terpadu.

Aspek Perbedaan	Laporan Keberlanjutan (SR)	Laporan Terpadu (IR)
Tujuan Utama	Akuntabilitas dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada pemangku kepentingan luas	Menjelaskan penciptaan nilai jangka panjang kepada penyedia modal (investor/kreditur)
Fokus	Kinerja <i>Triple Bottom Line</i> (People, Planet, Profit)	Keterkaitan strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek
Pertanyaan Kunci	"Seberapa besar dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan?"	"Bagaimana perusahaan menciptakan nilai berkelanjutan?"
Pengguna Utama	Pemangku kepentingan luas (masyarakat, LSM, pemerintah, investor, karyawan)	Penyedia modal finansial (investor dan kreditur)
Kerangka Acuan	GRI Standards, IFRS S1/S2, POJK 51/2017	<i>International integrated reporting Framework, International Integrated Reporting Council</i>)
Status di Indonesia	Wajib (POJK 51/2017)	Sukarela

Pada tahap awal perkembangan kedua praktik pelaporan ini, seringkali sulit untuk membedakan secara tegas antara Laporan Keberlanjutan (SR) dan Laporan Terpadu (IR). Kesulitan identifikasi ini muncul karena baik SR maupun IR sama-sama mengungkapkan informasi tentang dampak yang material terhadap perusahaan. SR yang merujuk pada standar GRI, aspek tata kelola (*governance*) dan pengungkapan sosial-lingkungan dirancang untuk menunjukkan akuntabilitas perusahaan atas dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan (perspektif *inside-out*). Namun demikian, standar SR modern seperti IFRS S1 secara eksplisit berfokus pada bagaimana faktor lingkungan dan sosial berdampak terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan (perspektif *outside-in*). Sementara itu, IR sejak awal dibangun untuk menjelaskan bagaimana berbagai faktor eksternal memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang, yang juga sejalan dengan perspektif

outside-in. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih yang signifikan. SR berbasis IFRS S1 dan IR sama-sama menggunakan perspektif *outside-in* untuk menjelaskan dampak dunia terhadap perusahaan, sementara SR berbasis GRI menggunakan perspektif *inside-out* untuk menjelaskan dampak perusahaan terhadap dunia. Perbedaan mendasar yang sesungguhnya terletak pada cakupan materialitas yang digunakan. SR tradisional (GRI) fokus pada *impact materiality*, IR fokus pada *financial materiality*, sedangkan SR modern (seperti yang diwajibkan CSRD di Eropa) mengadopsi *double materiality* yang menggabungkan keduanya. Tanpa pemahaman yang cermat terhadap evolusi standar dan perbedaan perspektif materialitas ini, pengguna laporan dapat dengan mudah menganggap SR dan IR sebagai praktik yang identik atau saling tumpang tindih tanpa kejelasan peran masing-masing.

D. TANTANGAN IMPLEMENTASI PELAPORAN DI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG: KAJIAN PENELITIAN DAN PRAKTIK

Setelah memahami perbedaan konseptual antara pelaporan keberlanjutan dan pelaporan terpadu, selanjutnya perlu untuk diakui bahwa implementasi kedua jenis pelaporan ini sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan di mana organisasi beroperasi, khususnya tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Di negara maju seperti Inggris, Jerman, atau Jepang, praktik pelaporan keberlanjutan dan terpadu umumnya telah lebih matang. Implementasi tersebut didukung oleh infrastruktur regulasi yang kuat, kesadaran investor yang tinggi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia, India, atau Brasil, tantangan implementasi cenderung lebih kompleks dan bersifat fundamental, mulai dari lemahnya penegakan hukum, rendahnya tingkat adopsi sukarela, keterbatasan kapasitas teknis dan pendanaan, hingga belum terintegrasinya isu keberlanjutan ke dalam strategi bisnis inti perusahaan. Sub-bab ini akan menganalisis berbagai tantangan implementasi pelaporan di kedua kelompok negara tersebut, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menghambat sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat adopsi pelaporan yang berkualitas di negara berkembang.

Sebuah studi komparatif di kawasan Indo-Pasifik mengidentifikasi bahwa hambatan utama pelaporan keberlanjutan di negara berkembang meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman, biaya tambahan yang signifikan, keterbatasan waktu, serta minimnya inisiatif dari pemerintah (Dissanayake et al., 2021).

Temuan ini diperkuat oleh penelitian di Uganda yang mengungkapkan bahwa keterlambatan adopsi *integrated reporting* (IR) di negara berkembang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, budaya dan kepemimpinan yang belum mendukung, kurangnya kesadaran tentang IR, serta belum adanya regulasi yang mewajibkan. (Bananuka et al., 2019).

Lebih lanjut, sebuah studi tentang adopsi standar keberlanjutan di negara berkembang seperti Brasil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan menemukan bahwa biaya implementasi dan sertifikasi merupakan hambatan terbesar terutama terkait dengan biaya yang memberatkan perusahaan untuk menyediakan laporan tersebut. (Sommer, 2017). Selain itu, penelitian di Ghana pada sektor pertambangan dan eksplorasi minyak mengungkapkan lemahnya komparabilitas pengungkapan antar perusahaan meskipun menggunakan standar pelaporan yang sama, serta terbatasnya pengungkapan terkait iklim yang menunjukkan peningkatan emisi GRK selama periode pengamatan (Ng et al., 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanpa penegakan prinsip *double materiality* yang mempertimbangkan isu keberlanjutan spesifik di negara berkembang, sistem pelaporan global berisiko menjadi sekadar mekanisme pengungkapan tanpa dampak nyata pada perubahan iklim (Ng et al., 2022). Sementara itu, di negara maju seperti Eropa dan Afrika Selatan, kerangka regulasi yang bersifat wajib secara empiris ditunjukkan sebagai pendorong utama adopsi IR yang berhasil, berbeda dengan negara berkembang seperti Malaysia, Sri Lanka, dan Nigeria di mana adopsi bersifat sukarela sehingga menghasilkan praktik pelaporan yang bervariasi dan tidak konsisten (Shanmugam et al., 2025). Tantangan utama di negara berkembang juga mencakup lemahnya penegakan regulasi dan kurangnya keahlian teknis, yang memperlebar kesenjangan kualitas pelaporan antara perusahaan besar dan kecil.

Sebuah tinjauan sistematis di Afrika Sub-Sahara bahkan menemukan bahwa meskipun IR dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan legitimasi, adopsi yang bersifat simbolis (*symbolic adoption*), jaminan asuransi (*assurance*) yang lemah, serta regulasi yang terfragmentasi menjadi kendala serius yang menghambat konsistensi dan efektivitas pelaporan (Abbana et al., 2025). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa konteks institusional (e.g., termasuk kualitas regulasi, infrastruktur pendukung, dan kapasitas sumber daya manusia) merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi pelaporan, yang masih menjadi kelemahan struktural di sebagian besar negara berkembang (Abbana et al., 2025). Untuk memperdalam pemahaman tentang tantangan implementasi pelaporan di negara

berkembang, pembahasan ini menyajikan secara khusus praktik di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang dengan pasar modal terbesar di Asia Tenggara dan komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, Indonesia menawarkan pelajaran berharga tentang kompleksitas implementasi pelaporan keberlanjutan dan terpadu di tengah keterbatasan struktural.

1. Kerangka Regulasi yang Berkembang di Indonesia

Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kerangka regulasi keuangan berkelanjutan. Dimulai dengan penerbitan POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai fondasi utama. Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Perkembangan berlanjut dengan pengenalan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada tahun 2021 serta penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berkelanjutan. TKBI versi 3 yang direncanakan terbit pada tahun 2026 akan mengatur tentang dua kategori utama yaitu *green* dan *transition* untuk meningkatkan kejelasan klasifikasi dan mengurangi risiko *greenwashing*.² Juli 2025 ketika Indonesia mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan PSPK 1 dan 2 yang merujuk IFRS S1 dan S2. Dengan adopsi ini, Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan yang mengintegrasikan standar global ke dalam regulasi nasional secara komprehensif. Saat ini, OJK tengah menyelesaikan revisi POJK 51/2017 yang dirancang sebagai regulasi payung lintas sektor, mengusung pendekatan *climate-first* melalui dua perspektif materialitas: *outside-in* (dampak risiko iklim terhadap perusahaan) dan *inside-out* (dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan)

2. Rendahnya Adopsi Pelaporan Terpadu

Meskipun kerangka regulasi untuk pelaporan keberlanjutan terus diperkuat, adopsi pelaporan terpadu (*integrated reporting*/IR) di Indonesia masih sangat rendah. Penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 menemukan bahwa hanya 71 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk

² *Greenwashing* adalah praktik penyajian citra yang menyesatkan tentang kinerja lingkungan suatu perusahaan, di mana klaim keberlanjutan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Praktik ini berkisar dari penggunaan kata-kata kabur seperti "ramah lingkungan" tanpa bukti, hingga penghilangan dampak negatif secara sengaja. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, *greenwashing* menjadi tantangan serius karena dapat mengurangi kredibilitas laporan dan menyesatkan pemangku kepentingan.

dianalisis, dari total populasi 934 perusahaan (Abbana et al., 2025). Temuan ini mengonfirmasi bahwa adopsi IR di Indonesia bersifat sukarela dan masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor BUMN, pertambangan, dan perbankan. Penelitian yang sama mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap implementasi IR, sementara leverage (tingkat utang) justru berpengaruh negatif (Abbana et al., 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung bersedia mengadopsi IR sebagai alat komunikasi nilai tambah, sementara perusahaan dengan beban utang tinggi mungkin menghindari pengungkapan tambahan yang dapat meningkatkan tekanan dari kreditur. Menariknya, variabel seperti komite audit, ukuran perusahaan, dan aktivitas internasional tidak terbukti memengaruhi adopsi IR, menunjukkan bahwa faktor pendorong adopsi di Indonesia mungkin berbeda dengan konteks negara maju.

3. Kesenjangan Implementasi: Antara Regulasi dan Realitas

Tantangan terbesar pelaporan keberlanjutan di Indonesia bukan terletak pada formulasi kebijakan, melainkan pada implementasinya di lapangan.³ Seperti ditegaskan oleh praktisi dalam diskusi publik, keberhasilan keuangan berkelanjutan hanya sebagian ditentukan oleh kerangka regulasi, sementara sisanya bergantung pada eksekusi di tingkat perusahaan. Beberapa kesenjangan utama meliputi: *Pertama*, lemahnya kepastian hukum dan standar pengukuran. Sampai saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur secara tegas siapa pihak yang berwenang memberikan *assurance* (jaminan) atas laporan keberlanjutan. Berbeda dengan profesi akuntan publik yang memiliki lisensi dan mekanisme pertanggungjawaban jelas, bidang *sustainability assurance* dinilai masih "abu-abu". Akibatnya, banyak lembaga menerbitkan sertifikasi dengan standar yang berbeda-beda, mulai dari AA1000 dari Accountability, ISO, hingga skema sertifikasi tertentu. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik *greenwashing* karena perusahaan bebas menentukan indikatornya sendiri tanpa acuan metrik yang baku.

³ Pendapat ini didasarkan pada diskusi terkait dengan Sustainable Finance Ecosystem yang dapat diakses pada tautan berikut: <https://wwf.id/en/talk-show-green-pulse-bridging-industry-and-nature-policies-in-financial-ecosystems>

Kedua, keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia. Penerapan standar IFRS S1 dan S2 menuntut keahlian baru yang masih langka di Indonesia, termasuk kemampuan mengukur emisi Lingkup 3 (*scope 3 emissions*), melakukan analisis skenario iklim, dan mengintegrasikan risiko keberlanjutan dalam model bisnis. Banyak perusahaan, belum siap menghadapi tuntutan pengungkapan yang bersifat *auditable* dan terverifikasi dari perspektif keberlanjutan ini. *Ketiga*, kesenjangan pendanaan yang besar. Kementerian Keuangan menekankan bahwa terdapat *funding gap* yang signifikan dalam mendukung agenda keuangan berkelanjutan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan optimalisasi peran sektor swasta melalui instrumen pembiayaan hijau seperti obligasi hijau (*green bonds*), insentif fiskal, dan dukungan bagi UMKM.

Keempat, tantangan tata kelola yang lebih luas. Bencana ekologis di Sumatera pada akhir tahun 2025 yang mengakibatkan lebih dari 1.199 orang meninggal dan sekitar 114.200 orang mengungsi telah mengungkap kegagalan tata kelola lingkungan yang lebih sistemik. Meskipun pemerintah merespons dengan mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan, publik tetap mengkritisi apakah kebijakan tersebut sekadar solusi administratif simbolis atau benar-benar memberikan keadilan. Fenomena ini merefleksikan paradoks yang lebih besar: meskipun pembangunan berkelanjutan telah menjadi arus utama kebijakan publik sejak KTT Bumi 1992, praktik kebijakan di tingkat domestik masih jauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan demikian, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pelaporan keberlanjutan dan terpadu di negara berkembang tidak hanya bergantung pada ketersediaan kerangka regulasi yang memadai, tetapi juga pada kapasitas institusional, kesiapan sumber daya manusia, komitmen penegakan hukum, dan perubahan budaya organisasi yang fundamental.

E. AGENDA RISET MASA DEPAN: PERTANYAAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan pemetaan perkembangan praktik dan penelitian serta analisis kesenjangan implementasi pelaporan yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, bab ini selanjutnya merumuskan agenda riset masa depan yang aplikatif. Agenda ini dirancang sebagai respon terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi dunia pelaporan keberlanjutan dan pelaporan terpadu, seperti transisi

menuju standar global IFRS S1 dan S2 serta maraknya praktik *greenwashing* yang mengancam kredibilitas laporan dalam konteks spesifik negara berkembang. Pembahasan ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan penelitian spesifik yang harapannya dapat diuji secara empiris yang diharapkan dapat menjadi panduan konkret bagi peneliti selanjutnya. Namun demikian, rumusan pertanyaan tersebut tetap perlu dikonfirmasi kembali relevansinya dengan perkembangan penelitian IR dan SR serta praktik yang sedang berjalan. Agenda riset masa depan yang ditawarkan mencakup empat kelompok utama, yaitu: implementasi standar IFRS S1 dan S2, *greenwashing* dan kualitas assurance dalam konteks negara berkembang terutama di Indonesia serta agenda riset adopsi dan kualitas Integrated Reporting (IR) di Indonesia.

1. Agenda Riset Implementasi IFRS S1 dan S2 di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi PSPK 1 dan 2 yang mengacu pada IFRS S1 dan S2 pada Juli 2025, dengan implementasi bertahap dimulai tahun 2027. Namun, kesiapan perusahaan, terutama di luar sektor perbankan dan BUMN besar masih menjadi pertanyaan besar. Agenda riset pada area ini antara lain dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Se jauh mana tingkat kesiapan perusahaan publik di Indonesia (selain sektor jasa keuangan) dalam mengimplementasikan pengungkapan emisi Lingkup 3 sesuai IFRS S2 pada tenggat waktu yang ditetapkan OJK?
- Apa saja faktor-faktor penghambat utama (biaya, kapasitas SDM, ketersediaan data, atau kejelasan regulasi teknis) yang mempengaruhi kesiapan perusahaan Indonesia dalam mengadopsi IFRS S1 dan S2?
- Apakah adopsi IFRS S1 dan S2 mendorong perubahan strategi bisnis substantif perusahaan, atau sekadar perubahan format pelaporan tanpa dampak nyata pada kinerja lingkungan?
- Bagaimana persepsi investor dan kreditur di Indonesia terhadap informasi keberlanjutan yang disusun berdasarkan IFRS S1 dan S2, dibandingkan dengan informasi berbasis GRI?

2. Agenda Riset Greenwashing dan Kualitas Assurance di Indonesia

Greenwashing menjadi ancaman serius bagi kredibilitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia, terutama karena lemahnya penegakan hukum dan belum adanya standar *assurance* yang baku. Agenda riset pada area ini antara lain dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah dapat dikembangkan model pengukuran kuantitatif yang dapat mendeteksi praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia?
- Seberapa luas praktik *greenwashing* terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia, dan faktor-faktor apa yang menjadi pendorong utama praktik tersebut?
- Apakah keberadaan *assurance* pihak ketiga secara signifikan mengurangi praktik *greenwashing*, atau justru menjadi bentuk legitimasi semu?
- Apa kesenjangan kompetensi utama yang harus dipenuhi oleh akuntan publik dan profesi asesor lainnya di Indonesia agar mampu memberikan jasa *assurance* yang berkualitas?

3. Riset Adopsi dan Kualitas Integrated Reporting (IR) di Indonesia

Berbeda dengan SR yang telah diwajibkan melalui POJK 51/2017, adopsi IR di Indonesia masih sangat rendah dan bersifat sukarela, terbatas pada perusahaan-perusahaan besar di sektor BUMN, pertambangan, dan perbankan. Agenda riset pada area ini antara lain dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Faktor-faktor apa (profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, kualitas tata kelola) yang menjadi pendorong dan penghambat adopsi integrated reporting di perusahaan publik Indonesia, terutama di luar sektor BUMN dan tambang?
- Apa yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan yang telah mengadopsi IR cenderung berasal dari sektor tertentu (BUMN, perbankan, tambang), sementara sektor lain seperti properti, perdagangan, dan manufaktur non-tambang masih sangat rendah adopsinya?
- Sejauh mana kualitas laporan terpadu yang diterbitkan perusahaan Indonesia, diukur berdasarkan kepatuhan terhadap International <IR> Framework (termasuk pengungkapan six capitals, integrated thinking, dan narasi penciptaan nilai)?
- Apakah adopsi IR terbukti meningkatkan relevansi nilai (*value relevance*) laporan perusahaan di Indonesia? Apakah investor merespon positif penerbitan laporan terpadu?
- Bagaimana hubungan antara adopsi IR dan adopsi IFRS S1/S2? Apakah perusahaan yang mengadopsi IR cenderung

lebih siap mengimplementasikan standar IFRS S1/S2, atau justru sebaliknya?

- Hambatan spesifik apa yang dihadapi perusahaan Indonesia dalam mengadopsi IR, termasuk keterbatasan pemahaman tentang integrated thinking, kesulitan mengukur six capitals (terutama modal manusia, intelektual, sosial, dan alam), serta tantangan dalam mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan?

4. Agenda Riset Sinergi dan Integrasi antara SR (IFRS S1/S2) dan IR

Salah satu perkembangan paling menarik dalam lanskap pelaporan global adalah semakin kaburnya batas antara SR dan IR, terutama karena IFRS S1 mengadopsi perspektif *outside-in* yang sebelumnya menjadi ciri khas IR. Hal ini membuka agenda riset baru tentang bagaimana kedua praktik pelaporan ini dapat saling melengkapi atau justru bersaing di tingkat perusahaan. Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan antara lain:

- Apakah perusahaan di Indonesia yang telah mengadopsi IR lebih siap mengimplementasikan IFRS S1 dan S2 dibandingkan perusahaan yang hanya menyusun SR berbasis GRI?
- Bagaimana praktik terbaik (*best practice*) integrasi antara laporan keberlanjutan (berbasis IFRS S1/S2) dan laporan terpadu (berbasis <IR> *Framework*) di perusahaan Indonesia? Apakah kedua laporan ini dapat digabungkan, atau sebaiknya tetap terpisah?
- Apakah investor di Indonesia lebih mengandalkan informasi dari laporan terpadu atau dari laporan keberlanjutan (IFRS S1/S2) dalam pengambilan keputusan investasi?
- Bagaimana persepsi preparer laporan (manajemen perusahaan) tentang beban pelaporan ganda (SR dan IR)? Apakah mereka menganggapnya redundan atau saling melengkapi?

F. SIMPULAN

Bab ini telah mengkaji pelaporan keberlanjutan (SR) dan pelaporan terpadu (IR) melalui tiga tujuan utama. *Pertama*, mengenai perbedaan dan irisan keduanya, ditemukan bahwa SR tradisional (GRI) berfokus pada akuntabilitas dampak perusahaan terhadap lingkungan (perspektif *inside-out*), sementara IR berfokus pada bagaimana faktor eksternal memengaruhi nilai perusahaan (perspektif *outside-in*). Namun, hadirnya IFRS S1 yang juga mengadopsi perspektif

outside-in membuat batas keduanya semakin kabur, meskipun IR tetap memiliki karakteristik unik seperti *integrated thinking* dan kerangka *six capitals*. Kedua, analisis kesenjangan praktik dan penelitian menunjukkan perbedaan mencolok antara negara maju dan berkembang. Di negara maju, tantangan utama adalah peningkatan kualitas dan *assurance* laporan. Sebaliknya, di Indonesia tantangan lebih fundamental: rendahnya adopsi IR, keterbatasan SDM, lemahnya standar pengukuran, maraknya *greenwashing*, serta kesenjangan antara kemajuan regulasi dan implementasi di lapangan. Ketiga, agenda riset masa depan difokuskan pada tiga isu dalam konteks Indonesia: implementasi IFRS S1/S2 (kesiapan perusahaan, faktor penghambat), *greenwashing* dan kualitas *assurance* (deteksi, efektivitas verifikasi), serta adopsi IR (faktor pendorong dan penghambat, kesenjangan antar sektor, sinergi dengan IFRS S1/S2). Ketiga agenda ini saling terkait dan menjadi prioritas untuk memperkuat ekosistem pelaporan keberlanjutan dan terpadu di Indonesia.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Abbana, S., Marimuthu, F., & Maama, H. (2025). Integrated Reporting in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review of Outcomes, Constraints and Impacts. *Journal of Ecohumanism*, 4(4), 1873–1895. <https://doi.org/https://doi.org/10.62754/joe.v4i4.6932>
- Integrated
- Bananuka, J., Tumwebaze, Z., & Orobia, L. (2019). The adoption of integrated reporting : a developing country perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(1), 2–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2017-0089>
- Dissanayake, D., Kuruppu, S., Qian, W., & Tilt, C. (2021). Barriers for sustainability reporting : evidence from Indo-Paci fi c region. *Meditari Accountancy Research*, 29(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/medar-01-2020-0703>
- Goerzen, A., Assche, A. Van, Zhan, J. X., & Zhang, L. (2025). From the editors: Global sustainability reporting standards and the future of international business. *Journal of International Business Policy*, 8(2), 125–136. <https://doi.org/10.1057/s42214-025-00213-x>
- IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information, (2024).
- Judijanto, L. (2025). Transparency in Corporate Sustainability Reporting: Evaluating Metrics, Accountability, and Social Impact. *Asian Business Research Journal*, 10(8), 95–102. <https://doi.org/10.55220/2576-6759.545>
- Lev, B., & Gu, F. (2016). *The End of Accounting and the path forward for Investor and Managers*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Ng, A. W., Yorke, S. M., & Nathwani, J. (2022). Enforcing Double Materiality in Global Sustainability Reporting for Developing Economies: Reflection on Ghana ' s Oil Exploration and Mining Sectors. *Sustainability*, 14(16). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14169988>
- Pristi, K. M., & Bandiyono, A. (2024). Tren dan Pola Dalam Adopsi Standar Pelaporan Global Reporting Initiative (GRI) Oleh Perusahaan BUMN di Indonesia: Scoping Review. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(3), 305–318. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/6110/3732>
- Roszak, S., Sandu, R., Königsgruber, R., & Ramid, S. (2025). The Practice Turn in Integrated Reporting (IR) Research: a Comprehensive Review. *Comptabilité Contrôle Audit*, 31(1), 7–53.

- <https://www.proquest.com/trade-journals/le-practice-turn-dans-les-recherches-sur/docview/3223343947/se-2>
- Shanmugam, J. K., Zharifah, N., Adenan, C., & Jamaludin, M. F. (2025). Exploring the Implementation of Integrated Reporting: A Comparative Literature Review Across Countries. *Gading Journal for the Social Sciences*, 28(1), 144–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.24191/gading.v28i1.495>
- Sommer, C. (2017). *Drivers and Constraints for Adopting Sustainability Standards in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)* (Issue 21). German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Bonn. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/199511/1/die-dp-2017-21.pdf>
- Yuhertiana, I., & Husna, G. A. (2025). Audit Committee and ESG Disclosure: Advancing SDG For Sustainable Performance In State-Owned Enterprises. *Journal of Lifestyle and SDG'S Review*, 5(1), 1–25. <https://sdgsreview.org/LifestyleJournal/article/view/5042/2449>

■ TENTANG PENULIS



**Dr. Nugroho Wisnu, Murti, S.E., M.Si.,
M.Ec.Dev., Ak., CA.
Universitas Dharma AUB Surakarta**

Penulis lahir di Sukoharjo tahun 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada tahun 2006. Ketertarikan pada bidang akuntansi forensik mendorong penulis untuk melanjutkan studi Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan konsentrasi Audit Forensik, serta pendidikan profesi selesai di tahun 2011. Untuk memperdalam keahlian di bidang penilaian aset, penulis kemudian menempuh pendidikan Magister yang kedua di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Program Studi Ilmu Ekonomika Pembangunan dengan konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Properti (MAPP), lulus pada tahun 2017. Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi konsentrasi akuntansi keuangan diselesaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2025. Penulis juga telah sertifikasi profesi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Program Studi Akuntansi dan Program Studi Magister Manajemen (MM) Universitas Dharma Surakarta. Penelitian dan publikasi ilmiahnya berfokus pada analisis valuasi instrumen investasi, perpajakan, relevansi nilai informasi akuntansi keuangan maupun non keuangan. Buku ini merupakan salah satu kontribusi penulis dalam pengembangan literasi akuntansi dan penilaian aset di Indonesia.

Bab 11



STANDAR DAN KERANGKA PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL

Alan Smith Purba, S.E., M.Ak.
Universitas Mulawarman

A. KONSEP DASAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL

Pelaporan keberlanjutan global merupakan bagian penting dari perkembangan akuntansi modern yang menempatkan informasi ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, laporan keuangan konvensional tidak selalu cukup untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang. Risiko iklim, perubahan regulasi, tuntutan investor, tekanan masyarakat, hak tenaga kerja, efisiensi sumber daya, dan tata kelola etis menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan perusahaan. Pelaporan keberlanjutan global hadir untuk menjawab kebutuhan informasi tersebut. Melalui pelaporan keberlanjutan, perusahaan dapat menyampaikan bagaimana strategi, kebijakan, risiko, peluang, dampak, dan kinerja keberlanjutan dikelola secara sistematis. Pelaporan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Dalam praktik global, berbagai standar dan kerangka pelaporan telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, keterbandingan, dan kredibilitas informasi keberlanjutan.

1. Pengertian Pelaporan Keberlanjutan Global

Pelaporan keberlanjutan global dapat dipahami sebagai proses penyusunan dan penyampaian informasi mengenai dampak, risiko, peluang, serta kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola berdasarkan standar atau kerangka yang berlaku secara internasional. Pelaporan ini mencerminkan perluasan fungsi akuntansi dari orientasi keuangan menuju pertanggungjawaban yang lebih luas. Istilah global menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak hanya berlaku dalam batas yurisdiksi nasional, tetapi juga mengacu pada prinsip, standar, dan praktik yang dapat digunakan lintas negara. Perusahaan multinasional, perusahaan terbuka, lembaga keuangan, serta organisasi yang terlibat dalam rantai pasok global membutuhkan pelaporan yang dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan di pasar internasional. Dalam pelaporan keberlanjutan, informasi yang disajikan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Informasi kuantitatif mencakup data emisi, konsumsi energi, penggunaan air, limbah, tingkat kecelakaan kerja, jumlah pelatihan, atau kontribusi ekonomi. Sementara itu, informasi kualitatif mencakup kebijakan, strategi, tata kelola, sistem manajemen risiko, komitmen, dan proses pelibatan pemangku kepentingan. Kombinasi kedua jenis informasi tersebut diperlukan agar laporan keberlanjutan tidak hanya berisi angka, tetapi juga menjelaskan konteks dan arah kebijakan perusahaan (Fahmi, 2025).

2. Tujuan dan Fungsi Pelaporan Keberlanjutan bagi Perusahaan

Tujuan utama pelaporan keberlanjutan adalah menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan mengenai bagaimana perusahaan mengelola dampak serta risiko keberlanjutan. Informasi ini membantu pemangku kepentingan menilai kualitas tata kelola, ketahanan model bisnis, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Bagi perusahaan, pelaporan keberlanjutan memiliki beberapa fungsi strategis. *Pertama*, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat akuntabilitas. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana sumber daya digunakan, bagaimana dampak sosial dan lingkungan dikelola, serta bagaimana tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dilaksanakan. *Kedua*, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan internal. Data keberlanjutan dapat digunakan oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menetapkan target, mengendalikan biaya lingkungan, dan mengurangi risiko operasional. *Ketiga*,

pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana membangun kepercayaan. Perusahaan yang menyajikan informasi keberlanjutan secara transparan dapat meningkatkan legitimasi di mata investor, regulator, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat. Keempat, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai media untuk meningkatkan keterbandingan. Dengan menggunakan standar global, kinerja keberlanjutan perusahaan dapat dibandingkan antarperiode, antarsektor, dan antar negara (Sukaharsono & Andayani, 2021).

B. PERKEMBANGAN STANDAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Perkembangan standar pelaporan keberlanjutan menunjukkan perubahan signifikan dalam praktik akuntansi dan pelaporan korporasi. Pada awal perkembangannya, pelaporan keberlanjutan lebih banyak dilakukan secara sukarela dan bersifat naratif. Perusahaan menyampaikan informasi sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau komunikasi reputasi. Namun, meningkatnya kebutuhan pasar terhadap informasi keberlanjutan yang dapat dibandingkan mendorong pelaporan ini bergerak menuju praktik yang lebih terstandar dan regulatif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan semakin dipandang sebagai informasi penting dalam penilaian nilai perusahaan. Risiko iklim, hak asasi manusia, keamanan rantai pasok, efisiensi energi, dan tata kelola perusahaan dapat memengaruhi kinerja keuangan serta keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, standar pelaporan keberlanjutan berkembang untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat promosi, tetapi juga dapat diuji, ditelusuri, dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

1. Evolusi Pelaporan Keberlanjutan dari Sukarela menuju Regulatif

Pelaporan keberlanjutan pada awalnya banyak dilakukan secara sukarela. Perusahaan memilih sendiri topik, format, indikator, dan ruang lingkup informasi yang dilaporkan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan persoalan keterbandingan dan kredibilitas. Laporan keberlanjutan yang disusun tanpa standar dapat cenderung selektif, hanya menonjolkan capaian positif, dan mengabaikan dampak yang kurang menguntungkan bagi citra perusahaan. Seiring berkembangnya tuntutan investor dan regulator, pelaporan keberlanjutan mulai bergerak menuju standar yang lebih formal.

Perusahaan diharapkan menyajikan informasi keberlanjutan berdasarkan prinsip materialitas, konsistensi, keterbandingan, keandalan, dan kelengkapan. Perubahan ini memperlihatkan bahwa informasi keberlanjutan tidak lagi menjadi pelengkap laporan tahunan, tetapi menjadi bagian penting dalam penilaian risiko dan prospek bisnis. Perkembangan menuju regulasi juga dipengaruhi oleh kebutuhan pasar modal. Investor membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai risiko keberlanjutan, terutama risiko iklim dan tata kelola. Perusahaan yang tidak menyajikan informasi keberlanjutan secara memadai dapat menghadapi kesenjangan kepercayaan, risiko reputasi, dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan berkelanjutan (Werastuti, 2026).

2. Peran Lembaga Internasional dalam Pengembangan Standar Keberlanjutan

Lembaga internasional memiliki peran penting dalam membentuk standar dan kerangka pelaporan keberlanjutan. Lembaga seperti *Global Reporting Initiative*, *International Sustainability Standards Board*, *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, dan organisasi lain telah mengembangkan pedoman yang membantu perusahaan menyusun laporan keberlanjutan secara lebih sistematis. *Global Reporting Initiative* atau GRI berfokus pada pelaporan dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. GRI Standards disusun dalam sistem modular yang mencakup *Universal Standards*, *Sector Standards*, dan *Topic Standards*. *Sector Standards* dirancang untuk meningkatkan konsistensi pelaporan dampak berdasarkan sektor tertentu, sedangkan *Topic Standards* digunakan untuk mengungkapkan informasi pada topik tertentu yang relevan bagi organisasi. *International Sustainability Standards Board* atau ISSB berperan dalam membangun dasar global pelaporan keberlanjutan yang berorientasi pada kebutuhan investor. ISSB menerbitkan IFRS S1 dan IFRS S2 pada Juni 2023 sebagai standar awal pengungkapan keberlanjutan dan pengungkapan terkait iklim. Standar ini dimaksudkan sebagai global baseline untuk informasi keberlanjutan yang berfokus pada risiko dan peluang yang dapat memengaruhi prospek perusahaan.

C. GLOBAL REPORTING INITIATIVE DALAM PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Global Reporting Initiative merupakan salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling dikenal dalam praktik global. GRI menempatkan pelaporan keberlanjutan sebagai instrumen untuk mengungkapkan dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pemangku kepentingan yang luas, tidak hanya investor, untuk memahami dampak aktivitas perusahaan. GRI relevan dalam akuntansi keberlanjutan karena menekankan prinsip dampak dan akuntabilitas. Perusahaan tidak hanya diminta menjelaskan risiko keberlanjutan terhadap nilai perusahaan, tetapi juga bagaimana aktivitas perusahaan memengaruhi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, GRI memiliki orientasi yang kuat terhadap pertanggungjawaban publik.

1. Konsep dan Prinsip Pelaporan Berdasarkan GRI Standards

GRI Standards disusun untuk membantu organisasi melaporkan dampak secara transparan dan terstruktur. Sistem GRI terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu *Universal Standards*, *Sector Standards*, dan *Topic Standards*. *Universal Standards* berlaku untuk semua organisasi, *Sector Standards* membantu organisasi mengidentifikasi isu yang lazim pada sektor tertentu, sedangkan *Topic Standards* digunakan untuk melaporkan topik material tertentu, seperti energi, emisi, limbah, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan masyarakat lokal. Prinsip penting dalam GRI adalah materialitas dampak. Materialitas dalam konteks ini berkaitan dengan dampak signifikan organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi isu keberlanjutan yang paling penting berdasarkan dampak aktual dan potensial. Proses ini memerlukan pemahaman terhadap aktivitas bisnis, hubungan bisnis, rantai nilai, serta harapan pemangku kepentingan. GRI juga menekankan kelengkapan dan keseimbangan informasi. Perusahaan perlu menyajikan informasi secara proporsional, tidak hanya mengungkapkan capaian positif, tetapi juga risiko, tantangan, dan dampak negatif yang relevan. Prinsip ini penting untuk mencegah laporan keberlanjutan menjadi alat pencitraan semata (Lamberton, 2005).

2. Pengungkapan Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial dalam GRI

Pengungkapan dalam GRI mencakup topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Topik ekonomi berkaitan dengan nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, keberadaan pasar, praktik pengadaan, dampak ekonomi tidak langsung, serta perilaku antikorupsi. Informasi ini menunjukkan bagaimana perusahaan menciptakan dan mendistribusikan nilai ekonomi kepada berbagai pemangku kepentingan. Topik lingkungan mencakup aspek seperti energi, air, biodiversitas, emisi, limbah, material, dan kepatuhan lingkungan. Pengungkapan ini penting karena aktivitas perusahaan dapat memberikan tekanan terhadap sumber daya alam dan ekosistem. Informasi lingkungan membantu menilai sejauh mana perusahaan mengelola dampak ekologis dan memperbaiki efisiensi sumber daya. Topik sosial mencakup ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, keberagaman, hak asasi manusia, masyarakat lokal, serta tanggung jawab produk. Pengungkapan sosial memberikan gambaran mengenai hubungan perusahaan dengan tenaga kerja, konsumen, komunitas, dan rantai pasok. Dengan cakupan tersebut, GRI menjadi kerangka yang komprehensif dalam menilai dampak keberlanjutan perusahaan.

D. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD DAN IFRS SUSTAINABILITY DISCLOSURE STANDARDS

International Sustainability Standards Board atau ISSB merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan yang dapat digunakan secara global. Kehadiran ISSB menandai tahap baru dalam pelaporan keberlanjutan karena berupaya membangun dasar global yang berorientasi pada kebutuhan investor dan pasar modal. *IFRS Sustainability Disclosure Standards* memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan bagi prospek perusahaan. Dengan demikian, standar ini memiliki hubungan kuat dengan penilaian nilai perusahaan, arus kas masa depan, akses pembiayaan, dan biaya modal. Dua standar awal yang diterbitkan adalah IFRS S1 dan IFRS S2.

1. Konsep Dasar IFRS S1 tentang Pengungkapan Keberlanjutan

IFRS S1 berisi persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Standar ini meminta perusahaan mengungkap informasi tentang risiko dan peluang keberlanjutan yang secara wajar dapat memengaruhi prospek perusahaan. Informasi tersebut berkaitan dengan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target yang digunakan untuk mengelola risiko dan peluang keberlanjutan. Konsep utama IFRS S1 adalah keterhubungan antara keberlanjutan dan informasi keuangan. Risiko keberlanjutan tidak dipandang sebagai isu terpisah dari kinerja perusahaan, melainkan sebagai faktor yang dapat memengaruhi nilai ekonomi. Sebagai contoh, risiko perubahan iklim, perubahan regulasi, kelangkaan sumber daya, dan tuntutan pasar dapat berdampak pada pendapatan, biaya, aset, liabilitas, serta strategi investasi perusahaan. IFRS S1 juga menekankan pentingnya informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan investor. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyajikan informasi yang memungkinkan pengguna laporan memahami bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan memengaruhi model bisnis, strategi, dan kinerja keuangan (Bebbington et al., 2014).

2. Konsep Dasar IFRS S2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim

IFRS S2 merupakan standar yang berfokus pada pengungkapan terkait iklim. Standar ini mengatur informasi mengenai risiko dan peluang iklim yang dapat memengaruhi prospek perusahaan. Risiko iklim dapat berupa risiko fisik, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kenaikan suhu, serta risiko transisi, seperti perubahan regulasi, teknologi rendah karbon, perubahan preferensi konsumen, dan kebijakan harga karbon. IFRS S2 menuntut perusahaan menjelaskan tata kelola risiko iklim, strategi menghadapi risiko dan peluang iklim, proses manajemen risiko, serta metrik dan target yang digunakan. Standar ini sejalan dengan struktur pengungkapan yang dikembangkan oleh TCFD, yaitu *governance*, *strategy*, *risk management*, serta *metrics and targets*. Pengungkapan terkait iklim menjadi penting karena perubahan iklim dapat memengaruhi kelangsungan bisnis. Perusahaan yang tidak mengelola risiko iklim dapat menghadapi peningkatan biaya, gangguan operasional, penurunan nilai aset, dan tekanan reputasi. Oleh karena itu, IFRS S2 membantu perusahaan menyajikan informasi iklim yang lebih terstruktur dan relevan bagi pasar modal.

E. KERANGKA PELAPORAN KEBERLANJUTAN LAINNYA

Selain GRI dan IFRS *Sustainability Disclosure Standards*, terdapat berbagai kerangka lain yang turut memengaruhi praktik pelaporan keberlanjutan global. Kerangka tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan informasi yang berbeda, mulai dari risiko iklim, penciptaan nilai jangka panjang, hingga pengungkapan berbasis industri. Beberapa kerangka yang penting untuk dipahami adalah TCFD, *Integrated Reporting Framework*, dan SASB Standards. Kerangka-kerangka tersebut tidak selalu saling menggantikan. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan lebih dari satu kerangka sesuai kebutuhan pelaporan, regulasi, sektor usaha, dan pemangku kepentingan utama. Kombinasi kerangka dapat membantu perusahaan menyajikan informasi keberlanjutan secara lebih komprehensif.

1. Task Force on Climate-related Financial Disclosures dan Pelaporan Risiko Iklim

Task Force on Climate-related Financial Disclosures atau TCFD dikembangkan untuk mendorong pengungkapan informasi keuangan terkait iklim yang berguna bagi pengambilan keputusan. Rekomendasi TCFD disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu *governance*, *strategy*, *risk management*, serta *metrics and targets*. Pilar tersebut dirancang agar organisasi dapat menjelaskan bagaimana risiko dan peluang iklim diidentifikasi, dikelola, dan diintegrasikan dalam strategi bisnis. Pilar *governance* berfokus pada peran dewan dan manajemen dalam mengawasi isu iklim. Pilar *strategy* menjelaskan dampak risiko dan peluang iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan. Pilar *risk management* menjelaskan proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko iklim. Pilar *metrics and targets* mengungkap indikator serta sasaran yang digunakan untuk mengukur dan mengelola risiko iklim. TCFD memiliki pengaruh besar karena struktur pengungkapannya digunakan sebagai dasar dalam berbagai standar dan regulasi iklim. Pelaporan berbasis TCFD membantu perusahaan menghubungkan isu iklim dengan aspek keuangan, sehingga risiko iklim tidak hanya dipandang sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai isu strategis dan finansial.

2. Integrated Reporting Framework dan Sustainability Accounting Standards Board

Integrated Reporting Framework dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan, mempertahankan-

kan, atau mengurangi nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kerangka ini menekankan keterhubungan antara berbagai bentuk modal, seperti modal keuangan, manufaktur, intelektual, manusia, sosial, relasional, dan alam. *Integrated Reporting Framework* kini berada dalam ekosistem IFRS Foundation setelah konsolidasi *Value Reporting Foundation*. Pendekatan pelaporan terintegrasi membantu perusahaan menjelaskan hubungan antara strategi, tata kelola, kinerja, risiko, prospek, dan penciptaan nilai. Dengan demikian, laporan tidak hanya berisi data keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan bagaimana informasi keberlanjutan terhubung dengan model bisnis dan strategi perusahaan. *Sustainability Accounting Standards Board* atau SASB Standards berfokus pada pengungkapan keberlanjutan berbasis industri yang relevan secara finansial. SASB Standards membantu perusahaan mengidentifikasi isu keberlanjutan yang kemungkinan besar memengaruhi kinerja keuangan dalam industri tertentu. SASB Foundation dan *International Integrated Reporting Council* sebelumnya bergabung ke dalam *Value Reporting Foundation*, kemudian terkonsolidasi ke dalam IFRS Foundation untuk mendukung kerja ISSB. Perbandingan ringkas beberapa kerangka pelaporan keberlanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.1 *Integrated Reporting Framework dan Sustainability Accounting Standards Board*

Standar/Kerangka	Fokus Utama	Orientasi Pengguna
GRI Standards	Dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial	Pemangku kepentingan luas
IFRS S1	Risiko dan peluang keberlanjutan yang memengaruhi prospek perusahaan	Investor dan pasar modal
IFRS S2	Risiko dan peluang terkait iklim	Investor dan pasar modal
TCFD	Pengungkapan risiko iklim berbasis tata kelola, strategi, risiko, metrik, dan target	Investor, regulator, perusahaan
Integrated Reporting	Penciptaan nilai jangka panjang melalui berbagai bentuk modal	Investor dan pemangku

		kepentingan strategis
SASB Standards	Isu keberlanjutan berbasis industri yang material secara finansial	Investor dan analis pasar modal

F. HARMONISASI STANDAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL

Harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan global menjadi kebutuhan mendesak karena banyaknya standar dan kerangka yang digunakan oleh perusahaan. Keragaman standar dapat memberikan fleksibilitas, tetapi juga dapat menimbulkan kompleksitas, duplikasi, dan kebingungan bagi pengguna laporan. Oleh karena itu, harmonisasi diperlukan untuk meningkatkan keterbandingan, konsistensi, dan efisiensi pelaporan. Harmonisasi tidak selalu berarti menyatukan seluruh standar menjadi satu bentuk tunggal. Harmonisasi dapat dipahami sebagai upaya membangun keterhubungan antara standar, memperjelas fokus masing-masing kerangka, dan mengurangi tumpang tindih pengungkapan. Dalam praktik global, arah harmonisasi terlihat dari konsolidasi lembaga, penyelarasan konsep materialitas, serta integrasi antara informasi keberlanjutan dan informasi keuangan (Fahmi, 2025).

1. Tantangan Keterbandingan, Materialitas, dan Konsistensi Informasi Keberlanjutan

Tantangan utama pelaporan keberlanjutan adalah keterbandingan. Perusahaan dapat menggunakan indikator, metode pengukuran, batas pelaporan, dan istilah yang berbeda. Akibatnya, pengguna laporan sulit membandingkan kinerja antarperusahaan atau antarperiode. Keterbandingan menjadi semakin penting karena investor, regulator, dan masyarakat membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja secara objektif. Tantangan kedua adalah materialitas. Dalam pelaporan keberlanjutan, terdapat perbedaan pendekatan antara materialitas dampak dan materialitas finansial. GRI lebih menekankan dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. IFRS *Sustainability Disclosure Standards* lebih menekankan informasi risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek perusahaan. Perbedaan ini tidak harus dipertentangkan, tetapi perlu dipahami agar perusahaan dapat menyusun laporan sesuai tujuan pelaporan. Tantangan ketiga adalah konsistensi informasi. Laporan keberlanjutan sering

melibatkan berbagai unit kerja dan sumber data. Jika sistem pengendalian internal belum kuat, data keberlanjutan dapat tidak konsisten, sulit diverifikasi, dan kurang andal. Oleh sebab itu, perusahaan perlu membangun tata kelola data keberlanjutan yang mencakup prosedur pengumpulan, validasi, pengendalian, dan pelaporan.

2. Arah Integrasi Standar Global dalam Praktik Pelaporan Perusahaan

Arah integrasi standar global menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin bergerak menuju keterhubungan dengan pelaporan keuangan. ISSB membangun standar keberlanjutan yang berfokus pada kebutuhan investor dan pasar modal. Pada saat yang sama, GRI tetap memainkan peran penting dalam pelaporan dampak kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara saling melengkapi sesuai kebutuhan perusahaan. Integrasi juga terlihat dari penguatan struktur pengungkapan yang berbasis tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Struktur ini membantu perusahaan menyajikan informasi keberlanjutan secara lebih sistematis. Perusahaan tidak hanya melaporkan data kinerja, tetapi juga menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan dikelola dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktik perusahaan, integrasi standar global dapat dilakukan melalui beberapa langkah. *Pertama*, perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan utama. *Kedua*, perusahaan perlu menentukan isu material berdasarkan dampak dan relevansi finansial. *Ketiga*, perusahaan perlu memilih standar yang sesuai dengan tujuan pelaporan. *Keempat*, perusahaan perlu membangun sistem data dan pengendalian internal yang mendukung keandalan informasi. *Kelima*, perusahaan perlu menghubungkan pelaporan keberlanjutan dengan strategi bisnis dan pengelolaan risiko. Dengan arah tersebut, pelaporan keberlanjutan global berkembang dari sekadar praktik komunikasi menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Standar dan kerangka pelaporan keberlanjutan tidak hanya membantu perusahaan memenuhi tuntutan eksternal, tetapi juga memperkuat kemampuan internal dalam memahami risiko, mengelola dampak, dan menciptakan nilai jangka panjang.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (Eds.). (2014). *Sustainability accounting and accountability*. Routledge.
- Fahmi, R. A. (2025). Pelaporan Keberlanjutan dalam Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Literatur atas Praktik, Standar, dan Tantangannya. *Tangible Journal*, 10(1), 104-119.
- Lamberton, G. (2005). Sustainability accounting – a brief history and conceptual framework. In *Accounting forum* (Vol. 29, No. 1, pp. 7-26). Taylor & Francis.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Werastuti, D. N. S. (2026). Akuntansi Keberlanjutan; Akuntansi Hijau; Governance: Strategi Keberlanjutan Bisnis. *AMU Press*, 1-258.

■ TENTANG PENULIS



Alan Smith Purba, S.E., M.Ak.
Universitas Mulawarman

Penulis lahir di Balikpapan, 01 Agustus 1991. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Mulawarman dengan Program Studi S1 Akuntansi, lulus tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Magister tahun 2018 di Universitas Brawijaya pada Program Studi Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik, lulus tahun 2021. Selain menjadi Dosen, penulis juga sekarang menjadi tenaga ahli untuk beberapa pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Penulis mempunyai ketertarikan pada rumpun ilmu Akuntansi Keberlanjutan yang sekarang menjadi focus Penulis untuk beberapa penelitian Penulis. Penulis juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan mitra dan rekanan. Buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Bab 12



AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN KEBIJAKAN

Maryam Monika Rangkuti, S.E., M.Si.
Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

A. URGENSI REGULASI DALAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Salah satu landasan utama urgensi regulasi dalam akuntansi keberlanjutan adalah keberadaan kegagalan pasar (*market failure*), khususnya dalam bentuk eksternalitas negatif. Dalam sistem ekonomi pasar, harga suatu barang atau jasa seharusnya mencerminkan seluruh biaya yang timbul dalam proses produksinya. Namun dalam praktiknya, banyak biaya sosial dan lingkungan—seperti polusi udara, pencemaran air, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca—tidak tercermin dalam struktur harga. Biaya tersebut ditanggung oleh masyarakat luas dan generasi mendatang, bukan oleh entitas yang menghasilkan dampak tersebut. Kondisi ini menciptakan distorsi alokasi sumber daya dan menghasilkan sinyal ekonomi yang tidak akurat. Dalam konteks akuntansi, eksternalitas yang tidak diinternalisasi menyebabkan laporan keuangan konvensional gagal menggambarkan kinerja ekonomi secara utuh. Laba yang dilaporkan dapat tampak tinggi karena biaya lingkungan tidak diakui sebagai beban perusahaan. Oleh karena itu, regulasi menjadi instrumen penting untuk memaksa pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan, baik melalui kewajiban pelaporan, pajak karbon, mekanisme perdagangan emisi, maupun standar pengungkapan risiko keberlanjutan.

Agenda pembangunan berkelanjutan yang dipromosikan oleh United Nations menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan keseimbangan sosial dan lingkungan. Tanpa kerangka regulatif, akuntansi keberlanjutan berisiko menjadi pilihan opsional yang tidak mengubah struktur insentif ekonomi perusahaan. Selain eksternalitas, urgensi regulasi juga didorong oleh masalah asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dalam teori ekonomi informasi, pihak internal perusahaan memiliki akses terhadap data risiko operasional, dampak lingkungan, dan strategi mitigasi yang tidak sepenuhnya diketahui oleh investor, kreditur, regulator, maupun masyarakat. Ketimpangan informasi ini dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan investasi serta menimbulkan risiko sistemik dalam jangka panjang. Dalam konteks keberlanjutan, risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, potensi sanksi lingkungan, atau ketergantungan pada sumber daya tidak terbarukan sering kali tidak diungkapkan secara memadai apabila tidak ada kewajiban regulatif.

Tanpa aturan yang mengikat, perusahaan cenderung melakukan *selective disclosure*, yaitu hanya mengungkapkan informasi yang menguntungkan citra mereka. Regulasi pelaporan keberlanjutan berfungsi untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut melalui standar minimum pengungkapan yang terstruktur dan dapat diperbandingkan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya isu etika, tetapi menjadi kebutuhan sistemik untuk menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan efisiensi alokasi modal. Dari perspektif kelembagaan (*institutional perspective*), regulasi juga berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial bagi aktivitas korporasi. Perusahaan tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam sistem sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan ekspektasi publik. Ketika isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi perhatian global, tekanan terhadap perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial semakin meningkat (Sukaharsono & Andayani, 2021).

Rezim internasional seperti UNFCCC memperkuat ekspektasi global terhadap komitmen negara dan korporasi dalam pengurangan emisi dan pelaporan dampak lingkungan. Dalam situasi tersebut, regulasi menjadi instrumen formal yang menetapkan standar minimum akuntabilitas. Kewajiban pelaporan keberlanjutan tidak hanya bertujuan menyediakan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Tanpa regulasi, laporan keberlanjutan berpotensi menjadi alat legitimasi simbolik semata (*symbolic legitimacy*) yang tidak mencerminkan perubahan substantif dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, regulasi membantu memastikan bahwa praktik akuntansi keberlanjutan memiliki dasar hukum yang

kuat dan mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan.

B. ARSITEKTUR KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN GLOBAL

Arsitektur kebijakan keberlanjutan global tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses historis yang panjang. Isu lingkungan mulai mendapatkan perhatian serius dalam forum internasional sejak Konferensi Stockholm 1972, yang menandai pengakuan global terhadap keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sejak saat itu, berbagai inisiatif global berkembang untuk merespons krisis ekologis, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. Tonggak penting dalam arsitektur kebijakan global adalah adopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh *United Nations* pada tahun 2015. SDGs tidak hanya menekankan aspek lingkungan, tetapi juga integrasi dimensi sosial dan ekonomi dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan. Agenda ini memperluas tanggung jawab aktor non-negara, termasuk korporasi, untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan global.

Dengan demikian, perusahaan tidak lagi diposisikan semata sebagai entitas ekonomi, tetapi sebagai agen pembangunan yang harus mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsekuensinya, sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi global tersebut. Isu perubahan iklim menjadi pusat perhatian dalam kebijakan keberlanjutan global. Rezim internasional yang dikoordinasikan melalui UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) membentuk kerangka kerja bagi negara-negara untuk menetapkan komitmen pengurangan emisi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. *Paris Agreement* tahun 2015 menjadi tonggak penting karena memperkenalkan mekanisme *Nationally Determined Contributions* (NDCs), yang mewajibkan setiap negara menetapkan target penurunan emisi secara transparan dan terukur (Werastuti, 2026).

Rezim ini secara tidak langsung memengaruhi praktik akuntansi keberlanjutan di tingkat korporasi. Ketika negara menetapkan target penurunan emisi, sektor privat menjadi bagian dari strategi pencapaiannya. Pemerintah kemudian merumuskan regulasi turunan, seperti kewajiban pelaporan emisi, pengenaan pajak karbon, atau skema perdagangan karbon. Dengan demikian, arsitektur kebijakan global menciptakan efek berantai (*cascade effect*) dari level internasional ke nasional, hingga akhirnya memengaruhi sistem pengukuran dan

pengungkapan perusahaan. Dalam konteks ini, akuntansi menjadi instrumen teknis yang tidak terpisahkan dari komitmen kebijakan global. Selain organisasi global, kawasan regional memainkan peran penting dalam membentuk standar dan kebijakan keberlanjutan yang lebih mengikat. European Union merupakan contoh paling progresif dalam mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam sistem regulasi ekonomi dan keuangan.

Melalui kebijakan seperti *European Green Deal* dan regulasi pelaporan keberlanjutan korporasi, Uni Eropa menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi transformasi ekonomi jangka panjang. Pendekatan regional ini memiliki implikasi lintas batas (*extraterritorial impact*). Perusahaan di luar wilayah Uni Eropa yang memiliki hubungan perdagangan atau investasi dengan kawasan tersebut juga terdampak oleh regulasi yang berlaku. Hal ini menciptakan tekanan global bagi perusahaan multinasional untuk mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan dan terstandar. Dengan demikian, arsitektur kebijakan global bersifat multilapis – terdiri dari tingkat internasional, regional, dan nasional – yang saling berinteraksi dalam membentuk norma keberlanjutan global. Perkembangan kebijakan keberlanjutan global juga ditandai oleh upaya konvergensi antarnegara dan lembaga internasional.

Meskipun setiap negara memiliki konteks ekonomi dan sosial yang berbeda, terdapat kecenderungan menuju harmonisasi prinsip-prinsip dasar pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan. Konvergensi ini bertujuan meningkatkan keterbandingan (*comparability*) informasi lintas negara dan memperkuat integrasi pasar modal global. Bagi akuntansi keberlanjutan, konvergensi kebijakan global menciptakan kebutuhan akan sistem pelaporan yang konsisten dan dapat diverifikasi. Hal ini berdampak pada peningkatan tuntutan terhadap kualitas data, sistem informasi, serta mekanisme assurance (yang dibahas pada Bab 14). Di sisi lain, konvergensi juga menghadirkan tantangan bagi negara berkembang yang harus menyesuaikan kapasitas regulasi dan institusionalnya. Oleh karena itu, arsitektur kebijakan global tidak hanya mencerminkan kesepakatan normatif, tetapi juga arena negosiasi kepentingan antara negara maju dan berkembang (Lamberton, 2005).

C. KERANGKA REGULASI KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

Perkembangan regulasi keberlanjutan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dan komitmen nasional terhadap

pembangunan berkelanjutan. Sejak ratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait perubahan iklim dan lingkungan hidup, Indonesia mulai memperkuat kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab lingkungan dan sosial korporasi. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi fondasi normatif yang menegaskan kewajiban setiap entitas usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Transformasi regulasi semakin terlihat ketika isu keberlanjutan masuk ke dalam sektor keuangan dan pasar modal. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kepatuhan lingkungan semata (*environmental compliance*) menuju integrasi keberlanjutan dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, regulasi tidak lagi hanya mengatur batas emisi atau standar baku mutu lingkungan, tetapi juga mewajibkan transparansi, pelaporan, dan integrasi risiko keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan.

Ritel memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Sebagai penghubung antara produsen dan konsumen akhir, ritel memainkan peran yang vital dalam mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui proses distribusi barang dari produsen ke konsumen, sektor ritel tidak hanya berfungsi sebagai penyedia produk, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tonggak penting regulasi keberlanjutan adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong keuangan berkelanjutan. Melalui regulasi terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, OJK mewajibkan penyusunan Laporan Keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa isu keberlanjutan telah menjadi bagian dari arsitektur regulasi pasar modal nasional.

Kewajiban tersebut mengubah karakter pelaporan keberlanjutan di Indonesia dari yang sebelumnya dominan sukarela menjadi semi-mandatori hingga mandatori bagi entitas tertentu. Perusahaan tidak hanya diminta mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial, tetapi juga risiko, strategi, serta kinerja lingkungan dan sosial secara terukur. Dalam konteks ini, regulasi OJK berfungsi sebagai instrumen pengurangan asimetri informasi dan penguatan tata kelola perusahaan. Kewajiban pelaporan tersebut juga membuka ruang bagi mekanisme *assurance* dan audit keberlanjutan. Selain sektor keuangan, regulasi keberlanjutan di Indonesia juga diperkuat melalui kebijakan lingkungan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu instrumen kebijakan yang paling

dikenal adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Program ini menilai kinerja lingkungan perusahaan dan mengumumkan hasilnya kepada publik dalam bentuk peringkat warna.

PROPER memiliki karakteristik unik karena menggabungkan pendekatan regulatif dan reputasional. Meskipun pada dasarnya berbasis kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, publikasi peringkat menciptakan tekanan reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Dengan demikian, PROPER tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga instrumen transparansi yang mendorong perusahaan meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan. Dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, hasil PROPER dapat menjadi sumber informasi penting dalam pelaporan dan pengukuran kinerja lingkungan perusahaan. Sejalan dengan komitmen nasional dalam pengurangan emisi, Indonesia mulai mengembangkan instrumen kebijakan berbasis pasar untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kebijakan mengenai nilai ekonomi karbon dan mekanisme perdagangan karbon menjadi bagian dari strategi nasional untuk memenuhi target *Nationally Determined Contributions (NDCs)* di bawah rezim UNFCCC. Instrumen seperti pajak karbon dan bursa karbon menciptakan implikasi langsung terhadap sistem akuntansi perusahaan. Emisi karbon tidak lagi dipandang sebagai isu non-finansial semata, tetapi memiliki konsekuensi finansial yang dapat memengaruhi struktur biaya dan profitabilitas (Bebbington et al., 2014).

Hal ini menuntut perusahaan untuk mengembangkan sistem akuntansi karbon yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Regulasi karbon di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan publik dan praktik akuntansi semakin terintegrasi dalam kerangka keberlanjutan nasional. Meskipun kerangka regulasi keberlanjutan di Indonesia terus berkembang, tantangan harmonisasi antar-lembaga masih menjadi isu penting. Regulasi yang tersebar di berbagai kementerian dan otoritas berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau inkonsistensi pelaporan. Misalnya, kewajiban pelaporan kepada otoritas lingkungan dapat berbeda pendekatannya dengan kewajiban pelaporan kepada otoritas pasar modal. Selain itu, kapasitas perusahaan—terutama UMKM—dalam memenuhi tuntutan regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Ketidaksiapan infrastruktur sistem informasi dan sumber daya manusia dapat menyebabkan kepatuhan bersifat administratif semata tanpa integrasi strategis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, efektivitas regulasi keberlanjutan di Indonesia sangat bergantung pada koordinasi lintas

lembaga, konsistensi kebijakan, serta penguatan kapasitas institusional.

D. MANDATORY VERSUS VOLUNTARY DISCLOSURE: DINAMIKA DAN IMPLIKASINYA

Pada tahap awal perkembangannya, pelaporan keberlanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia, bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan secara proaktif menerbitkan laporan tanggung jawab sosial atau laporan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi reputasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pendekatan sukarela ini sering dipandang sebagai bentuk komitmen moral dan inisiatif korporasi yang melampaui kewajiban hukum. Namun, pendekatan sukarela memiliki keterbatasan mendasar. Tanpa kewajiban regulatif, tidak semua perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara konsisten dan komprehensif. Bahkan, terdapat kecenderungan *selective disclosure*, di mana perusahaan hanya melaporkan informasi yang menguntungkan citra mereka. Ketidakterbandingan antar laporan dan ketiadaan standar minimum juga menyulitkan investor dalam melakukan analisis risiko.

Kondisi ini mendorong banyak yurisdiksi beralih ke pendekatan mandatory reporting, dengan mewajibkan entitas tertentu untuk menyampaikan laporan keberlanjutan secara periodik dan terstruktur. Secara teoretis, perdebatan antara *voluntary* dan *mandatory disclosure* berakar pada dua pendekatan utama dalam regulasi pasar. Pendekatan pertama berargumen bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri (*market-based self-regulation*). Dalam pandangan ini, perusahaan yang tidak transparan akan kehilangan kepercayaan investor dan pada akhirnya terdorong untuk meningkatkan kualitas pengungkapan secara sukarela. Sebaliknya, pendekatan kedua menekankan bahwa kegagalan pasar dan asimetri informasi membuat regulasi menjadi kebutuhan. Tanpa kewajiban formal, perusahaan mungkin tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengungkapkan risiko keberlanjutan yang berpotensi menurunkan valuasi pasar. *Mandatory disclosure* dianggap mampu menciptakan *level playing field*, meningkatkan keterbandingan, serta melindungi kepentingan publik. Dalam konteks keberlanjutan yang menyangkut kepentingan lintas generasi, argumen untuk regulasi yang mengikat menjadi semakin kuat karena dampaknya melampaui kepentingan pemegang saham semata.

Perubahan dari *voluntary* ke *mandatory disclosure* memiliki implikasi signifikan terhadap tata kelola perusahaan. Ketika pelaporan

keberlanjutan menjadi kewajiban hukum, tanggung jawab atas informasi yang disajikan tidak lagi berada pada level komunikasi publik semata, melainkan menjadi bagian dari akuntabilitas formal dewan direksi dan manajemen. Hal ini memperkuat integrasi antara akuntansi keberlanjutan dan sistem tata kelola perusahaan. Kewajiban pelaporan juga mendorong pembentukan struktur organisasi internal yang lebih jelas, seperti komite keberlanjutan atau unit manajemen risiko ESG. Proses pengumpulan data menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, *mandatory disclosure* berfungsi tidak hanya sebagai alat transparansi eksternal, tetapi juga sebagai mekanisme disiplin internal yang memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Ketika pelaporan keberlanjutan bersifat sukarela, mekanisme verifikasi eksternal sering kali tidak menjadi prioritas. Namun, dalam rezim *mandatory disclosure*, kredibilitas informasi menjadi krusial.

Investor dan regulator membutuhkan jaminan bahwa data yang diungkapkan akurat dan dapat diandalkan. Hal ini membuka ruang bagi praktik audit dan assurance laporan keberlanjutan. Kehadiran *assurance* meningkatkan reliabilitas informasi, tetapi juga menambah kompleksitas dan biaya kepatuhan. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan data yang terdokumentasi dan dapat diuji. Di sisi lain, bagi regulator, keberadaan mekanisme *assurance* membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkecil risiko manipulasi data atau *greenwashing*. Meskipun *mandatory disclosure* memiliki banyak keunggulan, regulasi yang berlebihan (*over-regulation*) juga dapat menimbulkan beban administratif yang tinggi, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Jika persyaratan pelaporan terlalu kompleks atau tidak proporsional, perusahaan dapat terjebak pada kepatuhan formal tanpa perubahan substantif dalam praktik bisnis. Hal ini berpotensi menciptakan *box-ticking compliance* yang mengurangi makna strategis pelaporan keberlanjutan.

Sebaliknya, *under-regulation* atau regulasi yang terlalu longgar berisiko mempertahankan praktik pengungkapan yang tidak konsisten dan rentan terhadap *greenwashing*. Oleh karena itu, desain kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan transparansi dan kapasitas entitas yang diatur. Regulasi yang adaptif, berbasis risiko, dan proporsional akan lebih mampu mendorong transformasi keberlanjutan secara berkelanjutan. Peralihan menuju *mandatory sustainability reporting* menandai perubahan paradigma dalam praktik akuntansi modern. Akuntansi tidak lagi dipandang semata sebagai alat pencatatan transaksi finansial, tetapi

sebagai sistem informasi strategis yang mencerminkan dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Regulasi berperan sebagai katalis yang mempercepat integrasi faktor ESG dalam pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, *mandatory disclosure* berpotensi mendorong terciptanya standar global yang lebih terharmonisasi, meningkatkan kualitas data keberlanjutan, serta memperkuat hubungan antara pasar modal dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen penegakan hukum dan kesiapan institusional. Dengan demikian, dinamika antara *voluntary* dan *mandatory disclosure* mencerminkan evolusi akuntansi keberlanjutan dari praktik moral menjadi kewajiban struktural dalam sistem ekonomi modern.

E. INSTRUMEN KEBIJAKAN EKONOMI UNTUK INTERNALISASI EKSTERNALITAS

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa eksternalitas negatif merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pasar dalam konteks keberlanjutan. Aktivitas ekonomi yang menghasilkan polusi atau emisi sering kali tidak mencerminkan biaya sosial sebenarnya dalam struktur harga. Internalisasi eksternalitas merujuk pada upaya memasukkan biaya sosial dan lingkungan tersebut ke dalam sistem ekonomi formal melalui instrumen kebijakan publik. Dalam kerangka ekonomi lingkungan, negara memiliki peran strategis untuk mengoreksi distorsi ini melalui regulasi berbasis pasar (*market-based instruments*) maupun pendekatan komando dan kontrol (*command and control regulation*). Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya menetapkan batas emisi atau standar teknis, instrumen ekonomi memberikan sinyal harga atas dampak lingkungan. Dengan demikian, perusahaan terdorong untuk menyesuaikan perilaku produksinya karena terdapat konsekuensi finansial yang nyata. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, kebijakan ini memengaruhi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan perusahaan.

Keberhasilan dalam industri ritel tidak hanya bergantung pada penjualan produk, tetapi juga pada berbagai faktor yang mempengaruhi operasional dan pengalaman pelanggan. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif dan berubah-ubah, pengecer perlu memahami berbagai elemen yang berkontribusi pada kesuksesan mereka. Faktor-faktor ini meliputi pemilihan lokasi, strategi pemasaran, pengelolaan rantai pasokan, inovasi teknologi, serta pemahaman terhadap perilaku konsumen. Pajak karbon merupakan salah satu instrumen fiskal yang dirancang untuk memberikan harga

atas emisi gas rumah kaca. Secara konseptual, pajak karbon mengikuti prinsip *polluter pays principle*, yaitu pihak yang menghasilkan polusi harus menanggung biaya atas dampak yang ditimbulkannya. Dengan mengenakan tarif tertentu per ton emisi karbon, pemerintah menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi atau berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pajak karbon dikembangkan sebagai bagian dari strategi pencapaian target *Nationally Determined Contributions (NDCs)*.

Dari perspektif akuntansi, pajak karbon menimbulkan implikasi langsung terhadap struktur biaya perusahaan. Beban pajak karbon harus diakui sebagai komponen biaya operasional, yang pada akhirnya memengaruhi laba dan arus kas. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk mengembangkan sistem pengukuran emisi yang akurat agar dapat menghitung kewajiban pajak secara tepat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai katalis integrasi antara akuntansi karbon dan akuntansi biaya lingkungan. Selain pajak karbon, skema perdagangan karbon atau *emissions trading system (ETS)* merupakan instrumen berbasis pasar yang banyak diadopsi di berbagai yurisdiksi. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan batas total emisi (cap) dan mendistribusikan atau melelang izin emisi kepada perusahaan. Perusahaan yang mampu mengurangi emisi di bawah batas yang ditetapkan dapat menjual kelebihan izinnya, sementara perusahaan yang melebihi batas harus membeli izin tambahan (Sodiq et al., 2025).

Pendekatan ini menciptakan mekanisme pasar untuk menentukan harga karbon secara dinamis. Dari perspektif akuntansi, izin emisi dapat diperlakukan sebagai aset atau kewajiban tergantung pada posisi perusahaan. Transaksi jual beli izin emisi memerlukan pencatatan yang tepat serta pengungkapan yang transparan. Selain itu, fluktuasi harga karbon dapat menimbulkan risiko keuangan yang perlu dikelola melalui strategi manajemen risiko. Dengan demikian, perdagangan karbon tidak hanya merupakan instrumen lingkungan, tetapi juga instrumen keuangan yang memengaruhi laporan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain instrumen berbasis penalti seperti pajak karbon, pemerintah juga dapat menggunakan pendekatan insentif untuk mendorong investasi hijau. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan pajak, pembebasan bea masuk untuk teknologi ramah lingkungan, atau subsidi bagi proyek energi terbarukan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi hambatan biaya awal (*upfront cost*) yang sering menjadi kendala dalam transisi menuju praktik bisnis berkelanjutan. Dari sudut pandang akuntansi, insentif fiskal memengaruhi pengakuan pendapatan, pengurangan beban pajak, atau perlakuan atas aset tetap yang diperoleh melalui subsidi.

Perusahaan perlu memastikan bahwa perlakuan akuntansi atas insentif tersebut sesuai dengan standar yang berlaku dan diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan insentif hijau berfungsi sebagai pendorong transformasi struktural tanpa semata-mata mengandalkan pendekatan sanksi. Instrumen kebijakan ekonomi untuk internalisasi eksternalitas pada akhirnya menuntut perubahan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Pengukuran emisi, perhitungan kewajiban pajak karbon, pencatatan izin emisi, hingga pengelolaan insentif fiskal memerlukan data yang akurat dan terdokumentasi. Hal ini berkaitan erat dengan pengembangan sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan. Lebih jauh lagi, internalisasi eksternalitas melalui kebijakan ekonomi mendorong perubahan orientasi manajemen. Biaya lingkungan tidak lagi dipandang sebagai faktor eksternal, melainkan sebagai bagian integral dari struktur biaya dan strategi bisnis. Dalam jangka panjang, instrumen kebijakan ini berpotensi menciptakan transformasi perilaku korporasi, karena keberlanjutan menjadi variabel yang memengaruhi profitabilitas dan daya saing. Dengan demikian, kebijakan publik dan praktik akuntansi berada dalam hubungan timbal balik yang saling memperkuat.

F. TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN RISIKO KEBIJAKAN

Meskipun arsitektur regulasi keberlanjutan semakin berkembang, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Regulasi yang baik secara normatif belum tentu efektif secara operasional. Perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara administratif tanpa benar-benar mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara *compliance in form* dan *compliance in substance*. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya manusia sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan regulasi. Aparat pengawas mungkin menghadapi keterbatasan teknis dalam mengevaluasi laporan keberlanjutan atau memverifikasi data emisi. Akibatnya, penegakan hukum (*enforcement*) tidak berjalan optimal. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, regulasi berisiko kehilangan daya dorongnya sebagai instrumen transformasi sistemik. Salah satu risiko utama dalam implementasi kebijakan keberlanjutan adalah praktik *greenwashing*, yaitu tindakan perusahaan menyajikan citra seolah-olah ramah lingkungan tanpa perubahan substantif dalam operasionalnya (Widiasih et al., 2024).

Ketika pelaporan keberlanjutan menjadi kewajiban, tekanan untuk menampilkan kinerja yang baik dapat mendorong manipulasi narasi atau penggunaan indikator yang kurang relevan. Dalam kondisi ini, laporan keberlanjutan berpotensi menjadi alat komunikasi reputasional, bukan instrumen akuntabilitas. Selain itu, terdapat risiko *regulatory arbitrage*, yaitu strategi perusahaan memanfaatkan perbedaan regulasi antar yurisdiksi untuk mengurangi kewajiban kepatuhan. Dalam sistem ekonomi global yang terintegrasi, perusahaan multinasional dapat memindahkan aktivitas produksi ke wilayah dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keberlanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi nasional, tetapi juga pada koordinasi global yang konsisten. Tanpa harmonisasi, upaya internalisasi eksternalitas dapat terhambat oleh dinamika kompetisi lintas negara. Regulasi keberlanjutan sering dirancang dengan fokus pada perusahaan besar atau emiten pasar modal. Namun, ketika kebijakan tersebut diperluas cakupannya, muncul pertanyaan mengenai kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dalam pengumpulan data, penyusunan laporan, serta pemenuhan persyaratan teknis lainnya.

Beban administratif yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi atau bahkan menghambat pertumbuhan usaha. Di sisi lain, pengecualian total terhadap UMKM juga dapat menciptakan kesenjangan akuntabilitas dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, desain kebijakan yang proporsional dan berbasis risiko menjadi krusial. Pendekatan bertahap (*phased approach*), penyederhanaan format pelaporan, serta dukungan pelatihan dan digitalisasi dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Implementasi regulasi keberlanjutan memerlukan sistem informasi yang mampu menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan dapat diverifikasi. Pengukuran emisi karbon, konsumsi energi, limbah, serta indikator sosial memerlukan metodologi yang jelas dan terdokumentasi. Banyak perusahaan masih menghadapi keterbatasan dalam integrasi data non-keuangan ke dalam sistem akuntansi yang ada. Akibatnya, kualitas informasi yang dilaporkan dapat dipertanyakan. Keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya standarisasi metodologi juga menjadi tantangan. Tanpa sistem informasi yang memadai, kewajiban pelaporan berpotensi menjadi sekadar formalitas administratif.

Oleh karena itu, penguatan sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan menjadi prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan. Regulasi yang ambisius harus diimbangi dengan kesiapan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia agar implementasinya berjalan

optimal. Dalam konteks globalisasi, regulasi keberlanjutan tidak dapat berdiri sendiri dalam batas negara. Komitmen internasional yang dikoordinasikan melalui United Nations dan rezim perubahan iklim di bawah UNFCCC menciptakan tekanan bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya. Namun, proses harmonisasi ini tidak selalu mudah karena perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, dan prioritas nasional. Negara berkembang sering menghadapi dilema antara menjaga daya saing ekonomi dan memperketat regulasi lingkungan. Regulasi yang terlalu ketat dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing industri domestik, sementara regulasi yang terlalu longgar berisiko menimbulkan kritik internasional dan hambatan perdagangan.

Oleh karena itu, kebijakan keberlanjutan harus dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan keseimbangan antara komitmen global dan kepentingan nasional. Efektivitas regulasi keberlanjutan pada akhirnya bergantung pada tiga faktor utama: desain kebijakan yang tepat, kapasitas implementasi, dan komitmen penegakan hukum. Regulasi yang terlalu normatif tanpa mekanisme pengawasan yang jelas berisiko menjadi simbolik. Sebaliknya, regulasi yang dirancang secara partisipatif, berbasis data, dan didukung sistem pengawasan yang kuat berpotensi menghasilkan perubahan struktural dalam praktik bisnis. Dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, tantangan implementasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan dinamika hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Regulasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan tujuan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan dan risiko kebijakan menjadi penting agar regulasi tidak dipahami sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai bagian dari ekosistem tata kelola yang lebih luas.

G. KONVERGENSI STANDAR GLOBAL DAN TANTANGAN HARMONISASI REGULASI

Dalam satu dekade terakhir, lanskap pelaporan keberlanjutan mengalami transformasi besar dari sistem yang terfragmentasi menuju upaya konvergensi global. Sebelumnya, perusahaan menghadapi berbagai standar yang berdiri sendiri seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), dan kerangka pelaporan terintegrasi dari *International Integrated Reporting Council* (IIRC). Keberagaman ini meningkatkan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan masalah komparabilitas, duplikasi pelaporan, serta kebingungan bagi

investor dan regulator. Pembentukan *International Sustainability Standards Board* (ISSB) oleh IFRS Foundation pada tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam proses konsolidasi global. ISSB mengintegrasikan elemen-elemen SASB, TCFD, dan CDSB untuk menciptakan baseline global pelaporan keberlanjutan yang berorientasi pada investor. Konvergensi ini menandai pergeseran dari pendekatan multi-framework menuju sistem standar yang lebih terpusat, dengan tujuan meningkatkan konsistensi, kredibilitas, dan keterbandingan laporan lintas yurisdiksi.

Namun demikian, konvergensi tidak berarti uniformitas total. Setiap yurisdiksi tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan standar global dengan konteks nasionalnya. Di sinilah muncul dinamika antara *global baseline* dan *regulatory layering*, yakni penambahan persyaratan lokal di atas standar internasional. Salah satu tantangan utama harmonisasi regulasi adalah perbedaan paradigma dasar pelaporan keberlanjutan. ISSB mengadopsi pendekatan materialitas finansial (*financial materiality*), yakni informasi yang relevan terhadap keputusan investor dan berdampak pada nilai perusahaan. Pendekatan ini sejalan dengan logika pasar modal dan integrasi risiko keberlanjutan ke dalam analisis keuangan. Sebaliknya, standar yang diterapkan di kawasan Uni Eropa melalui *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) dan diatur dalam *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) menggunakan konsep *double materiality*. Artinya, perusahaan wajib mengungkapkan tidak hanya bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi kinerja finansial, tetapi juga bagaimana aktivitas perusahaan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat (Quddus, 2025).

Perbedaan paradigma ini mencerminkan orientasi kebijakan yang berbeda: model Anglo-Saxon yang berfokus pada investor versus model kontinental Eropa yang lebih *stakeholder-centric*. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, pilihan pendekatan ini memiliki implikasi strategis. Adopsi standar berbasis investor dapat meningkatkan daya saing pasar modal, namun pendekatan *double materiality* lebih selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Negara berkembang menghadapi tantangan struktural dalam mengharmonisasikan regulasi keberlanjutan global dengan kapasitas domestik. *Pertama*, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur data menjadi hambatan dalam penerapan standar yang kompleks. Pelaporan berbasis pengukuran emisi karbon, misalnya, memerlukan sistem pencatatan dan verifikasi yang belum sepenuhnya tersedia di banyak perusahaan. *Kedua*, terdapat risiko *regulatory overload*. Perusahaan di negara berkembang sering kali harus

memenuhi persyaratan regulator domestik sekaligus tuntutan pasar internasional, terutama jika mereka memiliki akses pembiayaan global.

Tanpa koordinasi kebijakan yang baik, harmonisasi justru dapat meningkatkan beban kepatuhan dan biaya pelaporan. Ketiga, isu kedaulatan regulasi juga menjadi pertimbangan. Adopsi penuh standar global dapat dipersepsikan sebagai ketergantungan normatif pada lembaga internasional. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah selective convergence, yakni mengadopsi baseline global sambil tetap mempertahankan ruang kebijakan nasional. Indonesia telah menunjukkan langkah progresif dalam membangun regulasi keberlanjutan melalui kebijakan pelaporan keberlanjutan dan taksonomi hijau. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kerangka nasional selaras dengan baseline global tanpa kehilangan konteks domestik, terutama dalam sektor berbasis sumber daya alam. Strategi yang dapat ditempuh meliputi:

- Penyelarasan standar nasional dengan ISSB sebagai baseline internasional.
- Integrasi prinsip double materiality untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
- Penguatan kapasitas assurance dan audit keberlanjutan.
- Kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem pelaporan yang kredibel.

Konvergensi standar bukan sekadar proses teknis, melainkan juga proses politik dan institusional. Ia mencerminkan negosiasi antara kepentingan pasar global, prioritas pembangunan nasional, dan tuntutan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, akuntansi keberlanjutan menjadi arena strategis di mana tata kelola global dan nasional saling berinteraksi.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (Eds.). (2014). *Sustainability accounting and accountability*. Routledge.
- Lamberton, G. (2005). Sustainability accounting – A brief history and conceptual framework. In *Accounting Forum* (Vol. 29, No. 1, pp. 7–26). Taylor & Francis.
- Quddus, M. S. Q. (2025). Analisis konvergensi hukum ekonomi internasional: Tantangan hukum bagi Indonesia dalam mengharmonisasikan kepentingan BRICS dan ASEAN. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(1), 62–88.
- Sodiq, A., Utami, J. M. P., & Erhan, W. S. (2025). Peran pemerintah dan kebijakan publik dalam menghadapi eksternalitas perekonomian. *AKPEM: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan*, 7(2), 23–38.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Werastuti, D. N. S. (2026). *Akuntansi keberlanjutan; akuntansi hijau; governance: Strategi keberlanjutan bisnis*. AMU Press, 1–258.
- Widiasih, S., Julina, F., & Sekarsari, D. (2024). Tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 46–51.

■ TENTANG PENULIS

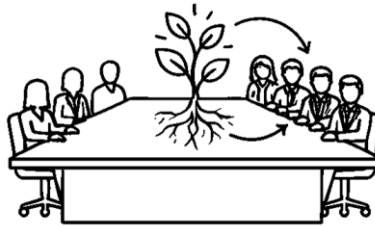


Maryam Monika Rangkuti, S.E., M.Si
Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Lahir di Medan, 6 Maret 1992. Menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Sumatera Utara program studi Akuntansi dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Sumatera Utara program studi Ilmu

Akuntansi. Sepanjang karirnya, penulis pernah bekerja di bagian keuangan. Di tahun 2022 penulis memutuskan untuk fokus menjadi Dosen. Penerima hibah Penelitian BIMA diperoleh dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Spesialisasi penulis adalah Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Tata Kelola dan Akuntansi Keberlanjutan.

Bab 13



PERAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

I Gusti Ayu Ngurah Pradnyadevi Utami, S.E., M.A.
Sekolah Tinggi Bisnis Runata

A. PENDAHULUAN: INTEGRASI KEBERLANJUTAN DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan lingkungan bisnis global menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi isu strategis dalam praktik tata kelola perusahaan modern. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari kemampuannya mengelola dampak sosial dan lingkungan. Peningkatan perhatian terhadap perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, serta tanggung jawab sosial perusahaan mendorong organisasi bisnis untuk mengintegrasikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam pengambilan keputusan strategis. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengungkapan ESG berkaitan dengan pengelolaan risiko, peningkatan reputasi perusahaan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi organisasi (Gillan et al., 2021; Tsang et al., 2023). Perubahan tersebut juga memengaruhi perkembangan konsep *corporate governance*, yang tidak lagi hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*) berperan sebagai sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Integrasi informasi keberlanjutan dalam sistem pelaporan perusahaan

membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Chen et al., 2023; Jankalová & Jankal, 2024).

B. KONSEP DAN LANDASAN TEORETIS HUBUNGAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DAN CORPORATE GOVERNANCE

Perkembangan praktik bisnis modern menunjukkan bahwa integrasi isu keberlanjutan dalam pengelolaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari sistem *corporate governance*. Dalam beberapa dekade terakhir, tata kelola perusahaan mengalami transformasi seiring meningkatnya perhatian terhadap isu *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Informasi keberlanjutan semakin dipandang sebagai bagian penting dari sistem informasi korporasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan strategis organisasi (Gillan et al., 2021; Tsang et al., 2023). Dalam konteks ini, akuntansi keberlanjutan berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas bisnis secara sistematis. Hubungan antara akuntansi keberlanjutan dan tata kelola perusahaan dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif teoretis yang banyak digunakan dalam literatur akuntansi dan manajemen. Teori-teori tersebut membantu menjelaskan bagaimana perusahaan merespons tuntutan pemangku kepentingan, mengelola konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, serta mempertahankan legitimasi sosial di tengah dinamika lingkungan bisnis. Beberapa kerangka teori yang sering digunakan dalam kajian ini meliputi *agency theory*, *stakeholder theory*, *legitimacy theory*, dan *institutional theory* (Del Gesso & Lodhi, 2025; Kalbouneh et al., 2023).

1. Konsep Corporate Governance dalam Perspektif Keberlanjutan

Corporate governance secara tradisional dipahami sebagai sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan direksi atau komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan perusahaan dikelola secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, perkembangan lingkungan bisnis global menunjukkan bahwa konsep tata kelola perusahaan terus berkembang dengan memasukkan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi (Mahmood et al., 2025). Pendekatan

tradisional yang berorientasi pada pemegang saham (*shareholder-oriented governance*) dinilai memiliki keterbatasan karena kurang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, muncul pendekatan *stakeholder-oriented governance* yang menekankan bahwa perusahaan harus menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam tata kelola organisasi cenderung memiliki transparansi yang lebih tinggi serta kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko jangka panjang (Khanchel & Lassoued, 2022). Integrasi keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme utama:

- Integrasi keberlanjutan dalam struktur pengawasan perusahaan, di mana dewan direksi dan komisaris memastikan bahwa strategi perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.
- Peningkatan transparansi melalui pelaporan keberlanjutan, yang memungkinkan perusahaan menyampaikan informasi ESG kepada pemangku kepentingan.
- Integrasi risiko keberlanjutan dalam sistem manajemen perusahaan, sehingga isu lingkungan dan sosial menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko organisasi.

2. Agency Theory dan Asimetri Informasi dalam Isu Keberlanjutan

Agency theory menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat muncul karena adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengelola perusahaan. Dalam kondisi tersebut, manajemen sering memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham sehingga menimbulkan asimetri informasi (Kalbouneh et al., 2023). Dalam konteks keberlanjutan, masalah ini dapat muncul ketika perusahaan tidak secara transparan mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan menjadi mekanisme penting untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor (Khanchel & Lassoued, 2022). Akuntansi keberlanjutan dapat membantu mengurangi masalah agensi melalui beberapa cara:

- Meningkatkan transparansi informasi non-keuangan, khususnya terkait dampak sosial dan lingkungan perusahaan.

- Menyediakan dasar evaluasi bagi investor, sehingga pemegang saham dapat menilai keberlanjutan strategi perusahaan.
- Mendorong akuntabilitas manajerial, karena pengungkapan informasi keberlanjutan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan.

3. Stakeholder Theory dan Akuntabilitas Korporasi

Stakeholder theory menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, serta lingkungan. Dalam perspektif ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan (Jankalová & Jankal, 2024). Dalam konteks keberlanjutan, teori ini memberikan dasar konseptual bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Pelaporan keberlanjutan menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan (Kalbouneh et al., 2023).

4. Legitimacy Theory dan Pelaporan Keberlanjutan

Legitimacy theory menjelaskan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosial dengan memastikan bahwa aktivitas operasionalnya selaras dengan nilai dan norma masyarakat. Apabila perusahaan dianggap tidak memenuhi ekspektasi sosial, legitimasi organisasi dapat menurun dan berdampak pada reputasi serta keberlangsungan bisnis (Ruiz-Blanco et al., 2022). Dalam konteks ini, pelaporan keberlanjutan menjadi salah satu sarana komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (Khanchel & Lassoued, 2022).

5. Institutional Theory dan Tekanan Regulasi

Institutional theory menjelaskan bahwa perilaku organisasi dipengaruhi oleh tekanan institusional dari lingkungan eksternal, seperti regulasi pemerintah, norma industri, serta ekspektasi masyarakat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab (Kalbouneh et al., 2023). Tekanan institusional yang mendorong praktik akuntansi keberlanjutan umumnya meliputi:

- Tekanan regulatif, yaitu kewajiban yang berasal dari regulasi pemerintah atau regulator terkait pelaporan keberlanjutan.
- Tekanan normatif, yaitu standar profesional dan praktik terbaik yang berkembang dalam industri.
- Tekanan mimetik, yaitu kecenderungan perusahaan meniru praktik organisasi lain yang dianggap berhasil atau memiliki legitimasi tinggi.

C. PERKEMBANGAN REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Perkembangan praktik bisnis global menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) telah menjadi bagian penting dari sistem pelaporan korporasi modern. Perusahaan tidak lagi hanya menyampaikan informasi keuangan, tetapi juga mengungkapkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan, tuntutan transparansi dari investor, serta berkembangnya berbagai standar pelaporan internasional yang mendorong perusahaan menyampaikan informasi non-keuangan secara lebih komprehensif (Jankalová & Jankal, 2024; Tsang et al., 2023). Dalam konteks tata kelola perusahaan, standar pelaporan keberlanjutan membantu meningkatkan transparansi, konsistensi, dan komparabilitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan (Chen et al., 2023; Khanchel & Lassoued, 2022).

1. Evolusi Pelaporan Keberlanjutan di Tingkat Global

Pada awalnya, pelaporan keberlanjutan disusun secara sukarela sebagai bagian dari praktik *corporate social responsibility* (CSR). Namun, meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan sosial mendorong pelaporan keberlanjutan berkembang menjadi bagian integral dari sistem pelaporan korporasi modern. Tekanan dari investor institusional, lembaga pemeringkat ESG, serta organisasi internasional turut mempercepat perkembangan praktik ini. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung memperoleh kepercayaan investor yang lebih besar serta akses pembiayaan yang lebih baik di pasar modal (Tsang et al., 2023). Beberapa faktor utama yang mendorong perkembangan pelaporan keberlanjutan secara global meliputi:

- Meningkatnya kesadaran terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan;

- Tuntutan transparansi dari investor dan pemangku kepentingan;
- Berkembangnya standar pelaporan internasional yang mendorong konsistensi pengungkapan ESG.

2. Standar dan Kerangka Pelaporan Keberlanjutan Internasional

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, berbagai organisasi internasional mengembangkan standar pelaporan yang dapat digunakan oleh perusahaan secara global. Beberapa standar yang banyak digunakan antara lain:

- ***Global Reporting Initiative (GRI)***. GRI merupakan salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling luas digunakan di dunia. Kerangka ini memberikan pedoman bagi perusahaan dalam mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sistematis (Jankalová & Jankal, 2024).
- ***IFRS Sustainability Disclosure Standards***. Standar ini dikembangkan untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang relevan bagi investor, khususnya terkait risiko dan peluang yang berkaitan dengan isu keberlanjutan (International Financial Reporting Standards Foundation, 2022).
- ***International Sustainability Standards Board (ISSB)***. ISSB dibentuk oleh IFRS Foundation untuk mengembangkan standar global pelaporan keberlanjutan yang lebih terintegrasi dan dapat dibandingkan secara internasional (International Financial Reporting Standards Foundation, 2022).

3. Integrasi Pelaporan Keberlanjutan dalam Laporan Korporasi

Seiring meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan, perusahaan mulai mengintegrasikan informasi ESG ke dalam laporan korporasi. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah *integrated reporting*, yaitu sistem pelaporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menjelaskan hubungan antara strategi bisnis, tata kelola, serta pengelolaan risiko keberlanjutan terhadap penciptaan nilai jangka panjang (Eccles & Klimenko, 2019). Dalam praktiknya, integrasi informasi keberlanjutan dalam laporan perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- Penggabungan informasi ESG dalam laporan tahunan perusahaan.

- Penyusunan laporan keberlanjutan secara terpisah (*standalone sustainability report*).
- Penerapan *integrated reporting* yang menggabungkan laporan keuangan dan keberlanjutan.

4. Regulasi Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan pelaporan keberlanjutan dipengaruhi oleh kebijakan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu regulasi utama adalah POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Selain itu, transparansi keberlanjutan juga didukung oleh POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten yang mengatur pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. OJK juga menerbitkan POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond*, yang mengatur penerbitan instrumen pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan. Regulasi-regulasi tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik tata kelola perusahaan.

5. Mandatory dan Voluntary Disclosure dalam Pelaporan Keberlanjutan

Dalam praktik pelaporan keberlanjutan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* merupakan pengungkapan informasi keberlanjutan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi reputasi dan tanggung jawab sosial organisasi (Ruiz-Blanco et al., 2022). Sebaliknya, *mandatory disclosure* merupakan pengungkapan yang diwajibkan oleh regulasi atau standar tertentu untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi informasi keberlanjutan (Chen et al., 2023). Perbedaan antara *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure* dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

- **Dasar kewajiban pelaporan**
Voluntary disclosure didasarkan pada inisiatif perusahaan, sedangkan *mandatory disclosure* diwajibkan oleh regulasi atau standar tertentu.
- **Tingkat fleksibilitas pengungkapan**
Voluntary disclosure memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan dalam menentukan jenis informasi yang

diungkapkan, sedangkan *mandatory disclosure* mengharuskan perusahaan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.

- **Tingkat komparabilitas informasi**

Mandatory disclosure cenderung menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dibandingkan antar perusahaan dibandingkan *voluntary disclosure*.

D. MEKANISME TATA KELOLA DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Integrasi akuntansi keberlanjutan dalam praktik bisnis modern tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keberlanjutan, tetapi juga dengan bagaimana informasi keberlanjutan diintegrasikan dalam struktur tata kelola perusahaan. Mekanisme *corporate governance* berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen formal, tetapi diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Literatur menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola yang efektif, seperti pengawasan dewan, sistem pengendalian internal, dan manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan serta memperkuat akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan (Gillan et al., 2021). Dalam konteks ini, akuntansi keberlanjutan berfungsi sebagai sistem informasi yang menyediakan data mengenai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan bagi manajemen dan dewan. Informasi tersebut membantu organisasi mengevaluasi kinerja keberlanjutan, mengidentifikasi risiko ESG, serta merumuskan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan (Tsang et al., 2023).

1. Peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan direksi dan dewan komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam kebijakan dan strategi perusahaan. Tanggung jawab dewan tidak hanya terbatas pada pengawasan kinerja keuangan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Jankalová & Jankal, 2024). Efektivitas peran tersebut dipengaruhi oleh kompetensi dan komposisi dewan. Dewan yang memiliki pemahaman mengenai isu keberlanjutan serta keberagaman latar belakang profesional cenderung lebih mampu mengintegrasikan aspek ESG dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa keberagaman dewan berkorelasi positif dengan kualitas pengungkapan ESG (Chen et al., 2023; Kalbouneh et al., 2023).

Pengawasan strategi keberlanjutan oleh dewan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme berikut:

- Penetapan kebijakan keberlanjutan, yaitu memastikan prinsip keberlanjutan menjadi bagian dari visi dan strategi perusahaan.
- Pengawasan implementasi strategi keberlanjutan, melalui evaluasi kinerja manajemen dan pencapaian target keberlanjutan.
- Evaluasi laporan keberlanjutan, untuk memastikan informasi yang disampaikan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Komite Audit dan Sistem Pengendalian Internal

Komite audit berperan penting dalam memastikan kualitas dan integritas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, komite audit mengawasi proses penyusunan laporan serta memastikan bahwa informasi ESG yang disampaikan akurat dan dapat diverifikasi (De Almeida & De Sousa Paiva, 2022). Sistem pengendalian internal juga mendukung implementasi kebijakan keberlanjutan dengan membantu perusahaan mengidentifikasi dan memantau risiko yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Integrasi ESG dalam sistem pengendalian internal memungkinkan perusahaan menerapkan kebijakan keberlanjutan secara konsisten di seluruh organisasi (Gillan et al., 2021). Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah:

- Pengembangan kebijakan internal terkait pengelolaan isu lingkungan dan sosial.
- Pengawasan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan melalui monitoring dan audit internal.
- Evaluasi berkala terhadap kebijakan keberlanjutan untuk menilai efektivitas implementasi strategi perusahaan.

3. Manajemen Risiko Keberlanjutan

Manajemen risiko merupakan komponen penting dalam tata kelola perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan organisasi. Dalam konteks keberlanjutan, risiko tersebut dapat berupa perubahan iklim, kerusakan lingkungan, maupun konflik sosial dengan masyarakat (Jankalová & Jankal, 2024). Integrasi aspek keberlanjutan dalam kerangka *enterprise risk management* (ERM) memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan

mengelola risiko ESG secara sistematis. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan risiko keberlanjutan dalam ERM memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis (Chen et al., 2023). Tahapan utama dalam manajemen risiko keberlanjutan meliputi:

- Identifikasi risiko lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
- Evaluasi dampak risiko terhadap organisasi, termasuk dampaknya terhadap reputasi dan kinerja keuangan.
- Pengembangan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi potensi dampak terhadap perusahaan.

4. Sistem Pengukuran Kinerja Keberlanjutan

Pengukuran kinerja keberlanjutan merupakan elemen penting dalam implementasi akuntansi keberlanjutan. Tanpa indikator yang jelas, perusahaan akan kesulitan mengevaluasi efektivitas kebijakan keberlanjutan yang diterapkan (Jankalová & Jankal, 2024). Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *balanced scorecard*, yang memungkinkan integrasi indikator keuangan dan non-keuangan dalam sistem evaluasi kinerja organisasi. Integrasi indikator ESG dalam *balanced scorecard* membantu perusahaan menghubungkan strategi keberlanjutan dengan tujuan bisnis jangka panjang (Tsang et al., 2023). Indikator kinerja keberlanjutan umumnya meliputi:

- Indikator lingkungan, seperti emisi karbon dan efisiensi energi.
- Indikator sosial, seperti kesejahteraan karyawan dan kontribusi terhadap masyarakat.
- Indikator tata kelola, seperti transparansi pelaporan dan kepatuhan regulasi.

5. Peran Fungsi Akuntansi dan Manajemen

Fungsi akuntansi dan manajemen memiliki peran penting dalam implementasi akuntansi keberlanjutan karena bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyajian informasi ESG perusahaan. Selain menyusun laporan keuangan, fungsi akuntansi juga berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data keberlanjutan yang digunakan dalam laporan perusahaan (Jankalová & Jankal, 2024). Manajemen perusahaan bertanggung jawab mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam strategi bisnis serta memastikan seluruh unit organisasi mendukung implementasi kebijakan tersebut. Integrasi data ESG dalam sistem

informasi akuntansi memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan melaporkan informasi keberlanjutan secara lebih efektif sehingga dapat digunakan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis (Chen et al., 2023).

E. DAMPAK AKUNTANSI KEBERLANJUTAN TERHADAP KUALITAS TATA KELOLA DAN NILAI PERUSAHAAN

Penerapan akuntansi keberlanjutan tidak hanya meningkatkan transparansi informasi perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kualitas tata kelola dan kinerja ekonomi perusahaan. Dalam literatur akuntansi dan keuangan, pengungkapan informasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin dipandang sebagai faktor yang memengaruhi persepsi investor, biaya pendanaan, serta nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi bagi organisasi (Tsang et al., 2023). Akuntansi keberlanjutan menyediakan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang membantu investor menilai risiko dan peluang jangka panjang perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung memiliki transparansi yang lebih baik dan tingkat ketidakpastian informasi yang lebih rendah di pasar modal (Chen et al., 2023). Oleh karena itu, integrasi informasi keberlanjutan dalam sistem pelaporan perusahaan dapat memperkuat kualitas tata kelola serta meningkatkan kepercayaan investor.

1. Sustainability Disclosure dan Cost of Capital

Salah satu implikasi penting dari pelaporan keberlanjutan adalah pengaruhnya terhadap biaya modal (*cost of capital*). Dalam teori keuangan, biaya modal mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atas investasi yang mereka lakukan. Ketidakpastian informasi mengenai risiko perusahaan dapat meningkatkan persepsi risiko investor dan pada akhirnya meningkatkan biaya modal (Gillan et al., 2021). Pengungkapan ESG membantu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor. Dengan adanya informasi yang lebih komprehensif mengenai kebijakan lingkungan, praktik sosial, dan tata kelola perusahaan, investor dapat menilai risiko perusahaan secara lebih akurat. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung memiliki

biaya modal yang lebih rendah karena transparansi informasi meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor (Chen et al., 2023; Khanchel & Lassoued, 2022). Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme berikut:

- Mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor.
- Meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan di pasar modal.
- Meningkatkan kepercayaan investor, sehingga menurunkan premi risiko dan biaya modal.

2. Pengaruh Pelaporan Keberlanjutan terhadap Nilai Perusahaan

Pelaporan keberlanjutan juga memiliki implikasi terhadap nilai perusahaan (*firm value*). Perusahaan yang mampu mengelola isu keberlanjutan secara efektif cenderung dipandang memiliki risiko yang lebih rendah dan prospek jangka panjang yang lebih baik (Kalbouneh et al., 2023). Praktik keberlanjutan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui beberapa mekanisme, antara lain peningkatan reputasi organisasi, penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang lebih efektif. Dengan demikian, integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis dapat mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan (Chen et al., 2023). Faktor yang menjelaskan hubungan tersebut antara lain:

- Peningkatan transparansi informasi perusahaan.
- Penguatan reputasi perusahaan di pasar.
- Pengelolaan risiko jangka panjang yang lebih baik.

3. Reputasi Perusahaan dan Kepercayaan Investor

Reputasi perusahaan merupakan aset tidak berwujud yang penting bagi keberlangsungan organisasi. Pelaporan keberlanjutan dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab (Tsang et al., 2023). Perusahaan yang secara konsisten mengungkapkan informasi keberlanjutan cenderung dipandang lebih transparan dan akuntabel oleh pemangku kepentingan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta membantu perusahaan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat (Chen et al., 2023; Gillan et al., 2021).

4. Risiko Greenwashing dalam Praktik Pelaporan Keberlanjutan

Meskipun memiliki berbagai manfaat, pelaporan keberlanjutan juga menghadapi tantangan berupa fenomena *greenwashing*, yaitu ketika perusahaan menyajikan informasi keberlanjutan yang bersifat simbolik tanpa diikuti implementasi nyata dalam aktivitas operasional (Ruiz-Blanco et al., 2022). Praktik ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan merusak reputasi perusahaan apabila informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya (Kalbouneh et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa pelaporan keberlanjutan didukung oleh mekanisme tata kelola yang kuat. Beberapa langkah untuk mengurangi risiko *greenwashing* antara lain:

- Menggunakan standar pelaporan keberlanjutan yang kredibel seperti GRI atau IFRS *Sustainability Disclosure Standards*.
- Melakukan assurance independen terhadap laporan keberlanjutan.
- Mengintegrasikan strategi keberlanjutan dalam aktivitas operasional perusahaan.

F. TANTANGAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Meskipun akuntansi keberlanjutan semakin diakui sebagai komponen penting dalam tata kelola perusahaan modern, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Perusahaan tidak hanya dituntut meningkatkan transparansi informasi keberlanjutan, tetapi juga harus menghadapi keterbatasan sumber daya, kompleksitas standar pelaporan, serta perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi akuntansi keberlanjutan tidak hanya bergantung pada kerangka pelaporan yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam sistem tata kelola perusahaan (Kalbouneh et al., 2023). Literatur menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan akuntansi keberlanjutan berkaitan dengan keterbatasan standardisasi pelaporan, rendahnya kredibilitas laporan keberlanjutan, konflik kepentingan dalam manajemen perusahaan, biaya implementasi sistem pelaporan ESG, serta fenomena *decoupling* antara komitmen formal dan praktik operasional perusahaan (Jankalová & Jankal, 2024).

1. Keterbatasan Standardisasi dan Komparabilitas Laporan

Salah satu tantangan utama dalam pelaporan keberlanjutan adalah keterbatasan standardisasi. Berbeda dengan pelaporan keuangan yang memiliki standar akuntansi yang relatif seragam, pelaporan keberlanjutan masih menggunakan berbagai kerangka standar seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*. Perbedaan tersebut menyebabkan variasi dalam jenis informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sehingga menyulitkan pemangku kepentingan dalam membandingkan kinerja keberlanjutan antarperusahaan (Jankalová & Jankal, 2024). Selain itu, beberapa indikator keberlanjutan seperti dampak sosial atau kontribusi terhadap masyarakat sering sulit diukur secara kuantitatif, sehingga metode pengukuran yang digunakan perusahaan dapat berbeda. Kondisi ini menurunkan tingkat komparabilitas laporan keberlanjutan dibandingkan laporan keuangan yang memiliki standar pengukuran yang lebih jelas (Tsang et al., 2023). Keterbatasan standardisasi tersebut dapat menimbulkan beberapa implikasi, yaitu:

- Kesulitan dalam membandingkan kinerja keberlanjutan antarperusahaan.
- Potensi inkonsistensi dalam pengungkapan informasi.

2. Menurunnya keandalan informasi bagi investor. Kredibilitas dan Assurance Laporan Keberlanjutan

Tantangan lain dalam implementasi akuntansi keberlanjutan adalah kredibilitas laporan keberlanjutan. Berbeda dengan laporan keuangan yang umumnya diaudit secara independen, laporan keberlanjutan sering kali tidak melalui proses verifikasi yang sama ketatnya, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keandalan informasi yang disampaikan (Tsang et al., 2023). Untuk meningkatkan kredibilitas laporan, banyak perusahaan mulai menggunakan *sustainability assurance* yang dilakukan oleh auditor eksternal atau lembaga independen. Proses assurance bertujuan memverifikasi keakuratan data serta memastikan kesesuaian laporan dengan standar pelaporan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan assurance eksternal cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari pemangku kepentingan (Del Gesso & Lodhi, 2025). Namun demikian, praktik assurance masih menghadapi tantangan metodologis karena indikator

keberlanjutan bersifat non-keuangan dan sulit diukur secara seragam.

3. Konflik Kepentingan dalam Manajemen Perusahaan

Implementasi akuntansi keberlanjutan juga dapat menghadapi konflik kepentingan dalam manajemen perusahaan. Dalam banyak kasus, manajemen dihadapkan pada tekanan untuk mencapai kinerja keuangan jangka pendek, sehingga investasi yang berkaitan dengan keberlanjutan sering dianggap kurang prioritas (Gillan et al., 2021). Konflik ini muncul karena implementasi kebijakan keberlanjutan sering memerlukan investasi tambahan atau perubahan dalam proses operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan mekanisme tata kelola yang mampu menyelaraskan kepentingan manajemen dengan tujuan keberlanjutan, misalnya melalui integrasi indikator keberlanjutan dalam sistem evaluasi kinerja manajemen (Tsang et al., 2023).

4. Biaya Implementasi Sistem Akuntansi Keberlanjutan

Implementasi akuntansi keberlanjutan juga memerlukan investasi dalam pengembangan sistem informasi, pelatihan sumber daya manusia, serta penyusunan prosedur pelaporan baru (Chen et al., 2023). Bagi perusahaan besar, investasi tersebut dapat menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Namun bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas, biaya implementasi sistem pelaporan ESG dapat menjadi hambatan yang signifikan (Kalbouneh et al., 2023). Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam sistem pelaporan keberlanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti peningkatan kepercayaan investor serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan (Khanchel & Lassoued, 2022).

5. Fenomena *Decoupling* dalam Praktik Keberlanjutan

Salah satu tantangan konseptual dalam praktik keberlanjutan adalah fenomena *decoupling*, yaitu kondisi ketika perusahaan secara formal menyatakan komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi implementasi nyata dari komitmen tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam aktivitas operasional perusahaan (Ruiz-Blanco et al., 2022). Fenomena ini sering terjadi karena tekanan institusional yang mendorong perusahaan menunjukkan komitmen keberlanjutan, sementara perubahan

operasional yang diperlukan memerlukan biaya dan sumber daya yang besar. Akibatnya, beberapa perusahaan lebih menekankan pada pengungkapan informasi keberlanjutan tanpa melakukan perubahan substantif dalam praktik bisnisnya (Kalbouneh et al., 2023). *Decoupling* dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan risiko reputasi perusahaan. Oleh karena itu, integrasi strategi keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan mekanisme tata kelola perusahaan menjadi penting untuk memastikan bahwa komitmen keberlanjutan benar-benar tercermin dalam praktik operasional organisasi (Jankalová & Jankal, 2024).

G. SIMPULAN

Keberlanjutan telah menjadi isu strategis yang memengaruhi praktik tata kelola perusahaan modern. Dalam konteks ini, akuntansi keberlanjutan berperan sebagai sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Integrasi informasi ESG dalam pelaporan perusahaan dapat meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, serta memperkuat kualitas tata kelola dan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun demikian, implementasi akuntansi keberlanjutan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan standarisasi pelaporan dan potensi praktik *greenwashing*. Oleh karena itu, penguatan mekanisme tata kelola serta pengembangan standar pelaporan yang lebih konsisten menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik keberlanjutan benar-benar terintegrasi dalam strategi dan aktivitas operasional perusahaan.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Y., Li, T., Zeng, Q., & Zhu, B. (2023). Effect of ESG performance on the cost of equity capital: Evidence from China. *International Review of Economics & Finance*, 83, 348–364. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.09.001>
- De Almeida, M. G., & De Sousa Paiva, I. C. (2022). Audit Committees and its effect on Environmental, Social, and Governance Disclosure. *2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 1–6. <https://doi.org/10.23919/CISTI54924.2022.9820167>
- Del Gesso, C., & Lodhi, R. N. (2025). Theories underlying environmental, social and governance (ESG) disclosure: a systematic review of accounting studies. *Journal of Accounting Literature*, 47(2), 433–461. <https://doi.org/10.1108/JAL-08-2023-0143>
- Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). *The Investor Revolution*. International Financial Reporting Standards Foundation. (2022). *IFRS 3: Business Combinations*. IFRS Foundation.
- Jankalová, M., & Jankal, R. (2024). Review of sustainability accounting terms. *Administrative Sciences*, 14, 137. <https://doi.org/10.3390/admsci14070137>
- Kalbouneh, A., Aburisheh, K., Shaheen, L., & Aldabbas, Q. (2023). The intellectual structure of sustainability accounting in the corporate environment: A literature review. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2211370>
- Khanchel, I., & Lassoued, N. (2022). ESG Disclosure and the Cost of Capital: Is There a Ratcheting Effect over Time? *Sustainability*, 14(15), 9237. <https://doi.org/10.3390/su14159237>
- Mahmood, N., Yousaf, A., & Mahmood, H. (2025). Corporate Sustainability In The Context of Sustainable Development Goals: A Systematic Review of Governance, Technology, And Stakeholder-Centric Approaches. *Contemporary Journal of Social Science Review*, 3(3), 2634–2661. <https://doi.org/10.63878/cjsr.v3i3.1291>
- Ruiz-Blanco, S., Romero, S., & Fernandez-Feijoo, B. (2022). Green, blue or black, but washing—What company characteristics determine greenwashing? *Environment, Development and Sustainability*, 24(3), 4024–4045. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01602-x>

Tsang, A., Frost, T., & Cao, H. (2023). Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure: A literature review. *The British Accounting Review*, 55(1), 101149. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2022.101149>

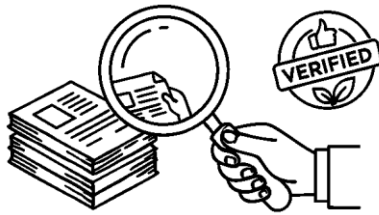
■ TENTANG PENULIS



**I Gusti Ayu Ngurah Pradnyadevi Utami,
S.E., M.A.
Sekolah Tinggi Bisnis Runata**

Penulis lahir di Denpasar, 29 Juli 1999. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Udayana dengan Program Studi S1 Akuntansi, lulus tahun 2021. Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Magister tahun 2021 di Universitas Airlangga pada Program Studi Magister Akuntansi, lulus tahun 2023. Selain aktif dalam kegiatan pengajaran, penulis juga terlibat dalam berbagai aktivitas akademik dan kelembagaan. Bidang keilmuan dan minat penelitian penulis meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, tata kelola perusahaan, audit, serta isu keberlanjutan dan UMKM. Saat ini, penulis menjalankan peran sebagai dosen sekaligus staf akademik di Sekolah Tinggi Bisnis Runata, serta aktif berkontribusi dalam pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Korespondensi melalui email pradnyadevi66@gmail.com

Bab 14



AUDIT DAN ASSURANCE LAPORAN KEBERLANJUTAN

Emayanti Christina Hutabarat, S.Ak., M.Ak.
Universitas Mulawarman

A. PENDAHULUAN

Isu tentang keberlanjutan dan perubahan iklim memang tidak pernah habis untuk dibahas. Menjadi menarik karena isu ini akhir-akhir memang sedang menjadi sebuah *concern* di kalangan masyarakat. Keuntungan bukan menjadi satu-satunya hal yang harus diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan. Tuntutan akan kelestarian dan keseimbangan baik lingkungan maupun sosial juga perlu diperhatikan. Apabila kinerja keuangan berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kinerja lingkungan dan sosial serta berkontribusi nyata mengatasi berbagai permasalahan tersebut, di masa mendatang akan menjadi perusahaan yang bertahan (Nofianto & Agustina, 2014). Ditambah lagi, sudah banyak kasus akibat kelalaian perusahaan terhadap aspek lingkungan. Informasi terkait aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan perusahaan ini perlu dilaporkan dalam laporan berkelanjutan atau sering disebut *sustainability report*.

B. KONSEP LAPORAN KEBERLANJUTAN

Dalam perkembangan praktik bisnis modern, perusahaan tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas usahanya secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola organisasi. Perubahan

orientasi ini mendorong munculnya kebutuhan akan suatu bentuk pelaporan yang mampu menggambarkan kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari aspek non-keuangan. Pada konteks inilah, laporan keberlanjutan menjadi instrumen penting untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017, laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat dan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial serta lingkungan hidup suatu perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

1. Definisi Laporan Keberlanjutan

Laporan berkelanjutan atau *sustainability report* adalah laporan berkala yang diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membagikan secara luas tindakan dan hasil tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Laporan berkelanjutan ini merupakan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Selain menyajikan laporan keuangan standar seperti laba rugi, neraca, maupun arus kas, perusahaan perlu melaporkan praktik terkait aspek sosial dan lingkungan, misalnya tingkat emisi karbon. Laporan ini dipublikasikan untuk mengkomunikasikan komitmen dan tindakan perusahaan di bidang sosial dan lingkungan. Melalui *sustainability report*, perusahaan dapat mempertimbangkan dampaknya dalam berbagai masalah keberlanjutan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih transparan tentang risiko dan peluang yang mereka hadapi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 2009) belum mengatur secara jelas terkait kewajiban menyajikan informasi terkait pelestarian lingkungan, yang menyatakan “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri sehingga faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.” Kemudian, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 menjelaskan bahwa wajib melakukan pelaporan terhadap laporan keberlanjutan wajib

(*mandatory*) bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik tertentu, sedangkan sektor usaha lain diluar itu masih bersifat sukarela (*voluntary*). Dengan adanya laporan keberlanjutan, para pemangku kepentingan dapat mengetahui cara-cara yang dilakukan perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam operasi perusahaan sehari-hari. Laporan berkelanjutan perusahaan umumnya harus mencakup adalah kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. Ketiga hal ini juga disebut sebagai triple bottom lines. Dengan demikian, laporan berkelanjutan dapat menyediakan data dan informasi yang valid yang tidak tercantum pada laporan keuangan untuk membantu *stakeholders* dan investor dalam mengambil keputusan bisnis.

2. Tujuan Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan disusun bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan administratif atau formalitas pelaporan perusahaan, melainkan sebagai instrumen strategis yang mencerminkan tanggung jawab organisasi terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas usahanya. Dalam konteks bisnis modern, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menunjukkan kinerja finansial, tetapi juga menjelaskan bagaimana kegiatan operasionalnya memengaruhi para pemangku kepentingan, lingkungan hidup, dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan pelaporan korporasi konvensional, karena berfungsi sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi perusahaan kepada publik. Secara konseptual, tujuan utama laporan keberlanjutan adalah menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Global Reporting Initiative (2021) menjelaskan bahwa tujuan *sustainability reporting* adalah memberikan transparansi tentang bagaimana organisasi berkontribusi atau berupaya berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan melaporkan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia secara konsisten dan kredibel. Dengan demikian, laporan keberlanjutan menjadi media yang memungkinkan para pemangku kepentingan menilai sejauh mana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya secara bertanggung jawab. Selain itu, tujuan laporan keberlanjutan juga erat kaitannya dengan upaya membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan. Melalui

pengungkapan informasi yang terbuka, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. *Global Reporting Initiative* (2021) juga menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan membantu organisasi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dari aspek internal, laporan keberlanjutan dapat menjadi alat evaluasi untuk menetapkan target, mengukur kinerja, mengelola perubahan, dan mengidentifikasi risiko maupun peluang strategis.

Menurut *Global Reporting Initiative* (2021) pelaporan keberlanjutan bertujuan untuk memastikan transparansi mengenai cara organisasi berkontribusi demi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Sustainability report* tidak hanya berkontribusi untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan dan sosial. Laporan keberlanjutan yang dibuat setiap tahun juga bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Tidak hanya untuk kepentingan internal, laporan keberlanjutan juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan eksternal perusahaan. Oleh sebab itu, tujuan laporan keberlanjutan pada akhirnya bukan hanya menyampaikan informasi kinerja perusahaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana perusahaan menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi dan tanggung jawab jangka panjangnya.

3. Manfaat Laporan Keberlanjutan

Bagi pihak internal, *sustainability report* merupakan hal yang penting untuk membantu perusahaan memperkirakan dampak kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Melalui data rinci yang dikumpulkan untuk laporan keberlanjutan, perusahaan juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan operasi mereka dan mengurangi biaya operasional. Dalam pengumpulan data laporan keberlanjutan, tentu dibutuhkan upaya bersama dari berbagai departemen. Melalui proses tersebut, karyawan perusahaan pun akan menyadari bahwa perusahaan mereka berfokus pada aspek *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *sustainability*. Dengan demikian, akan merasa bangga dan perasaan tersebut dapat berimbas pada peningkatan retensi karyawan, penurunan turnover, dan peningkatan branding perusahaan.

C. KONSEP AUDIT DAN ASSURANCE

Secara konseptual, audit dan *assurance* sama-sama merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, independen, dan berbasis bukti. Namun, keduanya tidak sepenuhnya sama. Audit pada umumnya dipahami sebagai penugasan untuk memeriksa informasi, terutama laporan keuangan historis, dengan tujuan memberikan opini mengenai apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai kerangka pelaporan yang berlaku. Sementara itu, *assurance* memiliki konsep yang lebih luas, yaitu penugasan profesional yang bertujuan meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap suatu informasi atau *subject matter* yang dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Audit dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk *assurance*, tetapi tidak semua *assurance* adalah audit. Dalam praktik modern, *assurance* dapat diterapkan tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada laporan keberlanjutan, informasi ESG, emisi gas rumah kaca, pengendalian internal, kepatuhan, dan berbagai informasi non-keuangan lain yang memerlukan validasi independen.

D. AUDIT DAN ASSURANCE LAPORAN KEBERLANJUTAN

Laporan keberlanjutan yang telah diaudit akan meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat (publik). Kreditur, pelanggan, dan regulator menggunakan laporan keberlanjutan yang telah diaudit untuk menilai risiko dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Selain itu, investor sebagai *user* juga memperoleh keyakinan yang memadai terhadap informasi keuangan yang disajikan pada laporan keberlanjutan. Perusahaan yang dinilai baik oleh investor atas laporan keberlanjutan yang telah diaudit mendorong pengambilan keputusan investasi. Melalui implementasi audit dan *assurance* pada laporan keberlanjutan dapat memperkuat kredibilitas, transparansi, dan menghindari terjadinya *greenwashing*.

1. Audit Laporan Keberlanjutan

Audit Keberlanjutan (*sustainability audit*) adalah proses sistematis dan independen untuk mengevaluasi keandalan, relevansi dan konsistensi dari informasi keberlanjutan yang disajikan pada *laporan Enviromental, Social and Governance* (ESG) atau laporan keberlanjutan organisasi. Audit pada laporan keberlanjutan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) bahwa data yang disajikan oleh perusahaan *reliable* benar-benar mencerminkan dampak dan

kinerja keberlanjutan yang terjadi. Dalam praktiknya, di Indonesia saat ini belum ada kewajiban bagi perusahaan untuk dilakukan audit terhadap laporan keberlanjutannya. Audit dan *assurance* pada laporan keberlanjutan perusahaan masih bersifat *voluntary* bukan *mandatory*. Pengungkapan informasi akuntansi lingkungan yang sifatnya sukarela belum mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan (Suyudi et al., 2020). Sehingga perlu adanya pengungkapan terkait hal tersebut.

2. Assurance Laporan Keberlanjutan

Assurance laporan keberlanjutan adalah proses independen dan sistematis untuk mengevaluasi apakah informasi keberlanjutan suatu entitas disusun sesuai kriteria tertentu dan bebas dari salah saji material, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan. Assurance berkaitan dengan jasa untuk memverifikasi *carbon disclosure*, melakukan *due diligence* terhadap ESG report dan berbagai jasa yang berhubungan dengan aspek *Environmental Social Governance* (ESG). Jasa *assurance* bertujuan untuk melindungi masyarakat dan publik terhadap informasi keuangan perusahaan agar mencerminkan data dan informasi yang benar Assurance bermanfaat bagi perusahaan sebagai *benchmark* yang menunjukkan apakah laporan keberlanjutan yang disajikan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks keberlanjutan, yaitu menggambarkan kondisi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan KPMG (2022) menyatakan ada tren global yang menunjukkan bahwa organisasi sektor publik dan swasta menggunakan *limited assurance* dan *reasonable assurance* untuk memvalidasi informasi ESG yang telah dilaporkan. *Limited assurance* bertujuan untuk memberikan tingkat keyakinan yang terbatas dan lebih rendah atas informasi yang diuji dibanding *reasonable assurance*. Pada *limited assurance*, prosedur yang dilakukan lebih banyak berupa *inquiry*, *analytical procedures*, *walkthrough*, pengujiannya terbatas dan kesimpulannya berbentuk negatif. Sedangkan *reasonable assurance* mempunyai makna yang sama dengan tingkat keyakinan dalam audit laporan keuangan. *Reasonable assurance* memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi, walaupun tidak absolut. Prosedur yang dilakukan lebih ekstensif, bukti yang dikumpulkan lebih mendalam, dan kesimpulannya berbentuk positif, Pemilihan jenis *assurance* bergantung pada lingkup pelaporan, tingkat risiko reputasi dan kebutuhan *stakeholder*.

Tujuan Assurance Laporan Keberlanjutan

Secara substantif, *assurance* laporan keberlanjutan mempunyai beberapa tujuan terdiri atas:

- Meningkatkan kredibilitas laporan
- Mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan.
- Menekan risiko *greenwashing*.
- Memperkuat sistem pengendalian internal atas data ESG.
- Mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelaporan
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh investor dan pihak lain.

3. Perbedaan Audit dan Assurance dalam Laporan Keberlanjutan

Ada perbedaan antara audit dan *assurance* dalam kaitannya dengan penerapan laporan keberlanjutan. Audit berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan standar audit terhadap laporan keuangan historis. Audit berfokus pada kewajaran laporan keuangan dan menghasilkan opini auditor. Sedangkan *assurance* mencakup aspek yang lebih luas. *Assurance* adalah penugasan profesional independen untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap suatu informasi selain tanggung jawab pihak penyusun. Dalam konteks keberlanjutan, *assurance* dapat diterapkan pada emisi karbon, data keselamatan kerja, kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM), *due diligence* rantai pasok, atau keseluruhan laporan keberlanjutan. Jasa *assurance* yang ditawarkan berhubungan dengan aspek *Environmental Social Governance* (ESG). Audit laporan keberlanjutan dapat dipahami sebagai bentuk *assurance* yang dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan yang sistematis dan independen. Secara terminologi profesional global, istilah yang lebih umum digunakan saat ini adalah *sustainability assurance*.

E. PROSES AUDIT DAN ASSURANCE LAPORAN KEBERLANJUTAN

Audit dan *assurance* laporan keberlanjutan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Berbeda dengan laporan keuangan yang telah lama memiliki sistem pengukuran dan pengujian yang relatif mapan, laporan keberlanjutan memuat informasi yang

lebih beragam, mencakup data kuantitatif, narasi kebijakan, target jangka panjang, serta indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kondisi ini menyebabkan proses pemeriksaan atas laporan keberlanjutan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, karena auditor atau praktisi *assurance* tidak hanya menilai ketepatan angka, melainkan juga menelaah kesesuaian metode, keandalan sumber data, kelengkapan pengungkapan, serta konsistensi antara informasi yang dilaporkan dengan kondisi aktual perusahaan. Proses audit dan *assurance* laporan keberlanjutan dilakukan secara sistematis melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Di bawah ini diuraikan proses audit dan *assurance* dalam laporan keberlanjutan secara lebih rinci. Proses Audit pada Laporan Keberlanjutan terdiri atas:

- **Penerimaan dan perencanaan penugasan**
Tahap ini dimulai dengan keputusan apakah penugasan dapat diterima dan dilanjutkan. Pada tahap ini auditor atau praktisi *assurance* menilai independensi, kompetensi tim, ruang lingkup penugasan, kecukupan kriteria yang digunakan, serta kemungkinan memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Dalam tahap ini auditor menentukan objek yang akan diuji, apakah seluruh laporan atau hanya bagian tertentu, standar atau *framework* yang menjadi dasar seperti GRI, ESRS, IFRS S1/S2, atau kriteria internal..
- **Memahami entitas dan konteks keberlanjutan**
Setelah penugasan diterima, auditor harus memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai entitas, model bisnis, tata kelola, proses operasional, serta isu keberlanjutan yang relevan. Pemahaman ini tidak hanya mencakup struktur organisasi, tetapi juga bagaimana perusahaan mengidentifikasi isu material, siapa pemilik data ESG, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana informasi tersebut akhirnya masuk ke laporan keberlanjutan. Pada tahap ini auditor biasanya mempelajari kebijakan dan strategi keberlanjutan perusahaan, struktur tata kelola (*governance*), termasuk peran direksi, dewan, dan komite, metodologi pengukuran indikator ESG, sistem informasi dan pengendalian internal atas data keberlanjutan; batas pelaporan atau *reporting boundary*, misalnya entitas anak, fasilitas produksi, atau rantai pasok tertentu.
- **Menetapkan kriteria dan materialitas**
Audit laporan keberlanjutan tidak dapat dilakukan tanpa kriteria yang jelas. Auditor harus memastikan bahwa informasi yang diperiksa dievaluasi terhadap standar atau

kriteria yang sesuai. Kriteria tersebut dapat berupa *framework* pelaporan seperti GRI atau ESRS, atau standar khusus seperti IFRS S2 untuk pengungkapan iklim. Dalam *assurance engagement*, kesesuaian kriteria menjadi syarat utama karena tanpa kriteria yang layak, auditor tidak memiliki dasar objektif untuk menilai informasi yang dilaporkan. Selain itu, auditor juga menetapkan materialitas, yaitu ambang signifikansi salah saji yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan. Dalam laporan keberlanjutan, materialitas sering lebih kompleks dibanding audit laporan keuangan karena tidak selalu hanya berbasis angka. Materialitas dapat berkaitan dengan dampak lingkungan, isu tenaga kerja, hak asasi manusia, reputasi, atau risiko strategis perusahaan.

- **Penilaian risiko salah saji material**
Setelah memahami entitas dan kriterianya, auditor melakukan identifikasi dan penilaian risiko salah saji material. Tujuannya adalah menentukan bagian mana dari laporan keberlanjutan yang paling rentan terhadap kesalahan, bias, ketidakkonsistenan, atau pengungkapan yang menyesatkan. Risiko yang umumnya ada pada laporan keberlanjutan yaitu data emisi gas rumah kaca dihitung dengan faktor emisi yang salah, cakupan fasilitas yang dilaporkan tidak konsisten antar tahun, data kecelakaan kerja tidak lengkap karena keterlambatan input dari unit operasional, indikator sosial didasarkan pada definisi yang berubah tanpa penjelasan, target keberlanjutan dilaporkan tanpa dasar metodologis yang memadai, narasi laporan terlalu positif dan tidak mencerminkan kondisi aktual.
- **Merancang prosedur audit atau *assurance***
Berdasarkan hasil penilaian risiko, auditor merancang prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang cukup dan sesuai. Pada tahap ini auditor menentukan jenis pengujian, luas sampel, lokasi pengujian, pihak yang akan diwawancarai, dan dokumen apa saja yang perlu diperiksa. Perancangan prosedur sangat dipengaruhi oleh jenis *assurance* yang diminta, area berisiko tinggi, kompleksitas data dan kesiapan sistem dokumentasi perusahaan.
- **Pelaksanaan pengujian dan pengumpulan bukti**
Tahap ini merupakan inti dari proses audit laporan keberlanjutan. Auditor mulai menguji data, proses, dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan. Bukti yang dikumpulkan harus cukup, relevan dan dapat diandalkan. Adapun prosedur yang dilakukan meliputi meminta

keterangan kepada klien, inspeksi, perhitungan ulang, prosedur analitis, pelaksanaan ulang dan pengamatan.

- Evaluasi bukti dan penarikan kesimpulan setelah bukti terkumpul yaitu auditor mengevaluasi apakah bukti tersebut cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Pada tahap ini auditor mempertimbangkan apakah seluruh temuan telah dijelaskan dan diselesaikan, apakah terdapat salah saji material yang belum diperbaiki, apakah laporan disusun sesuai kriteria yang dinyatakan, apakah penyajian laporan bersifat seimbang dan tidak menyesatkan. Bila ditemukan perbedaan, auditor akan mendiskusikannya dengan manajemen. Manajemen dapat memperbaiki laporan, menyesuaikan angka, menambah penjelasan, atau tetap mempertahankan pengungkapan awal. Jika salah saji material tidak diperbaiki, hal tersebut akan memengaruhi bentuk kesimpulan auditor.
- Penyusunan laporan audit
Tahap akhir adalah penyusunan laporan audit. Laporan ini menjelaskan objek yang diaudit, ruang lingkup penugasan, kriteria yang digunakan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, sifat *assurance*, dan kesimpulan akhir. Dalam praktik, bentuk kesimpulan tergantung pada jenis audit. Kesimpulan biasanya berbentuk negatif maupun positif. Kesimpulan negatif yaitu informasi tidak disajikan secara layak sedangkan kesimpulan positif yaitu menurut opini auditor, informasi telah disajikan secara layak dalam semua hal yang material sesuai kriteria yang digunakan.

Proses *assurance* laporan keberlanjutan mencakup beberapa proses berikut ini:

- Tahap pertama adalah penerimaan perikatan (*engagement acceptance*) dan perencanaan. Pada tahap ini praktisi *assurance* menilai independensi, kompetensi tim, kecocokan kriteria, kejelasan ruang lingkup, risiko penugasan, serta kesiapan organisasi. Dalam *sustainability assurance*, tahap ini sangat penting karena ruang lingkup dan definisi indikator sering belum sejelas laporan keuangan.
- Tahap kedua yaitu memahami entitas dan konteks keberlanjutan. Praktisi *assurance* harus memahami model bisnis, value chain, struktur tata kelola, isu material, pemilik data, sistem pengumpulan data, dan proses pelaporan. Hal ini berkaitan dengan identifikasi dampak, resiko dan peluang serta penilaian *double materiality*.
- Tahap ketiga adalah menentukan materialitas dan area prioritas pemeriksaan. Materialitas dalam konteks ini tidak

selalu identik dengan nilai uang, tetapi juga dapat berkaitan dengan signifikansi isu, sensitivitas pengguna, dan dampak terhadap keputusan. Konsep *double materiality* sangat menentukan apa yang seharusnya diungkapkan.

- Tahap keempat adalah penilaian resiko, yaitu mengidentifikasi area di mana salah saji material mungkin terjadi. Misalnya, emisi gas rumah kaca dihitung dengan faktor emisi yang tidak diperbarui, data kecelakaan kerja tidak lengkap, atau klaim keberlanjutan tidak didukung dokumentasi yang cukup.
- Tahap kelima adalah pelaksanaan prosedur *assurance*. Hal ini meliputi wawancara, inspeksi dokumen, perhitungan ulang, pelaksanaan ulang, rekonsiliasi data, pengujian sampel, sistem walkthrough, serta kunjungan ke perusahaan. Pada *limited assurance*, prosedur cenderung lebih terbatas pada *reasonable assurance*, kedalaman pengujian meningkat.
- Tahap keenam adalah evaluasi bukti dan pembentukan kesimpulan. Praktisi *assurance* menilai apakah bukti yang terkumpul cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Evaluasi juga mencakup apakah laporan disajikan secara seimbang, tidak menyesatkan, dan sesuai kriteria yang dinyatakan.
- Tahap ketujuh adalah pelaporan *assurance*. Laporan ini memuat ruang lingkup, kriteria, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab praktisi, standar yang digunakan, batasan inheren, tingkat *assurance*, dan kesimpulan. Struktur ini konsisten dengan pendekatan *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) dalam *assurance engagements*.

F. STANDAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Dalam praktik pelaporan keberlanjutan, keberadaan standar menjadi aspek yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan, pengungkapan, dan penilaian atas informasi keberlanjutan yang disajikan perusahaan. Standar-standar tersebut membantu memastikan bahwa laporan keberlanjutan disusun secara sistematis, dapat dibandingkan, relevan, andal, dan mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi ESG yang diungkapkan. Berikut ini terdapat beberapa standar yang berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, dijelaskan secara rinci berikut ini:

- **ISAE 3000 (*Revised*)**
ISAE 3000 (*Revised*) telah sejak lama menjadi standar payung untuk *assurance* atas informasi non-keuangan. ISAE 3000 (*Revised*) adalah standar umum untuk *assurance engagement* selain audit atau *review* atas informasi keuangan historis. Standar ini menjadi fundamental lama bagi *assurance* informasi non-keuangan, termasuk ESG dan *sustainability disclosures*.
- **ISSA 5000**
ISSA 5000 merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) pada November 2024 dan efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 15 Desember 2026. ISSA 5000 merupakan tonggak baru yang dirancang khusus untuk penugasan *assurance* keberlanjutan. Standar ini berlaku baik untuk penugasan wajib maupun sukarela dan dimaksudkan sebagai *baseline global* agar praktik *assurance* keberlanjutan lebih konsisten.
- **AA1000AS v3**
AA1000 *Assurance Standard* v3 (AA1000ASv3) dikembangkan oleh *AccountAbility*. Standar ini menonjol karena pendekatannya lebih berorientasi pada prinsip, keterlibatan pemangku kepentingan, dan evaluasi yang lebih luas terhadap manajemen, kinerja, dan pelaporan keberlanjutan, termasuk tantangan dan peluang masa depan.
- **Global Reporting Initiative Standards (GRI)**
Global Reporting Initiative Standards (GRI) adalah salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di dunia. GRI sendiri bukan merupakan standar *assurance*, namun sering dijadikan untuk menilai apakah laporan keberlanjutan disusun dengan benar. GRI juga menyatakan bahwa *external assurance* dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan, meskipun tidak diwajibkan untuk dapat menyatakan laporan mengacu pada GRI.
- **IFRS S1 dan IFRS S2**
IFRS S1 dan IFRS S2 merupakan dua standar yang semakin penting karena mengarahkan pelaporan keberlanjutan sesuai kebutuhan investor dan pasar modal, terutama yang berkaitan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan dan pengungkapan yang berkaitan dengan iklim. Jika entitas melapor dengan IFRS S1/S2, maka *assurance* juga akan menilai keterukuran, konsistensi, dan kelayakan pengungkapan berdasarkan kriteria tersebut.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Global Reporting Initiative. (2021). GRI 1: Foundation 2021. *Global Reporting Initiative*. Retrieved April 2, 2026, from <https://www.globalreporting.org/standards/>
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI 2: General Disclosures 2021. *Global Reporting Initiative*. Retrieved April 2, 2026, from <https://www.globalreporting.org/standards/>
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI 3: Material Topics 2021. *Global Reporting Initiative*. Retrieved April 2, 2026, from <https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009): Penyajian laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2013). *International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information*. IAASB. <https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-audits-or>
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2021). *Non-authoritative guidance on applying ISAE 3000 (Revised) to sustainability and other extended external reporting assurance engagements*. IAASB. <https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000-revised-sustainability-and-other-extended-external>
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2024). *International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000: General requirements for sustainability assurance engagements*. IAASB. Retrieved April 2, 2026, from <https://www.iaasb.org/focus-areas/understanding-international-standard-sustainability-assurance-5000>
- International Financial Reporting Standards Foundation. (2023). *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>

- International Financial Reporting Standards Foundation. (2023). *IFRS S2 Climate-related Disclosures*. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>
- KPMG. (2022). *Survey of sustainability reporting 2022*. KPMG. <https://kpmg.com/xx/en/our-insights/esg/survey-of-sustainability-reporting-2022.html>
- Nofianto, E., & Agustina, L. (2014). Analisis pengaruh sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 343–351
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. OJK. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan%2C-Emiten%2C-dan-Perusahaan-Publik.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017*. OJK. <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/peraturanojk/Documents/SAL%20Lampiran%20II%20POJK%2051%20%20keuangan%20berkelanjutan.pdf>
- Suyudi, M., Permana, D., & Suganda, D. (2020). Penerapan akuntansi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 188–216.

■ TENTANG PENULIS



**Emayanti Christina Hutabarat, S.Ak., M.Ak.
Universitas Mulawarman**

Penulis lahir di Padang Sidempuan, 02 Mei 1993. Penulis menempuh Pendidikan Diploma 3 di Universitas Indonesia pada Program Studi Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan, lulus tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan studi Sarjana di Universitas Trisakti dengan Program Studi S1 Akuntansi, lulus tahun 2017 dan melanjutkan Studi Magister tahun 2021 di Universitas Sebelas Maret pada Program Studi Magister Akuntansi, lulus tahun 2023. Penulis merupakan Dosen aktif di Universitas Mulawarman. Buku ini merupakan buku ke lima yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Bab 15



AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA UMKM DAN SEKTOR PUBLIK

*Ahmad Rijal Amiruddin, S.E., M.Ak.
Universitas Islam As'adiyah Sengkang*

A. KONSEP DASAR AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA UMKM DAN SEKTOR PUBLIK

Akuntansi keberlanjutan pada UMKM dan sektor publik merupakan bagian penting dari perkembangan akuntansi modern yang tidak lagi terbatas pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UMKM dan sektor publik memiliki posisi strategis karena keduanya berperan langsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat, penyediaan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, pemerataan kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena jumlahnya besar, tersebar di berbagai wilayah, dan memiliki hubungan erat dengan masyarakat lokal. Sementara itu, sektor publik memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya negara, menyediakan pelayanan dasar, serta memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan pada dua sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana penguatan akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

1. Pengertian Akuntansi Keberlanjutan pada UMKM dan Sektor Publik

Akuntansi keberlanjutan pada UMKM dapat dipahami sebagai proses pencatatan, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan informasi yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Fokusnya tidak hanya pada laba usaha, arus kas, dan modal, tetapi juga pada penggunaan bahan baku, efisiensi energi, pengelolaan limbah, kesejahteraan tenaga kerja, hubungan dengan pelanggan, serta kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Dalam UMKM, akuntansi keberlanjutan tidak selalu harus disusun dalam bentuk laporan yang kompleks. Praktik sederhana seperti mencatat biaya listrik, air, bahan baku yang terbuang, limbah produksi, penggunaan kemasan ramah lingkungan, upah tenaga kerja, dan kontribusi sosial dapat menjadi dasar awal penerapan akuntansi keberlanjutan. Dengan cara tersebut, pelaku UMKM dapat memahami hubungan antara aktivitas usaha dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan serta masyarakat. Pada sektor publik, akuntansi keberlanjutan merupakan proses penyediaan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Informasi tersebut mencakup penggunaan anggaran, efektivitas program publik, pelayanan masyarakat, pemerataan manfaat pembangunan, pengelolaan lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan pada sektor publik berhubungan erat dengan akuntabilitas pemerintahan dan tata kelola publik (Pratama & Sisdianto, 2024).

2. Karakteristik UMKM dan Sektor Publik dalam Praktik Keberlanjutan

UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan besar. Skala usaha yang relatif kecil, keterbatasan modal, sistem administrasi sederhana, keterbatasan sumber daya manusia, dan kedekatan dengan komunitas lokal menjadi ciri utama UMKM. Kondisi ini menyebabkan penerapan akuntansi keberlanjutan pada UMKM perlu disesuaikan dengan kapasitas usaha. Pendekatan yang terlalu rumit dapat menjadi beban administratif, sedangkan pendekatan yang sederhana dan praktis lebih mudah diterapkan. Karakteristik lain dari UMKM adalah fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Pemilik usaha biasanya terlibat langsung dalam operasional sehingga perubahan praktik usaha dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya, penggunaan bahan

baku lokal, pengurangan limbah, penghematan energi, pemanfaatan kemasan ramah lingkungan, dan pengaturan jam kerja dapat diterapkan melalui keputusan langsung pemilik usaha.

Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan pada UMKM perlu diarahkan pada pencatatan sederhana yang dapat membantu pemilik usaha mengambil keputusan yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Sektor publik memiliki karakteristik berbeda karena orientasinya bukan pada laba, melainkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan sektor publik bersumber dari dana masyarakat, seperti pajak, retribusi, hibah, dan sumber pendapatan negara atau daerah lainnya. Oleh sebab itu, sektor publik dituntut untuk menyajikan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik keberlanjutan pada sektor publik juga memiliki cakupan yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan lingkungan memerlukan informasi akuntansi yang mampu menunjukkan manfaat, biaya, dampak, dan keberlanjutan program.

B. URGENSI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN BAGI UMKM

Akuntansi keberlanjutan bagi UMKM memiliki urgensi yang semakin besar seiring meningkatnya tuntutan pasar, regulasi, dan kesadaran konsumen terhadap produk yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. UMKM tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai unit usaha kecil yang terpisah dari agenda keberlanjutan. Dalam jumlah yang besar dan tersebar luas, akumulasi dampak UMKM terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat menjadi sangat signifikan. Penerapan akuntansi keberlanjutan pada UMKM juga penting untuk meningkatkan daya saing. UMKM yang mampu mencatat dan mengelola biaya sosial serta lingkungan dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Dalam rantai pasok modern, perusahaan besar semakin menuntut pemasok untuk memenuhi prinsip keberlanjutan. Oleh sebab itu, UMKM perlu mulai membangun sistem pencatatan yang mendukung praktik usaha berkelanjutan.

1. Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan kewirausahaan masyarakat. Dalam banyak wilayah, UMKM menjadi sumber utama penghidupan rumah tangga dan menjadi penggerak kegiatan ekonomi daerah. Keberadaan UMKM juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi karena peluang usaha dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Dalam perspektif keberlanjutan, peran UMKM tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi. UMKM juga dapat mendukung keberlanjutan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, pelibatan tenaga kerja lokal, pelestarian keterampilan tradisional, dan penguatan solidaritas komunitas. Usaha berbasis lokal sering kali memiliki kedekatan sosial dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Kedekatan tersebut dapat menjadi modal sosial dalam membangun praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Dari aspek lingkungan, UMKM dapat berkontribusi melalui penggunaan bahan baku lokal, pengurangan limbah, daur ulang, efisiensi energi, dan inovasi produk ramah lingkungan. Meskipun skala masing-masing usaha relatif kecil, jumlah UMKM yang besar menyebabkan dampak kolektifnya penting bagi keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan dapat membantu UMKM memahami dampak operasional dan mengambil langkah perbaikan secara bertahap (Larasati & Subagio, 2026).

2. Tantangan UMKM dalam Menerapkan Akuntansi Keberlanjutan

Penerapan akuntansi keberlanjutan pada UMKM menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah keterbatasan literasi akuntansi. Banyak pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Jika pencatatan keuangan dasar belum berjalan baik, maka pencatatan informasi sosial dan lingkungan menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang sederhana dan sesuai kebutuhan UMKM. Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya. UMKM sering kali memiliki modal terbatas, tenaga kerja terbatas, dan waktu operasional yang padat. Pencatatan tambahan mengenai dampak lingkungan atau sosial dapat dianggap sebagai beban apabila tidak dikaitkan langsung dengan manfaat usaha. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan

perlu dirancang sebagai alat bantu efisiensi dan pengambilan keputusan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Tantangan ketiga adalah belum meratanya dukungan teknologi. Digitalisasi akuntansi dapat membantu UMKM mencatat biaya, penggunaan bahan baku, energi, limbah, dan aktivitas sosial secara lebih mudah. Namun, tidak semua UMKM memiliki akses terhadap aplikasi, pelatihan, dan infrastruktur digital yang memadai. Kesenjangan digital dapat menghambat penerapan akuntansi keberlanjutan secara luas. Tantangan keempat adalah belum kuatnya insentif pasar. Sebagian UMKM belum melihat manfaat langsung dari pelaporan keberlanjutan. Konsumen dan mitra bisnis belum selalu memberikan penghargaan terhadap praktik usaha berkelanjutan. Akibatnya, motivasi untuk menerapkan pencatatan keberlanjutan masih rendah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan perusahaan besar dalam rantai pasok menjadi penting.

C. PRAKTIK AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA UMKM

Praktik akuntansi keberlanjutan pada UMKM perlu dirancang secara sederhana, terukur, dan sesuai dengan kemampuan pelaku usaha. UMKM tidak harus langsung menyusun laporan keberlanjutan yang kompleks sebagaimana perusahaan besar. Tahap awal dapat dimulai dari pencatatan biaya dan aktivitas yang memiliki hubungan langsung dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan sederhana ini penting agar akuntansi keberlanjutan tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki pengelolaan usaha. Dengan mencatat biaya energi, air, bahan baku, limbah, kemasan, upah, keselamatan kerja, dan kegiatan sosial, UMKM dapat memahami area yang membutuhkan efisiensi dan perbaikan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menekan biaya, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat reputasi usaha (Sisdianto, 2025).

1. Pencatatan Biaya Sosial dan Lingkungan pada UMKM

Pencatatan biaya sosial dan lingkungan pada UMKM merupakan langkah awal dalam membangun akuntansi keberlanjutan. Biaya lingkungan dapat meliputi biaya penggunaan listrik, air, bahan bakar, pengelolaan limbah, pembelian bahan ramah lingkungan, perbaikan alat produksi agar lebih hemat energi, serta biaya kebersihan tempat usaha. Biaya ini perlu dicatat

agar pemilik usaha dapat mengetahui hubungan antara aktivitas produksi dan dampak lingkungan. Biaya sosial dapat mencakup upah tenaga kerja, pelatihan karyawan, perlindungan keselamatan kerja, bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, dukungan terhadap kegiatan lokal, dan biaya peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Pencatatan biaya sosial membantu UMKM memahami bahwa kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan produksi dan penjualan, tetapi juga dengan kesejahteraan pihak yang terlibat dalam proses usaha. Pencatatan tersebut dapat dilakukan dalam format sederhana. UMKM dapat membuat kolom khusus untuk biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemisahan ini membantu pemilik usaha melihat proporsi biaya dan manfaat yang terkait dengan keberlanjutan. Misalnya, peningkatan biaya kemasan ramah lingkungan dapat dikaitkan dengan peningkatan citra produk dan loyalitas pelanggan. Penghematan listrik dapat dikaitkan dengan penurunan biaya operasional. Tabel berikut menunjukkan contoh sederhana pencatatan biaya keberlanjutan pada UMKM.

Tabel 15.1 Pencatatan Biaya Sosial dan Lingkungan pada UMKM

Jenis Biaya	Contoh Komponen	Tujuan Pencatatan
Biaya ekonomi	Bahan baku, tenaga kerja, transportasi, sewa	Menilai efisiensi dan laba usaha
Biaya lingkungan	Listrik, air, limbah, kemasan ramah lingkungan	Mengendalikan dampak ekologis dan biaya sumber daya
Biaya sosial	Pelatihan, keselamatan kerja, bantuan komunitas	Menilai kontribusi sosial dan hubungan dengan masyarakat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan pada UMKM dapat dimulai dari pencatatan yang mudah dipahami. Informasi yang sederhana tetapi konsisten dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.

2. Pelaporan Keberlanjutan Sederhana bagi UMKM

Pelaporan keberlanjutan sederhana bagi UMKM dapat disusun dalam bentuk ringkasan kegiatan usaha yang menjelaskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini tidak harus panjang dan kompleks, tetapi perlu menyajikan informasi yang relevan, jujur, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah

memberikan gambaran mengenai bagaimana UMKM menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Pada aspek ekonomi, laporan dapat memuat informasi mengenai omzet, biaya utama, jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan kontribusi terhadap ekonomi sekitar. Pada aspek sosial, laporan dapat menjelaskan perlakuan terhadap tenaga kerja, keselamatan kerja, keterlibatan masyarakat, serta pelayanan kepada pelanggan. Pada aspek lingkungan, laporan dapat mencakup penggunaan energi, penghematan air, pengurangan limbah, penggunaan kemasan ramah lingkungan, atau kegiatan daur ulang.

Pelaporan sederhana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Bagi pemilik usaha, laporan keberlanjutan membantu mengevaluasi perkembangan usaha. Bagi konsumen, laporan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan. Bagi lembaga keuangan, informasi keberlanjutan dapat menjadi tambahan pertimbangan dalam pembiayaan. Bagi pemerintah, laporan tersebut dapat membantu memetakan kontribusi UMKM terhadap pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama pelaporan keberlanjutan sederhana adalah relevansi dan konsistensi. UMKM tidak perlu melaporkan seluruh aspek keberlanjutan secara luas. Informasi yang dilaporkan sebaiknya sesuai dengan jenis usaha dan dampak utama yang ditimbulkan. Usaha kuliner, misalnya, dapat fokus pada bahan baku, kemasan, limbah makanan, kebersihan, dan tenaga kerja. Usaha kerajinan dapat fokus pada bahan baku, proses produksi, limbah, keterampilan lokal, dan pemberdayaan pengrajin (Irmadiani et al., 2025).

D. AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM SEKTOR PUBLIK

Akuntansi keberlanjutan dalam sektor publik memiliki kedudukan penting karena pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sektor publik tidak hanya berkewajiban melaporkan penggunaan anggaran, tetapi juga perlu menunjukkan dampak program dan kebijakan terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dalam perspektif keberlanjutan, keberhasilan sektor publik tidak cukup diukur dari realisasi anggaran. Program yang menyerap anggaran besar belum tentu memberikan manfaat yang optimal jika tidak menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, akuntansi keberlanjutan membantu sektor publik menghubungkan alokasi anggaran dengan hasil pembangunan dan dampak jangka panjang.

1. Peran Sektor Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Sektor publik memiliki peran utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan, regulasi, pelayanan publik, penganggaran, dan pengawasan. Pemerintah menentukan arah pembangunan melalui perencanaan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola sektor publik. Dalam aspek ekonomi, sektor publik berperan menciptakan iklim usaha yang sehat, menyediakan infrastruktur, mendukung UMKM, mengelola pendapatan negara atau daerah, dan mendorong pemerataan pembangunan. Dalam aspek sosial, sektor publik bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan kesetaraan akses layanan. Dalam aspek lingkungan, sektor publik berperan dalam pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah, mitigasi perubahan iklim, dan penataan ruang. Akuntansi keberlanjutan membantu sektor publik menunjukkan apakah program pembangunan telah memberikan manfaat yang seimbang. Informasi yang disajikan tidak hanya menjelaskan jumlah anggaran yang digunakan, tetapi juga hasil dan dampaknya. Misalnya, program pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari jumlah anggaran yang terserap, tetapi juga dari penurunan volume sampah, peningkatan daur ulang, partisipasi masyarakat, dan kualitas lingkungan.

2. Akuntabilitas Sosial, Lingkungan, dan Tata Kelola pada Sektor Publik

Akuntabilitas sektor publik merupakan kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Dalam konteks keberlanjutan, akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat publik secara adil dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Akuntabilitas sosial mencakup pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat, akses layanan, pemerataan manfaat, dan perlindungan kelompok rentan. Informasi mengenai kualitas layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dari akuntabilitas sosial.

Akuntansi keberlanjutan dapat membantu menyajikan informasi tersebut dalam bentuk indikator yang dapat dievaluasi. Akuntabilitas lingkungan mencakup pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem. Pemerintah perlu melaporkan bagaimana kebijakan publik berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Informasi ini penting karena kerusakan lingkungan dapat menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar. Akuntabilitas tata kelola mencakup transparansi, partisipasi, integritas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tata kelola yang baik memastikan bahwa program keberlanjutan tidak hanya direncanakan, tetapi juga dilaksanakan secara efektif dan dapat diawasi oleh masyarakat. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan sektor publik menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan public (Kaila & Nawangsari, 2025).

E. PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA KEBERLANJUTAN PADA SEKTOR PUBLIK

Pengukuran dan pelaporan kinerja keberlanjutan pada sektor publik diperlukan untuk menilai sejauh mana program pemerintah mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengukuran kinerja tidak boleh hanya berorientasi pada input dan serapan anggaran, tetapi perlu mencakup output, outcome, dan dampak. Pendekatan ini penting agar evaluasi pembangunan tidak berhenti pada aspek administratif. Pelaporan kinerja keberlanjutan juga memperkuat transparansi pemerintah. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai bagaimana anggaran digunakan dan manfaat apa yang dihasilkan. Dengan pelaporan yang baik, sektor publik dapat menunjukkan keberhasilan, menjelaskan kendala, dan merumuskan perbaikan kebijakan.

1. Indikator Kinerja Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan pada Sektor Publik

Indikator kinerja keberlanjutan sektor publik perlu mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator ekonomi dapat meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dukungan terhadap UMKM, efisiensi belanja publik, dan kualitas infrastruktur. Indikator ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mendukung kesejahteraan ekonomi.

Indikator sosial dapat mencakup akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, tingkat kemiskinan, kesetaraan gender, perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Indikator sosial penting untuk memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat secara adil.

Indikator lingkungan dapat mencakup kualitas udara, kualitas air, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, penurunan emisi, konservasi lahan, dan kesiapsiagaan bencana. Indikator ini menunjukkan bagaimana pemerintah menjaga daya dukung lingkungan dan mengurangi risiko ekologis. Tabel berikut menggambarkan contoh indikator keberlanjutan sektor publik.

Tabel 15.1 Indikator Kinerja Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan pada Sektor Publik

Dimensi	Contoh Indikator	Tujuan Pengukuran
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi lokal, dukungan UMKM, penyerapan tenaga kerja	Menilai kontribusi kebijakan terhadap kesejahteraan ekonomi
Sosial	Akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, partisipasi masyarakat	Menilai pemerataan manfaat pembangunan
Lingkungan	Pengelolaan sampah, kualitas air, ruang terbuka hijau, emisi	Menilai perlindungan lingkungan dan daya dukung ekologis
Tata kelola	Transparansi anggaran, partisipasi publik, kepatuhan regulasi	Menilai kualitas pengelolaan pemerintahan

Penggunaan indikator tersebut dapat membantu pemerintah menyusun laporan kinerja yang lebih bermakna. Informasi yang disajikan tidak hanya menunjukkan pelaksanaan program, tetapi juga menjelaskan dampak yang dihasilkan.

2. Integrasi Pelaporan Keberlanjutan dalam Laporan Kinerja Pemerintah

Integrasi pelaporan keberlanjutan dalam laporan kinerja pemerintah menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik. Laporan kinerja pemerintah perlu menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Dengan integrasi ini, laporan pemerintah

tidak hanya berisi informasi administratif, tetapi juga menunjukkan kontribusi program terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Integrasi dapat dilakukan dengan memasukkan indikator ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Setiap program pemerintah perlu memiliki tujuan, indikator, target, anggaran, output, dan outcome yang jelas. Misalnya, program pembangunan jalan tidak hanya dinilai dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga dari peningkatan akses masyarakat, pengurangan biaya transportasi, dampak terhadap lingkungan, dan manfaat ekonomi lokal.

Pelaporan keberlanjutan juga memerlukan koordinasi antarunit pemerintah. Data keberlanjutan sering tersebar di berbagai dinas atau lembaga, seperti lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sosial, dan keuangan. Jika koordinasi lemah, pelaporan menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, integrasi data dan sistem informasi menjadi kebutuhan penting. Selain itu, pelaporan keberlanjutan sektor publik perlu mudah dipahami masyarakat. Bahasa laporan yang terlalu teknis dapat membatasi partisipasi publik. Pemerintah perlu menyajikan informasi utama secara ringkas, jelas, dan terbuka agar masyarakat dapat memahami capaian dan tantangan pembangunan (Manalu et al., 2026).

F. STRATEGI PENGUATAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA UMKM DAN SEKTOR PUBLIK

Penguatan akuntansi keberlanjutan pada UMKM dan sektor publik membutuhkan strategi yang terarah. Penerapan akuntansi keberlanjutan tidak dapat berjalan hanya melalui kewajiban formal, tetapi memerlukan literasi, kapasitas sumber daya manusia, sistem pencatatan, dukungan teknologi, insentif, dan kolaborasi. Strategi ini penting agar akuntansi keberlanjutan dapat diterapkan secara realistis dan memberikan manfaat nyata. UMKM membutuhkan pendekatan yang sederhana, murah, dan mudah digunakan. Sektor publik membutuhkan sistem yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja. Keduanya memerlukan dukungan kebijakan yang mendorong pencatatan dan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

1. Peningkatan Kapasitas, Literasi, dan Digitalisasi Akuntansi Keberlanjutan

Peningkatan kapasitas merupakan langkah utama dalam memperkuat akuntansi keberlanjutan. Pelaku UMKM perlu memperoleh pelatihan mengenai pencatatan keuangan dasar, identifikasi biaya lingkungan, pengelolaan biaya sosial, dan penyusunan laporan sederhana. Pelatihan tersebut perlu menggunakan bahasa yang praktis dan contoh yang sesuai dengan jenis usaha. Literasi keberlanjutan juga penting agar UMKM memahami manfaat ekonomi dari praktik berkelanjutan. Penghematan energi, pengurangan limbah, penggunaan bahan baku efisien, dan peningkatan kualitas tenaga kerja dapat berdampak pada penurunan biaya dan peningkatan daya saing. Jika manfaat tersebut dipahami, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk melakukan pencatatan keberlanjutan. Pada sektor publik, peningkatan kapasitas diperlukan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun indikator, mengelola data, mengukur dampak, dan menyusun laporan keberlanjutan. Aparatur tidak hanya perlu memahami akuntansi anggaran, tetapi juga hubungan antara anggaran, program, hasil, dan dampak keberlanjutan. Digitalisasi dapat menjadi strategi penting. Aplikasi pencatatan sederhana dapat membantu UMKM mencatat transaksi, biaya energi, biaya bahan baku, limbah, dan aktivitas sosial. Pada sektor publik, sistem informasi terintegrasi dapat membantu menghubungkan data perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan kinerja keberlanjutan. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan keterbukaan informasi.

2. Kolaborasi Pemerintah, UMKM, dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaporan Keberlanjutan

Kolaborasi menjadi kunci dalam memperkuat akuntansi keberlanjutan. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pembina. Pemerintah dapat menyediakan pedoman pencatatan keberlanjutan sederhana bagi UMKM, memberikan pelatihan, menyediakan aplikasi, serta menciptakan insentif bagi usaha yang menerapkan praktik berkelanjutan. UMKM berperan sebagai pelaksana praktik keberlanjutan di tingkat usaha. Pelaku UMKM perlu membangun kebiasaan mencatat aktivitas usaha secara lebih lengkap. Pencatatan tidak hanya difokuskan pada penjualan dan biaya produksi, tetapi juga penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, kesejahteraan tenaga kerja, dan kontribusi sosial. Lembaga keuangan dapat mendukung melalui pembiayaan berkelanjutan. Informasi keberlanjutan sederhana

dapat menjadi salah satu dasar penilaian dalam pemberian kredit atau pembiayaan. UMKM yang memiliki catatan penggunaan sumber daya, efisiensi biaya, dan praktik sosial yang baik dapat memperoleh nilai tambah dalam akses pembiayaan (Luckyanayu & Valdiansyah, 2026).

Perguruan tinggi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan besar juga dapat berkontribusi. Perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan dan pengembangan model pelaporan sederhana. Asosiasi usaha dapat menyebarkan praktik baik. Perusahaan besar dapat membantu UMKM dalam rantai pasok agar memenuhi standar keberlanjutan. Lembaga masyarakat dapat mendorong transparansi dan partisipasi publik. Dalam sektor publik, kolaborasi diperlukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, masyarakat, dan dunia usaha. Pelaporan keberlanjutan pemerintah akan lebih bermakna jika didukung oleh partisipasi publik dan keterbukaan data. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai dampak program, sedangkan lembaga pengawasan dapat memastikan bahwa pelaporan disusun secara akuntabel. Dengan strategi tersebut, akuntansi keberlanjutan pada UMKM dan sektor publik dapat berkembang sebagai sistem informasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing, sedangkan sektor publik dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Irmadiani, N. D., Budiyanto, H., Cahyani, A. T., Prakoso, M. A., & Riyono, S. (2025). Peningkatan literasi keuangan dan pencatatan akuntansi sederhana bagi UMKM di desa pesisir untuk mendorong keberlanjutan usaha: Studi di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5531–5539.
- Kaila, N., & Nawangsari, A. (2025). Transparansi dan akuntabilitas sektor publik: Pilar utama dalam *good governance*. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 8(2).
- Larasati, L., & Subagio, A. (2026). Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. *Journal of Community Development and Empowerment*, 2(1), 16–20.
- Luckyanayu, I. H., & Valdiansyah, R. H. (2026). Transformasi UMKM berkelanjutan: Integrasi akuntansi hijau, kompetensi digital, dan kebijakan publik. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 23(1), 1–13.
- Manalu, R. Y., Sinaga, R. L. B., Lubis, P. D. K., & Matondang, K. A. (2026). Integrasi tata kelola keuangan sektor publik: Analisis strategis perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23511–23516.
- Pratama, W., & Sisdianto, E. (2024). Analisis penerapan standar akuntansi lingkungan dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(12), 464–476.
- Sisdianto, E. (2025). Implementasi akuntansi lingkungan di UMKM: Studi kasus pada industri kerajinan kayu di Jepara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 272–283.

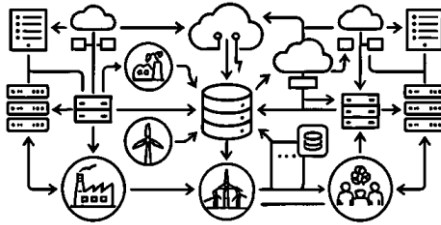
■ TENTANG PENULIS



Ahmad Rijal Amiruddin, S.E., M.Ak.
Universitas Islam As'adiyah Sengkang

Penulis merupakan berdarah Bugis. Lahir dari Buah hati dari pasangan Drs. H. Amiruddin Yaqub, S.Pd. I., M.Pd dan Dra. Hj. Habibah, S.Ag., S.Pd.I (Almh). Penulis lahir di Sengkang, 07 Januanri 1995. Sejak kecil sudah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren As'adiyah. Dimulai taman kanak-kanak RA (Raudhatul Athfal) No. 2. Kemudian Pendidikan dasar diselesaikan di MIA No. 3 As'adiyah Sengkang tahun 2007. Setelah itu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada MTs As'adiyah Putera 1 Sengkang tahun lulus 2010. Setelah selesai Madrasah Tsanawiyah, kemudian melanjutkan jenjang berikutnya di Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 3 Unggulan (sekarang SMA 7 Wajo) tahun lulus 2013. Setelah selesai pada jenjang SMA penulis mencoba hijrah dari kota Sengkang menuju Kota Pelajar yaitu Yogyakarta. Penulis menempuh kuliah S1 dan S2 di Yogyakarta dari tahun 2013-2020. Dimana Sarjana Strata 1 diselesaikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi tahun selesai 2017, lalu Sarjana Strata 2 diselesaikan di Universitas Islam Indonesia Jurusan Magister Akuntansi tahun selesai 2020. Penulis juga pernah melakukan Praktek kerja di Perusahaan Semen Indonesia tepatnya pada Semen Tonasa di Pangkep Tahun 2015. Beberapa kali penulis terlibat dalam forum ilmiah baik sebagai peserta maupun penulis seperti seminar, konferensi, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Saat ini penulis sebagai dosen di Universitas Islam As'adiyah Sengkang pada Program Sarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis dapat dihubungi; 085241555989, facebook Ahmad Rijal Amiruddin.

Bab 16



SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK KEBERLANJUTAN

*Dr. Samuel PD Anantadjaya, BSc, M.B.A., M.M.
Institut IPMI*

A. KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK KEBERLANJUTAN

Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam perkembangan akuntansi keberlanjutan karena keberlanjutan membutuhkan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik bisnis modern, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak lagi terbatas pada data keuangan, seperti pendapatan, biaya, laba, aset, liabilitas, dan arus kas. Perusahaan juga membutuhkan informasi nonkeuangan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, tata kelola, efisiensi sumber daya, risiko iklim, kesejahteraan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan hadir sebagai sarana untuk mengintegrasikan data keuangan dan nonkeuangan dalam satu sistem yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Sistem ini membantu organisasi mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi keberlanjutan secara sistematis. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai fondasi informasi bagi pengelolaan kinerja keberlanjutan. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, kualitas informasi sangat menentukan kualitas keputusan. Perusahaan yang memiliki sistem informasi

akuntansi yang baik akan lebih mampu mengukur dampak lingkungan, menghitung biaya sosial, mengelola risiko keberlanjutan, serta menyusun laporan yang transparan. Sebaliknya, sistem informasi yang lemah dapat menyebabkan data tidak lengkap, tidak konsisten, sulit diverifikasi, dan kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi untuk Keberlanjutan

Sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan dapat dipahami sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi akuntansi yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem informasi akuntansi tradisional yang pada awalnya lebih berfokus pada transaksi keuangan. Dalam sistem informasi akuntansi konvensional, data utama yang dikelola adalah data transaksi yang memiliki nilai moneter. Contohnya transaksi pembelian, penjualan, pembayaran gaji, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan penyusutan aset. Namun, dalam sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan, ruang lingkup data diperluas. Data yang dikumpulkan dapat mencakup konsumsi energi, penggunaan air, emisi karbon, volume limbah, biaya pengelolaan lingkungan, jumlah kecelakaan kerja, pelatihan karyawan, kontribusi sosial, serta indikator tata kelola (Sukaharsono & Andayani, 2021).

Sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan tidak dapat dipandang hanya sebagai sistem teknologi. Sistem ini mencakup unsur manusia, prosedur, data, perangkat lunak, perangkat keras, pengendalian internal, dan kebijakan organisasi. Teknologi memang berperan penting dalam mempercepat proses pengolahan data, tetapi keberhasilan sistem sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan kejelasan prosedur pengumpulan data. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan merupakan sistem yang menghubungkan proses akuntansi dengan agenda keberlanjutan perusahaan. Sistem ini membantu organisasi memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pelaporan, pengendalian, evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

2. Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Mendukung Praktik Keberlanjutan

Sistem informasi akuntansi berperan sebagai infrastruktur utama dalam mendukung praktik keberlanjutan. Keberlanjutan tidak dapat dikelola hanya melalui komitmen normatif atau pernyataan kebijakan. Keberlanjutan membutuhkan data yang dapat digunakan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kinerja, dan menentukan tindakan perbaikan. Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi menjadi alat yang mengubah komitmen keberlanjutan menjadi informasi operasional yang dapat dikelola. Peran pertama sistem informasi akuntansi adalah menyediakan data bagi pengukuran kinerja keberlanjutan. Perusahaan dapat mengetahui tingkat konsumsi energi, penggunaan bahan baku, jumlah limbah, biaya lingkungan, serta dampak sosial melalui data yang dicatat secara sistematis. Tanpa data tersebut, perusahaan akan sulit menilai apakah strategi keberlanjutan telah berjalan secara efektif. Peran kedua adalah mendukung pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi memungkinkan perusahaan menetapkan prosedur, otorisasi, dokumentasi, dan verifikasi atas data keberlanjutan (Werastuti, 2026).

Hal ini penting karena data keberlanjutan sering berasal dari banyak unit kerja, seperti produksi, sumber daya manusia, keuangan, lingkungan, pengadaan, dan pemasaran. Tanpa sistem yang terintegrasi, data dapat menjadi tidak konsisten. Peran ketiga adalah mendukung pelaporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan membutuhkan informasi yang lengkap, terstruktur, dan dapat ditelusuri. Sistem informasi akuntansi membantu menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun laporan sesuai standar atau kerangka pelaporan yang digunakan perusahaan. Peran keempat adalah mendukung pengambilan keputusan strategis. Informasi keberlanjutan dapat digunakan untuk menentukan investasi pada teknologi bersih, efisiensi energi, pengelolaan limbah, perbaikan keselamatan kerja, serta pengembangan produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi menjadi bagian penting dari manajemen strategis berbasis keberlanjutan.

B. KOMPONEN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KEBERLANJUTAN

Sistem informasi akuntansi berbasis keberlanjutan dibangun dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Komponen

tersebut meliputi data, prosedur, teknologi, sumber daya manusia, pengendalian internal, serta mekanisme pelaporan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi seluruhnya harus bekerja secara terpadu agar sistem mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam konteks keberlanjutan, kompleksitas sistem informasi akuntansi menjadi lebih tinggi dibandingkan sistem akuntansi konvensional. Hal ini disebabkan oleh sifat data keberlanjutan yang beragam. Sebagian data bersifat moneter, seperti biaya pengelolaan limbah dan investasi teknologi ramah lingkungan. Sebagian data bersifat nonmoneter, seperti jumlah emisi, volume air, tingkat kecelakaan kerja, atau jumlah penerima manfaat program sosial. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi perlu dirancang agar mampu mengelola berbagai jenis data tersebut secara konsisten.

1. Data, Prosedur, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia dalam Sistem Informasi Akuntansi

Data merupakan komponen utama dalam sistem informasi akuntansi. Dalam akuntansi keberlanjutan, data mencakup informasi keuangan dan nonkeuangan. Data keuangan meliputi biaya operasional, biaya lingkungan, biaya sosial, investasi keberlanjutan, dan penghematan biaya akibat efisiensi. Data nonkeuangan meliputi konsumsi energi, penggunaan air, emisi, limbah, keselamatan kerja, pelatihan, kepuasan pelanggan, dan kontribusi sosial. Prosedur merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, memverifikasi, mengolah, dan melaporkan data. Prosedur yang jelas diperlukan agar data keberlanjutan dikumpulkan secara konsisten. Misalnya, prosedur pengukuran emisi harus menjelaskan sumber data, metode perhitungan, periode pelaporan, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pemeriksaan. Tanpa prosedur yang jelas, data keberlanjutan dapat berbeda antarunit dan sulit dibandingkan (Aldino & Septiano, 2021).

Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat, menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis data. Teknologi dalam sistem informasi akuntansi dapat berupa perangkat lunak akuntansi, sistem Enterprise Resource Planning, aplikasi pelaporan keberlanjutan, basis data, cloud computing, dashboard kinerja, dan alat analitik. Teknologi membantu perusahaan mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan akses informasi. Sumber daya manusia merupakan komponen yang menentukan kualitas sistem. Sistem yang baik tetap membutuhkan tenaga kerja yang memahami akuntansi, keberlanjutan, teknologi, dan pengendalian data.

Akuntan, auditor internal, manajer lingkungan, manajer sumber daya manusia, analis data, dan pimpinan organisasi perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya data keberlanjutan. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci agar sistem informasi akuntansi dapat digunakan secara efektif. Hubungan antar komponen tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 16.1 Data, Prosedur, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia dalam Sistem Informasi Akuntansi

Komponen Sistem	Fungsi Utama	Contoh dalam Akuntansi Keberlanjutan
Data	Menjadi bahan dasar informasi	Biaya energi, emisi, limbah, pelatihan, keselamatan kerja
Prosedur	Mengatur proses pengumpulan dan pelaporan	Prosedur pencatatan limbah dan verifikasi data energi
Teknologi	Mengolah dan mengintegrasikan informasi	Software akuntansi, ERP, dashboard keberlanjutan
Sumber daya manusia	Mengelola, menafsirkan, dan mengawasi sistem	Akuntan, auditor internal, analis data, manajer keberlanjutan
Pengendalian internal	Menjaga keandalan data	Otorisasi, dokumentasi, validasi, audit internal

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keberlanjutan merupakan sistem multidimensi. Seluruh komponen perlu saling mendukung agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang kredibel.

2. Integrasi Informasi Keuangan dan Nonkeuangan dalam Sistem Akuntansi Keberlanjutan

Integrasi informasi keuangan dan nonkeuangan merupakan ciri utama sistem akuntansi keberlanjutan. Informasi keuangan memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi dari suatu aktivitas, sedangkan informasi nonkeuangan memberikan gambaran mengenai dampak sosial dan lingkungan. Kedua jenis informasi tersebut perlu dihubungkan agar perusahaan dapat

memahami keberlanjutan secara menyeluruh. Sebagai contoh, data penggunaan energi tidak cukup hanya dicatat dalam satuan kilowatt-jam. Data tersebut juga perlu dikaitkan dengan biaya energi, efisiensi produksi, emisi karbon, dan target pengurangan konsumsi energi. Dengan integrasi tersebut, manajemen dapat mengetahui apakah efisiensi energi berdampak pada penurunan biaya operasional sekaligus pengurangan dampak lingkungan. Integrasi juga penting dalam pengelolaan biaya lingkungan. Biaya pengelolaan limbah, biaya pemantauan lingkungan, biaya sertifikasi, biaya perbaikan teknologi, dan biaya kepatuhan dapat dicatat dalam sistem keuangan. Namun, biaya tersebut perlu dikaitkan dengan data nonkeuangan, seperti volume limbah, tingkat pencemaran, atau jumlah material yang didaur ulang (Astuti et al., 2025).

Hubungan ini membantu perusahaan menilai efektivitas pengeluaran lingkungan. Dalam aspek sosial, informasi nonkeuangan seperti jumlah pelatihan karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan tingkat pergantian tenaga kerja perlu dikaitkan dengan biaya pelatihan, biaya kompensasi, biaya kehilangan produktivitas, dan biaya rekrutmen. Dengan demikian, perusahaan dapat memahami bahwa investasi sosial tidak hanya memiliki nilai moral, tetapi juga dapat memengaruhi kinerja ekonomi. Integrasi informasi keuangan dan nonkeuangan juga mendukung pelaporan keberlanjutan. Laporan yang hanya menampilkan narasi sosial dan lingkungan tanpa data keuangan dapat sulit digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, laporan keuangan tanpa informasi nonkeuangan tidak mampu menjelaskan risiko dan dampak keberlanjutan secara memadai. Oleh karena itu, sistem akuntansi keberlanjutan perlu menghubungkan kedua jenis informasi tersebut dalam satu alur data yang terstruktur.

C. PENGELOLAAN DATA KEBERLANJUTAN DALAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Pengelolaan data keberlanjutan merupakan inti dari sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan. Data keberlanjutan harus dikumpulkan, diverifikasi, diolah, dan disajikan secara sistematis agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan. Pengelolaan data yang lemah dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat, terlambat, atau sulit dipercaya. Karakteristik data keberlanjutan berbeda dari data keuangan tradisional. Data keberlanjutan sering berasal dari banyak unit kerja, menggunakan

satuan pengukuran yang beragam, dan membutuhkan metode perhitungan khusus. Misalnya, emisi karbon dihitung berdasarkan aktivitas tertentu dan faktor emisi, sedangkan keselamatan kerja diukur melalui jumlah kecelakaan, jam kerja hilang, atau tingkat kejadian. Oleh sebab itu, pengelolaan data keberlanjutan memerlukan standar prosedur yang jelas.

1. Identifikasi dan Pengumpulan Data Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Identifikasi data merupakan tahap awal dalam pengelolaan informasi keberlanjutan. Perusahaan perlu menentukan jenis data apa yang relevan dengan kegiatan usaha, risiko utama, kebutuhan pemangku kepentingan, dan standar pelaporan yang digunakan. Tidak semua data harus dikumpulkan. Data yang diprioritaskan adalah data yang material, dapat diukur, dan memiliki hubungan dengan dampak serta strategi perusahaan. Data ekonomi dapat mencakup pendapatan, biaya operasional, nilai ekonomi yang didistribusikan, investasi, pajak, pembelian dari pemasok lokal, serta biaya keberlanjutan. Data ini membantu perusahaan memahami kontribusi ekonomi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Data ekonomi juga dapat digunakan untuk menilai bagaimana keberlanjutan memengaruhi kinerja keuangan. Data sosial mencakup informasi tentang tenaga kerja, pelanggan, masyarakat, dan rantai pasok.

Contohnya adalah jumlah karyawan, tingkat pelatihan, keselamatan kerja, keberagaman, kesejahteraan tenaga kerja, kepuasan pelanggan, pengaduan konsumen, dan kegiatan sosial. Data sosial membantu perusahaan menilai hubungan dengan pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Data lingkungan mencakup konsumsi energi, penggunaan air, emisi, limbah, bahan baku, keanekaragaman hayati, dan kepatuhan lingkungan. Data ini penting untuk memahami dampak ekologis perusahaan. Pengumpulan data lingkungan biasanya memerlukan koordinasi dengan unit produksi, teknik, lingkungan, dan operasional. Pengumpulan data perlu dilakukan secara terstruktur. Setiap data harus memiliki sumber, penanggung jawab, periode pencatatan, metode pengukuran, dan dokumen pendukung. Misalnya, data konsumsi listrik dapat diperoleh dari tagihan listrik atau meter internal. Data limbah dapat diperoleh dari catatan produksi atau dokumen pengangkutan limbah. Data pelatihan dapat diperoleh dari catatan sumber daya manusia. Kejelasan sumber data akan meningkatkan kredibilitas informasi.

2. Validasi, Pengolahan, dan Penyajian Data Keberlanjutan

Validasi data merupakan proses memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar, lengkap, dan sesuai dengan metode yang ditetapkan. Validasi penting karena data keberlanjutan dapat berasal dari berbagai sumber yang memiliki kualitas berbeda. Kesalahan pengukuran, duplikasi data, ketidaksesuaian periode, atau perbedaan satuan dapat menurunkan kualitas informasi. Validasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data, otorisasi oleh penanggung jawab, dan audit internal. Misalnya, data penggunaan bahan bakar dapat dibandingkan dengan bukti pembelian dan catatan operasional kendaraan. Data jumlah pelatihan dapat dibandingkan dengan daftar hadir dan laporan kegiatan. Proses ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan benar-benar dapat ditelusuri. Setelah divalidasi, data perlu diolah menjadi informasi yang bermakna. Pengolahan data dapat berupa klasifikasi, perhitungan rasio, analisis tren, perbandingan target, dan visualisasi. Contohnya, data konsumsi energi dapat diolah menjadi intensitas energi per unit produksi. Data kecelakaan kerja dapat dihitung menjadi tingkat kecelakaan per jumlah jam kerja. Data limbah dapat dianalisis berdasarkan persentase limbah yang didaur ulang.

Penyajian data keberlanjutan harus dilakukan secara jelas dan mudah dipahami. Informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dashboard, atau narasi analitis. Penyajian yang baik tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menjelaskan makna angka tersebut. Misalnya, penurunan konsumsi air perlu dijelaskan penyebabnya, seperti perbaikan teknologi produksi atau kebijakan efisiensi air. Penyajian data juga harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna informasi. Manajemen membutuhkan informasi yang rinci untuk pengambilan keputusan internal. Investor membutuhkan informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan. Regulator membutuhkan informasi kepatuhan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi perlu menghasilkan informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

D. DIGITALISASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK KEBERLANJUTAN

Digitalisasi membawa perubahan besar dalam sistem informasi akuntansi. Pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara

manual kini dapat dilakukan melalui aplikasi digital, sistem terintegrasi, cloud computing, big data analytics, dan artificial intelligence. Dalam konteks keberlanjutan, digitalisasi membantu perusahaan mengelola data yang kompleks, beragam, dan berasal dari banyak sumber. Digitalisasi sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan menjadi semakin penting karena tuntutan pelaporan semakin tinggi. Perusahaan harus mampu menyajikan data keberlanjutan secara cepat, akurat, dan dapat diverifikasi. Tanpa dukungan teknologi, proses pengumpulan dan pengolahan data keberlanjutan dapat memakan waktu lama dan rentan kesalahan. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas akuntansi keberlanjutan.

1. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencatatan dan Pelaporan Keberlanjutan

Teknologi digital dapat digunakan dalam berbagai tahap pencatatan dan pelaporan keberlanjutan. Pada tahap pencatatan, aplikasi digital dapat membantu perusahaan menginput data energi, air, emisi, limbah, biaya lingkungan, keselamatan kerja, dan kegiatan sosial secara berkala. Data yang dicatat secara digital lebih mudah disimpan, dicari, diolah, dan diaudit. Pada tahap pengolahan, sistem digital dapat membantu mengklasifikasikan data, menghitung indikator, membandingkan capaian dengan target, dan menyusun laporan otomatis. Misalnya, sistem dapat menghitung total konsumsi energi per bulan, intensitas emisi per unit produksi, atau persentase limbah yang berhasil didaur ulang. Otomatisasi ini dapat mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pelaporan. Pada tahap pelaporan, teknologi digital memungkinkan penyajian informasi dalam bentuk dashboard interaktif. *Dashboard* keberlanjutan dapat menampilkan indikator utama secara real time atau periodik. Manajemen dapat memantau capaian keberlanjutan tanpa harus menunggu laporan tahunan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Teknologi digital juga dapat meningkatkan transparansi. Perusahaan dapat menyediakan informasi keberlanjutan melalui laporan digital, situs web, atau platform pelaporan. Namun, transparansi digital perlu disertai dengan pengendalian data yang baik. Informasi yang disajikan kepada publik harus melalui proses validasi agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi (Nadhifah et al., 2025).

2. Peran Big Data, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence dalam Akuntansi Keberlanjutan

Big data memiliki peran penting dalam akuntansi keberlanjutan karena data keberlanjutan dapat berasal dari berbagai sumber dalam jumlah besar. Data dapat berasal dari sensor produksi, sistem keuangan, sistem sumber daya manusia, rantai pasok, media sosial, laporan pelanggan, dan data lingkungan. Dengan kemampuan analisis big data, perusahaan dapat menemukan pola, tren, risiko, dan peluang yang tidak mudah terlihat melalui analisis manual. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara fleksibel. Melalui cloud, data keberlanjutan dapat diakses oleh berbagai unit kerja secara terintegrasi. Hal ini penting bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang, lokasi produksi, atau unit bisnis. Cloud computing juga mendukung kolaborasi dalam penyusunan laporan keberlanjutan karena data dapat diperbarui dan dipantau secara lebih efisien.

Artificial intelligence dapat digunakan untuk menganalisis data keberlanjutan secara lebih mendalam. AI dapat membantu mendeteksi anomali data, memprediksi konsumsi energi, mengidentifikasi risiko lingkungan, mengelompokkan pengaduan pelanggan, dan memberikan rekomendasi efisiensi. Dalam akuntansi keberlanjutan, AI dapat memperkuat kemampuan analitis sistem informasi akuntansi. Namun, penggunaan teknologi digital juga menimbulkan tantangan. Perusahaan perlu memastikan keamanan data, privasi, kualitas algoritma, dan kompetensi pengguna. Data keberlanjutan yang tersimpan dalam sistem digital harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Selain itu, penggunaan AI perlu diawasi agar hasil analisis tidak menyesatkan. Teknologi harus dipahami sebagai alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab profesional akuntansi dan manajemen.

E. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat digunakan untuk memantau kinerja, membandingkan capaian dengan target, mengidentifikasi penyimpangan, dan menentukan tindakan korektif. Dengan demikian, sistem

informasi akuntansi menjadi bagian dari mekanisme pengendalian manajemen. Dalam konteks keberlanjutan, pengendalian tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga mencakup pengendalian dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan operasional tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga mematuhi prinsip keberlanjutan. Sistem informasi akuntansi membantu perusahaan menghubungkan tujuan keberlanjutan dengan indikator kinerja yang terukur.

1. Sistem Informasi Akuntansi untuk Pengendalian Kinerja Keberlanjutan

Pengendalian kinerja keberlanjutan membutuhkan indikator yang jelas. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk menetapkan dan memantau indikator seperti konsumsi energi, emisi, penggunaan air, volume limbah, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan karyawan, kepatuhan lingkungan, dan kontribusi sosial. Indikator tersebut dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, perusahaan menetapkan target keberlanjutan. Pada tahap pelaksanaan, unit kerja menjalankan program dan mencatat data. Pada tahap pemantauan, sistem informasi akuntansi mengolah data dan menunjukkan capaian. Pada tahap evaluasi, manajemen menilai penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan.

Sebagai contoh, perusahaan yang menetapkan target pengurangan konsumsi energi sebesar 10 persen memerlukan data pemakaian energi secara periodik. Sistem informasi akuntansi dapat menunjukkan apakah konsumsi energi mengalami penurunan atau justru meningkat. Jika target tidak tercapai, manajemen dapat menelusuri penyebabnya, seperti penggunaan mesin yang tidak efisien, kebocoran energi, atau peningkatan volume produksi. Pengendalian kinerja keberlanjutan juga dapat diterapkan pada aspek sosial. Contohnya, perusahaan dapat memantau tingkat kecelakaan kerja, jam pelatihan karyawan, atau keluhan pelanggan. Data tersebut membantu perusahaan melakukan perbaikan kebijakan keselamatan, pengembangan kompetensi, dan kualitas pelayanan.

2. Sistem Informasi Akuntansi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Strategis Berkelanjutan

Sistem informasi akuntansi menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis berkelanjutan karena menyediakan informasi yang menghubungkan aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan. Keputusan strategis membutuhkan pemahaman tentang biaya, manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang. Tanpa informasi yang memadai, keputusan keberlanjutan dapat bersifat intuitif dan kurang terukur. Dalam keputusan investasi, sistem informasi akuntansi dapat membantu menilai kelayakan investasi pada teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, pengolahan limbah, atau sistem keselamatan kerja. Analisis tidak hanya memperhitungkan biaya awal, tetapi juga manfaat jangka panjang seperti penghematan biaya, penurunan risiko, peningkatan reputasi, dan kepatuhan regulasi. Dalam keputusan operasional, informasi keberlanjutan dapat digunakan untuk menentukan pilihan bahan baku, metode produksi, pemasok, kemasan, dan distribusi. Perusahaan dapat memilih alternatif yang lebih efisien dan memiliki dampak lingkungan lebih rendah. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi mendukung perubahan operasional menuju proses bisnis yang lebih berkelanjutan.

Dalam keputusan strategis pasar, informasi keberlanjutan dapat membantu perusahaan memahami preferensi konsumen dan tuntutan rantai pasok.

Produk yang lebih ramah lingkungan atau diproduksi melalui proses yang bertanggung jawab dapat memiliki nilai tambah di pasar. Informasi keberlanjutan juga dapat membantu perusahaan memenuhi persyaratan mitra bisnis, investor, dan lembaga pembiayaan. Sistem informasi akuntansi juga mendukung manajemen risiko. Risiko perubahan iklim, regulasi lingkungan, konflik sosial, gangguan rantai pasok, dan reputasi dapat diidentifikasi melalui data yang terintegrasi. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi mitigasi dan meningkatkan ketahanan bisnis. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi untuk keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam tata kelola perusahaan modern. Sistem ini membantu perusahaan mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi keputusan, dan keputusan menjadi tindakan strategis yang mendukung penciptaan nilai berkelanjutan.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2).
- Astuti, N. D., Malau, E. I., & Bahantwelu, M. I. (2025). Model konseptual integrasi akuntansi lingkungan ke dalam pelaporan keuangan: Implikasi bagi akuntabilitas dan praktik akuntansi modern. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 13(2), 77-85.
- Nadhifah, S. U., Triyaliska, R., Ardita, C. D., & Suhatmi, E. C. (2025). Digitalisasi sistem informasi akuntansi terhadap praktik keberlanjutan UMKM. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 266-273.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Werastuti, D. N. S. (2026). *Akuntansi keberlanjutan; akuntansi hijau; governance: Strategi keberlanjutan bisnis*. AMU Press.

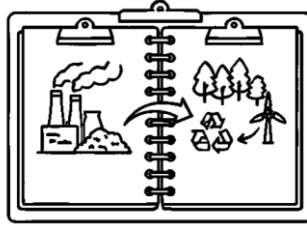
■ TENTANG PENULIS



**Dr. Samuel PD Anantadjaya, BSc, M.B.A., M.M.,
CFC., CFP., CBA., CFHA., CPS
Institut IPMI**

Penulis adalah seorang dosen di Institut IPMI. Beliau memiliki pengalaman sebagai mantan Dekan Fakultas Bisnis & Ilmu Sosial dan mantan Kepala Program Studi Administrasi Bisnis di International University Liaison Indonesia (IULI) dari Agustus 2015 hingga Agustus 2021, serta sejak 2005 ditugaskan sebagai dosen di Swiss German University. Beliau memegang gelar Sarjana Sains (BSc) di bidang Keuangan dan Ekonomi dari University of Wisconsin, La Crosse, AS, Magister Administrasi Bisnis (MBA) di bidang Keuangan dari Edgewood College di Madison, Wisconsin, AS, Magister Manajemen (MM) di bidang Manajemen Strategis dari Bandung School of Management, atau sekarang dikenal sebagai Telkom University di Bandung, Indonesia, dan Doktor (Dr) di bidang Manajemen Strategis dengan konsentrasi pada Kinerja Organisasi dan Pengendalian Sistem dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, Indonesia. Beliau juga memiliki sertifikasi sebagai Financial Planner (CFP), Financial Consultant (CFC), Business Administrator (CBA), Hand-Writing Analyst (CFHA), dan Public Speaking (CPS). Google Scholar # d0ec_K8AAAAJ. Ia juga memegang sertifikasi sebagai dosen # 11104102610218 sejak Agustus 2011, sertifikasi Asesor # 991110410261021815007 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ia dapat dihubungi melalui email: ethan.eryn@gmail.com

Bab 17



STUDI KASUS PENERAPAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Theresia Mentari, M.Ak.
Universitas Palangka Raya

A. KONSEP DASAR STUDI KASUS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Studi kasus dalam akuntansi keberlanjutan memiliki peran penting dalam menjembatani konsep teoretis dengan praktik nyata di berbagai jenis organisasi. Akuntansi keberlanjutan tidak hanya dapat dipahami melalui definisi, prinsip, dan standar pelaporan, tetapi juga perlu dijelaskan melalui pengalaman penerapan dalam konteks perusahaan, UMKM, sektor jasa, dan sektor publik. Melalui studi kasus, pembahasan akuntansi keberlanjutan menjadi lebih aplikatif karena menunjukkan bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi dampak, mengukur biaya, mengelola risiko, dan menyampaikan informasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda. Perusahaan manufaktur menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah, energi, bahan baku, dan emisi. Sektor jasa memiliki perhatian utama pada kualitas layanan, dampak sosial, tata kelola, dan efisiensi operasional. UMKM membutuhkan pendekatan sederhana karena keterbatasan sumber daya dan sistem pencatatan. Sektor publik menekankan akuntabilitas penggunaan anggaran dan dampak program terhadap masyarakat serta lingkungan. Oleh karena itu, studi kasus memberikan ruang untuk memahami keragaman praktik akuntansi keberlanjutan secara lebih kontekstual.

1. Pengertian Studi Kasus dalam Akuntansi Keberlanjutan

Studi kasus dalam akuntansi keberlanjutan dapat dipahami sebagai pendekatan pembelajaran dan analisis yang menggunakan contoh konkret penerapan akuntansi keberlanjutan pada organisasi tertentu atau sektor tertentu. Studi kasus bertujuan menggambarkan bagaimana prinsip keberlanjutan diterapkan dalam pencatatan, pengukuran, pelaporan, pengendalian, dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks akademik, studi kasus bukan hanya cerita mengenai keberhasilan organisasi. Studi kasus juga mencakup persoalan, hambatan, keputusan manajerial, konflik kepentingan, keterbatasan data, serta strategi perbaikan. Dengan demikian, studi kasus memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai akuntansi keberlanjutan. Penerapan keberlanjutan tidak selalu berjalan ideal karena organisasi sering menghadapi kendala biaya, teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan perubahan budaya organisasi. Studi kasus akuntansi keberlanjutan dapat bersifat deskriptif, analitis, atau evaluatif. Studi kasus deskriptif menjelaskan bagaimana suatu praktik dilakukan. Studi kasus analitis menelaah hubungan antara aktivitas organisasi dengan dampak keberlanjutan. Studi kasus evaluatif menilai efektivitas penerapan akuntansi keberlanjutan berdasarkan indikator tertentu. Ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana akuntansi keberlanjutan berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi (Wardoyo et al., 2023).

2. Tujuan dan Manfaat Studi Kasus bagi Pemahaman Praktik Keberlanjutan

Tujuan utama studi kasus dalam akuntansi keberlanjutan adalah memberikan pemahaman praktis mengenai cara organisasi menerapkan prinsip keberlanjutan dalam sistem akuntansi. Studi kasus membantu pembaca memahami bahwa akuntansi keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan, tetapi juga mencakup proses identifikasi dampak, pengumpulan data, pengendalian biaya, pengukuran kinerja, dan evaluasi strategi. Manfaat pertama studi kasus adalah memperjelas hubungan antara teori dan praktik. Konsep seperti materialitas, akuntabilitas, transparansi, biaya lingkungan, dan pelaporan sosial dapat lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan contoh penerapan. Manfaat kedua adalah menunjukkan variasi praktik antarorganisasi. Setiap sektor memiliki isu keberlanjutan yang berbeda sehingga pendekatan akuntansi yang digunakan juga berbeda.

Manfaat ketiga adalah mengembangkan kemampuan analitis. Melalui studi kasus, pembaca dapat menilai faktor yang mendorong keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi keberlanjutan. Misalnya, keberhasilan dapat dipengaruhi oleh komitmen manajemen, sistem informasi yang baik, dukungan regulasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sebaliknya, kegagalan dapat terjadi karena data tidak memadai, biaya implementasi tinggi, atau pelaporan hanya bersifat simbolik. Manfaat keempat adalah memberikan inspirasi bagi pengembangan praktik. Organisasi dapat mempelajari praktik baik dari sektor lain dan menyesuaikannya dengan kondisi internal. Dengan demikian, studi kasus menjadi sarana pembelajaran yang relevan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, manajemen, pelaku UMKM, dan aparatur sektor publik (Sukaharsono & Andayani, 2021).

B. STUDI KASUS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang sangat relevan dalam pembahasan akuntansi keberlanjutan karena memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan bahan baku, energi, air, mesin produksi, tenaga kerja, dan limbah. Aktivitas manufaktur dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui produksi barang, penciptaan lapangan kerja, dan pembayaran pajak. Namun, sektor ini juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Studi kasus pada perusahaan manufaktur umumnya menekankan bagaimana perusahaan mengidentifikasi biaya lingkungan, mengendalikan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, serta menyusun pelaporan keberlanjutan. Dalam kerangka akuntansi keberlanjutan, perusahaan manufaktur perlu menghubungkan data produksi dengan data lingkungan dan sosial agar manajemen dapat memahami hubungan antara efisiensi operasional dan dampak keberlanjutan.

1. Pengelolaan Biaya Lingkungan dalam Proses Produksi

Dalam perusahaan manufaktur, biaya lingkungan dapat muncul pada berbagai tahap proses produksi. Biaya tersebut dapat berupa biaya pengelolaan limbah, biaya pengolahan air, biaya pengendalian emisi, biaya pemeliharaan mesin ramah lingkungan, biaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta biaya pemulihan akibat pencemaran. Jika biaya lingkungan tidak dicatat secara terpisah, perusahaan akan kesulitan mengetahui besarnya

dampak lingkungan terhadap struktur biaya produksi. Studi kasus penerapan akuntansi keberlanjutan pada perusahaan manufaktur dapat dimulai dari pemetaan proses produksi. Setiap tahap produksi dianalisis untuk mengetahui penggunaan bahan baku, energi, air, dan potensi limbah. Misalnya, pada tahap persiapan bahan, perusahaan mencatat jumlah bahan baku yang digunakan dan jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Pada tahap produksi, perusahaan mencatat konsumsi listrik, bahan bakar, dan air. Pada tahap akhir, perusahaan mencatat biaya pengolahan limbah dan biaya pengemasan.

Pencatatan biaya lingkungan membantu perusahaan mengidentifikasi peluang efisiensi. Jika biaya listrik terlalu tinggi, manajemen dapat mengevaluasi penggunaan mesin. Jika limbah produksi meningkat, perusahaan dapat meninjau kembali desain proses produksi atau kualitas bahan baku. Jika biaya pengolahan limbah terus meningkat, perusahaan dapat mempertimbangkan investasi pada teknologi produksi bersih. Akuntansi keberlanjutan juga membantu perusahaan membedakan biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan mencakup pelatihan lingkungan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Biaya deteksi mencakup audit lingkungan dan pemantauan emisi. Biaya kegagalan internal mencakup pengolahan limbah sebelum keluar dari area perusahaan. Biaya kegagalan eksternal mencakup denda, kompensasi, atau pemulihan kerusakan lingkungan. Klasifikasi ini membantu manajemen memahami bahwa investasi pencegahan sering kali lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan (Werastuti, 2026).

2. Pelaporan Emisi, Limbah, dan Efisiensi Sumber Daya

Pelaporan emisi, limbah, dan efisiensi sumber daya menjadi bagian penting dalam studi kasus akuntansi keberlanjutan pada perusahaan manufaktur. Laporan tersebut memberikan informasi mengenai sejauh mana perusahaan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan produksi. Informasi ini penting bagi manajemen, investor, regulator, masyarakat, dan konsumen. Pelaporan emisi mencakup informasi mengenai sumber emisi, jenis emisi, volume emisi, dan upaya pengurangannya. Perusahaan dapat mencatat emisi dari penggunaan bahan bakar, listrik, proses produksi, dan transportasi. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung intensitas emisi per unit produk. Dengan indikator ini, perusahaan dapat menilai apakah proses produksi menjadi lebih efisien dari waktu ke waktu.

Pelaporan limbah mencakup jumlah limbah yang dihasilkan, jenis limbah, metode pengelolaan, limbah yang didaur ulang, dan limbah yang harus diproses secara khusus. Informasi ini menunjukkan kualitas pengendalian lingkungan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengurangi limbah dapat memperoleh manfaat berupa penurunan biaya pengolahan, peningkatan efisiensi bahan baku, dan peningkatan reputasi. Efisiensi sumber daya mencakup penggunaan energi, air, dan material secara optimal. Perusahaan dapat menyusun indikator seperti konsumsi energi per unit produksi, penggunaan air per unit produksi, dan persentase bahan baku yang menjadi produk akhir. Indikator tersebut membantu manajemen memahami hubungan antara produktivitas dan keberlanjutan. Contoh ringkas indikator pada perusahaan manufaktur dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 17.1 Pelaporan Emisi, Limbah, dan Efisiensi Sumber Daya

Aspek Keberlanjutan	Indikator yang Dicatat	Manfaat bagi Manajemen
Emisi	Total emisi dan intensitas emisi per unit produk	Menilai dampak iklim dan efisiensi energi
Limbah	Volume limbah, limbah daur ulang, biaya pengolahan	Mengendalikan biaya dan dampak lingkungan
Energi	Konsumsi listrik dan bahan bakar	Mengidentifikasi peluang penghematan
Air	Penggunaan air dan air limbah	Mengelola risiko sumber daya air
Material	Rasio bahan baku menjadi produk akhir	Meningkatkan efisiensi produksi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan pada perusahaan manufaktur tidak hanya berguna untuk kepentingan eksternal, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal.

C. STUDI KASUS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA SEKTOR JASA

Sektor jasa memiliki karakteristik berbeda dari sektor manufaktur karena produk utama yang dihasilkan umumnya

berbentuk layanan, bukan barang fisik. Dampak keberlanjutan pada sektor jasa sering kali tidak terlalu terlihat dalam bentuk limbah produksi besar, tetapi tetap signifikan melalui penggunaan energi, kualitas layanan, hubungan dengan pelanggan, perlindungan data, aksesibilitas layanan, etika bisnis, dan dampak sosial. Studi kasus akuntansi keberlanjutan pada sektor jasa dapat mencakup layanan keuangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan layanan profesional. Setiap jenis jasa memiliki isu keberlanjutan yang berbeda. Layanan keuangan berhubungan dengan pembiayaan berkelanjutan dan tata kelola. Pendidikan berhubungan dengan akses, kualitas, dan dampak sosial. Kesehatan berhubungan dengan keselamatan pasien, kualitas pelayanan, limbah medis, dan penggunaan sumber daya.

1. Penerapan Akuntansi Keberlanjutan dalam Layanan Keuangan, Pendidikan, dan Kesehatan

Pada layanan keuangan, akuntansi keberlanjutan dapat diterapkan melalui pencatatan dan pelaporan pembiayaan yang mendukung kegiatan berkelanjutan. Lembaga keuangan dapat mengidentifikasi portofolio kredit atau investasi yang terkait dengan energi bersih, UMKM, pertanian berkelanjutan, perumahan layak, dan usaha ramah lingkungan. Selain itu, lembaga keuangan juga perlu mengelola risiko sosial dan lingkungan dari pembiayaan yang diberikan. Dalam layanan pendidikan, akuntansi keberlanjutan dapat diterapkan melalui pengukuran akses pendidikan, kualitas pembelajaran, efisiensi penggunaan dana, kesejahteraan tenaga pendidik, penggunaan energi kampus, dan kontribusi institusi terhadap masyarakat. Lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, tetapi juga terhadap dampak sosial berupa peningkatan kapasitas manusia dan pemerataan kesempatan belajar. Dalam layanan kesehatan, akuntansi keberlanjutan dapat diterapkan melalui pencatatan biaya pelayanan, mutu layanan, keselamatan pasien, penggunaan energi, pengelolaan limbah medis, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rumah sakit atau klinik memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar karena berhubungan langsung dengan keselamatan manusia dan pengelolaan limbah berisiko. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa tetap membutuhkan sistem informasi akuntansi keberlanjutan. Meskipun tidak selalu menghasilkan limbah produksi dalam jumlah besar, sektor jasa memiliki dampak sosial yang kuat dan membutuhkan pengukuran yang akurat (Farida et al., 2026).

2. Pengukuran Dampak Sosial dan Kualitas Layanan Berkelanjutan

Pengukuran dampak sosial menjadi pusat perhatian dalam sektor jasa. Kualitas layanan tidak hanya diukur dari jumlah pelanggan, pendapatan, atau efisiensi biaya, tetapi juga dari manfaat yang diterima pengguna layanan. Dalam sektor pendidikan, dampak sosial dapat diukur melalui tingkat kelulusan, akses bagi kelompok kurang mampu, peningkatan kompetensi, dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat. Dalam sektor kesehatan, dampak sosial dapat diukur melalui keselamatan pasien, waktu tunggu, kepuasan pasien, dan keterjangkauan layanan. Kualitas layanan berkelanjutan juga berkaitan dengan keadilan akses. Layanan yang berkualitas tetapi hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, organisasi jasa perlu mencatat dan melaporkan indikator akses, keterjangkauan, kepuasan, dan dampak jangka panjang.

Selain dampak sosial, sektor jasa juga perlu mengelola dampak lingkungan. Gedung perkantoran, kampus, rumah sakit, hotel, dan fasilitas layanan lain menggunakan energi, air, bahan habis pakai, dan menghasilkan limbah. Oleh sebab itu, pencatatan konsumsi listrik, penggunaan air, limbah, dan kebijakan efisiensi tetap relevan. Akuntansi keberlanjutan pada sektor jasa membantu organisasi menilai hubungan antara kualitas layanan, biaya operasional, dan dampak sosial. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki proses layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat akuntabilitas kepada publik.

D. STUDI KASUS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA UMKM

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena jumlahnya besar, dekat dengan masyarakat, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Namun, penerapan akuntansi keberlanjutan pada UMKM menghadapi tantangan khusus. Banyak UMKM masih menggunakan pencatatan sederhana, bahkan sebagian belum memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Oleh karena itu, studi kasus akuntansi keberlanjutan pada UMKM perlu menggunakan pendekatan yang praktis dan mudah diterapkan. Akuntansi keberlanjutan pada UMKM tidak harus dimulai dari laporan yang kompleks. Praktik awal dapat dilakukan melalui pencatatan biaya sosial dan lingkungan yang sederhana. Misalnya, UMKM dapat mencatat penggunaan listrik, air, bahan baku, kemasan,

limbah, upah tenaga kerja, kegiatan sosial, dan biaya kebersihan. Data sederhana tersebut dapat membantu pelaku usaha memahami hubungan antara efisiensi, tanggung jawab sosial, dan daya saing (Zahra & Partiwi, 2026).

1. Pencatatan Sederhana Biaya Sosial dan Lingkungan pada UMKM

Pencatatan sederhana biaya sosial dan lingkungan dapat diterapkan oleh UMKM dengan menambahkan kategori khusus dalam pembukuan. Selain mencatat penjualan dan biaya produksi, pelaku usaha dapat mencatat biaya yang berhubungan dengan keberlanjutan. Biaya lingkungan dapat berupa biaya listrik, air, bahan bakar, pengelolaan sampah, pembelian kemasan ramah lingkungan, dan perbaikan alat produksi agar lebih efisien. Biaya sosial dapat berupa upah, bantuan sosial, pelatihan pekerja, perlengkapan keselamatan, dan dukungan terhadap kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, UMKM makanan dapat mencatat jumlah bahan baku yang terbuang setiap hari. Jika pemborosan bahan baku tinggi, pemilik usaha dapat mengevaluasi perencanaan produksi. UMKM kerajinan dapat mencatat sisa bahan produksi dan mencari cara memanfaatkannya menjadi produk tambahan. UMKM laundry dapat mencatat penggunaan air, listrik, dan deterjen untuk mengukur efisiensi operasional. Pencatatan sederhana ini memiliki manfaat langsung. Pelaku UMKM dapat mengetahui pos biaya yang dapat dikurangi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki proses usaha. Selain itu, pencatatan keberlanjutan dapat menjadi nilai tambah ketika UMKM mengajukan pembiayaan, mengikuti program pemerintah, atau masuk ke rantai pasok perusahaan besar.

2. Strategi UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing melalui Praktik Berkelanjutan

Praktik berkelanjutan dapat menjadi strategi daya saing bagi UMKM. Konsumen semakin memperhatikan kualitas produk, etika usaha, kebersihan, bahan baku, kemasan, dan dampak lingkungan. UMKM yang mampu menunjukkan praktik usaha bertanggung jawab dapat memperoleh kepercayaan pasar yang lebih kuat. Strategi pertama adalah efisiensi sumber daya. Penghematan listrik, air, bahan baku, dan kemasan dapat menurunkan biaya operasional. Strategi kedua adalah penggunaan bahan baku lokal. Selain mengurangi biaya transportasi, bahan baku lokal dapat memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Strategi ketiga adalah pengurangan limbah. Sisa bahan produksi

dapat dimanfaatkan kembali atau diolah menjadi produk lain. Strategi keempat adalah transparansi sederhana kepada konsumen. UMKM dapat menyampaikan informasi mengenai bahan baku, proses produksi, kemasan, atau kegiatan sosial melalui label produk, media sosial, atau katalog usaha. Transparansi ini dapat memperkuat kepercayaan konsumen. Strategi kelima adalah digitalisasi pencatatan. Aplikasi pembukuan sederhana dapat membantu UMKM mencatat biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih teratur. Melalui strategi tersebut, akuntansi keberlanjutan tidak menjadi beban bagi UMKM, tetapi menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, reputasi, dan akses pasar.

E. STUDI KASUS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA SEKTOR PUBLIK

Sektor publik memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran negara atau daerah, pelayanan publik, dan penyediaan infrastruktur. Akuntansi keberlanjutan pada sektor publik tidak hanya menekankan pencatatan anggaran, tetapi juga pengukuran manfaat program terhadap masyarakat dan lingkungan. Studi kasus pada sektor publik dapat mencakup program pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi publik, pengembangan UMKM, perlindungan lingkungan, atau pengurangan kemiskinan. Setiap program perlu diukur tidak hanya berdasarkan serapan anggaran, tetapi juga berdasarkan output, outcome, dan dampak jangka panjang (Wardoyo et al., 2023).

1. Pelaporan Kinerja Keberlanjutan dalam Program Pemerintah

Pelaporan kinerja keberlanjutan dalam program pemerintah bertujuan menunjukkan hubungan antara alokasi anggaran dan manfaat pembangunan. Misalnya, dalam program pengelolaan sampah, pemerintah tidak cukup melaporkan jumlah dana yang digunakan untuk membeli kendaraan pengangkut sampah. Pemerintah juga perlu melaporkan volume sampah yang terangkut, persentase sampah yang didaur ulang, jumlah masyarakat yang terlayani, dan dampaknya terhadap kebersihan lingkungan. Dalam program penyediaan air bersih, pelaporan keberlanjutan dapat mencakup jumlah rumah tangga yang memperoleh akses, kualitas air, biaya operasional, tingkat kehilangan air, dan keberlanjutan sumber air. Dalam program

pemberdayaan UMKM, pelaporan dapat mencakup jumlah UMKM yang dibina, peningkatan omzet, akses pembiayaan, jumlah tenaga kerja, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Akuntansi keberlanjutan sektor publik membantu mengubah orientasi pelaporan dari sekadar administrasi anggaran menjadi pelaporan berbasis hasil. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari habisnya anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan lingkungan.

2. Akuntabilitas Sosial, Lingkungan, dan Tata Kelola dalam Pelayanan Publik

Akuntabilitas sosial dalam pelayanan publik berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa program memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan sosial perlu diukur dari aspek akses, kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan. Informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas lingkungan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Program pembangunan infrastruktur, kawasan industri, pengelolaan sampah, dan tata ruang harus memperhatikan dampak ekologis. Akuntansi keberlanjutan membantu sektor publik mencatat biaya lingkungan, dampak lingkungan, dan hasil pengelolaan lingkungan. Akuntabilitas tata kelola mencakup transparansi, partisipasi, efektivitas, dan integritas dalam pelaksanaan program. Pelayanan publik yang berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang baik agar anggaran digunakan secara tepat, program dilaksanakan sesuai tujuan, dan masyarakat dapat mengawasi prosesnya. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan sektor publik menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

F. ANALISIS PEMBELAJARAN DARI STUDI KASUS AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan memiliki pola yang berbeda pada setiap sektor. Perusahaan manufaktur berfokus pada biaya lingkungan dan efisiensi sumber daya. Sektor jasa menekankan dampak sosial dan kualitas layanan. UMKM membutuhkan pencatatan sederhana yang mudah diterapkan. Sektor publik menekankan akuntabilitas program dan dampak pembangunan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akuntansi

keberlanjutan perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Meskipun berbeda, terdapat kesamaan penting dalam seluruh studi kasus. Penerapan akuntansi keberlanjutan membutuhkan data yang andal, komitmen organisasi, sistem pencatatan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan orientasi jangka panjang. Tanpa unsur tersebut, praktik keberlanjutan berisiko menjadi formalitas dan tidak menghasilkan perubahan substantif (Uno & Ngabito, 2025).

1. Faktor Keberhasilan dan Hambatan Penerapan Akuntansi Keberlanjutan

Faktor keberhasilan pertama adalah komitmen pimpinan. Organisasi yang memiliki pimpinan dengan perhatian terhadap keberlanjutan cenderung lebih mudah mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam sistem akuntansi. Komitmen pimpinan diperlukan untuk menetapkan kebijakan, menyediakan anggaran, mengembangkan sistem, dan mendorong perubahan budaya organisasi. Faktor kedua adalah ketersediaan data. Akuntansi keberlanjutan membutuhkan data yang dapat diukur dan ditelusuri. Perusahaan atau instansi publik yang memiliki sistem informasi baik akan lebih mudah menyusun laporan keberlanjutan. Faktor ketiga adalah kompetensi sumber daya manusia. Akuntan, manajer, auditor internal, dan pelaksana program perlu memahami hubungan antara informasi keuangan dan nonkeuangan.

Faktor keempat adalah dukungan teknologi. Digitalisasi membantu organisasi mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data keberlanjutan secara lebih efisien. Faktor kelima adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Pelaporan keberlanjutan yang baik perlu mempertimbangkan kebutuhan informasi dari pihak yang terdampak. Hambatan utama penerapan akuntansi keberlanjutan adalah keterbatasan sumber daya. Banyak organisasi belum memiliki anggaran, tenaga ahli, dan sistem informasi yang memadai. Hambatan kedua adalah rendahnya literasi keberlanjutan. Sebagian organisasi masih memandang keberlanjutan sebagai biaya tambahan, bukan sebagai investasi jangka panjang. Hambatan ketiga adalah kesulitan pengukuran. Dampak sosial dan lingkungan sering kali sulit diukur secara kuantitatif. Hambatan keempat adalah risiko pelaporan simbolik, yaitu laporan disusun untuk membangun citra tanpa perubahan nyata dalam praktik organisasi.

2. Implikasi Studi Kasus bagi Pengembangan Praktik Akuntansi Keberlanjutan

Studi kasus memberikan implikasi penting bagi pengembangan akuntansi keberlanjutan. *Pertama*, praktik akuntansi keberlanjutan perlu bersifat kontekstual. Tidak semua organisasi membutuhkan sistem pelaporan yang sama. Perusahaan besar memerlukan sistem yang lebih kompleks, sedangkan UMKM membutuhkan pendekatan sederhana. Sektor publik membutuhkan indikator yang menghubungkan anggaran dengan dampak pembangunan. *Kedua*, akuntansi keberlanjutan perlu diintegrasikan dengan sistem pengambilan keputusan. Informasi keberlanjutan tidak boleh hanya dikumpulkan untuk laporan tahunan. Informasi tersebut perlu digunakan dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi kinerja, dan perumusan strategi. *Ketiga*, pengembangan praktik akuntansi keberlanjutan membutuhkan penguatan kapasitas. Pendidikan akuntansi perlu memasukkan materi keberlanjutan, biaya lingkungan, pelaporan sosial, analisis dampak, dan sistem informasi keberlanjutan. Pelatihan bagi praktisi juga diperlukan agar organisasi mampu menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik (Sukaharsono & Andayani, 2021).

Keempat, studi kasus menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Organisasi perlu menyajikan informasi secara seimbang, tidak hanya menonjolkan keberhasilan, tetapi juga menjelaskan tantangan dan langkah perbaikan. Transparansi seperti ini akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. *Kelima*, praktik akuntansi keberlanjutan perlu terus berkembang mengikuti perubahan regulasi, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Isu seperti perubahan iklim, ekonomi sirkular, hak tenaga kerja, rantai pasok berkelanjutan, dan tata kelola digital akan semakin memengaruhi sistem akuntansi. Oleh karena itu, pembelajaran dari studi kasus menjadi dasar penting untuk membangun praktik akuntansi yang lebih adaptif, relevan, dan bertanggung jawab.

■ DAFTAR PUSTAKA

- Farida, L., Septiawati, R., & Arimurti, T. (2026). Analisis kesiapan implementasi akuntansi keberlanjutan pada Perumdam Tirta Tarum Karawang. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 208–216.
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Uno, S., & Ngabito, D. (2025). Tata kelola akuntabilitas dan kinerja layanan publik di era *co-governance* digital. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(2), 493–502.
- Wardoyo, D. U., Milzam, N., Ramadhani, R. P., & Hariyanto, R. D. (2023). Pengaruh akuntansi keberlanjutan pada industri perbankan: Studi kasus Bank Mandiri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 118–126.
- Werastuti, D. N. S. (2026). *Akuntansi keberlanjutan; akuntansi hijau; governance: Strategi keberlanjutan bisnis*. AMU Press.
- Zahra, S. F., & Partiw, S. G. (2026). Analisis kualitas layanan dan kepuasan wisatawan pada pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Bansari. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 5(1), 81–91.
- Entri Wardoyo et al. (2023) yang tercantum dua kali telah dituliskan satu kali.

■ TENTANG PENULIS



Theresia Mentari, M.Ak.
Universitas Palangka Raya

Penulis lahir di Palangka Raya 23 November 1994. Ketertarikan mendalam pada tata kelola keuangan dan ekonomi mengantarkan saya menempuh studi sarjana di Universitas Palangka Raya lulus pada Tahun 2016 dan Magister di Universitas Brawijaya lulus pada tahun 2018.

Semenjak tahun 2022, saya mendedikasikan diri sebagai Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Palangka Raya (UPR). Di luar tanggung jawab pengajaran, saya adalah seorang penulis dan peneliti yang produktif menyumbangkan pemikiran melalui *book chapter* dan artikel jurnal guna memperkaya diskursus akademis di ranah akuntansi dan ekonomi.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC002026110476, 9 Juli 2026

Pencipta

Nama : R. A. Widyanti Diah Lestari, Benni Sumarman dkk
Alamat : Jl. Candi Kalasan IV No. 23, RT 005/RW 010, Kel. Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur 65125, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, 65125

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : R. A. Widyanti Diah Lestari, Benni Sumarman dkk
Alamat : Jl. Candi Kalasan IV No. 23, RT 005/RW 010, Kel. Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur 65125, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, 65125

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: AKUNTANSI KEBERLANJUTAN: Konsep dan Praktik Keberlanjutan

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 8 Juli 2026, di Kota Serang

Jangka waktu perlindungan

: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan

: 001338371

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
a.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan meminda kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.